Knowledge Capture:

Presidensi G20 Indonesia 2022



Finance Track

Isu-Isu Prioritas, Capaian, dan Keberlanjutan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Recover Together
Recover Stronger

Knowledge Capture:

Presidensi G20 Indonesia 2022

Finance Track

Isu-isu Prioritas, Capaian dan Keberlanjutan

Penulis

Agung Yuniarto
Dian Handayani
Eko Nur Surachman
Fandy Anggara Putra
Klemens Amy Novianto
Satria Aji Setiawan
Yubilianto

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Oktober 2023

Knowledge Capture: Presidensi G20 Indonesia 2022 *Finance Track* Isu-isu Prioritas, Capaian, dan Keberlanjutan

Copyright© 2023
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Indonesia oleh
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2023
Gedung Soegito Sostroamidjojo
Jalan Purnawarman No 99, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Penulis:
Agung Yuniarto
Dian Handayani
Eko Nur Surachman
Klemens Amy Novianto
Satria Aji Setiawan
Yubilianto

Editor:
Yulius P Hermawan & Rafa Ammaara
Desain dan *Lay Out*: Ikkou Creative Studio
Sampul depan: Ikkou Creative Studio
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

xxvi + 269 hlm: 18.2 x 25.7

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Disclaimer

Dengan ini dinyatakan bahwa tulisan yang dimuat dalam buku ini tidak secara otomatis mewakili sikap dan pandangan resmi dari Kementerian Keuangan atau Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karenanya pertanggungjawaban atas isi tulisan tersebut sepenuhnya berada di tangan Penulis yang bersangkutan.

PENGANTAR

KATA PENGANTAR KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Presidensi Indonesia dalam G20 tahun 2022 menjadi sorotan dunia di tengah masih belum stabilnya ekonomi dunia pasca Pandemi COVID-19 dan hadirnya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Presidensi G20 Indonesia 2022, yang didedikasikan untuk *Finance Track*, menjadi momentum penting bagi negara Indonesia dalam berpartisipasi mewujudkan kestabilan ekonomi global. Buku **"*Knowledge Capture*: Presidensi G20 Indonesia 2022"** menghadirkan sebuah wawasan mendalam tentang peran kunci Indonesia dalam memimpin G20. Buku ini merinci isu-isu prioritas, capaian, dan keberlanjutan pembahasan dan program-program yang disepakati dalam forum G-20 tahun 2022.



Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 tidak hanya sekadar menjadi tuan rumah, tetapi juga memainkan peran sentral sebagai media untuk mengoordinasikan kebijakan-kebijakan baik fiskal maupun moneter yang dilakukan oleh para anggota G20. Salah satu isu kunci adalah koordinasi *Exit Strategy* untuk Mendukung Pemulihan Global. Buku ini menguraikan strategi dan kebijakan yang diadopsi oleh para anggota G20 dalam mempertahankan kondisi ekonomi negara pada saat pandemi COVID-19. Buku ini juga membahas faktor-faktor yang dipertimbangkan saat menyusun strategi dan kebijakan dukungan dalam rangka melakukan normalisasi kondisi ekonomi pasca pandemi.

Selain itu, buku ini membahas bagaimana G20 dan para anggotanya mengatasi *Scarring Effect* untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi. Peningkatan Sistem Pembayaran Lintas Batas juga menjadi salah satu aspek yang diteliti dengan cermat dalam buku ini, karena hal ini memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas keuangan global.

Indonesia juga memainkan peran penting dalam mengembangkan Skema Pendanaan Pembangunan Berkelanjutan. Buku ini mengungkap bagaimana negara ini berupaya memfasilitasi pembiayaan yang berkelanjutan untuk proyek-proyek penting di seluruh dunia. Penerapan standar infrastruktur berkualitas melalui kebijakan *Environmental*, *Social*, *and Corporate Governance* (ESG) di Indonesia juga menjadi sorotan utama dalam buku ini, menggambarkan komitmen Indonesia dalam memperbaiki infrastruktur dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Selanjutnya, buku ini membahas langkah-langkah konkret dalam Penguatan Sistem Inklusi Finansial. Inklusi finansial merupakan fondasi penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat global. Agenda Perpajakan Internasional juga menjadi topik yang tidak bisa diabaikan dalam buku ini, mencerminkan upaya Indonesia dalam mengatasi masalah perpajakan yang kompleks di tingkat internasional.

Pembahasan dan peluncuran *Pandemic Fund* adalah salah satu momen penting dalam Presidensi G20 Indonesia 2022, dan buku ini secara rinci menggambarkan bagaimana fondasi ini diletakkan dan harapannya dalam menghadapi tantangan pandemi global yang belum selesai. Buku ini juga membahas peran *Finance Track Working Groups* dalam G20, yang berperan sebagai mesin penggerak dalam mewujudkan agenda-agenda penting.

Terakhir, buku ini mengawal Keberlanjutan Program G20. Keberlanjutan dalam pelaksanaan program-program G20 adalah kunci untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Buku ini menguraikan upaya Indonesia dalam menjaga momentum dan memastikan bahwa capaian-capaian G20 dapat berlanjut hingga ke masa depan.

Buku "*Knowledge Capture*: Presidensi G20 Indonesia 2022" bukan hanya sekadar catatan sejarah, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam peran

Indonesia dalam forum global ini. Dalam bab-bab yang terperinci, buku ini memberikan pandangan yang jelas dan mendalam tentang bagaimana Indonesia berkontribusi dalam pembentukan masa depan ekonomi global. Semoga buku ini tidak hanya memberikan wawasan yang berharga, tetapi juga menginspirasi tindakan positif di tingkat global. Selamat membaca dan menjelajahi wawasan yang luar biasa ini.

Andin Hadiyanto

Jakarta, Oktober 2023



SAMBUTAN

SEKRETARIS BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN



Rasa syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, buku "*Knowledge Capture*: Presidensi G20 Indonesia 2022 *Finance Track* Isu-isu Prioritas, Capaian dan Keberlanjutan" ini dapat kami selesaikan sebagai manifestasi dari komitmen Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dalam menggali, menganalisis, dan mencatat berbagai isu global terkait makroekonomi selama Presidensi G20 Indonesia.

G20 adalah sebuah forum multilateral yang membahas berbagai isu global, termasuk kesehatan, stabilitas keuangan, dan perubahan iklim. Dengan tema *"Recover Together, Recover Stronger"*, Indonesia dengan tegas mendorong semangat kerja sama untuk menciptakan tatanan global yang adil dan inklusif.

Memegang presidensi ini adalah kesempatan langka yang hanya muncul sekali dalam satu generasi, yakni sekitar setiap 20 tahun. Kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat yang besar bagi pemulihan Indonesia dan dunia. Manfaat ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatkan aktivitas ekonomi hingga penguatan kepercayaan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

BPPK, sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, terlibat aktif dalam proses *knowledge capture* dari kegiatan ini. Kami berharap, buku ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang substansi yang dibahas dan hasil-

hasil yang dihasilkan selama Presidensi G20 Indonesia. Lebih lanjut buku ini dapat menyajikan gambaran tentang tindakan-tindakan yang harus diambil dalam mengawal hasil-hasil tersebut selama G20 berlangsung.

Buku ini membahas substansi pada forum-forum G20. Ditulis oleh sekelompok penulis terpilih yaitu, Agung Yuniarto, Yubilianto, Eko Nur Surachman, Dian Handayani, Fandy Anggara Putra, Satria Aji Setiawan, dan Klemens Amy Novianto.

Buku ini disusun dengan struktur yang terdiri dari sembilan bab. Bab pertama adalah Pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang fokus dari Presidensi G20 Indonesia 2022. Bab kedua hingga kedelapan membahas agenda prioritas di jalur keuangan, yaitu *Exit Strategy to Support Equitable Recovery*, *Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth*, *Payment System in the Digital Era*, *Sustainable Finance*, *Financial Inclusion*, *Digital, and SMEs*, dan *International Taxation*. Kemudian buku ini ditutup bab kesembilan, yang membahas tentang bagaimana mengawal keberlanjutan program G20.

Saya berharap, buku ini dapat memberikan wawasan dan membantu pembaca untuk memahami sejauh mana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dalam Jalur Keuangan pada Presidensi G20 Indonesia dapat membentuk masa depan keuangan dan ekonomi global. Dalam hal ini, kami mengajak pembaca untuk menjelajahi setiap bab dan mengambil manfaat dari tulisan yang kami sajikan.

Iqbal Islami

Jakarta, Oktober 2023

Daftar Isi

Kata Pengantar Kepala BPPK vi

Kata Sambutan Tim Penyusun ix

Galeri Foto xix

Bab 1 1
Pendahuluan: Presidensi G20 Indonesia

- Awal Mula Pendirian G20 3
- Keanggotaan dan Agenda Pertemuan 8
- Presidensi G20 Indonesia 17
- Agenda Utama Jalur Keuangan 22
- Kelompok Kerja dan Gugus Tugas pada Jalur Keuangan 24
- Capaian Presidensi G20 Indonesia di Finance Track 27
- Penutup 29

Bab 2 33
Koordinasi *Exit Strategy* untuk Mendukung Pemulihan Global

- Latar Belakang 34
- Pentingnya Mewujudkan Pemulihan Ekonomi dari Pandemi COVID-19 yang Kuat dan Merata 35
- Pertimbangan dalam Menentukan *Exit Strategy* Negara-negara Anggota G20 36
- Implementasi *Exit Strategy* Negara-Negara Anggota G20 40
- Pentingnya Komunikasi Efektif dalam Koordinasi *Exit Strategy* untuk Memitigasi Negative Spillover 55
- Penutup 56

Bab 3 59
Scarring Effect: Dampak Jangka Panjang dari Pandemi pada Ekonomi Global

- Pendahuluan 60
- Dampak *Scarring Effect* 61
- Upaya G20 dalam Mengatasi *Scarring Effect* 64
- Capaian G20 di bawah Presidensi Indonesia 67

Kerja sama dengan Lembaga-lembaga Internasional 71

Penutup 72

Bab 4 75
Penguatan Sistem Pembayaran Lintas Batas

Pendahuluan 76

Urgensi Pembahasan Sistem Pembayaran di bawah Presidensi G20 Indonesia 77

Peran Utama Bank Sentral dalam Mengembangkan Sistem Pembayaran di Era Digital 82

Sistem Pembayaran Saat Ini 86

Tantangan Sistem Pembayaran dalam Konteks Digitalisasi 90

Central Bank Digital Currency (CBDC) 93

Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025 98

Mengembangkan Interlinking Sistem Pembayaran dan Peran Aplikasi Pemrograman Antarmuka 104

Proyek Nexus dalam Penguatan Pembayaran Lintas Batas 109

Penutup 111

Bab 5 115
Pengembangan Skema Pendanaan Pembangunan Berkelanjutan - Penerapan Standar Infrastruktur Berkualitas melalui Kebijakan ESG Di Indonesia

Pendahuluan 116

Kerangka Kerja ESG 121

ESG dan Agenda Prioritas G20 123

Bagaimana Kriteria ESG Diterapkan? 125

Implementasi Kerangka Kerja ESG dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia 128

Penutup 134

Bab 6 139
Penguatan Sistem Inklusi Finansial

Latar Belakang 140

Kemitraan Global untuk Inklusi Keuangan 141

Inklusi Keuangan dalam Presidensi G20 Indonesia 146

Kerangka Implementasi Prinsip Tingkat Tinggi (*High-Level Principles*) tentang Inklusi Keuangan Digital 150

Inventarisasi Database dan Analisis Produk serta Layanan Keuangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Luar Kredit (*Beyond Credit*) 157

Perangkat Diagnostik Regulasi Layanan Keuangan Digital UMKM 163

Penutup 169

Bab 7
Agenda Perpajakan Internasional 173

Pendahuluan 174

Domestic Tax Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 175

Upaya Memerangi Praktik BEPS di Negara-negara Berkembang 188

Rencana Aksi G20 untuk Mengatasi Praktik BEPS 195

Penyelenggaraan Ministerial Tax Symposium and Tax and Development 199

Capaian Presidensi Indonesia dalam Isu Perpajakan Internasional 201

Penutup 207

Bab 8
Pandemic Fund untuk Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Respons Pandemi 211

Latar belakang 212

Proses Pembentukan *Pandemic Fund* 213

Target dan Fokus Pendanaan *Pandemic Fund* 217

Sumber Pendanaan *Pandemic Fund* 218

Pengelolaan dan Mekanisme Penyaluran *Pandemic Fund* 219

Penutup 223

Bab 9
Mengawal Keberlanjutan Program G20 227

Pentingnya Keberlanjutan Program 228

Tantangan dalam Mengawal Keberlanjutan 232

Hasil Kesepakatan dan Kesepakatan Baru Di Deklarasi Presidensi G20 Indonesia 234

Mengawal Keberlanjutan Hasil yang Dicapai oleh Presidensi G20 Indonesia 246

Kesimpulan 249

Galeri Foto-Foto G20 2022 253

Biografi Anggota Tim Penulis 265

Daftar Gambar

Gambar 1.1:	Daftar Penyelenggaraan KTT G20	7
Gambar 1.2:	Pengelompokan Negara Regional untuk Rotasi Presidensi G20	9
Gambar 1.3.	Peta Anggota-anggota G20	10
Gambar 1.4.	Profil Negara-negara Anggota G20	10
Gambar 1.5.	Logo G20 di bawah Presidensi Indonesia	19
Gambar 1.6.	Pertemuan-pertemuan G20 di bawah Presidensi Indonesia	20
Gambar 2.1.	Pertimbangan dalam Merumuskan *Exit Strategies*	40
Gambar 3.1.	Dampak Pandemi-COVID-19 pada Kapital, Tenaga Kerja dan Produktivitas	62
Gambar 3.2.	Rekomendasi Kebijakan untuk Mengatasi *Scarring Effects*	66
Gambar 3.3.	Capaian G20 dalam Mengatasi *Scarring Effects*	70
Gambar 4.1.	Fokus Area dan Isu-isu dalam Penguatan Pembayaran Lintas Batas	79
Gambar 4.2.	Unsur-unsur Infrastruktur Pembayaran	87
Gambar 4.3.	Roadmap dan Timetable Cetak Biru SPI 2025	101
Gambar 4.4.	Model *Interlinking* Sistem Pembayaran	108
Gambar 5.1.	Prinsip-prinsip Investasi Infrastruktur Berkualitas	124
Gambar 5.2.	Operasionalisasi Standar ESG dalam Pembangunan	126
Gambar 5.3.	Standar Lingkungan dan Sosial	127
Gambar 6.1.	Kerangka Rencana Kerja Inklusi Keuangan G20 2020	143
Gambar 6.2.	Prinsip-prinsip Inklusi Keuangan Digital	151
Gambar 6.3.	Wawasan Utama dan Rekomendasi Akses Layanan Finansial Digital bagi UMKM	165
Gambar 7.1.	Contoh Perusahaan Multinasional Yang Dicurigai Memanfaatkan *Tax Haven*	179
Gambar 7.2.	Limabelas Rencana Aksi Penanganan Isu BEPS	196

Gambar 8.1.	G20 Joint Finance and Health Ministers' Meeting, Bali 13 November 2022	214
Gambar 8.2.	Peluncuran *Pandemic Fund*	216
Gambar 8.3.	Kontributor *Pandemic Fund* (dalam Juta dolar AS Data per tanggal 4 Oktober 2023	219
Gambar 9.1.	KTT G20 di bawah Presidensi India Tahun 2023	228
Gambar 9.2	Kesepakatan-kesepakatan G20 di bawah Presidensi Indonesia	235

Daftar Singkatan

AEOI	Automatic Exchange of Information
AFI	Alliance for Financial Inclusion
AIIB	Asian Infrastructure Investment Bank
APA	Advance Pricing Arrangement
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APEC	Asia Pacific Economic Forum
API	Application Programming Interface
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
AML/CFT	Anti-Money laundering/ Combating the Financing of Terrorism
BEPS	Base Erosion and Profit Shifting
BI	Bank Indonesia
BI-ETP	Bank Indonesia-Electronic Trading Platform
BI-FAST	Bank Indonesia-Funds Transfer System
BIS	Bank of International Settlements
BISIH	Bank of International Settlements Innovation Hub
BPPK	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
CbC	Country-by-Country
CbCR	Country-by-Country Reporting
CBDC	Central Bank Digital Currency
CFC	Controlled Foreign Companies
COVID	Corona Virus Disease
CPMI	Committee on Payment and Market Infrastructures
DFI	Digital Financial Inclusion
DGI	Data Gaps Initiatives
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJPb	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPPR	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DSSI	Debt Service Suspension Initiative
EFTs	Exchange Traded Funds
ESF	Environmental and Social Framework
ESG	Economic Social Governance
ESS	Environmental and Social Standards
ESS	Environmental and Social Standards
EU	European Union
FAO	Food and Agriculture Organization
FCBD	Finance and Central Bank Deputies
FCP	Financial Consumer Protection
FEKDI	Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia
FIAP	Fellow of the Institution Of Analysts and Programmers
FIF-PPR	Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response
FMCBG	Finance Ministers and Central Bank Governors
FPS	Fast Payment Systems
FSB	Financial Stability Board
FWG	Framework Working Group
FX	Foreign Exchange
FXI	Foreign Exchange Intervention
GDP	Gross Domestic Product
GIHub	Global Infrastructure Hub
GloBE	Global Anti-Base Erosion
GPFI	Global Partnership for Financial Inclusion
GPN	Gerbang Pembayaran Nasional
G7	Group of Seven
G20	Group of Twenty
G22	Group of Twenty-two
G33	Group of Thirty-three
HAM	Hak Asasi Manusia
HLP	High-Level Principles
IFAWG	International Financial Architecture Working Group
IFC	International Financial Corporation
IIF	Indonesia Infrastructure Finance
INFE	International Network on Financial Education
IMF	International Monetary Fund
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
IsDB	Islamic Development Bank
ISO	International Organization for Standardization
IWG	Infrastructure Working Group
JETP	Just Energy Transition Partnership
JFHMM	Joint Finance and Health Ministers Meeting

JFHTF	Joint Finance-Health Task Force
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
KYC	Know Your Customer
LDC	Least Developed Countries
MAP	Mutual Agreement Procedure
MCAA	Multilateral Competent Authority Agreement
MDBs	Multilateral Development Banks
MLC	Multilateral Convention
MPM	Merchant Presented Mode
MSMEs	Micro, Small and Medium Enterprises
NEPAD	New Partnership for Africa's Development
NGO	Non-Governmental Organization
NRRP	National Resilience and Recovery Plan
ODA	Official Development Assistance
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PDB	Produk Domestik Bruto
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PRI	Principles for Responsible Investment
PSP	Payment Service Provider
PT	Perseroan Tinggi
QII	Quality Infrastructure Investment
QR	Quick Response
QRIS	Quick Response Code Indonesian Standard
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RST	Resilience and Sustainability Trust
SDGs	Sustainable Development Goals
SFWG	Sustainable Finance Working Group
SLD	Service Level Description
SMEs	Small and Medium Enterprises
SMV	Special Mission Vehicle
SNTC	Standar Nasional Teknologi Chip
SP	Sistem Pembayaran
SPI	Sistem Pembayaran Indonesia
SRI	Socially Responsible Investment
SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications
TIPS	Target Instant Payment Settlement
TIWB	Tax Inspectors Without Borders
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UN	United Nations
UNDP	United Nations Development Programme
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund
UUD	Undang-Undang Dasar
VGD	Viability Gap Fund
WB	World Bank
WEF	World Economic Forum
WHO	World Health Organization
WTO	World Trade Organization

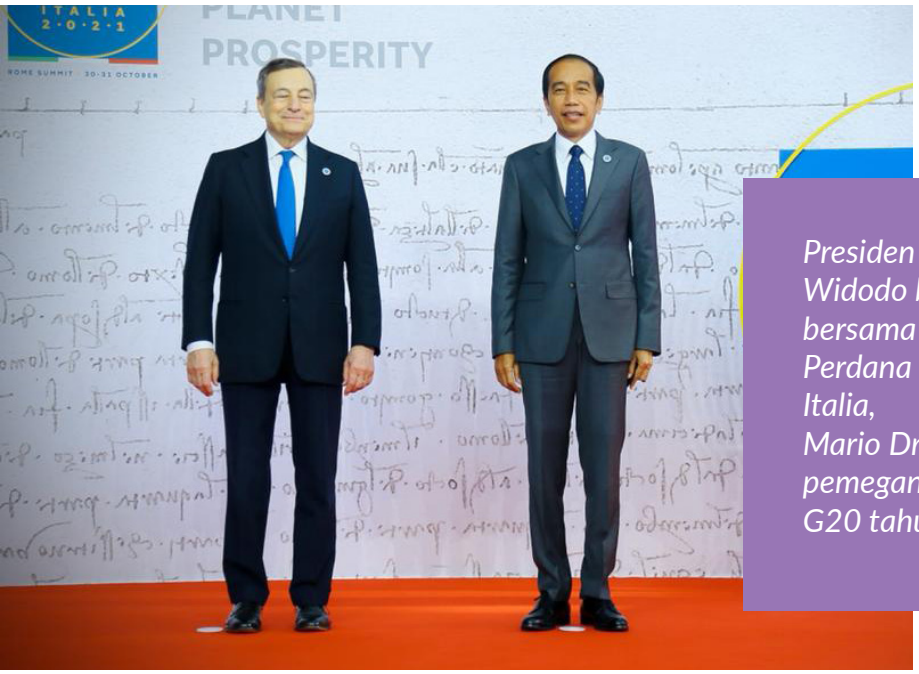
Dokumentasi KTT G20 Sebelum dan Sesudah Presidensi G20 Indonesia

Penyelenggaraan KTT G20 di bawah Presidensi Italia - 2021



Presiden Joko Widodo tiba di Roma untuk menghadiri KTT G20 di Roma, 30 Oktober 2021

Sumber Foto: https://setkab.go.id/en/president-jokowi-to-attend-session-on-global-economy-health-at-g20-summit/



Presiden Joko Widodo berfoto bersama dengan Perdana Menteri Italia, Mario Draghi, pemegang Presidensi G20 tahun 2021

Sumber Foto:
https://www.g20italy.org



Pemimpin-pemimpin G20 berpose bersama pada KTT G20 di Italia, 30 Oktober 2021

Sumber Foto:
https://www.g20italy.org

Penyelenggaraan KTT G20 di bawah Presidensi India - 2023



Presiden Joko Widodo disambut oleh Perdana Menteri Narendra Modi pada KTT G20 di New Delhi, 9-10 September 2023

Sumber Foto:
https://www.g20.org/en/media-resources/gallery/september-2023/arrival_at_bm/



Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri India, Narendra Modi, pada KTT G20 di New Delhi India, 9-10 September 2023

Sumber Foto:
https://www.g20.org/en/media-resources/gallery/september-2023/delegantions/



Penyelenggaraan KTT G20 di New Delhi, India, 9-10 September 2023

Sumber Foto: https://www.g20.org/en/media-resources/gallery/september-2023/g20-summit/



Kunjungan Pemimpin-pemimpin G20 di Rajghat, 10 September 2023

Sumber Foto: https://www.g20.org/en/media-resources/gallery/september-2023/delegantions/



Troika G20 tahun 2023 Presiden Joko Widodo (Indonesia), Perdana Menteri Narendra Modi (India), Presiden (Brasil)

Sumber Foto: https://www.g20.org/en/media-resources/gallery/september-2023/g20-summit/

Dokumentasi Pertemuan-pertemuan dalam Finance Track di bawah Presidensi G20 Indonesia -2022

Sumber Foto: Dokumentasi Kementerian Keuangan



Grand Launching Indonesia ETM Country Platform



Penyelenggaraan Joint Finance and Health Deputies Ministers Meeting, 10 November 2022



Indonesia Fintech Summit Keempat, 11 November 2022



Konferensi Pers 2nd Joint Finance and Health Ministers Meeting, 12 November 2022



High Level Discussion dalam Rangka Grand Launching Energy Transition Mechanism Indonesia Country Platform, 14 November 2022



Peluncuran Kerangka Kerja ESG, 12 November 2022



Pertemuan Bersama Menteri-menteri Keuangan dan Menteri-menteri Kesehatan, 12 November 2022



Peluncuran Pandemic Fund, 13 November 2022



Signing Ceremony ETM Indonesia Country Platform



Pembukaan KTT G20 Di Bali, 15 November 2022

Presiden Joko Widodo memimpin KTT G20 di Bali 15-16 November 2022



BAB 1

Pendahuluan Presidensi G20 Indonesia



"... Saya mengundang Yang Mulia dan Bapak Ibu untuk hadir melanjutkan diskusi pada KTT G20 di Indonesia. Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang Indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia. Terima kasih."

(Joko Widodo, 2021)

Inilah penggalan sambutan Presiden Joko Widodo saat menerima estafet presidensi *Group of Twenty* (G20) dari Perdana Menteri Italia, Mario Draghi, pada Rome Summit di tanggal 31 Oktober 2021. Melalui seremoni singkat ini, Indonesia resmi memimpin jalannya diskusi pada forum ekonomi sembilan belas negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia *plus* Uni Eropa ini dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun sejak 1 Desember 2021.

G20 merupakan forum multilateral yang merepresentasikan sekitar 85% *gross domestic product* (GDP) global, lebih dari 75% perdagangan dunia, dan sekitar dua per tiga dari jumlah populasi dunia. Dengan kapasitas sebesar ini, G20 menjadi ajang yang sangat bergengsi dan memainkan peranan signifikan, bukan hanya bagi para anggotanya melainkan juga bagi seluruh dunia. Untuk itulah, memegang tampuk kepemimpinan atas forum G20 merupakan langkah strategis bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya, sekaligus mengawal inisiatif bagi kemajuan dunia.

Awal Mula Pendirian G20

Sejarah pembentukan G20 bermula dari forum G7 yang lebih dulu terbentuk pada tahun 1976. G7 merupakan forum politik dan ekonomi yang terdiri dari Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Inggris, Jepang, Italia, dan Kanada sebagai negara-negara utama serta Uni Eropa sebagai *non-enumerated member.*

Dengan kekuatan ekonomi raksasa, forum G7 berdiri sebagai arena eksklusif bagi para anggotanya yang kesemuanya adalah negara maju. Bagi sebagian pihak, G7 dianggap terlalu tertutup karena tidak merepresentasikan kepentingan global. Gagasan untuk memperlebar jejaring kerja sama multilateral dalam tubuh G7 mencuat pada saat terjadi krisis keuangan di Meksiko pada tahun 1994. Saat itu, bank sentral Meksiko melakukan strategi devaluasi atas mata uang Peso untuk stabilisasi ekonomi. Alih-alih tercapai, didorong oleh ketidakstabilan politik domestik, para investor justru berbondong-bondong menarik investasinya pada surat utang *Tesobonos* yang diterbitkan oleh pemerintah Meksiko. Arus modal yang keluar secara besar-besaran ini pada akhirnya memukul mata uang Peso dan menenggelamkan Meksiko dalam krisis finansial. Meksiko, yang pada dekade 90-an sedang menikmati pertumbuhan ekonomi, mendadak harus merasakan resesi. Akibatnya, sejumlah bank di Meksiko runtuh akibat gagal bayar dan angka kemiskinan naik tajam.

Kanada, sebagai salah satu negara G7 yang terdampak krisis finansial Meksiko, pada KTT G7 tahun 1995 untuk pertama kalinya menyuarakan isu mengenai pentingnya forum G7 untuk membuka diri terhadap negara-negara berkembang.

> "*This makes non sense. India is not part of this, China is not part of this, and the major regional economies are not part of it. Don't you think we should create a parallel organization?*", kenang Paul Martin, Menteri Keuangan Kanada (1993-2002), dalam sebuah wawancara oleh Centre for International Governance Innovation (CIGI, 2018).

Berselang beberapa tahun kemudian, krisis besar melanda Asia. Berawal dari terpukulnya nilai tukar Bath Thailand terhadap dolar Amerika Serikat di tahun 1997, krisis kemudian menjalar ke sejumlah negara, seperti Korea Selatan dan Indonesia. Bagi Indonesia, krisis ini adalah yang tergelap sepanjang sejarah, dengan nilai tukar rupiah terpuruk terhadap dolar Amerika Serikat dan mengharuskan Orde Baru

di bawah kepemimpinan Soeharto menemui kesudahannya.

Kerapuhan ekonomi di Asia akibat krisis dengan cepat merambat menjadi krisis global. Di Rusia, krisis hebat terjadi pada tahun 1998 yang memaksa bank sentral Rusia mendevaluasi Rubel dan kemampuan membayar utang luar negeri dalam kondisi *default*. Di tahun yang sama, Rusia diundang secara resmi ke dalam pertemuan G7 yang menjadikan forum ini berubah menjadi G8.

Krisis di Asia berdampak sistemik yang semakin meluas. Di tahun 1999, Brazil terseret ke dalam jurang krisis yang dikenal dengan nama '*Samba Effect*. Jatuhnya perekonomian Brazil yang saat itu menjadi lokomotif pertumbuhan di kawasan dengan cepat mengguncang negara-negara di Amerika Latin.

Memburuknya kondisi ekonomi global akibat krisis di Asia menyadarkan komunitas internasional bahwa forum G8 telah gagal memberikan solusi bagi dunia. Lebih jauh, banyak pihak yang mendesak adanya keterwakilan dari negara-negara dengan ekonomi berdampak dalam forum sekelas G8. Sederhananya, komunitas internasional menilai perkumpulan negara maju saja tidak akan mampu memotret potensi krisis global yang bisa jadi lahir dari negara berkembang.

Inisiatif Pembentukan G22 dan G33

Sebagai respons atas krisis yang melanda global, pada KTT APEC yang diselenggarakan di Vancouver, Kanada, pada penghujung November 1997, Presiden Bill Clinton menyampaikan inisiatif untuk mengundang menteri keuangan dari seluruh dunia untuk hadir dalam sebuah forum diskusi. Pertemuan ini diagendakan untuk membahas permasalahan krisis global dan bila dimungkinkan untuk mencapai konsensus atas permasalahan tersebut. Untuk itu, Departemen Keuangan Amerika Serikat menyusun dua agenda pertemuan yang kemudian dikenal sebagai forum G22.

Forum G22 juga dikenal sebagai *Willard Group*, di mana nama ini diambil dari nama hotel tempat penyelenggaraan pertemuan pertama yang dilangsungkan pada April 1998. Pertemuan ini dihadiri oleh para menteri keuangan dan gubernur bank sentral yang membahas isu-isu penting dalam menghadapi permasalahan ekonomi global. Forum ini sepakat bahwa diperlukan upaya untuk penguatan sistem keuangan internasional dengan mengantisipasi terjadinya krisis dan memperbaiki resolusi apabila suatu saat krisis terjadi.

Pertemuan kedua dilaksanakan pada 5 Oktober 1998 di sela-sela agenda pertemuan IMF-World Bank di Washington DC. Dalam pertemuan ini, forum mengundang empat negara tambahan untuk ambil bagian dalam diskusi. Pada pertemuan pertama, negara-negara yang hadir adalah kelompok G7 dan 15 negara lain, yaitu Argentina, Australia, Brazil, China, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, Meksiko, Polandia, Rusia, Singapura, Afrika Selatan, Republik Korea, dan Thailand. Pada pertemuan kedua, forum juga dihadiri oleh Belgia, Belanda, Swedia, dan Swiss.

Kelompok yang lebih inklusif, yaitu G33, kemudian terbentuk dari inisiatif G7 pada awal 1999 untuk menggantikan forum G22. Anggota dari kelompok ini adalah para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari negara-negara G22 ditambah dengan Belgia, Chile, Pantai Gading, Mesir, Maroko, Belanda, Arab Saudi, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Turki. Kelompok G33 melangsungkan dua kali pertemuan, yaitu pada Maret dan April 1999, untuk mendiskusikan reformasi ekonomi global dan sistem keuangan internasional.

Namun demikian, ketidakpuasan kemudian hadir, baik dari negara maju maupun negara berkembang. Negara-negara ini merasa tidak bahagia atas status *ad hoc* dari forum G22 dan G33 yang dipandang tidak berkelanjutan. Beberapa pandangan lain beranggapan forum ini terlalu besar sebagai wadah diskusi untuk mencapai konsensus. Di sisi lain, keterwakilan kekuatan ekonomi dari negara-negara berkembang dipandang penting untuk mencapai kesepakatan global. Permasalahan ini menjadi latar belakang penting atas terbentuknya kelompok G20.

Terbentuknya Kelompok G20

Pada tahun 1999, akibat tekanan internasional dan dorongan internal dari Amerika Serikat dan Kanada untuk menjadikan G7 menjadi lebih inklusif, sejumlah negara yang memiliki ekonomi berdampak dari setiap kawasan diundang dalam arena. Pengukuhan forum baru terkonfirmasi melalui *communique* pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G7 pada September 1999:

> *We propose to establish a new mechanism for informal dialogue in the framework of the Bretton Woods-institutional system, to broaden the dialogue on key economic and financial policy issues among systemically significant economies and promote cooperation to achieve stable and sustainable world economic growth that benefits all. We believe that discussions held in this group will prove useful to complement and reinforce*

the role of the governing bodies of the Bretton Woods institutions.

Accordingly, in December in Berlin, we will invite our counterparts from a number of systemically important countries from regions around the world to launch this new group. The EU Presidency and European Central Bank will be invited. In addition, to ensure effective liaison with the IMF and World Bank, we will invite the World Bank President, IMF Managing Director and Interim and Development Committee chairmen to serve as ex officio members of the group. We are grateful to Paul Martin of Canada for agreeing to lead this group as Chairman-for its first two years.

Statement of G7 Finance Ministers and Central Bank Governors, 1999 (Hajna, 2019)

Pertemuan pertama forum G20 dilangsungkan di Berlin pada 15-16 Desember 1999 yang dipimpin oleh Paul Martin. Formasi lengkap negara-negara dalam forum ini adalah Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, dan Amerika Serikat. Selain itu, Uni Eropa juga ditetapkan sebagai anggota penuh dalam forum G20.

Sejak saat itu, G20 menjadi komite baru dalam pembahasan isu perekonomian global. Perkumpulan yang sebelumnya hanya mewakili delapan negara maju, kemudian diperluas dengan menghadirkan *emerging markets*, yaitu negara-negara dengan perekonomian menguat yang dapat mewakili tiap-tiap kawasan. Penambahan anggota ini memungkinkan terjadinya dialog-dialog yang lebih efektif dan diharapkan mampu memberikan solusi nyata dalam setiap permasalahan ekonomi dunia.

Eskalasi G20 ke Level Pimpinan Negara

Sejak terbentuk pada tahun 1999, sejatinya G20 merupakan forum ekonomi yang dihadiri oleh tiap-tiap negara anggotanya yang diwakili oleh para menteri keuangan dan gubernur bank sentral. G20 fokus pada penanganan krisis ekonomi, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penguatan sistem finansial pada tiap-tiap negara anggota, serta sebagai respons atas serangan teror 9 September 2001 di Gedung World Trade Center. Setelahnya, diskusi berkembang pada urgensi reformasi pada lembaga-lembaga keuangan Bretton Woods, World Bank dan IMF.

Proposal untuk meningkatkan level pertemuan menjadi forum kepala negara telah disuarakan oleh Paul Martin pada pertemuan puncak G8 pada tahun 2005, KTT Gleneagles. Martin melihat bahwa peran negara-negara berkembang yang sedang menguat, seperti China dan India tidak boleh lagi dipandang sebelah mata oleh G8. Gagasan tersebut kemudian didukung oleh Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, dan Perdana Menteri Inggris, Gordon Brown. Pada krisis keuangan dan ekonomi global di tahun 2008, kedua tokoh ini mendesak Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, untuk menggelar pertemuan kepala negara pertama pada forum G20 di Washington DC. Dengan melibatkan Presiden European Commision, Manuel Barroso, Bush merilis undangan untuk hadir di KTT Washington.

Gambar 1.1: Daftar Penyelenggaraan KTT G20

Presidensi	Lokasi Penyelenggaraan	Tanggal Penyelenggaraan
Brazil	Washington DC, Amerika Serikat	15 – 16 November 2008
Inggris	London, Inggris	2 – 3 April 2009
Inggris	Pittsburgh, Amerika Serikat	24 – 25 September 2009
Republik Korea	Toronto, Kanada	26 – 27 Juni 2010
Republik Korea	Seoul, Korea	11 – 12 November 2010
Prancis	Cannes, Prancis	3 – 4 November 2011
Meksiko	Los Cabos, Meksiko	18 – 19 Juni 2012
Rusia	St. Pitersburg, Rusia	5 – 6 September 2013
Australia	Brisbane, Australia	15 – 16 November 2014
Turki	Antalya, Turki	15 – 16 November 2015
China	Hangzhou, China	4 – 5 September 2016
Jerman	Hamburg, Jerman	6 – 9 Juli 2017
Argentina	Buenos Aires, Argentina	30 November – 1 Desember 2018
Jepang	Osaka, Jepang	28 – 29 Juni 2019
Arab Saudi	Riyadh, Arab Saudi	21 – 22 November 2020
Italia	Roma, Italia	30 – 31 Oktober 2021
Indonesia	Bali, Indonesia	15-16 November 2022
India	New Delhi, India	9-10 September 2023

Keanggotaan dan Agenda Pertemuan

Selain sembilan belas negara utama dan Uni Eropa yang berstatus sebagai anggota tetap, pertemuan-pertemuan pada forum G20 juga dihadiri sejumlah pihak lain, seperti negara undangan dan lembaga internasional.

Pada sejumlah penyelenggaraan pertama, G20 mengundang Belanda dan Spanyol untuk turut serta bergabung dalam diskusi. Namun, pada KTT Seoul di tahun 2010, diputuskan hanya Spanyol yang akan hadir sebagai undangan tetap. Dalam presidensi yang sama, diputuskan juga bahwa di setiap presidensi ke depan, tidak diperkenankan untuk mengundang lebih dari lima negara, dan dua di antaranya harus berasal dari benua Afrika.

Prancis sebagai tuan rumah dari KTT Cannes di tahun 2011 mengundang Spanyol sebagai undangan tetap, Guinea Khatulistiwa sebagai *chair* dari Uni Afrika, Ethiopia sebagai *chair* dari *New Partnership for Africa's Development* (NEPAD), Singapura yang mewakili *Global Governance Group*, dan Uni Emirat Arab sebagai *chair* dari *Cooperation Council for the Arab States of the Gulf*.

Di samping mengundang negara lain untuk hadir dalam pertemuan puncak, G20 juga mengundang sejumlah lembaga internasional. Lembaga Bretton Woods, IMF dan World Bank, selalu diundang di setiap penyelenggaraan. Sementara PBB dan OECD dalam beberapa kesempatan juga mengambil bagian di sejumlah pertemuan.

Mengundang negara lain dan organisasi internasional merupakan langkah forum G20 untuk terus menggaungkan representasi dan keseimbangan regional untuk membentuk arena diskusi yang lebih terbuka dan inklusif. Dengan semangat yang sama, jika ditilik dengan lebih saksama, anggota tetap forum G20 bukanlah negara-negara yang berada pada peringkat dua puluh besar dunia secara ukuran ekonomi. Dalam rilis peringkat negara berdasarkan *gross domestic bruto* (GDP) oleh World Bank, Spanyol berada di peringkat 14 tidak berstatus sebagai anggota tetap, sementara Afrika Selatan yang berada di peringkat 31 menjadi anggota tetap G20.

Dalam setiap tahun penyelenggaraannya, forum G20 menunjuk satu negara secara bergilir sebagai penyelenggara, atau yang lebih dikenal dengan sistem presidensi. Negara yang memegang presidensi memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan KTT, menyusun agenda

agenda pertemuan, serta mengundang negara atau lembaga tamu untuk hadir. Karena forum G20 tidak memiliki sekretariat tetap, negara pemegang presidensi membentuk sekretariat temporal untuk mengelola jalannya seluruh agenda dan pertemuan selama presidensi.

Rotasi presidensi dilakukan dengan memilih negara pada grup yang berbeda secara bergantian di setiap tahunnya. Pengelompokan negara-negara ini dilakukan dengan pendekatan lokasi geografis dengan total 5 grup yang berisikan masing-masing maksimal 4 negara. Khusus untuk Grup 1 (Australia, Kanada, Arab Saudi dan Amerika Serikat) dan Grup 2 (India, Rusia, Afrika Selatan, dan Turki) yang tidak menggunakan pola regional. Sementara itu, anggota ke-20, Uni Eropa, tidak masuk ke dalam grup mana pun.

Gambar 1.2: Pengelompokan Negara Regional untuk Rotasi Presidensi G20

Grup 1	Grup 2	Grup 3	Grup 4	Grup 5
Australia	India	Argentina	Prancis	China
Kanada	Rusia	Brazil	Jerman	Indonesia
Arab Saudi	Afrika Selatan	Meksiko	Italia	Jepang
Amerika Serikat	Turkiye	-	Inggris	Korea Selatan

Sumber: Hajna: 2019:3.

Dalam rangka menjaga kontinuitas dan memastikan perpindahan estafet presidensi berjalan dengan lancar, dibentuklah sistem *troika* yang terdiri dari negara pemegang presidensi, negara pemegang presidensi sebelumnya, serta negara pemegang presidensi yang akan datang. Dalam penyelenggaraan presidensi tahun 2022, Indonesia berpartner dengan Italia sebagai pemegang presidensi tahun 2021 dan India yang melanjutkan presidensi di tahun 2023.

Profil Anggota G20

Sejak dilangsungkan pertemuan pertama pada Desember 1999, kelompok G20 terdiri dari 19 negara utama yang menjadi representasi dari tiap-tiap benua serta Uni Eropa sebagai anggota penuh. Berikut ini adalah profil dari para anggotanya.

Gambar 1.3. Peta Anggota-anggota G20



Gambar 1.4. Profil Negara-negara Anggota G20

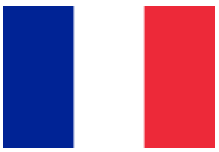
Amerika Serikat	
Benua	Amerika Utara
Ibu Kota	Washington DC
Gross Domestik Bruto (2021)	23.32 triliun dolar AS
Peringkat Ekonomi di Dunia (2021)	1
Mata Uang Resmi	Dollar Amerika (USD)
Luas Wilayah	9.831,5 ribu km^2
Jumlah Penduduk (2021)	332,03 juta

Kanada	
Benua	Amerika Utara
Ibu Kota	Ottawa
Gross Domestik Bruto (2021)	2 triliun dolar AS
Peringkat Ekonomi di Dunia (2021)	9
Mata Uang Resmi	Dollar Kanada (CAD)
Luas Wilayah	15.634,4 ribu km^2
Jumlah Penduduk (2021)	38,23 juta

Meksiko	
Benua	Amerika Tengah
Ibu Kota	Mexico City
Gross Domestik Bruto (2021)	1.27 triliun dolar AS
Peringkat Ekonomi di Dunia (2021)	15
Mata Uang Resmi	Peso (MXN)
Luas Wilayah	1.964,4 ribu km^2
Jumlah Penduduk (2021)	126,71 juta

Brasil	
Benua	Amerika Selatan
Ibu Kota	Brasilia
Gross Domestik Bruto (2021)	1.65 triliun dolar AS
Peringkat Ekonomi di Dunia (2021)	12
Mata Uang Resmi	Real Brasil (BRL)
Luas Wilayah	8.515,8 ribu km^2
Jumlah Penduduk (2021)	214,33 juta

Argentina	
Benua	Amerika Selatan
Ibu Kota	Buenos Aires
Gross Domestik Bruto (2021)	487.23 miliar dolar AS
Peringkat Ekonomi di Dunia (2021)	26
Mata Uang Resmi	Peso (ARS)
Luas Wilayah	2.780,4 ribu km^2
Jumlah Penduduk (2021)	45,81 juta

Prancis	
Benua	Eropa
Ibu Kota	Paris
Gross Domestik Bruto (2021)	2.96 triliun dolar AS
Peringkat Ekonomi di Dunia (2021)	7
Mata Uang Resmi	Euro (EUR)
Luas Wilayah	549,1 ribu km^2
Jumlah Penduduk (2021)	67,75 juta

Inggris/Britania Raya (UK)	
Benua	Eropa
Ibu Kota	London
Gross Domestik Bruto (2021)	3.12 triliun dolar AS
Peringkat Ekonomi di Dunia (2021)	5
Mata Uang Resmi	Pound Sterling (GBP)
Luas Wilayah	243,6 ribu km^2
Jumlah Penduduk (2021)	67,03 juta

Jerman	
Benua	Eropa
Ibu Kota	Berlin
Gross Domestik Bruto (2021)	4.26 triliun dolar AS
Peringkat Ekonomi di Dunia (2021)	4
Mata Uang Resmi	Euro (EUR)
Luas Wilayah	357,6 ribu km^2
Jumlah Penduduk (2021)	83,20 juta

Italia	
Benua	Eropa
Ibu Kota	Roma
Gross Domestik Bruto (2021)	2.11 triliun dolar AS
Peringkat Ekonomi di Dunia (2021)	8
Mata Uang Resmi	Euro (EUR)
Luas Wilayah	302,1 ribu km^2
Jumlah Penduduk (2021)	59,11 juta

Turki	
Benua	Asia/Eropa
Ibu Kota	Ankara
Gross Domestik Bruto (2021)	819.03 miliar dolar AS
Peringkat Ekonomi di Dunia (2021)	19
Mata Uang Resmi	Lira (TRY)
Luas Wilayah	785,4 ribu km^2
Jumlah Penduduk (2021)	84,78 juta

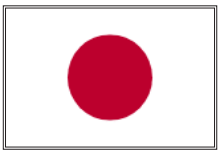
Afrika Selatan	
Benua	Afrika
Ibu Kota	Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein
Gross Domestik Bruto (2021)	419.02 miliar dolar AS
Peringkat Ekonomi di Dunia (2021)	31
Mata Uang Resmi	Rand (ZAR)
Luas Wilayah	1.219,1 ribu km^2
Jumlah Penduduk (2021)	59,39 juta

Arab Saudi	
Benua	Asia
Ibu Kota	Riyadh
Gross Domestik Bruto (2021)	868.59 miliar dolar AS
Peringkat Ekonomi di Dunia (2021)	18
Mata Uang Resmi	Riyal Saudi (SAR)
Luas Wilayah	2.149,7 ribu km^2
Jumlah Penduduk (2021)	35,95 juta

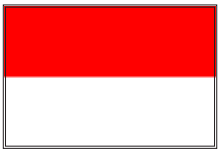
Rusia	
Benua	Eropa/Asia
Ibu Kota	Moscow
Gross Domestik Bruto (2021)	1.84 triliun dolar AS
Peringkat Ekonomi di Dunia (2021)	11
Mata Uang Resmi	Rubel Rusia (RUB)
Luas Wilayah	17.098,3 ribu km^2
Jumlah Penduduk (2021)	143,45 juta

Tiongkok	
Benua	Asia
Ibu Kota	Beijing
Gross Domestik Bruto (2021)	17.82 triliun dolar AS
Peringkat Ekonomi di Dunia (2021)	2
Mata Uang Resmi	Renminbi (CNY)
Luas Wilayah	9.562,.9 ribu km^2
Jumlah Penduduk (2021)	1.412,36 juta

India	
Benua	Asia
Ibu Kota	New Delhi
Gross Domestik Bruto (2021)	3.15 triliun dolar AS
Peringkat Ekonomi di Dunia (2021)	6
Mata Uang Resmi	Rupee India (INR)
Luas Wilayah	3.287,3 ribu km^2
Jumlah Penduduk (2021)	1.407,56 juta

Jepang	
Benua	Asia
Ibu Kota	Tokyo
Gross Domestik Bruto (2021)	5.01 triliun dolar AS
Peringkat Ekonomi di Dunia (2021)	3
Mata Uang Resmi	Yen (JPY)
Luas Wilayah	378 ribu km^2
Jumlah Penduduk (2021)	125,68 juta

Korea Selatan	
Benua	Asia
Ibu Kota	Seoul
Gross Domestik Bruto (2021)	1.81 triliun dolar AS
Peringkat Ekonomi di Dunia (2021)	10
Mata Uang Resmi	Won (KRW)
Luas Wilayah	100,4 ribu km^2
Jumlah Penduduk (2021)	51,74 juta

Indonesia	
Benua	Asia
Ibu Kota	Jakarta
Gross Domestik Bruto (2021)	1.19 triliun dolar AS
Peringkat Ekonomi di Dunia (2021)	16
Mata Uang Resmi	Rupiah (IDR)
Luas Wilayah	1.916,9 ribu km^2
Jumlah Penduduk (2021)	273,75 juta

Australia	
Benua	Australia
Ibu Kota	Canberra
Gross Domestik Bruto (2021)	1.55 triliun dolar AS
Peringkat Ekonomi di Dunia (2021)	13
Mata Uang Resmi	Dolar Australia (AUD)
Luas Wilayah	7.741,2 ribu km^2
Jumlah Penduduk (2021)	25,69 juta

European Union	
Benua	Eropa
Jumlah Negara	27
Gross Domestik Bruto (2021)	17.19 triliun dolar AS
Mata Uang Resmi	Euro (EU)

Sumber gambar bendera: https://flagpedia.net/download/images
Sumber peringkat perekonomian: https://oec.world/en/profile/country/
Sumber luas wilayah: https://databank.worldbank.org/data/embed-int/CountryProfile/id/b450fd57

Presidensi G20 Indonesia

Indonesia ditetapkan sebagai *troika* pada KTT Riyadh pada tahun 2020 bersama dengan Arab Saudi dan Italia. Itu artinya, Indonesia adalah pemegang presidensi G20 untuk tahun penyelenggaraan setelah presidensi Italia, yaitu tahun 2022. Serah-terima estafet presidensi ke Indonesia baru terjadi satu tahun kemudian, pada saat KTT Roma di tahun 2021. Per 1 Desember 2021, Indonesia resmi menjadi tuan rumah sekaligus pemimpin forum G20 hingga kurang lebih satu tahun setelahnya. Ini adalah yang pertama bagi Indonesia sejak awal mula berdirinya forum G20. Dengan posisi ini, Indonesia memiliki kesempatan yang sangat strategis untuk ikut menentukan arah desain kebijakan.

Bagi Indonesia, memegang keketuaan forum sekaliber G20 adalah kesempatan emas untuk mengupayakan kepentingan-kepentingan nasionalnya agar menjadi agenda pembahasan. Di sisi lain, Indonesia juga memegang posisi yang unik dalam merepresentasikan negara-negara berkembang yang lain. Dalam posisi ini, Indonesia memegang tanggung jawab vital dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang untuk didengarkan oleh dunia, termasuk isu mengenai inklusi keuangan menuju ekonomi hijau dan pemerataan akses terhadap vaksin COVID-19.

Hal lain yang membuat posisi Indonesia semakin penting dalam forum ini adalah jumlah penduduk yang besar. Sebagai negara dengan populasi terbesar nomor 4 di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar

yang menjanjikan, terlebih dengan mayoritas penduduknya berada pada usia produktif dalam beberapa tahun mendatang. Selanjutnya, sebagai negara yang mayoritas penduduknya memeluk Islam, Indonesia berkesempatan menjadi jembatan atas perbedaan-perbedaan antara negara-negara Barat dan negara-negara Islam. Melalui keramahtamahan dan kemajemukan yang menjadi ciri khas masyarakatnya, Indonesia dapat menjadi representasi negara Islam yang santun, modern, dan terbuka terhadap perbedaan. Sebagai negara demokrasi baru yang masih dalam proses konsolidasi, Indonesia dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain dalam mempromosikan sistem demokrasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Terakhir, sebagai satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20, Indonesia dapat menjadi corong suara dalam mengupayakan pertumbuhan kawasan.

Recover Together, Recover Stronger

Tongkat estafet keketuaan G20 diterima Indonesia di tengah kondisi dunia yang masih dalam kemelut pandemi COVID-19. Setelah WHO menetapkan status pandemi pada 11 Maret 2020, penyebaran virus covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat dunia. Secara global per 24 Oktober 2021, tercatat lebih dari 243 juta kasus terkonfirmasi COVID-19 dengan lebih dari 4,9 juta kematian (WHO, 2021). Penyebaran kasus yang begitu cepat ditambah dengan tingginya tingkat kematian memaksa negara-negara di seluruh dunia untuk bertindak cepat untuk melindungi masyarakatnya sejak awal krisis kesehatan ini ditetapkan. Bentuk kebijakan yang banyak diambil adalah membatasi pergerakan masyarakat. Akibatnya, terjadi banyak penghentian aktivitas produksi yang berdampak pada sektor perdagangan. Di sektor pariwisata, banyak negara yang menarik tuas rem dengan menutup batas negara untuk pelancong dari luar negeri. Kondisi ini menyebabkan terpukulnya industri transportasi, akomodasi, dan ekonomi kreatif. Tidak menunggu lama sejak pembatasan diterapkan, tingkat pengangguran pun meningkat tajam. Tentu saja, kondisi ini juga berpengaruh negatif terhadap sektor-sektor lain yang menyebabkan ekonomi di banyak negara mengalami guncangan.

Selama tahun 2020, data menunjukkan terjadi kontraksi yang cukup dalam pada ekonomi dunia. Bahkan, sejumlah negara maju harus mengalami pertumbuhan ekonomi secara negatif yang cukup signifikan, seperti Amerika Serikat (-3,4%), Jerman (-4,6%), Prancis (-8%), Italia (8,9%), Spanyol (-10,8%), Jepang (-4,6%), Inggris (-9,8%), dan Kanada (-5,3%) (IMF, 2023). Sementara itu, Indonesia mengalami pertumbuhan

negatif sebesar -2,1%.

Pada tahun 2021, seiring dengan momentum pemulihan yang ditopang oleh semakin tingginya tingkat vaksinasi, ekonomi global pun semakin menguat. Banyak negara sudah mulai melonggarkan restriksi mobilitas masyarakatnya yang menyebabkan aktivitas ekonomi perlahan mulai kembali menggeliat. Secara global, selama tahun 2021, ekonomi *rebound* dengan angka pertumbuhan positif sebesar 6%.

Pada keketuaan pada forum G20, Indonesia mengusung tema "*Recover Together, Recover Stronger*". Melalui tema ini, Indonesia mengajak dunia untuk memastikan pemulihan terjadi secara merata dan tidak ada pihak yang ditinggalkan. Dalam jangka pendek, Indonesia perlu mengetengahkan diskusi mengenai peningkatan stabilitas sistem keuangan dan akses vaksin bagi negara-negara miskin dan rentan dalam rangka pemulihan bersama. Dalam jangka menengah dan panjang, Indonesia memandang perlu untuk mencapai konsensus terkait peningkatan efisiensi ekonomi, perbaikan dalam inklusi keuangan, serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui misi kebersamaan yang diusung dalam tema besar presidensi, Indonesia ingin menularkan semangat gotong royong yang selama ini telah melekat sebagai identitas bangsa.

Semangat "*Recover Together, Recover Stronger*" terasa menjadi lebih kuat setelah Indonesia merilis logo presidensi. Gambaran batik kawung yang menjadi sentra dari sebuah siluet gunungan merepresentasikan semangat gotong royong dalam membangun dunia/semesta. Hal ini sekaligus mempertegas tekad forum G20 untuk mendorong pemulihan

Gambar 1.5. Logo G20 di bawah Presidensi Indonesia

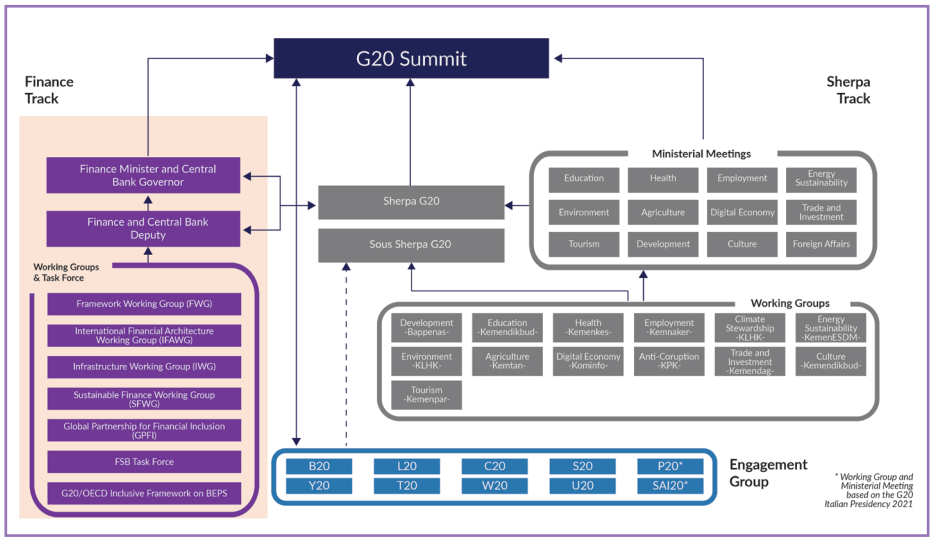


Menilik lebih detail, bentuk tanaman merambat yang membentuk pola pada logo melambangkan Presidensi G20 Indonesia sebagai "*bridge builder*" dan "*part of solution*". Selain itu, sulur tanaman pada logo ini juga menjadi simbol pertumbuhan hijau dan berkelanjutan. Pada bagian bawah logo, terdapat tulisan "G20 Indonesia 2022" berwarna biru tua. Warna ini merepresentasikan Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki kekayaan alam melimpah.

Tiga Isu Prioritas Presidensi G20 Indonesia

Dalam upaya terwujudnya pemulihan secara merata dan lebih kuat, Indonesia menetapkan tiga isu prioritas. *Pertama*, **penguatan arsitektur kesehatan global**. Dalam upaya menuju pemulihan pasca pandemi, dibutuhkan kerja sama global untuk memastikan kesetaraan pada standar kesehatan yang berlaku serta kerja sama yang lebih erat untuk membangun ketahanan komunitas global terhadap pandemi di masa mendatang. *Kedua*, **transformasi digital**. Untuk memperoleh potensi besar dari digitalisasi ekonomi yang terjadi secara masif, dibutuhkan lanskap kerja sama baru dari negara-negara di dunia dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka kesejahteraan bersama di era digital. *Ketiga*, **transisi energi berkelanjutan**. Selaras dengan upaya global untuk memastikan keamanan energi, terdapat kebutuhan mendesak untuk mempercepat transisi menuju sumber-sumber energi yang lebih bersih. Hal ini perlu dibahas dengan pendekatan-pendekatan dan dimensi-dimensi baru untuk menjamin masa depan yang lebih baik bagi komunitas global.

Gambar 1.6. Pertemuan-pertemuan G20 di bawah Presidensi Indonesia



Tiga isu prioritas pada Presidensi G20 Indonesia kemudian diturunkan pada dua jalur pembahasan, yaitu Jalur Keuangan (*Finance Track*) dan Jalur Sherpa (*Sherpa Track*). Pada setiap jalur, pembahasan agenda dilakukan secara lebih mendetail dan dilakukan secara berjenjang, mulai dari level kelompok kerja (*working groups*), deputi (*deputies*), dan menteri (ministerial). Pembahasan dari tiap-tiap jalur ini kemudian akan kembali mengerucut pada pertemuan level kepala negara di KTT Bali.

Sherpa Track

Pada awal terbentuknya, G20 merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Namun, forum G20 ini kemudian ditingkatkan level pertemuannya menjadi level kepala negara/ pemerintahan yang pertama kali diselenggarakan pada KTT Washington pada tahun 2008. Dua tahun setelahnya, dibentuk pembahasan pada sektor pembangunan dalam forum G20. Ini menjadi titik kelahiran Jalur Sherpa, yaitu jalur kerja yang membahas isu-isu global non-keuangan. Penamaan Sherpa diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal yang berjalan menuju puncak Himalaya. Filosofi ini yang kemudian melekat pada jalur non-keuangan yang membuka jalan menuju *summit* (KTT).

Pada Presidensi G20 Indonesia, Jalur Sherpa dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sejumlah isu yang dibahas pada Jalur Sherpa antara lain adalah antikorupsi, pembangunan, perdagangan, pariwisata, energi, perubahan iklim, kesehatan, dan kesetaraan gender. Isu-isu ini kemudian didistribusikan pada kelompok-kelompok kerja yang dipimpin oleh kementerian yang relevan. Hasil pembahasan isu-isu spesifik pada level kelompok kerja kemudian menjadi bahan masukan pada pertemuan tingkat menteri dan KTT.

Jalur Sherpa pada Presidensi G20 Indonesia memiliki 11 kelompok kerja (*working group*), 1 kelompok inisiatif, dan 10 *enggagement group*.

Finance Track

Finance Track atau Jalur Keuangan adalah jalur kerja G20 yang mendiskusikan isu-isu makro ekonomi global melalui Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG), Finance and Central Bank Deputies (FCBD), dan sejumlah pertemuan pada tingkat kelompok kerja (working groups) (Presidensi G20 India, 2023). Beberapa isu kunci yang dibahas pada Jalur Keuangan adalah *outlook* perekonomian global dan pengawasan atas risiko perekonomian global, reformasi menuju arsitektur

keuangan global yang lebih tahan dan stabil, perpajakan internasional, pembiayaan infrastruktur berkualitas, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, reformasi di bidang keuangan dan pembiayaan dalam mengantisipasi pandemi masa depan, serta pendanaan pada pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi (*Pandemic Prevention, Preparedness and Responses*/PPR).

Agenda-agenda utama dalam Jalur Keuangan didistribusikan ke kelompok-kelompok kerja dan gugus-gugus tugas untuk dapat didiskusikan dan hasilnya dibawa pada FCBD dan FMCBG. Pada Presidensi G20 Indonesia, kelompok kerja dan gugus tugas terdiri dari Framework Working Group (FWG), International Financial Architecture Working Group (IFAWG), Infrastructure Working Group (IWG), Sustainable Finance Working Group (SFWG), Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), Financial Stability Board Task Force, dan G20/OECD Inclusive Framework on BEPS.

Agenda Utama Jalur Keuangan

Pada Jalur Keuangan, tiga isu prioritas presidensi diejawantahkan ke dalam enam agenda utama yang dibahas secara berjenjang, yaitu:

1. *Exit Strategy to Support Equitable Recovery*

   Indonesia menaruh perhatian pada situasi pemulihan di mana sejumlah negara mulai menormalisasi kebijakan fiskal dan moneternya. Strategi yang ditetapkan suatu negara untuk keluar dari kebijakan yang tidak biasa dalam rangka meredam efek negatif pandemi ini disebut sebagai *exit strategy*. Agenda ini dicanangkan oleh Indonesia untuk memastikan *exit strategy* dapat terkoordinasi dengan baik untuk mengurangi efek limpahan (*spillover*) yang dirasakan oleh negara-negara berkembang akibat dari kebijakan yang diambil oleh negara-negara yang lebih dahulu pulih ekonominya. Dengan koordinasi ini, diharapkan dapat terciptanya iklim pertumbuhan yang kondusif dan adil bagi seluruh negara.

2. *Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth*

   Pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian dunia dengan hebat. Walau di tahun 2021 perkeonomian mulai berangsur menguat, hantaman pandemi menyisakan efek luka (*scarring effect*) yang perlu didukung untuk betul-betul pulih. Terdapat sejumlah isu terkait efek luka yang perlu dibahas dan disepakati bersama, yaitu turunnya produktivitas, masih lesunya investasi,

serta tingginya angka pengangguran. Dukungan atas kondisi tersebut diharapkan mampu mengakselerasi proses pemulihan mengakselerasi proses pemulihan dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kokoh.

3. *Payment System in the Digital Era*

Situasi pandemi yang memaksa manusia untuk mengurangi interaksi fisik membawa kemajuan dalam percepatan digitalisasi, termasuk pada sistem pembayaran. Kondisi ini juga disebabkan oleh adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat yang semakin menggemari belanja secara daring. Digitalisasi pada sistem pembayaran ini juga membuka kesempatan bagi UMKM untuk mengakses layanan keuangan secara lebih mudah. Selain itu, agenda ini juga akan membahas isu terkait *central bank digital currency* yang diharapkan dapat menghadirkan efisiensi pada pembayaran lintas batas (*cross border payment*).

4. *Sustainable Finance*

Setelah melewati pandemi COVID-19, dunia harus bersiap untuk menghadapi dampak dari perubahan iklim yang diprediksi akan membawa dampak ekonomi yang jauh lebih besar apabila Kesepakatan Paris 2050 tidak dipenuhi. Untuk itu, seluruh negara harus berkomitmen untuk memerangi perubahan iklim dengan mendorong ekonomi hijau yang berkelanjutan. Agenda utama ini membahas mengenai transisi menuju ekonomi hijau agar dapat menjadi lebih adil dan terjangkau bagi negara-negara berkembang. Lebih jauh, pembahasan pada agenda ini diharapkan dapat membantu negara-negara berkembang untuk mengakses pasar investasi yang mengarah pada ekonomi hijau.

5. *Financial Inclusion, Digital, and SMEs*

Jalur Keuangan juga mendorong semakin terbukanya akses layanan keuangan bagi kelompok-kelompok rentan, seperti kelompok wanita dan kelompok muda, untuk mendorong produktivitas. Selain itu, agenda ini diharapkan dapat mendukung proses digitalisasi ekonomi secara optimal untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan akses terhadap pasar dan sumber pembiayaan yang inklusif.

6. *International Taxation*

Dengan semakin berkembangnya ekonomi lintas negara, perusahaan-perusahaan multinasional dimungkinkan untuk

beroperasi dan melakukan transaksi bisnis di berbagai wilayah di dunia. Praktik ini kemudian meningkatkan potensi kerugian negara akibat penghindaran pajak, terlebih hingga saat ini belum ada peraturan perpajakan yang menjadi acuan perpajakan secara global. Untuk itulah, melalui agenda ini, forum G20 membahas sejumlah isu seputar pajak internasional serta strategi *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS).

Selain enam agenda yang telah ditetapkan tersebut, Presidensi G20 Indonesia juga akan melanjutkan sejumlah agenda warisan (*legacy*) dari presidensi sebelumnya, yaitu pengintegrasian risiko iklim ke dalam pengawasan risiko global, penguatan jaring pengaman keuangan global (*global financial safety net*/GPFN), penanganan volatilitas arus modal, melanjutkan the *Data Gaps Initiative* (DGI), peningkatan reformasi regulasi sektor keuangan, penguatan pengelolaan dan transparansi utang, percepatan agenda infrastruktur menuju pengembangan yang berkelanjutan dan inklusif, optimalisasi dukungan pembiayaan dari bank pembangunan multilateral, penguatan kapasitas sistem kesehatan dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi, serta melanjutkan program *Compact with Africa*.

Kelompok Kerja dan Gugus Tugas pada Jalur Keuangan

Enam agenda utama dan sepuluh agenda warisan yang dibahas di Jalur Keuangan didistribusikan ke sejumlah kelompok kerja dan gugus tugas. Hasil dari pembahasan pada level ini akan dieskalasi ke pertemuan FCBD dan FMCBG, dan menjadi masukan terhadap rekomendasi kebijakan yang tertuang di *Ministerial Communique* atau *Statement* dan *Plan of Action*.

1. *Framework Working Group*

   Framework Working Group (FWG) merupakan kelompok kerja yang membahas isu-isu makro ekonomi global dan mendiskusikan bagaimana kerja sama dalam menyusun kebijakan dapat ditingkatkan untuk menghasilkan pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Dalam Presidensi G20 Indonesia, FWG fokus pada dua agenda utama *Finance Track*, yaitu koordinasi *exit strategy* dalam mengupayakan pemulihan global yang adil dan merata dan penanganan efek luka pandemi (*scaring effects*) dalam perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di masa mendatang, serta pada topik monitoring risiko global yang menjadi *legacy issue* dari presidensi sebelumnya. Sepanjang tahun 2022, FWG melaksanakan tiga kali

pertemuan, yaitu pada 13-14 Januari 2022, 24-25 Mei 2022, dan 29-30 September 2022.

2. *International Financial Architecture Working Group*

International Financial Architecture Working Group (IFAWG) merupakan tim kerja di Jalur Keuangan yang memiliki fokus pembahasan pada penguatan sistem keuangan global, termasuk dukungan bagi negara berpenghasilan rendah dan rentan. Dalam Presidensi G20 Indonesia, IFAWG memiliki fokus pembahasan pada upaya-upaya memperkuat ketahanan dan menjaga stabilitas sistem keuangan internasional (Bank Indonesia, 2022). Topik diskusi di antaranya adalah dinamika aliran kapital dan respons kebijakan yang optimal bagi negara-negara berkembang, penguatan jaring pengaman keuangan global (*Global Financial Safety Net*/GFSN), dan upaya-upaya memperkuat kembali ketahanan sistem keuangan untuk mengatasi berbagai vulnerabilitas sumber-sumber keuangan. Di bawah Presidensi Indonesia, G20 juga memberikan perhatian pada upaya-upaya memperkuat pendanaan dukungan dan manajemen hutang di negara-negara berpendapatan rendah, termasuk arah penguatan kebijakan manajemen hutang bagi negara-negara miskin melalui *the Common Framework for Debt Treatments* di luar *Debt Service Suspension Initiative* (DSSI).

Sepanjang tahun 2022, IFAWG telah mengadakan empat kali pertemuan, yaitu pada 27-28 Januari 2022 di Jakarta, 24-25 Maret 2022 di Jakarta, 16-17 Juni 2022 di Jakarta dan 22-23 September 2022 di Seoul.

3. *Infrastructure Working Group*

Infrastructure Working Group (IWG) merupakan kelompok kerja di Jalur Keuangan yang membahas agenda-agenda prioritas di bidang infrastruktur. Selama Presidensi G20 Indonesia, IWG memiliki enam tema utama yang dibahas, yaitu peningkatan investasi infrastruktur berkelanjutan dengan mendorong partisipasi sektor swasta, penekanan peran infrastruktur dalam mendorong inklusi sosial dan pengurangan kesenjangan antar daerah, peningkatan investasi infrastruktur digital dan penggunaan teknologi dalam infrastruktur, mendorong infrastruktur transformatif pasca pandemi COVID-19, penerapan indikator *Quality Infrastructure Investment* (QII), dan pembaharuan tata kelola *Global Infrastructure Hub*.

Selama tahun 2022, IWG melaksanakan empat kali pertemuan, yaitu pada tanggal 20-21 Januari 2022, 17 Maret 2022, 9-10 Juni 2022, dan 15-16 September 2022.

4. *Sustainable Finance Working Group*

Sustainable Finance Working Group (SFWG) merupakan kelompok kerja yang bertujuan untuk menggerakkan keuangan berkelanjutan sebagai jalan untuk memastikan pertumbuhan dan stabilitas global serta mempromosikan transisi menuju ekonomi yang lebih hijau, memiliki ketahanan, dan inklusif (Presidensi G20 India, 2023). Pada Presidensi G20 Indonesia, SFWG fokus pada pembahasan salah satu agenda utama *Finance Track*, yaitu keuangan berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2022, SFWG melaksanakan empat kali pertemuan, yaitu pada 25 Januari, 30-31 Maret 2022, 14-15 Juni 2022, dan 26-27 September 2022.

5. *Global Partnership for Financial Inclusion*

Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) adalah *platform* inklusif bagi seluruh negara anggota G20, negara non-G20 yang berkepentingan, serta pemangku kepentingan yang relevan untuk meneruskan upaya dalam bidang inklusi keuangan, termasuk implementasi Rencana Aksi Inklusi Keuangan G20, yang disahkan pada KTT G20 di Seoul (GPFI, 2023). Pada Presidensi G20 Indonesia, GPFI menjadi tim kerja dengan fokus utama membahas salah satu agenda utama Finance Track, yaitu inklusi keuangan.

Sepanjang tahun 2022, GPFI melaksanakan tiga kali rapat pleno, yaitu pada 3-4 Februari 2022, 12-13 Mei 2022, dan 5 Oktober 2022.

6. *OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS*

OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS merupakan kerangka kerja yang beranggotakan lebih dari 135 negara dan yurisdiksi yang berkolaborasi dalam mengimplementasikan 15 aksi untuk melawan praktik penghindaran pajak, perbaikan pada koherensi peraturan-peraturan pajak internasional, dan menjamin terciptanya lingkungan perpajakan yang lebih transparan.

Kerangka inklusif OECD ini melakukan pertemuan keempat belas di Paris pada tanggal 6-7 Oktober 2022. Fokus pembahasannya di antaranya adalah transparansi perpajakan, administrasi

perpajakan dan digitalisasi, serta pajak dan pembangunan (OECD, 2022).

7. *Joint Finance-Health Task Force (JFHTF)*

Joint Finance-Health Task Force (JFHTF) merupakan gugus tugas yang dibentuk sebagai tindak lanjut atas kesepakatan KTT Roma. Gugus tugas ini memiliki misi khusus, yaitu memperkuat kesiapsiagaan dunia dalam pengendalian pandemi melalui *prevention*, *preparedness and response* (PPR). Selama Presidensi G20 Indonesia, gugus tugas ini melaksanakan enam kali pertemuan, yaitu pada 20 Desember 2021, 26 Januari 2022, 1 April 2022, 31 Mei 2022, 30 Agustus 2022, dan 28 September 2022. tugas yang dibentuk sebagai tindak lanjut atas kesepakatan KTT Roma. Gugus tugas ini memiliki misi khusus, yaitu memperkuat kesiapsiagaan dunia dalam pengendalian pandemi melalui *prevention*, *preparedness and response* (PPR). Selama Presidensi G20 Indonesia, gugus tugas ini melaksanakan enam kali pertemuan, yaitu pada 20 Desember 2021, 26 Januari 2022, 1 April 2022, 31 Mei 2022, 30 Agustus 2022, dan 28 September 2022.

Capaian Presidensi G20 Indonesia di Finance Track

Sejumlah capaian telah diwujudkan dalam Jalur Keuangan G20 di bawah Presidensi Indonesia. Di antara capaian tersebut diuraikan sebagai berikut.

Pandemic Fund

Capaian terbesar Presidensi G20 Indonesia pada *Finance Track* adalah diluncurkannya *the Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness, and Response* (FIF-PPR) atau lebih sering disebut dengan istilah *Pandemic Fund* pada rangkaian KTT Bali. Dana yang merupakan sumbangan kolektif ini adalah bukti konkret keberhasilan semangat pulih bersama dan pulih lebih kuat yang digaungkan selama Presidensi G20 Indonesia.

Pada awalnya, inisiatif pembentukan FIF-PPR ini berasal dari Deklarasi KTT Roma pada presidensi Italia. Indonesia kemudian melanjutkan agenda warisan penguatan kapasitas sistem kesehatan dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi dengan membentuk gugus tugas JHTF. Gugus tugas ini kemudian meningkatkan dialog dan kerja sama global pada isu yang berkaitan dengan *pandemic PPR* hingga

berhasil membentuk *Pandemic Fund* pada 8 September 2022. Hingga gelaran pertemuan kedua Joint Finance-Health Ministers Meeting pada 12 November 2022, telah terkumpul dana sebesar 1,4 miliar dolar AS dalam bentuk komitmen finansial yang telah diumumkan oleh 24 negara donor dan 3 filantropi.

Pandemic Fund menyediakan aliran pendanaan tambahan jangka panjang untuk memperkuat kemampuan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah melalui investasi dan dukungan teknis di tingkat nasional, regional dan global (World Bank, 2022).

Hasil Konkrit *Infrastructure Working Group*

Pada pertemuan FMCBG ketiga yang diselenggarakan di Bali pada 15-16 Juli 2022, G20 menyatakan dukungannya pada *Blueprint* (cetak biru) G20 untuk peningkatan pembiayaan dan pengembangan InfraTech (Kementerian Keuangan, 2022). Melalui cetak biru ini, sektor publik dan sektor swasta dimungkinkan untuk berkolaborasi dan meningkatkan investasi ke InfraTech. Dalam upaya mendukung pengembangan cetak biru ini, Global Infrastructure Hub (GI Hub) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) menyusun *Stocktake of Approaches on Scaling Up Infratech*.

InfraTech merupakan bentuk integrasi teknologi digital dan non-digital dengan infrastruktur fisik dalam rangka menghasilkan aset yang efisien, terhubung, dan tangguh. Pembahasan mengenai InfraTech merupakan kelanjutan dari agenda Presidensi G20 Arab Saudi di tahun 2020 yang dituangkan pada Agenda InfraTech G20 Riyadh (Kementerian Keuangan, 2022).

Sementara itu, pada pertemuan FMCBG keempat yang diselenggarakan di Washington DC pada 12-13 Oktober 2022, forum menyatakan dukungannya pada alat InfraTracker 2.0 yang dihadirkan oleh GI Hub. Alat InfraTracker ini memungkinkan transformasi sektor publik dan swasta menuju investasi infrastruktur pasca pandemi COVID-19 dengan memberikan wawasan tentang strategi dan rencana infrastruktur jangka panjang. Selaras dengan ini, G20 juga memberikan dukungan terhadap *the Compendium of Quality Infrastructure Investment* (QII) *Indicators* dan *the associated guidance note* yang dikembangkan untuk G20. Kompendium ini dimaksudkan untuk membantu menginformasikan pengambilan keputusan tentang desain, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset infrastruktur, mengatasi kekurangan informasi

yang dapat mengurangi investasi dalam infrastruktur, dan mendukung peningkatan aliran dana ke proyek infrastruktur.

Sustainable Finance Report

Presidensi Indonesia melalui *Sustainable Finance Working Group* (SFWG) melanjutkan pembahasan terkait dokumen *Sustainable Finance Roadmap* yang telah disahkan pada KTT Roma tahun 2021. Dalam sejumlah pertemuannya, sekretariat mempresentasikan kemajuan peta jalan melalui sebuah *dashboard*. Seluruh data terkait upaya-upaya dunia internasional dalam meningkatkan keuangan berkelanjutan disimpan dan diorganisir dalam *dashboard* ini.

Dalam pertemuan final SFWG, forum G20 sepakat untuk merilis dokumen yang berfungsi sebagai laporan *progress* keuangan berkelanjutan dalam bentuk *Sustainable Finance Report*. Dokumen ini merupakan ringkasan dari pembahasan SFWG selama Presidensi G20 Indonesia. Sejumlah informasi termuat di dalam dokumen ini, di antaranya adalah *progress* pada pelaksanaan aksi-aksi yang direkomendasikan di *Sustainable Finance Roadmap*, penjelasan mengenai dampak dari aktivitas SFWG, serta poin-poin kunci untuk ditindaklanjuti (*key takeaways*) dari pertemuan *the Forum on International Policy Levers for Sustainable Investment* yang diselenggarakan pada 13 Juni 2022.

Penutup

Indonesia resmi memegang Presidensi G20 untuk yang pertama kalinya setelah menerima tongkat estafet dari Italia pada 30 Oktober 2021. G20 adalah forum strategis yang membahas isu-isu tingkat dunia, antara lain kesehatan global, stabilitas keuangan, dan perubahan iklim. Dengan posisinya sebagai negara berkembang, presidensi G20 menjadi arena bagi Indonesia untuk bersuara lantang dalam mengusahakan kepentingan negara-negara berkembang lainnya. Melalui tema *Recover Together, Recover Stronger*, Indonesia dengan tegas mengupayakan semangat gotong royong untuk menciptakan tatanan global yang adil dan inklusif.

Indonesia menetapkan tiga isu prioritas dalam keketuaannya, yaitu penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan. Tiga isu prioritas ini kemudian diturunkan ke dalam agenda-agenda di dua jalur kerja, Jalur Keuangan dan Jalur Sherpa. Pada Jalur Keuangan, Indonesia mengejawantahkan tiga isu prioritas, yaitu *Exit*

Strategy to Support Equitable Recovery, Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth, *Payment System in the Digital Era*, *Sustainable Finance*, *Financial Inclusion*, *Digital, and SMEs*, dan *International Taxation*. Keenam agenda ini didistribusikan ke kelompok-kelompok kerja dan gugus-gugus tugas yang dibentuk selama presidensi.

Pembahasan berjenjang di Jalur Keuangan menghasilkan sejumlah hasil nyata, termasuk pembentukan *Pandemic Fund* yang diluncurkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di sela-sela agenda KTT Bali. *Pandemic Fund* menjadi terobosan yang ditelurkan oleh Presidensi G20 Indonesia untuk memperkuat kapasitas sistem kesehatan global dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi.

Selain kesuksesan pada aspek substansi, Presidensi G20 juga menjadi etalase bagi Indonesia untuk menegaskan kapasitasnya dalam mengelola rangkaian pertemuan di tengah situasi pandemi. Di saat dunia dalam posisi siaga dalam menyikapi penyebaran virus COVID-19 varian Omicron, Indonesia menunjukkan agilitas tinggi dalam mengelola setiap pertemuannya. Selain itu, Indonesia juga banyak mendapatkan apresiasi dari dunia internasional atas kesuksesan mempertahankan forum G20 di tengah invasi militer Rusia ke Ukraina yang banyak mendapat kecaman dari negara-negara Barat. Kepiawaian Indonesia dalam melakukan pendekatan ke semua pihak menjadi kunci sukses dalam menjaga keutuhan G20.

Referensi

Bank Indonesia (2022) "International Financial Architecture Working Group (IFAWG): G20 Commitment to Support Low Income and Vulnerable Economies and Increasing International Financial System Resilience and Stability." Press Release. 28 Januari 2022. https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_242622.aspx

Center for Governance Innovation/CIGI (2018). "Forged in Crisis: An Inside Look at the G20's History." https://www.cigionline.org/multimedia/forged-crisis-inside-look-g20s-history/

Center for Governance Innovation/CIGI (2018). "Forged in Crisis: An Inside Look at the G20's History." https://www.cigionline.org/multimedia/forged-crisis-inside-look-g20s-history/

Global Partnership for Financial Inclusion/GPFI (2023). "About GPFI." https://www.gpfi.org/about-gpfi

Hajnal, P.I (2019). *The G20: Evolution, Interrelationships, Documentation*. NY: Routledge.

International MonetaryFund/ IMF (2023). "World Economic Outlook." https://www.imf.org/en/Publications/WEO.

Joko Widodo (2021). "Pidato Presiden Republik Indonesia Saat Penerimaan Presidensi Indonesia Di G20 Tahun 2022." https://www.presidenri.go.id/transkrip/pidato-presiden-republik-indonesia-saat-penerimaan-presidensi-indonesia-di-g20-tahun-2022/

Kementerian Keuangan (2022). "G20 Blueprint for Scaling Up InfraTech Financing and Development Diterbitkan untuk Mendukung Implementasi Agenda InfraTech." https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1178-1516/umum/capaian-iwg-g20/infratech

OECD (2022). "14th Meeting of the Inclusive Framework on BEPS." https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-meeting-october-2022.htm.

Presidensi G20 India (2023). "Finance Track." https://www.g20.org/en/workstreams/finance-track/

Presidensi G20 India (2023). "About Us." https://g20sfwg.org/about-us/

World Heath Organization/WHO (2021). "Weekly epidemiological update on COVID-19 - 26 October 2021." https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---26-october-2021

World Bank (2022). "FAQs: The Pandemic Fund." https://www.worldbank.org/en/topic/pandemics/brief/factsheet-financial-intermediary-fund-for-pandemic-prevention-preparedness-and-response





BAB 2

Koordinasi *Exit Strategy* untuk Mendukung Pemulihan Global

Pendahuluan

Sebagai forum global tertinggi untuk mengatasi masalah perekonomian global, G20 menghadapi tantangan yang kompleks dengan adanya pandemi COVID-19. Sejak COVID-19 muncul di akhir tahun 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi global pada awal tahun 2020, banyak negara melakukan kebijakan fiskal dan moneter yang tidak biasa dengan tujuan untuk meminimalkan dampak pandemi ke dunia bisnis dan juga individu warga negara. Presidensi G20 Indonesia bertujuan untuk bekerja bersama dengan seluruh anggota G20 dalam upaya mengatasi tantangan bersama yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia.

Saat dunia berada di tahap akhir pandemi COVID-19 dan perbaikan kondisi ekonomi mulai terasa, agresi Rusia terhadap Ukraina memperlambat perbaikan itu. Konflik militer antara kedua negara ini menyebabkan gangguan *supply chain*, kenaikan harga pangan dan energi, dan memicu inflasi. Selain itu, masih bermunculannya varian-varian baru dari COVID-19 menyebabkan perbaikan kondisi ekonomi tersebut harus melewati jalan yang terjal. Dengan melihat tantangan-tantangan ini, forum G20 memiliki peran penting untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan yang terorkestrasi dengan baik untuk membantu mengarahkan ekonomi global ke arah perbaikan yang berkelanjutan dan inklusif.

Kecepatan negara-negara di dunia memperbaiki kondisi perekonomiannya berbeda-beda bergantung kepada sumber daya yang dimiliki, implementasi kebijakan kesehatan, dan implementasi kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat. Perbaikan kondisi ekonomi di negara berkembang berjalan secara relatif lebih lambat dibandingkan negara maju, yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan untuk memberikan dukungan secara ekonomi kepada masyarakat. Adanya inflasi yang ditimbulkan dari konflik geopolitik semakin memperlebar kemampuan negara dalam memperbaiki kondisi ekonominya. Inflasi ini menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah.

Dengan melihat adanya kecepatan yang berbeda antar negara dalam mengimplementasikan kebijakan terkait perbaikan ekonomi, G20 merasa penting untuk mewujudkan koordinasi antara negara anggota terkait normalisasi kebijakan (*exit strategy*) yang dilakukan. Normalisasi kebijakan yang terencana, terkalibrasi, dan dikomunikasikan dengan baik merupakan hal yang penting untuk meminimalkan efek *spill over* yang mungkin muncul dari normalisasi kebijakan suatu negara ke negara lain.

Koordinasi antar negara anggota G20 sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perbaikan ekonomi yang kuat dan merata pasca pandemi COVID-19. Hal ini senada dengan tema Presidensi G20 Indonesia, *Recover Together Recover Stronger*. Sebagai forum yang menguasai 80% GDP global, G20 mempunyai peran signifikan untuk mewujudkan kestabilan sistem keuangan global dan berupaya meminimalkan ketidakpastian. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan komunikasi yang terjalin dengan baik antar negara-negara anggota dan dengan negara lain.

Pentingnya Mewujudkan Pemulihan Ekonomi dari Pandemi COVID-19 yang Kuat dan Merata

Dibandingkan dengan negara-negara maju, negara-negara berkembang lebih lambat dalam memperbaiki kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19 (World Bank, 2021). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain varian COVID-19 yang masih bermunculan, perbedaan sumber daya dalam melakukan vaksinasi dan penarikan beberapa kebijakan dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Sebagai sebuah krisis yang dipicu masalah kesehatan, upaya vaksinasi memegang peranan penting dalam meredam efek yang ditimbulkan dan membantu mempercepat pemulihan ekonomi. Negara-negara maju yang memiliki akses dan kemampuan untuk menyediakan vaksin kepada warganya akan semakin cepat dalam upaya perbaikan ekonominya. Sedangkan negara-negara berkembang membutuhkan waktu untuk mencukupi kebutuhan vaksinasi untuk warganya. Keterbatasan negara dalam mempertahankan kebijakan dukungan turut serta dalam mempengaruhi upaya pemulihan ekonomi. Dengan sumber daya yang lebih dibandingkan dengan negara-negara berkembang, negara maju dapat mempertahankan kebijakan dukungan lebih lama dan menjaga kondisi ekonominya lebih stabil.

Pasca pandemi COVID-19, banyak negara, terutama negara berkembang, mengalami permasalahan terkait utang yang digunakan sebagai sumber dana untuk memberikan dukungan finansial kepada warganya (IMF, 2022). Permasalahan dari meningkatnya utang pemerintah yang terakumulasi bertambah dengan adanya peningkatan dari pinjaman yang diambil oleh perusahaan swasta untuk menutupi kerugian mereka selama penurunan penjualan selama pandemi (Albrizio et al., 2022). Gabungan permasalahan ini menghadirkan tantangan bagi negara, termasuk peningkatan beban bunga dan penurunan kapasitas fiskal yang tersedia. Keadaan ini diperparah oleh situasi di mana biaya pembiayaan (*financing cost*) yang harus ditanggung oleh negara-negara berkembang mempengaruhi potensi pertumbuhan ekonomi negara

tersebut dalam jangka panjang dan mungkin akan berdampak pada preferensi risiko para investor.

Saat pandemi COVID-19 mulai terkendali, banyak negara mulai mencabut kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung sektor ekonomi. Kapasitas fiskal yang sebelumnya digunakan untuk memberikan dukungan tersebut, kini dialihkan untuk prioritas-prioritas pembangunan lainnya yang sebelumnya tertunda akibat pandemi. Namun, dengan munculnya inflasi dan krisis pangan dan energi akibat konflik geopolitik di Eropa, beberapa negara telah mengambil langkah-langkah baru untuk mengurangi dampak ke ekonomi. Ini termasuk kebijakan penurunan pajak, pemberian subsidi untuk bahan bakar, atau memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga yang membutuhkan.

Dari situasi yang dijelaskan di atas dan mempertimbangkan perlunya untuk menyeimbangkan perbaikan ekonomi, perlu dilakukan koordinasi antar negara, minimal dalam forum G20, agar dapat mewujudkan kestabilan ekonomi global dan meminimalkan munculnya potensi efek luapan negatif lintas batas negara. Selain itu, perlu diantisipasi potensi-potensi gangguan terhadap ekonomi yang dapat terjadi, yang sebelumnya berhasil ditahan oleh stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya, ditariknya kebijakan stimulus pajak atau kredit murah dapat menjadikan sektor swasta menjadi rentan terhadap ketidakpastian global yang masih mungkin terjadi.

Pertimbangan dalam Menentukan *Exit Strategy* Negara-Negara Anggota G20

Untuk meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 ke kondisi ekonomi dan sosial, negara-negara telah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dukungan yang diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat dan usaha yang rentan. Setidaknya terdapat empat instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 ini, yaitu perlindungan sosial dan kesehatan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan keuangan, industri, dan perdagangan (Izvorski, et al., 2020).

Perlindungan sosial dan kesehatan dilakukan dengan membatasi penyebaran virus melalui mekanisme pengetesan dan perawatan masyarakat yang tertular di fasilitas kesehatan atau sarana karantina lainnya, memperluas layanan kesehatan, dan memperkuat dukungan sosial melalui mekanisme penyaluran kas ke rumah tangga yang membutuhkan. Komponen dari kebijakan fiskal termasuk di kebijakan

penambahan anggaran belanja dan tambahan pembiayaan dengan mekanisme utang. Kebijakan moneter dilakukan banyak negara dengan memotong suku bunga dan menambah likuiditas perbankan. Dalam hal kebijakan keuangan, industri, dan perdagangan dilakukan dengan memberikan kelonggaran terhadap pinjaman swasta dalam negeri. Kelonggaran tersebut diberikan dengan prasyarat tertentu yang ketat agar tidak menciptakan ketidakstabilan keuangan di kemudian hari. Kebijakan lain dilakukan dengan, pengurangan persyaratan agunan dan pengurangan pembatasan dan tarif impor.



Dalam agenda G20 Indonesia, negara-negara anggota mengklasifikasikan kebijakan-kebijakan dukungan pemerintah untuk meminimalkan dampak pandemi COVID-19 pada kondisi ekonomi dan sosial menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu kebijakan fiskal dan dukungan untuk pasar tenaga kerja, kebijakan moneter dan dukungan untuk sektor keuangan, dan kebijakan pengaturan nilai tukar mata uang dan kebijakan terkait neraca pembayaran (Hafid et al., 2022). Negara-negara anggota sepakat bahwa bauran kebijakan fiskal dan moneter yang terkalibrasi dengan baik mempunyai peran penting untuk menstabilkan kondisi keuangan.

Dalam pembahasan yang dilakukan, negara-negara anggota G20 telah sepakat bahwa stimulus ekonomi yang diberikan selama pandemi COVID-19 perlu ditarik secara bertahap seiring dengan proses pemulihan ekonomi, yang harus disesuaikan dengan kondisi saat itu.

Dalam upaya memperbaiki ekonomi, penting untuk memiliki bauran kebijakan makroekonomi yang kokoh, di mana semua pihak yang memiliki kewenangan terkait dengan kebijakan tersebut dapat bekerja bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan saat memulai proses penarikan kebijakan stimulus, termasuk evolusi pandemi COVID-19, stabilitas dan pemulihan ekonomi, proyeksi jangka pendek (termasuk indikator-indikator inflasi, kredit, dan likuiditas), kondisi pasar tenaga kerja, dan perkembangan geopolitik. Selain itu, pemerintah juga perlu mencapai keseimbangan yang tepat antara keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah dan pertimbangan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Presidensi G20 Indonesia melakukan survei kepada negara-negara anggota untuk menjabarkan pengalaman dalam menarik kebijakan dukungan dalam upaya perbaikan kondisi ekonomi (Hafid et al., 2022). Berdasarkan survei yang dilakukan kepada delegasi anggota G-20 tersebut, diperoleh beberapa pertimbangan dalam melakukan normalisasi atau penarikan kebijakan dukungan (*exit strategy*) sebagai berikut:

1. ***Exit Strategy*** dari kebijakan terkait pandemi COVID-19 harus memastikan tercapainya tujuan menyeluruh dari pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Tujuan ini mengharuskan pembuat kebijakan untuk menyeimbangkan ruang kebijakan yang tersedia untuk meminimalkan dampak nasional dan global yang merugikan dari kebijakan yang diterapkan, terutama mengingat beberapa negara memiliki ruang kebijakan ekonomi makro yang lebih terbatas.
2. **Negara-negara berada pada tahap pandemi yang berbeda.** Kondisi ini mendorong implementasi kebijakan yang berbeda di negara-negara tersebut dan penentuan waktu yang tepat untuk melakukan *exit strategy*. Beberapa negara mulai kebijakan dukungan pada ekonomi, sementara beberapa lainnya memperluas dukungan kebijakannya dengan mempertimbangkan evolusi pandemi saat ini, kondisi ekonomi global, dan kapasitas yang dimiliki oleh negara tersebut.

3. **Respons kebijakan** baik dari negara maju maupun negara berkembang dapat mengakibatkan *spillover* dan *spillback* ke negara lain. Misalnya, pengetatan moneter di negara maju dapat menimbulkan efek *spillover* ke negara berkembang, sementara kebijakan *lockdown* di negara berkembang dapat memengaruhi gangguan rantai pasokan global.
4. **Keterkaitan antara kebijakan dan *trade-off*** yang berpotensi muncul harus dipertimbangkan saat mengimplementasikan *exit strategy*. Kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan telah diimplementasikan untuk mengatasi dampak langsung dari pandemi. Dalam hal ini, negara-negara anggota G20 menyampaikan bahwa penerapan satu kebijakan perlu mempertimbangkan kebijakan-kebijakan lainnya ketika memutuskan bagaimana dan kapan harus menarik kebijakan dukungan ekonomi. Khususnya, beberapa anggota menyoroti bahwa kebijakan fiskal dan moneter saling melengkapi satu sama lain untuk mempertahankan kondisi ekonomi dari akibat yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, sehingga interaksi antara keduanya akan menentukan dalam menjalankan *exit strategy* yang tepat.
5. Selain melihat perbaikan kondisi dari pandemi COVID-19, banyak negara mempertimbangkan **kondisi perang antara Ukraina dan Rusia** dalam menentukan *exit strategy*. Banyak negara menyebutkan bahwa program dukungan ekonomi kepada kelompok masyarakat yang terdampak sedang ditambahkan untuk mengatasi tantangan akibat perang di Ukraina.

Selain pertimbangan-pertimbangan di atas, Financial Stability Board menegarkan bahwa *exit strategy* perlu menyesuaikan kondisi ekonomi domestik dan menghindari dampak berlebihan pada kondisi pasar keuangan (FSB, 2022). Adanya batasan-batasan ini mungkin menyebabkan ruang gerak untuk mensikronisasi kebijakan *exit strategy* menjadi berkurang. FSB mencontohkan kebijakan yang dikomunikasikan oleh bank sentral di suatu negara mungkin ditanggapi dengan baik oleh para pelaku pasar keuangan, namun bisa ditanggapi berbeda oleh bank sentral di negara-negara lainnya.

Gambar 2.1 Pertimbangan dalam Merumuskan *Exit Strategy*

No	Aspek yang harus dipertimbangkan
1	Tujuan menyeluruh dari pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.
2	Kondisi nasional dalam konteks penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya
3	Risiko terjadinya *spillover* dan *spillback* dan rantai pasokan global
4	Keterkaitan antara kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan serta potensi *trade-off* akibat penerapan *exit strategy*
5	Dampak perang Rusia dan Ukraina bagi masyarakat yang rentan
6	Dampak penerapan *exit strategy* terhadap ekonomi domestik dan pasar keuangan

Sumber: Hafid, 2022; FSB, 2022.

Implementasi *Exit Strategy* Negara-Negara Anggota G20

Negara-negara anggota G-20 menerapkan beragam *exit strategy* dalam upaya untuk mengakhiri kebijakan-kebijakan dukungan yang diberikan selama pandemi COVID-19. Strategi tersebut mempunyai peran penting dalam menjaga transisi yang baik agar kondisi ekonomi terjaga tetap stabil dengan atau tanpa kebijakan dukungan tersebut. Presidensi G20 Indonesia mengumpulkan informasi terkait strategi tersebut dalam survei yang diberikan kepada negara-negara anggota G20 (Hafid et al., 2022). Sebagaimana disampaikan sebelumnya, *exit strategy* yang dilakukan oleh setiap negara berbeda-beda sesuai dengan ragam program atau kebijakan dukungan yang diterapkan dan kondisi ekonomi pada saat *exit strategy* dilakukan.

Negara-negara anggota G20 menerapkan beberapa kebijakan fiskal dan dukungan terhadap pasar tenaga kerja. Adapun kebijakan fiskal yang dilakukan mencakup kebijakan terkait pendapatan dan belanja. Terkait dengan kebijakan pendapatan khususnya perpajakan, sebagian besar negara menerapkan penangguhan pembayaran pajak, perpanjangan pelaporan pajak, dan keringanan pajak untuk sektor-sektor tertentu. Negara maju maupun negara berkembang menurunkan tarif pajak mereka sebagai salah satu kebijakan unggulan dalam merespons dampak pandemi COVID-19 pada kondisi ekonomi. Sebagai contoh, Pemerintah India melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi beban pajak di berbagai sektor, termasuk penundaan batas waktu pelaporan pajak dan kewajiban perpajakan lainnya. Pemerintah India juga mengurangi tingkat bunga denda untuk pelaporan *Goods and Services Tax* yang telat. Langkah-langkah serupa untuk mengurangi beban kepatuhan pajak selama bulan April dan Mei 2021 telah diperkenalkan kembali sebagai respons terhadap lonjakan infeksi yang terbaru (IMF, 2021).

Terkait dengan kebijakan pengeluaran, semua negara telah meningkatkan pengeluaran mereka untuk membiayai program di bidang kesehatan dan di bidang lainnya untuk meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19. Semua negara anggota G20 juga telah menerapkan berbagai kebijakan pengeluaran untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan memberikan perlindungan sosial. Kebijakan unggulan yang paling populer adalah dukungan untuk perusahaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah dan kebijakan jaring pengaman sosial untuk kelompok yang paling rentan (Hafid et al., 2022). Pemerintah Korea Selatan merupakan salah satu negara yang merespons dengan cepat melalui kebijakan perubahan anggaran pada Maret 2020 dengan fokus pada pemberian bantuan untuk dunia usaha, rumah tangga, dan lokal ekonomi yang terdampak atas pandemi COVID-19 (IMF, 2021).

Terkait dengan kebijakan dukungan untuk para tenaga kerja, sebagian besar negara, terutama negara-negara maju menerapkan skema retensi pekerjaan (*job retention*), dukungan upah, dan program pelatihan untuk mempertahankan tingkat pekerjaan. Skema retensi pekerja atau menjaga pekerja tetap memiliki pekerjaan dan dukungan upah serta amandemen undang-undang ketenagakerjaan dipilih sebagai kebijakan unggulan oleh negara-negara anggota. Kebijakan dukungan dilakukan oleh Pemerintah Inggris dengan pemerintah membayar 80 persen dari penghasilan pekerja mandiri (*Self Employment Income Support Scheme*, *SEISS*) dan karyawan yang dirumahkan (*Coronavirus Job Retention Scheme*, *CJRS*) (hingga maksimal £2.500 per karyawan per bulan) awalnya untuk

periode Maret-Mei 2020. Untuk karyawan yang dirumahkan, skema ini diperpanjang hingga akhir Oktober 2020.

Dalam hal kebijakan moneter dan dukungan sektor keuangan, sebagian besar bank sentral di negara-negara maju menerapkan pembelian aset keuangan untuk membantu capaian target inflasi, mendukung kegiatan ekonomi, merelaksasi pengetatan kondisi keuangan, meningkatkan likuiditas, menstabilkan pasar keuangan, dan memberikan tambahan stimulus moneter (Hafid et al., 2022). Sementara itu, sebagian besar negara berkembang dan beberapa negara maju memangkas suku bunga untuk membangkitkan kondisi ekonominya. Di sektor keuangan, mayoritas negara menyediakan skema penjaminan kredit untuk mendukung bisnis dan rumah tangga yang mengalami kesulitan keuangan selama pandemi. Skema penjaminan kredit merupakan kebijakan sektor keuangan yang paling banyak dipilih oleh negara-negara maju, sedangkan pemberian moratorium pinjaman atau penangguhan utang merupakan kebijakan unggulan yang paling banyak dipilih oleh negara-negara berkembang. Berdasarkan penjabaran lebih lanjut dari negara-negara anggota G20 yang menerapkan *exit strategy* untuk kebijakan moneter dan sektor keuangan tersebut, semua kebijakan ditetapkan bersifat sementara, dan beberapa telah diakhiri.

Dalam kaitannya dengan kebijakan terkait nilai tukar dan neraca pembayaran, baik negara maju maupun negara berkembang mengimplementasikan *bilateral swap line* sebagai tindakan pencegahan terhadap tekanan eksternal, sementara beberapa negara lain, terutama negara-negara berkembang, menerapkan intervensi valuta asing atau *Foreign Exchange Intervention* (FXI) melalui penjualan dan penjualan kontrak derivatif (Hafid et al., 2022). Beberapa negara menggunakan langkah-langkah intervensi valuta asing untuk mempertahankan tekanan eksternal dan memperlancar volatilitas nilai tukar. Sementara itu, langkah-langkah terkait manajemen arus modal atau *capital flow management* jarang digunakan, mencerminkan penggunaan kebijakan tersebut dipertimbangkan sebagai upaya terakhir ketika semua kebijakan lain dianggap tidak cukup.

Kebijakan-kebijakan Fiskal dan Dukungan pada Tenaga Kerja

Dalam survei yang diberikan oleh Presidensi G20 Indonesia, beberapa negara menguraikan rencana strategi atau pengalaman dalam mengakhiri kebijakan dukungan yang signifikan selama pandemi (Hafid et al., 2022). Sebagian besar tindakan fiskal terkait COVID-19 diindikasikan bersifat sementara, sementara beberapa kebijakan yang lain bersifat

permanen. Rincian dari kebijakan yang diimplementasikan tersebut sebagai berikut:

1. Kebijakan-kebijakan yang bersifat sementara dan telah ditarik sejak tahun 2020 (31 kebijakan).
2. Kebijakan yang ditarik bertahap dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi (11 kebijakan).
3. Kebijakan dukungan lainnya yang dilanjutkan untuk jangka waktu yang lebih lama (13 kebijakan).

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan negara-negara anggota G-20 dalam mengakhiri kebijakan dukungan selama pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut:

1. **Evolusi pandemi.** Negara-negara anggota mempertimbangkan situasi penyebaran pandemi COVID-19 yang semakin terkendali, dengan adanya vaksinasi, dan kemudian melakukan pelonggaran pembatasan pergerakan dan jarak sosial. Banyak negara anggota G20 menyampaikan bahwa apabila kondisi pandemi COVID-19 terus membaik, dukungan fiskal dan pasar tenaga kerja terkait pandemi akan dihentikan.
2. **Pemulihan dan stabilitas ekonomi.** Pelonggaran pembatasan COVID-19 mendorong pemulihan permintaan dan dimulainya kembali kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang paling terpukul berangsur-angsur membaik sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor tersebut. Negara-negara anggota melonggarkan kebijakan fiskal begitu pertumbuhan ekonomi meningkat yang biasanya terjadi bersamaan dengan peningkatan produktivitas, pemulihan tingkat pendapatan, dan peningkatan konsumsi pribadi.
3. **Prospek jangka pendek.** Negara-negara juga menganalisis prospek jangka pendek berdasarkan indikator yang tersedia - seperti inflasi, likuiditas di pasar, dan kondisi kredit - untuk memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu faktor penentu *exit strategy*.
4. **Situasi Pasar Tenaga Kerja.** Negara juga memantau tingkat pengangguran dan penciptaan lapangan kerja sebagai bagian dari pertimbangan untuk mengimplementasikan penghentian program dukungan.

5. **Perang di Ukraina.** Banyak negara menyampaikan bahwa perang di Ukraina telah meningkatkan ketidakpastian terhadap *exit strategy* dan meningkatkan kebutuhan untuk menyesuaikan kembali *exit strategy*, terutama program-program dukungan yang lebih terarah atau memperpanjang program dukungan ekonomi untuk jangka waktu yang lebih lama.

Detail terkait *exit strategy* di bidang pendapatan (perpajakan), pengeluaran, dan dukungan tenaga kerja diuraikan sebagai berikut.

1. Kebijakan Pendapatan (Perpajakan)

Negara-negara anggota G-20 menerapkan sedikitnya tiga program atau kebijakan terkait dengan perpajakan, yaitu: penangguhan pembayaran pajak, perpanjangan pelaporan pajak, dan keringanan pajak untuk sektor tertentu (Hafid et al., 2022). Baik negara maju maupun negara berkembang memilih pengurangan tarif pajak sebagai respons kebijakan unggulan mereka.

Hampir seluruh negara-negara anggota G20 menerapkan penangguhan pembayaran pajak, di mana 13 negara merupakan negara maju dan 8 negara merupakan negara berkembang. Mayoritas negara-negara tersebut menerapkan penangguhan pembayaran pajak untuk memberikan bantuan keuangan bagi perusahaan, terutama di sektor yang paling terpukul yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas mereka, serta untuk melindungi pekerjaan selama pandemi. Selain penangguhan pembayaran pajak, mayoritas negara anggota juga menerapkan kebijakan perpanjangan Penyampaian Faktur Pajak.

Dalam hal pemberian keringanan beban pajak, 16 negara memberikan keringanan pajak untuk sektor ekonomi tertentu. Sebagai contoh, China memberikan keringanan pajak untuk industri yang tertekan di sektor jasa dengan membebaskan pembayar pajak dari Pajak Pertambahan Nilai atas pendapatan yang diperoleh dari layanan angkutan umum. Spanyol, Turki, Inggris menerapkan diskon pajak, penangguhan utang pajak, dan pembayaran jaminan sosial untuk sektor perhotelan, perdagangan, pariwisata, dan sektor jasa lainnya.

Penurunan tarif pajak merupakan kebijakan unggulan yang paling banyak dipilih karena berimplikasi langsung pada pengurangan kewajiban pajak masyarakat dan bisnis tanpa menimbulkan beban pajak di masa mendatang. Argentina dan Rusia mengurangi tingkat kontribusi jaminan sosial yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

Sementara itu, Turki, dan Inggris mengurangi tarif pajak untuk sektor jasa. Korea mengurangi PPN untuk usaha kecil, dan Singapura mengurangi pajak penghasilan untuk wajib pajak badan. Beberapa negara melakukan kebijakan pembebasan pajak pertambahan nilai, terutama untuk barang medis dan peralatan medis terkait COVID-19 untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan barang yang digunakan untuk perawatan warga yang terinfeksi virus COVID-19.



Langkah-langkah kebijakan lainnya, seperti penangguhan bea masuk dan pajak impor, keringanan pajak penghasilan, pengurangan pajak, kredit pajak, dan pengembalian PPN, semuanya ditujukan untuk mengurangi kesulitan keuangan rumah tangga dan perusahaan.

Pada saat survei dilakukan, negara-negara anggota G-20 berada di posisi yang berbeda dalam hal penarikan kebijakan dukungan terkait perpajakan (Hafid et al., 2022). Negara-negara anggota mempertimbangkan beberapa faktor saat mengakhiri kebijakan dukungan perpajakan sebagai berikut:

1. Beberapa negara menyebutkan bahwa kebijakan unggulan terkait perpajakan berakhir atau akan berakhir setelah kebijakan ruang gerak mulai diperlukan dan permintaan terhadap barang dan jasa kembali ke tingkat yang sehat.
2. Beberapa negara menarik kebijakan dukungan terkait dengan perpajakan secara bertahap dengan mempertimbangkan pemulihan bertahap di beberapa sektor ekonomi yang paling terkena dampak.
3. Beberapa negara tidak berencana untuk mengakhiri beberapa program dukungan di bidang perpajakan. Misalnya, Korea menyampaikan bahwa tarif pengurangan PPN untuk kebijakan pemilik tunggal tidak memiliki tanggal akhir penerapan. Kebijakan pengurangan kontribusi jaminan sosial Rusia akan dipertahankan untuk mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Kebijakan Pengeluaran

Negara-negara maju dan berkembang telah membelanjakan anggaran fiskal mereka untuk banyak kebutuhan kesehatan terkait COVID-19 dan kebutuhan untuk bersiap dan merespons pandemi (*Pandemic Preparedness and Response/PPR*) (Hafid et al., 2022). Selain itu, negara-negara secara luas menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pengeluaran guna mendorong aktivitas ekonomi dan menyediakan jaring pengaman. Program unggulan terkait pengeluaran yang paling banyak dipilih oleh negara-negara anggota adalah dalam bentuk dukungan untuk perusahaan dan UMKM serta tunjangan sosial untuk kelompok yang paling rentan. Negara juga menyediakan paket ekonomi untuk mendukung sektor tertentu dan meningkatkan manfaat sosial bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Antara negara maju dan berkembang memiliki langkah yang berbeda terkait dengan kebijakan fiskal bidang pengeluaran ini. Kebijakan unggulan yang paling populer dipilih oleh negara maju adalah paket ekonomi untuk sektor tertentu yang mencakup rencana pemulihan pertumbuhan ekonomi jangka panjang seperti kebijakan untuk mendukung digitalisasi, ekonomi hijau, pendidikan, dan infrastruktur. Hal ini berbeda dengan negara berkembang yang memprioritaskan kebutuhan jangka pendek seperti respons kesehatan, memberikan manfaat sosial bagi kelompok rentan, dan dukungan bagi bisnis/UMKM. Dengan ruang kebijakan yang relatif lebih terbatas, banyak negara-negara berkembang memilih bantuan tunai sebagai kebijakan utama mereka.

Infeksi COVID-19 yang menyebar dengan cepat telah menunjukkan kesenjangan yang besar dalam layanan kesehatan masyarakat di beberapa negara dan membutuhkan sumber daya yang besar untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Beberapa negara merealokasi pengeluaran ke area prioritas dan menerbitkan obligasi pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan. Sebagai contoh, Indonesia menerima pembiayaan tambahan dari Asian Infrastructure Investment Bank bersama dengan World Bank untuk mendukung upaya pencegahan, pendeteksian, dan merespons penyebaran virus COVID-19 dan memperkuat sistem pelayanan kesehatan (AIIB, 2021).

Untuk mendukung sektor-sektor tertentu yang berdampak pada ketahanan ekonomi jangka panjang, baik negara maju maupun negara berkembang meningkatkan pengeluaran mereka untuk paket ekonomi untuk sektor-sektor tertentu. Paket ekonomi ini

berisi investasi untuk sektor tertentu sebagai bagian dari rencana pemulihan jangka panjang. Dalam konteks ini, Uni Eropa mengadopsi *Recovery and Resilience Facility* (RRF), sebuah instrumen pemulihan sementara untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial dari pandemi COVID-19, sekaligus untuk lebih mempersiapkan negara anggota Uni Eropa untuk transisi yang adil, digital, dan hijau. Spanyol menerapkan rencana pemulihan dengan berinvestasi dalam proyek yang berkontribusi pada transisi ekologis, transformasi digital, kohesi sosial dan teritorial, serta kesetaraan gender. Italia juga mengimplementasikan serangkaian proyek investasi di bidang infrastruktur, digitalisasi, transisi ke ekonomi hijau, dan kebijakan pasar tenaga kerja. Arab Saudi meluncurkan beberapa inisiatif investasi besar dalam proyek industri, pusat logistik, dan sektor pariwisata untuk memperdalam kompleksitas ekonominya dan meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan di masa depan.

Sebagian besar negara memberikan dukungan kepada kelompok yang paling terkena dampak melalui tunjangan sosial bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan kelompok rentan. Bentuk dari kebijakan-kebijakan ini antara lain: tunjangan anak, tunjangan kehamilan, bantuan darurat untuk penduduk dengan pendapatan minimum, dan peningkatan dukungan bagi penyandang disabilitas dan kelompok marjinal. Selain itu, mayoritas negara memberikan bantuan tunai, ditujukan untuk kelompok rentan dan juga dapat dikategorikan sebagai tunjangan sosial untuk keluarga berpenghasilan rendah dan kelompok rentan.

Untuk menjaga keberlangsungan usaha bisnis, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), banyak negara menghabiskan sumber daya melalui fasilitas pembiayaan/kredit, pengurangan kontribusi pemberi kerja, dan hibah bisnis untuk biaya operasional tetap atau revitalisasi. Selain untuk bisnis, negara juga memberikan bantuan untuk mendukung tenaga kerja, terutama melalui dukungan upah, melalui pemberian subsidi upah. Selain itu, anggota G20 juga melakukan kebijakan dalam hal penegasan peraturan yang mengurangi kemungkinan pekerja diputus hubungan kerjanya.

Terkait dengan implementasi *exit strategy*, beberapa negara telah melakukan penghentian beberapa kebijakan pengeluaran, mengurangi secara bertahap kebijakan tersebut, dan beberapa mempertahankan kebijakan yang dilakukan (Hafid et al., 2022).

1. Beberapa negara menghentikan atau secara bertahap mengurangi bantuan tunai, tunjangan pengangguran, dukungan upah, dan dukungan bisnis berdasarkan pencapaian target vaksinasi yang terkait dengan dimulainya kembali kegiatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Beberapa dukungan bisnis secara bertahap akan disesuaikan saat pendapatan dari sektor tertentu pulih dan diganti dengan dukungan yang lebih ditargetkan untuk membangkitkan kembali aktivitas bisnis dan pengaktifan kembali pasar tenaga kerja. Sebagai contoh, Singapura mengakhiri dukungan upahnya dan berfokus pada skema lain yang mendorong perekrutan, restrukturisasi bisnis, dan peningkatan keterampilan.
2. Beberapa tindakan dukungan untuk keuntungan bisnis dan sosial bagi kelompok rentan yang diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap COVID-19 telah ditarik pada tahun 2021 (Korea) dan 2022 (Inggris, UEA). Sementara negara lain, seperti Meksiko, saat ini belum mempertimbangkan untuk keluar dari dukungan terkait pandemi kepada kelompok rentan.
3. Paket ekonomi untuk sektor tertentu yang mencakup kebijakan untuk mendorong pemulihan jangka panjang akan dipertahankan selama beberapa tahun. Misalnya, Italia akan melanjutkan *National Resillience and Recovery Plan* (NRRP) hingga tahun 2026.



3. Dukungan untuk pasar tenaga kerja

Sebagian besar negara melakukan skema untuk mempertahankan pekerjaan dan pemberian dukungan upah. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi pengurangan jam kerja, pengurangan kontribusi sosial, subsidi upah, subsidi jaminan sosial, dan pinjaman kepada pemberi kerja. Skema untuk mempertahankan pekerjaan dengan kebijakan dukungan upah juga dipilih sebagai kebijakan unggulan anggota G20 di bidang ketenagakerjaan. Spanyol menerapkan dukungan komprehensif untuk pekerja yang mencakup pengurangan jam kerja, pembebasan perusahaan dari kontribusi jaminan sosial, perlindungan pekerja dari pembayaran substitusi upah, serta inisiatif pelatihan.

Beberapa negara menetapkan pembatasan sementara dalam pemutusan perjanjian kerja. Beberapa kebijakan dukungan tersebut memerlukan perubahan dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Selain kebijakan-kebijakan di atas, beberapa negara menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pekerja agar sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan digitalisasi. Sebagai contoh, Singapura dan Indonesia menerapkan paket dukungan perekrutan yang melibatkan program pelatihan keterampilan. Langkah yang sama dilakukan oleh Uni Eropa dengan mengimplementasikan program *The EU Next Generation* yang menyediakan pelatihan bagi pekerja, mendukung realokasi sektoral melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang pekerja.

Penyebaran infeksi COVID-19 dan proses pemulihan sektor-sektor tertentu menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam menarik kebijakan dukungan tenaga kerja (Hafid et al., 2022). Penjelasan lebih lanjut dari pertimbangan yang dilakukan oleh anggota G-20 adalah sebagai berikut:

1. Penyebaran infeksi COVID-19 dan pelonggaran pembatasan COVID-19 menentukan aktivitas ekonomi dan dimulainya kembali bisnis. Ketika perusahaan dan bisnis dibuka kembali, pasar tenaga kerja mulai pulih. Oleh karena itu, pemulihan pasar tenaga kerja menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan saat mempertimbangkan keluar dari dukungan pasar tenaga kerja. Sebagian besar dukungan pasar tenaga kerja bersifat sementara dan ditargetkan akan dihentikan secara bertahap pada tahun 2020, 2021, dan 2022.

2. Pemulihan sektor-sektor tertentu (misalnya ritel, katering, pariwisata, penerbangan sipil, transportasi, akomodasi, makanan dan jasa, seni dan hiburan) yang relatif lambat dibandingkan sektor lain juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan ketika secara bertahap dihapus atau dipertahankan untuk jangka waktu yang lebih lama.
3. Beberapa dukungan dapat diperpanjang berdasarkan ketersediaan ruang fiskal dan penilaian negara terhadap kondisi ekonomi yang berlangsung.

Kebijakan Moneter dan Dukungan pada Sektor Finansial

Terkait dengan kebijakan di bidang moneter dan sektor finansial, sebagian besar negara mengurangi besaran kebijakan moneter secara keseluruhan dan menghentikan kebijakan sektor keuangan yang diterapkan sebagai respons kebijakan pandemi (Hafid et al., 2022). Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menarik kebijakan dukungan di bidang ini di antaranya kondisi inflasi dan tingkat likuiditas.

1. Kebijakan-Kebijakan Moneter dan Makroprudensial

Negara-negara melakukan kebijakan moneter ekspansif melalui program pembelian aset dan kebijakan penurunan suku bunga untuk mendukung aktivitas ekonomi dan mencegah penurunan harga-harga di bawah target dalam jangka menengah. Mereka juga menerapkan langkah-langkah makroprudensial yang akomodatif untuk membantu bank mendukung aliran keuangan yang berkelanjutan ke ekonomi riil. Selain itu, negara juga melakukan program pembelian aset keuangan dan memangkas suku bunga untuk menambah likuiditas keuangan di pasar uang.

Selain langkah moneter, kebijakan makroprudensial juga ditempuh untuk membantu sektor keuangan mendukung kesinambungan aliran kredit ke ekonomi riil dengan tetap memperhatikan potensi risiko sistemik. Kebijakan tersebut meliputi perubahan rasio cadangan wajib, pengurangan modal yang dipertahankan oleh bank dalam bentuk *Countercyclical Capital Buffer* dan *Capital Concervation Buffer*, serta perubahan rasio *Debt-to-Income* (DTI) dan *Loan-to-Value* (LTV).

Selain kebijakan-kebijakan tersebut, beberapa negara mengimplementasikan kebijakan moneter dan makroprudensial yang tidak konvensional dan baru diperkenalkan pada saat pandemi COVID-19, seperti:

- Di Indonesia, otoritas kebijakan moneter melakukan relaksasi Rasio Intermediasi Makroprudensial (*Macroprudential Intermediation Ratio*), meningkatkan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (*Macroprudential Liquidity Buffer*), dan penerbitan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
- Di Turki, kebijakan yang dilakukan adalah dengan mengamankan aliran kredit tanpa hambatan (*uninteruppted flow*) ke sektor korporasi dan perusahaan eksportir; memperkenalkan Rasio Aset untuk mempercepat injeksi kredit.
- Pemerintah Argentina memberikan pembiayaan luar biasa ke Kementerian Keuangan selama pandemi dan penangguhan pembagian dividen lembaga keuangan.

Berikut disampaikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menarik kebijakan dukungan di bidang moneter:

1. Bank sentral perlu memantau tingkat inflasi dalam mengambil kebijakan moneter yang tepat, di mana dalam situasi kondisi inflasi berada pada target yang ditentukan, bank sentral dapat menghentikan kebijakan dukungan yang diberikan.
2. Pembukaan kembali ekonomi melalui pelonggaran kebijakan pembatasan ruang gerak akan mendorong aktivitas ekonomi dan memperbaiki kondisi pasar tenaga kerja. Kebijakan dukungan moneter dapat ditarik dengan mempertimbangkan perbaikan kondisi ekonomi dan pertumbuhan tingkat upah tenaga kerja.
3. Negara-negara juga memantau ketidakseimbangan keuangan sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan saat menentukan kebijakan moneter. Kebijakan dukungan moneter dapat ditarik ketika stabilitas keuangan terjaga.
4. Negara-negara memantau perkembangan perbaikan indikator likuiditas dan perlambatan kebutuhan likuiditas di sistem keuangan, terutama pada kebijakan terkait Giro Wajib Minimum, pembelian aset keuangan, dan langkah-langkah pendukung likuiditas lainnya.

2. Langkah-Langkah Sektor Keuangan

Mayoritas negara-negara anggota menyediakan skema penjaminan kredit untuk mendukung bisnis dan rumah tangga yang rentan terhadap tekanan keuangan (Hafid et al., 2022). Di negara maju, kebijakan unggulan yang paling banyak dipilih adalah skema penjaminan kredit, sedangkan untuk negara berkembang kebijakan unggulan yang paling banyak dipilih adalah pemberian moratorium pinjaman/penangguhan utang.

Negara-negara G20 memberikan jaminan kredit untuk mendukung perusahaan yang terkena dampak pandemi, khususnya UMKM. Kebijakan ini dilakukan dengan memberi fasilitas kepada badan usaha melalui institusi perantara keuangan (*financial intermediaries*). Insentif yang disampaikan tersebut bertujuan untuk menambah likuiditas badan usaha sehingga mereka mampu melanjutkan operasinya. Terkait dengan pelunasan utang, negara mengijinkan untuk menangguhkan pembayaran pokok dan bunga bagi debitur yang memenuhi syarat terutama pada tahap awal pandemi.

Di masa pandemi, negara-negara mengimplementasikan kebijakan untuk mendukung pemberian pinjaman oleh lembaga keuangan, termasuk pengurangan persyaratan *capital buffer*. Banyak jenis *capital buffer* yang dilonggarkan seperti *countercyclical capital buffer*, penyangga stabilitas domestik (*domestic stability buffer*), atau penyangga sistemik (*systemic buffer*). Pengurangan *capital buffer* dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan bank dalam mengantisipasi kerugian yang berpotensi terjadi dan tetap mampu menyalurkan kredit.

Dalam menarik kebijakan dukungan di sektor keuangan, negara-negara G20 mempertimbangkan beberapa faktor penting.

1. Negara-negara G20 melihat kondisi kesehatan ekonomi dalam menyesuaikan kebijakan khususnya terkait kebijakan *countercyclical buffer*. Pada saat kondisi ekonomi lemah selama pandemi, persyaratan penyangga dilonggarkan untuk menguatkan peran perbankan dalam menjaga kestabilan ekonomi.
2. Kondisi keuangan di level rumah tangga juga menjadi perhatian dalam menarik kebijakan dukungan. Dukungan untuk hipotek perumahan di beberapa negara ditentukan berdasarkan penurunan pendapatan rumah tangga dan akan dihentikan setelah terdapat peningkatan pendapatan.

3. Pada situasi kondisi keuangan perusahaan dan UMKM membaik, negara-negara akan mulai menarik kebijakan dukungan kredit yang diberikan. Banyak negara juga telah memutuskan kelanjutan kebijakan dukungan untuk perusahaan dan UMKM berdasarkan kasus per kasus.

3. *Exchange Rate* and *Balance of Payment Related Measures*

Pada saat survei disampaikan kepada para negara anggota G20, enam negara dari seluruh negara anggota G20 menanggapi pertanyaan sikap kebijakan keseluruhan tentang nilai tukar dan langkah-langkah terkait neraca pembayaran. Tiga negara berkembang menyebutkan bahwa keseluruhan kebijakan nilai tukar dan neraca pembayaran telah dicabut. Satu negara maju secara bertahap keluar dari langkah-langkah terkait nilai tukar dan neraca pembayaran. Satu negara maju dan satu berkembang menggunakan langkah-langkah terkait nilai tukar dan neraca pembayaran dan mereka belum keluar dari kebijakan tersebut.

Langkah-langkah intervensi valuta asing telah digunakan oleh beberapa anggota, sedangkan langkah-langkah manajemen arus modal lebih jarang digunakan. Tujuh negara menggunakan langkah-langkah intervensi valuta asing, sementara satu negara menggunakan langkah-langkah manajemen arus modal. Mayoritas negara yang menggunakan langkah-langkah ini adalah negara berkembang yang posisi eksternalnya terkena dampak pandemi. Kebijakan terkait dengan nilai tukar dan neraca pembayaran hanya digunakan jika diperlukan. Ini diterapkan pada langkah-langkah kebijakan seperti CFM, jalur kredit valuta asing, operasi repo, dan penjualan kontrak spot/derivatif.

Tindakan Manajemen Aliran Modal

Kebijakan terkait manajemen aliran modal dilakukan untuk membatasi volatilitas arus modal dan mengurangi risiko keuangan sistemik yang berasal dari pergerakan arus tersebut (Hafid et al., 2022). Kebijakan ini dilakukan untuk mengamankan ruang kebijakan moneter. Terkait dengan kebijakan ini, Argentina menerapkan batasan pembelian valuta asing dan persyaratan pembayaran luar negeri sebelum krisis COVID-19 dan menyesuaikan langkah-langkah tersebut sebagai bagian dari respons terhadap guncangan. Kebijakan tersebut membantu meningkatkan efektivitas respons kebijakan *countercyclical* selama pandemi, sekaligus menjaga ruang kebijakan moneter.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan saat keluar dari langkah-langkah manajemen arus modal adalah normalisasi pasar utang internasional dan pertumbuhan ekspor yang kuat.

Kebijakan Terkait Intervensi Nilai Tukar dan Neraca Pembayaran (*Balance of Payment*)

Terkait upaya menjaga nilai tukar, beberapa negara (baik negara maju maupun negara berkembang) membentuk fasilitas *bilateral swap line* dan intervensi valuta asing (Hafid et al., 2022). Selain itu, negara-negara menerapkan intervensi valuta asing melalui penjualan kontrak spot dan derivatif, pertukaran valuta asing, operasi repo obligasi negara dalam mata uang internasional, dan peningkatan cadangan valuta asing. Tindakan pertukaran valuta asing lainnya termasuk pembelian obligasi pemerintah di pasar sekunder.

Mengingat volatilitas nilai tukar, banyak negara berkembang melakukan intervensi valuta asing selama pandemi dalam bentuk intervensi di pasar spot. Beberapa negara maju melakukan kebijakan yang sama, yaitu intervensi di pasar valuta asing untuk meredam tekanan apresiasi yang berlebihan.

Intervensi di pasar valuta asing ditentukan oleh situasi nilai tukar dan likuiditas valas, yang dapat dinilai melalui pemantauan pendanaan dolar AS, kredit dolar AS harian, penawaran-permintaan pasar uang asing, dan perkembangan kondisi moneter secara keseluruhan.



Pentingnya Komunikasi Efektif dalam Koordinasi *Exit Strategy* untuk Memitigasi *Negative Spillover*

Komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan atas kebijakan yang diadopsi merupakan hal yang penting dalam memengaruhi ekspektasi publik. Selain mengarahkan ekspektasi publik, komunikasi kebijakan yang baik akan meningkatkan kredibilitas dari pembuat kebijakan (End & Hee Hong, 2022). Dalam kaitannya dengan penarikan kebijakan dukungan selama pandemi COVID-19, komunikasi penting tidak hanya untuk internal suatu negara, namun juga penting bagi pengambil kebijakan negara lain. Komunikasi telah terbukti menjadi elemen penting dalam pengambilan kebijakan selama pandemi ini. Informasi yang jelas dan tepat waktu kepada berbagai khalayak (termasuk lembaga pemerintah/publik terkait lainnya) telah berperan penting dalam menjamin sebanyak mungkin harapan para pelaku ekonomi (FSB, 2022).

Negara-negara G20 menyadari pentingnya peran komunikasi dalam implementasi *exit strategy*, khususnya terkait perubahan kebijakan menyesuaikan dengan kondisi penyebaran virus COVID-19 yang bergerak fluktuatif (Hafid et al., 2022). Negara-negara menekankan pentingnya mengkomunikasikan penilaian kondisi ekonomi dan keuangan dan persyaratan kondisi yang tepat untuk menarik kebijakan dukungan. Otoritas terkait perlu menyampaikan informasi yang jelas terkait kebijakan yang diambil, alasan dibalik diambilnya kebijakan tersebut, dan tujuan, serta harapan yang diinginkan. Informasi terkait kapan kebijakan direalisasikan serta kemungkinan risiko dan spillover yang mungkin, perlu untuk disampaikan dengan baik.

Banyak negara berkembang terutama menekankan pentingnya komunikasi dan keterbukaan dalam mengurangi potensi dampak negatif yang mungkin terjadi saat mengakhiri langkah-langkah dukungan (FSB, 2022). Negara-negara tersebut juga menggunakan informasi yang disampaikan untuk memastikan keselarasan dalam tindakan kebijakan. Contohnya, beberapa negara secara publik mengumumkan tujuan dan jadwal waktu langkah-langkah dukungan segera setelah diperkenalkan agar pihak-pihak yang terlibat dapat memahami tujuan kebijakan dan bersiap saat kebijakan dukungan dihentikan. Ini juga memberikan fleksibilitas kepada pemerintah pada saat memiliki opsi untuk memperpanjang langkah-langkah tersebut jika diperlukan.

Dengan tidak samanya perjalanan perbaikan kondisi ekonomi setiap negara, hal ini dapat dapat meningkatkan risiko *negative spillover* dan menekankan pentingnya kebijakan untuk mengendalikan dampak negatif tersebut (FSB, 2022). Langkah-langkah ini bukan dimaksudkan untuk melakukan sinkronisasi seluruh penarikan kebijakan yang dilakukan dikarenakan setiap penarikan kebijakan perlu untuk memperhatikan kondisi dan kebutuhan dalam negeri setiap negara.

Negative spillover yang paling banyak muncul berasal dari kebijakan moneter dan dukungan likuiditas pasar, yang memengaruhi pasar modal, arus modal, dan nilai tukar (FSB, 2022). Meskipun pihak berwenang pada umumnya menetapkan kebijakan sesuai dengan mandat domestik mereka dan kondisi ekonomi domestik, dampak luar dan kembali (*spillbacks*) dapat menjadi pertimbangan yang relevan, terutama jika kebijakan-kebijakan tersebut memengaruhi kondisi domestik. Efek negatif yang sama mungkin muncul dari penarikan kebijakan dukungan keuangan, seperti penghentian jaminan pemerintah atas pinjaman bisnis yang dapat memengaruhi kondisi modal perbankan. Untuk itu, koordinasi dan pertukaran informasi pada level internasional penting untuk menjadi pertimbangan dalam penarikan kebijakan.

Forum multilateral seperti G20 memerankan peran penting sebagai sarana mengkomunikasikan kebijakan antar negara. Komunikasi yang baik memberikan signal yang positif kepada masyarakat global terkait upaya bersama dalam menangani krisis (Hafid et al., 2022).

Penutup

Kecepatan pemulihan ekonomi di berbagai negara di seluruh dunia bervariasi, tergantung pada sumber daya yang tersedia, pelaksanaan kebijakan kesehatan, dan penerapan kebijakan pembatasan mobilitas penduduk. Mengamati perbedaan kecepatan ini dalam menerapkan tindakan perbaikan ekonomi, G20 menganggap penting untuk mengoordinasikan langkah-langkah penarikan kebijakan antara negara-negara anggotanya. Koordinasi di antara negara-negara anggota G20 menjadi sangat penting untuk mencapai pemulihan ekonomi yang kuat dan merata setelah pandemi COVID-19. Ini sejalan dengan tema Presidensi G20 Indonesia, yang berfokus pada "*Recover Together, Recover Stronger.*"

Negara-negara G20 mempertimbangkan beberapa faktor saat merencanakan untuk mengakhiri kebijakan dukungan untuk menjaga kondisi ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Pertama, negara-

negara ingin memastikan bahwa penarikan kebijakan mendukung pencapaian tujuan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Kedua, karena negara-negara berada pada tahap pandemi yang berbeda, hal ini menyebabkan implementasi kebijakan yang berbeda antar negara, dan berakibat pada penentuan waktu yang tepat untuk menarik kebijakan. Ketiga, negara-negara G20 menyadari bahwa kebijakan yang diimplementasikan oleh negara maju dan negara berkembang dapat memberikan dampak pada negara lain dalam bentuk *spillover* dan *spillback*. Keempat, negara-negara G20 harus mempertimbangkan *trade-off* yang mungkin muncul antara kebijakan yang mereka implementasikan dan dampaknya. Kelima, kondisi perang antara Ukraina dan Rusia perlu untuk dipertimbangkan ketika mereka merencanakan *exit strategy* mereka, selain melihat perbaikan kondisi seputar pandemi COVID-19.

Komunikasi memerankan peran penting dalam meminimalkan *negative spillover* yang berpotensi muncul dari penarikan kebijakan dukungan, terutama kebijakan dalam bidang moneter dan keuangan. Negara-negara menyoroti pentingnya menyampaikan dengan jelas kebijakan yang mereka ambil, menguraikan alasannya, serta menjelaskan tujuan dan harapan yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut. Meskipun otoritas kebijakan pada umumnya menentukan langkah-langkah mereka berdasarkan mandat yang bersifat nasional dan memprioritaskan kondisi ekonomi dalam negeri, dampak negatif keluar (*negative spillover*) tetap harus menjadi pertimbangan yang relevan.

Referensi

AIIB. (2021). "Indonesia: Emergency Response to COVID-19 Program - Additional Financing." https://www.aiib.org/en/projects/details/2021/approved/Indonesia-Emergency-Response-to-COVID-19-Program-Additional-Financing.html

Albrizio, S., Das, S., Koch, C., Natal, J.-M., dan Wingender, P. (2022). "Private Debt to Weigh on Global Economic Recovery." https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/04/18/blog04182022-weo-ch2-sm22

End, N., dan Hee Hong, G. (2022). "Trust What You Hear: Policy Communication, Expectations, and Fiscal Credibility," WP/22/36, February 2022. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/02/18/Trust-What-You-Hear-Policy-Communication-Expectations-and-Fiscal-Credibility-513163

Financial Stability Board/FSB. (2022). "Exit Strategies to Support Equitable Recovery and Address Effects from COVID-19 Scarring in the Financial Sector: Interim report." Http://www.fsb.org/emailalert

Hafid, I. S., Harun, C. A., Abdurochman, Sahminan, Handayani, D. E., Yusuf, A., Shabrina, M. S., Permata, G., Bathaluddin, M. B., Wijoseno, A. R., Utama, G., Kuntoaji, P., Parulian, F., dan Novianti, D. A. (2022). *G20 Presidency Note on Policy Setting on Exit Strategy to Support Recovery and Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth.*

International Monetary Fund/IMF (2021. *"Policy Responses To COVID-19. Policy Responses To COVID-19."* https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#I

International Monetary Fund/IMF (2022). "Debt Dynamics. Crisis Upon Crisis". https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2022/in-focus/debt-dynamics/

Izvorski, I., Mahajan, S., Moorty, L., dan Vincelette, G. A. (2020). "A Policy Framework for Mitigating the Economic Impact of COVID-19. https://www.brookings.edu/articles/a-policy-framework-for-mitigating-the-economic-impact-of-covid-19/

World Bank. (2021). *"The Global Economy: on Track for Strong but Uneven Growth as COVID-19 Still Weighs."* https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/06/08/the-global-economy-on-track-for-strong-but-uneven-growth-as-covid-19-still-weighs



BAB 3

Scarring Effect: Dampak Jangka Panjang dari Pandemi pada Ekonomi Global

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah mengguncang ekonomi global dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu fenomena yang terjadi sebagai akibat dari pandemi adalah *scarring effect*. *Scarring effect* adalah istilah yang digunakan dalam ilmu ekonomi untuk menggambarkan dampak jangka panjang dari krisis atau peristiwa ekonomi yang merusak terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi suatu negara atau wilayah. Istilah ini merujuk pada efek negatif yang dapat bertahan lama dan mempengaruhi berbagai sektor ekonomi dan masyarakat secara luas.

Pandemi COVID-19 telah menciptakan krisis ekonomi dan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan dampak mendalam di seluruh dunia. Sebagai respons terhadap pandemi dan dampak negatifnya, negara-negara di seluruh dunia telah mengambil tindakan luar biasa dalam bentuk dukungan fiskal, moneter, dan regulasi untuk melindungi individu dan bisnis yang paling terdampak.

Pertemuan G20 menjadi platform yang penting untuk membahas dampak jangka panjang dari pandemi ini, terutama dalam konteks *scarring effect*. Pada tahun 2022, Indonesia memegang presidensi G20, sebuah forum yang terdiri dari 20 negara anggota terbesar di dunia. Sebagai tuan rumah G20, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memimpin diskusi dan mengoordinasikan kebijakan ekonomi antara negara-negara anggota. Dalam konteks G20, penting untuk membahas *scarring effect* karena berbagai negara anggota mungkin telah mengalami krisis atau peristiwa ekonomi yang merusak sebelumnya. Dampak jangka panjang dari krisis semacam itu dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mereka dan menimbulkan tantangan yang kompleks.

Sebagai Presidensi G20 pada tahun 2022, Indonesia dapat memimpin diskusi dan upaya kolaboratif untuk mengurangi dampak jangka panjang dari krisis ekonomi dan mencari solusi yang berkelanjutan. Ini bisa melibatkan kebijakan pemulihan ekonomi yang disusun secara hati-hati, investasi dalam sektor yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, dan peningkatan kerjasama internasional dalam hal pertukaran informasi dan pengalaman.

Selain itu, penting juga untuk membahas bagaimana negara-negara anggota G20 dapat melindungi sektor-sektor vital ekonomi mereka dari *scarring effect*. Misalnya, sektor pendidikan dan kesehatan dapat menjadi prioritas dalam upaya pemulihan untuk memastikan bahwa investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia dan kesejahteraan

masyarakat tetap terjaga.

Dalam menghadapi *scarring effect*, penting juga untuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan inklusi sosial. Upaya pemulihan ekonomi harus mencakup langkah-langkah yang mempromosikan pertumbuhan yang inklusif, mengurangi kesenjangan sosial, dan melindungi lingkungan. Hal ini sesuai dengan keberlanjutan dan inklusi sosial yang menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan global.

Dampak *Scarring Effect*

Secara umum, telah banyak penelitian yang mencari tahu dampak negatif dari *scarring effect*, diantaranya:

1. Tingkat pengangguran yang meningkat.

   Salah satu dampak utama dari *scarring effect* adalah peningkatan tingkat pengangguran yang berkelanjutan. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan peningkatan drastis dalam pengangguran di seluruh dunia. Menurut International Monetary Fund (IMF), tingkat pengangguran global mencapai puncaknya selama pandemi dan menghasilkan pengangguran jangka panjang yang signifikan (IMF, 2021).

   Dampak jangka panjang dari pengangguran adalah penurunan keterampilan dan produktivitas pekerja. Individu yang menganggur untuk jangka waktu yang lama cenderung kehilangan keterampilan yang relevan untuk pasar tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Blanchard & Summers, 2020)

2. Kerugian produktivitas

   Scarring effect juga memengaruhi produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Selama pandemi, pembatasan mobilitas, penutupan bisnis, dan gangguan rantai pasokan telah merusak produktivitas di berbagai sektor. Sektor manufaktur, layanan, dan industri lainnya mengalami penurunan produksi yang signifikan (Kose, Ohnsorge, & Sugawara, 2020).

   Kerugian produktivitas ini dapat berlanjut dalam jangka panjang jika tidak ada tindakan yang diambil untuk memulihkan sektor-sektor yang terkena dampak. Kurangnya investasi dalam teknologi dan inovasi juga dapat menghambat kemampuan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (Jones & White, 2022).

3. Kesenjangan yang semakin tinggi

Scarring effect dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi di berbagai tingkat. Selama pandemi, sektor-sektor tertentu seperti pariwisata, perhotelan, dan ritel mengalami kerugian yang lebih besar daripada sektor lainnya. Masyarakat yang bekerja dalam sektor-sektor ini, yang seringkali terdiri dari pekerja berpendapatan rendah, telah menderita dampak ekonomi yang lebih besar (Oxfam, 2022).

Kesenjangan ekonomi ini dapat memperdalam divisi sosial dan meningkatkan ketidaksetaraan pendapatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, adalah penting bagi negara-negara dan lembaga internasional untuk merancang kebijakan yang berfokus pada redistribusi dan pemberdayaan ekonomi yang lebih luas (Aiyar, Berg, & Hussain, 2021).

Perang di Ukraina memberikan tekanan tambahan pada ekonomi global dan perdagangan dengan memperparah tekanan inflasi (terutama pada harga makanan dan energi) dan memperlambat aktivitas ekonomi. Inflasi yang meningkat, harga makanan dan energi yang lebih tinggi, gangguan rantai pasokan, munculnya varian baru COVID-19, dan konsekuensi ekonomi dari perang di Ukraina telah menciptakan tantangan besar dalam pemulihan ekonomi global.

Gambar 3.1. Dampak Pandemi-COVID-19 pada Kapital, Tenaga Kerja dan Produktivitas

	Sektor	Dampak
1	**Pasar tenaga kerja** Terganggunya pasar tenaga kerja dapat mengurangi jumlah dan kualitas input tenaga kerja	Periode tanpa kerja yang berkepanjangan dapat membuat sebagian orang keluar dari angkatan kerja, sehingga mengurangi pasokan tenaga kerja atau mengikis sumber daya pekerja. Pemulihan ekonomi yang lambat dapat meningkatkan prelavensi pekerjaan informal yang berpendapatan rendah dengan produktivitas rendah dan akses jaringan pengaman yang terbatas. Kelompok kerja seperti angkatan kerja baru menjadi rentan terhadap kemunduran.

2	**Pendidikan** Terganggunya proses pembelajaran berdampak buruk pada kualitas sumber daya manusia di beberapa decade ke depan	Penutupan sekolah dapat memperlambat pembentukan kapital sumber daya manusia yang berkualitas, dan berdampak pada angkatan kerja dengan tingkat keterampilan yang lebih rendah. Meningkatnya angka kemiskinan, kerawanan pangan dan buruknya akses layanan kesehatan dapat memperbesar kurangnya keterampilan.
3	**Korporasi** Kerentanan sektor korporasi dapat berakibat pada investasi kapital yang lebih rendah	Turunnya keuntungan dan utang yang membengkak termasuk kondisi keuangan yang semakin ketat dapat menghambat investasi. Jika kerugian investasi tersebut tidak diperoleh kembali dalam masa pemulihan, ketersediaan kapital dan produktivitas akan terus berkurang.
4	**Dukungan Kebijakan** Pengaturan kebijakan yang kurang optimal dapat menahan realokasi sumber-sumber dan membebani produktivitas	Dukungan kebijakan yang tidak tepat sasaran dapat menahan kapital dan tenaga kerja di *perusahaan zombie*, serta menghambat realokasi investasi ke perusahaan-perusahaan dengan produk margin yang lebih tinggi. Terlalu sedikit dukungan kebijakan di masa krisis juga dapat menyebabkan kebangkrutan bisnis-bisnis yang produktif secara luas.

Sumber: IMF, 2022: 5-6

Upaya G20 dalam Mengatasi *Scarring Effect*

Pertemuan G20, yang melibatkan para pemimpin ekonomi terbesar di dunia, telah memegang peran sentral dalam menghadapi tantangan ekonomi global, terutama dampak jangka panjang dari pandemi COVID-19 yang dikenal sebagai *scarring effect*. G20 telah berupaya merumuskan secara komprehensif langkah-langkah dan upaya konkret yang telah diambil oleh G20 untuk mengatasi *scarring effect* dan merestorasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya ini mencakup investasi dalam pendidikan dan keterampilan, reformasi struktural, dukungan bagi sektor terdampak, serta kerja sama internasional yang luas.

Presidensi G20 Indonesia telah berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh anggota G20 dan organisasi-organisasi internasional untuk memajukan kerja sama ekonomi yang efektif dan saling menguntungkan dalam menghadapi tantangan bersama yang dihadapi oleh perekonomian dunia, dengan tujuan *recover together, recover stronger*. Meskipun pemulihan dari pandemi terus berlangsung, kecepatannya relatif lambat dalam menghadapi berbagai tantangan global yang terus berlanjut, yang kemungkinan akan mengganggu proses keluar dari pandemi.

Pada bulan Februari 2022, menteri-menteri keuangan dan gubernur-gubernur bank sentral G20 (FMCBG) menugaskan *Framework Working Group* (Kelompok Kerja Kerangka Kerja G20/FWG) untuk merumuskan agenda ke depan yang tertuang dalam Rencana Aksi G20 (G20 Presidency, 2022). Penugasan tersebut bertujuan untuk menjaga pemulihan dan mengarahkan perekonomian global menuju pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif melalui pengembangan strategi-strategi keluar yang bersifat sukarela dan tidak mengikat (*non-binding*) untuk mendukung pemulihan dan mengatasi efek samping sehingga pertumbuhan tetap terjaga dan berlanjut di masa depan.

Survei kemudian didistribusikan oleh Presidensi Indonesia dalam G20 kepada anggota G20, peserta undangan, dan organisasi internasional pada akhir Februari 2022. Selain anggota G20, beberapa negara peserta undangan dan organisasi internasional turut serta dalam survei ini. Survei mencakup kebijakan yang diterapkan setelah pandemi hingga batas waktu pengiriman survei pada tanggal 22 April 2022.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa anggota G20 telah mengambil tindakan luar biasa untuk meredakan dampak langsung pandemi dan mendukung pemulihan. Tindakan kebijakan meliputi dukungan fiskal

dan pasar tenaga kerja, dukungan sektor keuangan dan moneter, serta kebijakan nilai tukar dan neraca pembayaran.

Kebijakan fiskal dan moneter telah terbukti penting untuk menstabilkan pasar keuangan dan mencegah krisis COVID-19 menciptakan luka yang lebih parah. Kombinasi kebijakan ini harus disesuaikan dengan baik, dengan kebijakan moneter tetap berjalan normal, sementara inflasi tetap terkendali. Kebijakan fiskal digunakan untuk mendukung rumah tangga dan perusahaan sambil beralih dari dukungan umum ke pendekatan yang lebih terarah.

Dalam mengimplementasikan dukungan kebijakan, anggota G20 sepakat bahwa negara-negara G20 harus menarik stimulus kebijakan selama pemulihan, dengan tetap bersiaga dalam menghadapi situasi ekonomi yang berkembang. Pada tahap ini, negara-negara G20 perlu memastikan campuran kebijakan makroekonomi yang solid sebagai strategi kunci di mana berbagai otoritas dapat efektif beroperasi bersama-sama dalam mencapai mandat mereka masing-masing.

Beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh negara-negara saat keluar dari dukungan kebijakan adalah perkembangan pandemi, pemulihan dan stabilitas ekonomi, prospek jangka pendek (termasuk indikator inflasi, kredit, dan likuiditas), situasi pasar tenaga kerja, dan perkembangan geopolitik. Ke depannya, penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara keberlanjutan fiskal jangka menengah dan pertimbangan stabilisasi. Strategi pengurangan utang yang berhasil harus berfokus pada konsolidasi fiskal, kualitas dan komposisi keuangan publik, serta mendorong pertumbuhan. Dukungan yang ditargetkan untuk rumah tangga dan perusahaan yang rentan harus dirancang untuk membatasi dampak tekanan inflasi, termasuk dari efek putaran kedua. Investasi dan reformasi untuk mengarahkan transisi hijau dan digital dapat mengurangi dampak guncangan pada PDB dengan mendukung pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka menengah hingga panjang.

Selain itu, meskipun secara umum disepakati bahwa pandemi akan menciptakan luka jangka panjang, sejauh mana luka ini akan bervariasi antar dan dalam negara-negara dengan luka yang lebih besar diharapkan di negara-negara berkembang akibat keterbatasan ruang kebijakan mereka dan kondisi yang ada sebelum pandemi. Pandemi juga telah menyebabkan dampak ekonomi yang lebih negatif secara proporsional bagi beberapa sektor dan kelompok yang rentan. Ini merupakan tantangan untuk memastikan pemulihan yang adil dan menghindari akumulasi ketidakseimbangan. Kebijakan ke depan harus mengidentifikasi strategi

untuk mengatasi efek luka dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Hasil survei juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional untuk mendukung keluaran yang aman dari pandemi COVID-19 dan mengatasi dampak jangka panjang dari pandemi tersebut. Banyak negara menyebutkan bahwa kerja sama internasional dalam bidang kesehatan (termasuk akses ke vaksin) dan pembukaan kembali perbatasan secara bertahap untuk menghidupkan kembali perdagangan sangat penting.

Hasil survei ini dapat menjadi sumber belajar dari krisis COVID-19 dan meningkatkan daya tahan di masa depan serta membangun fondasi yang kokoh untuk menghadapi guncangan mendatang. Dalam konteks memberikan referensi terkait tanggapan kebijakan makroekonomi untuk mengatasi krisis potensial dan semua implikasi kebijakan untuk mengatasi krisis, catatan ini menyajikan bagian khusus tentang menghadapi krisis masa depan, dengan menyoroti beberapa area kunci yang perlu diperhatikan saat menghadapi krisis yang muncul. Ini mencakup aspek seperti identifikasi awal sumber krisis, tanggapan kebijakan yang tepat waktu, strategi keluar dari tindakan kebijakan jangka pendek, mengatasi efek samping dan membangun yang lebih kuat, implementasi campuran kebijakan, komunikasi yang jelas dan tepat waktu, serta kerja sama internasional.

Gambar 3.2. Rekomendasi Kebijakan untuk Mengatasi *Scarring Effect*

No	Kebijakan yang direkomendasikan IMF	Aksi kongkrit
1	Tindakan cepat untuk memulihkan pembelajaran	Dalam konteks sekolah masih tutup akibat pandemi, diperlukan kebijakan untuk melindungi kesehatan dan pembelajaran siswa-siswa sekolah; Begitu sekolah sudah kembali dibuka, asesmen dampak pandemi terhadap pendidikan harus dibuat dan remediasi harus segera dimulai; Dalam jangka panjang, peningkatan ketahanan sistem pendidikan dapat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap pandemi di masa depan.
2	Hindari hambatan realokasi investasi dan segera atasi penurunan investasi	Dukungan kebijakan harus dikurangi untuk mengatasi hambatan realokasi, sambil mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari kegagalan perusahaan yang luas dan kemerosotan investasi

3	Kebijakan fiskal dan reformasi struktural untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas	Langkah-langkah fiskal untuk membantu meningkatkan produktivitas swasta jangka panjang dan investasi kapital dengan: 1). Memberikan insentif pada riset dan pengembangan (R&D) swasta; 2). Melaksanakan investasi publik untuk melengkapi inovasi swasta. Reformasi struktural seperti reformasi pasar produk dan fleksibilitas undang-undang perlindungan tenaga kerja diperlukan untuk meningkatkan investasi. Reformasi yang berorientasi pada pertumbuhan untuk menciptakan peluang kerja dengan tetap menjamin tingkat upah minimum yang layak dan melonggarkan pasar produk dan tenaga kerja yang tidak berdasar.
4	Melengkapi upaya domestik dengan aksi multilateral	Upaya bersama untuk mengakhiri pandemi global dan investasi dalam kesehatan global diperlukan untuk meminimalkan *scarring effects* yang lebih parah. Menciptakan lingkungan global yang kondusif bagi pertumbuhan, dengan dukungan bagi negara-negara berkembang dalam rangka membantu upaya mitigasi *scarring effects* yang luas

Sumber: IMF, 2022: 19-22.

Capaian G20 di bawah Presidensi Indonesia

Pertemuan G20 di Indonesia pada tahun 2022 telah menghasilkan serangkaian komitmen dan tindakan konkret untuk mengatasi *scarring effect*:

1. Investasi dalam pendidikan dan keterampilan

Salah satu pendekatan utama yang telah diambil oleh G20 adalah meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan keterampilan yang relevan adalah kunci untuk memastikan bahwa individu yang telah kehilangan pekerjaan mereka selama pandemi dapat kembali ke pasar tenaga kerja dengan lebih cepat dan efektif (Smith & Johnson, 2022).

Investasi dalam pendidikan melibatkan alokasi sumber daya yang lebih besar untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan,

terutama dalam bidang-bidang yang berpotensi memberikan keterampilan yang relevan untuk ekonomi pasca-pandemi. Selain itu, pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja juga menjadi fokus utama. Ini mencakup program-program pelatihan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh sektor-sektor ekonomi yang sedang tumbuh, seperti teknologi informasi, energi terbarukan, dan keahlian digital.

2. **Reformasi struktural**

Upaya besar telah dilakukan untuk mengimplementasikan reformasi struktural dalam regulasi ekonomi dan perpajakan. Tujuan utamanya adalah memulihkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang mungkin menghambat pemulihan (Jones & White, 2022).

Reformasi struktural ini mencakup berbagai aspek kebijakan, termasuk penyederhanaan regulasi bisnis, peningkatan efisiensi sektor publik, dan perubahan dalam kebijakan perpajakan. Misalnya, pengurangan birokrasi dan percepatan proses perizinan dapat membantu mendorong investasi dan inovasi di sektor swasta. Pembaruan perpajakan yang mempertimbangkan perubahan ekonomi pasca-pandemi juga menjadi penting untuk memastikan sistem perpajakan yang berkelanjutan.

3. **Dukungan bagi sektor terdampak**

G20 berkomitmen untuk memberikan dukungan ekonomi kepada sektor-sektor yang terdampak paling parah oleh pandemi, seperti sektor pariwisata, perhotelan, dan ritel. Sektor-sektor ini telah mengalami kerugian yang signifikan selama pandemi, dan pemulihan mereka menjadi kunci untuk mengatasi *scarring effect* secara efektif (Brown & Davis, 2022).

Dukungan ekonomi ini mencakup pengembangan paket stimulus yang dirancang khusus untuk sektor-sektor tersebut. Stimulus ini dapat berupa insentif pajak, subsidi upah, atau bantuan langsung kepada perusahaan dan pekerja dalam sektor-sektor yang terdampak. Tujuannya adalah untuk memastikan kelangsungan operasi bisnis, pemeliharaan lapangan kerja, dan pemulihan aktivitas ekonomi.

4. **Kerja sama internasional**

Selain langkah-langkah domestik, G20 juga aktif dalam kerja sama

internasional dalam pertukaran pengetahuan dan sumber daya untuk menghadapi dampak jangka panjang dari pandemi secara bersama-sama. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, seperti pertukaran data, koordinasi kebijakan ekonomi, dan bantuan teknis kepada negara-negara yang membutuhkan (IMF, 2022).

Kerja sama internasional juga penting dalam memastikan distribusi vaksin COVID-19 yang adil di seluruh dunia, karena pandemi belum berakhir dan vaksinasi yang merata merupakan bagian integral dari pemulihan ekonomi global. G20 berkomitmen untuk mendukung inisiatif vaksinasi global seperti COVAX untuk memastikan akses yang adil dan merata terhadap vaksin.



Scarring effect adalah tantangan serius yang dihadapi oleh ekonomi global pasca pandemi COVID-19. Pertemuan G20 di Indonesia pada tahun 2022 telah menggarisbawahi urgensi untuk mengatasi dampak jangka panjang ini. Dengan langkah-langkah seperti investasi dalam pendidikan, reformasi struktural, dukungan sektor-sektor terdampak, dan kerja sama internasional, G20 berharap dapat meminimalkan dampak jangka panjang pandemi ini dan memacu pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, upaya mengatasi *scarring effect* adalah tugas yang kompleks dan membutuhkan kerja sama aktif dari semua negara anggota G20. Dalam menjalankan perannya sebagai pemegang Presidensi G20 pada tahun 2022, Indonesia memiliki kesempatan untuk memimpin dialog, memfasilitasi kerjasama, dan memperjuangkan solusi yang berkelanjutan dalam menghadapi *scarring effect*, sehingga memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan kesejahteraan dan menciptakan kondisi yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi negara-negara anggota. Indonesia dapat menjadi motor penggerak dalam mempromosikan dialog, kerja sama, dan tindakan konkret dalam mengatasi *scarring effect* di tingkat global.

Gambar 3.3. Capaian G20 dalam Mengatasi *Scarring Effect*

No	Capaian	Tujuan
1	Investasi dalam pendidikan dan keterampilan melalui alokasi sumber daya yang lebih besar	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama dalam bidang-bidang yang berpotensi memberikan keterampilan yang relevan untuk ekonomi pasca-pandemi serta pelatihan-pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar
2	Reformasi struktural dalam regulasi ekonomi dan perpajakan	Memulihkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang mungkin menghambat pemulihan
3	Dukungan bagi sektor terdampak paling parah oleh pandemi, seperti sektor pariwisata, perhotelan, dan ritel dengan stimulus yang berupa insentif pajak, subsidi upah, atau bantuan langsung kepada perusahaan dan pekerja dalam sektor-sektor yang terdampak	Memastikan kelangsungan operasi bisnis, pemeliharaan lapangan kerja, dan pemulihan aktivitas ekonomi.

4	Kerja sama internasional dalam pertukaran data, koordinasi kebijakan ekonomi, dan bantuan teknis kepada negara-negara yang membutuhkan	Memastikan distribusi vaksin COVID-19 yang adil di seluruh dunia, karena pandemi belum berakhir dan vaksinasi yang merata merupakan bagian integral dari pemulihan ekonomi global

Sumber: Smith & Johnson, 2022; Jones & White, 2022; Brown & Davis, 2022; IMF, 2022.

Kerja sama dengan Lembaga-lembaga Internasional

Sebagai bagian dari upaya mengatasi *scarring effect*, G20 perlu memperkuat hubungan dengan lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan World Trade Organization (WTO). Kolaborasi dengan lembaga-lembaga ini akan memungkinkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mengatasi *scarring effect*.

Indonesia juga dapat mengadvokasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di tingkat global. Ini mencakup promosi investasi dalam sektor-sektor yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor energi terbarukan, industri digital, dan industri kreatif. Selain itu, Indonesia dapat memperjuangkan kebijakan yang melindungi pekerja dan kelompok rentan dari dampak *scarring effect*, termasuk perlindungan sosial yang memadai dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan.

Dalam konteks G20, Indonesia juga menginisiasi upaya pemulihan ekonomi yang berfokus pada pengurangan kesenjangan sosial dan regional. Hal ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur yang memadai di daerah terpinggirkan, dukungan untuk sektor informal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta program inklusi keuangan yang memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman dan terjangkau.

Selain itu, Indonesia memanfaatkan peran presidensi G20 untuk mempromosikan keterlibatan aktif pemuda dalam upaya mengatasi *scarring effect*. Pemuda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dan inovasi dalam membangun ekonomi yang tangguh dan inklusif.

Melalui dialog, pertemuan pemuda G20, dan program pertukaran pemuda, Indonesia mendorong partisipasi dan kontribusi pemuda dalam merumuskan solusi untuk mengatasi *scarring effect*.

Penutup

Penting bagi Indonesia untuk menjaga kesinambungan upaya mengatasi *scarring effect* setelah berakhirnya presidensi G20 tahun 2022. Negara ini dapat meningkatkan kerjasama regional dan global dalam mengumpulkan dan membagikan data, mengembangkan indikator kinerja, dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan.

Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan, Indonesia telah memainkan peran penting dalam mengatasi *scarring effect* dalam konteks G20. Melalui kerjasama aktif antara negara-negara anggota, lembaga internasional, dan masyarakat sipil, diharapkan langkah-langkah yang efektif dapat diambil untuk mempercepat pemulihan ekonomi, meminimalkan dampak jangka panjang, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Referensi

Aiyar, S., Berg, A., dan Hussain, M. S. (2021). "The Scarring Effects of COVID-19 on the Global Economy." IMF Blog.

Blanchard, O., & Summers, L. H. (2020). "Economic Effects of the COVID-19 Crisis: An Overview." *Journal of Policy Modelling*, 42(5), 891-897.

G20 Presidency. (2022) "G20 Presidency Note on Policy Setting on Exit Strategy to Support Recovery and Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth"

International Monetary Fund/IMF. (2021). "The Scarring Effects of COVID-19 on the Global Economy. IMF Blog."

International Monetary Fund/(IMF (2022a). "Global Economic Outlook and Policy Priorities: A G20 Update."

International Monetary Fund/IMF (2022b). "G-20 Background Note On Minimizing Scarring From The Pandemic." April 2022. https://www.imf.org/-/media/Files/Research/imf-and-g20/2022/g20-minimizing-scarring-from-the-pandemic.ashx

Jones, P., dan White, L. (2022). "Structural Reforms and Economic Recovery: Lessons from the Pandemic." *Economic Policy*, 37(109), 121-157.

Kose, M. A., Ohnsorge, F., dan Sugawara, N. (2020). "The Global Economic Outlook During the COVID-19 Pandemic: A Changed World." *World Bank Policy Research Working Paper*, (9246).

OECD. (2022). "Structural Reform Priorities in the Wake of COVID-19."

Oxfam. (2022). "Oxfam Inequality Report 2022."

Smith, J., dan Johnson, R. (2022). "Investing in Skills and Education for Post-Pandemic Economic Recovery." *Global Economic Review*, 51(1), 34-51.

UNWTO. (2022). "Tourism Recovery Tracker: COVID-19."

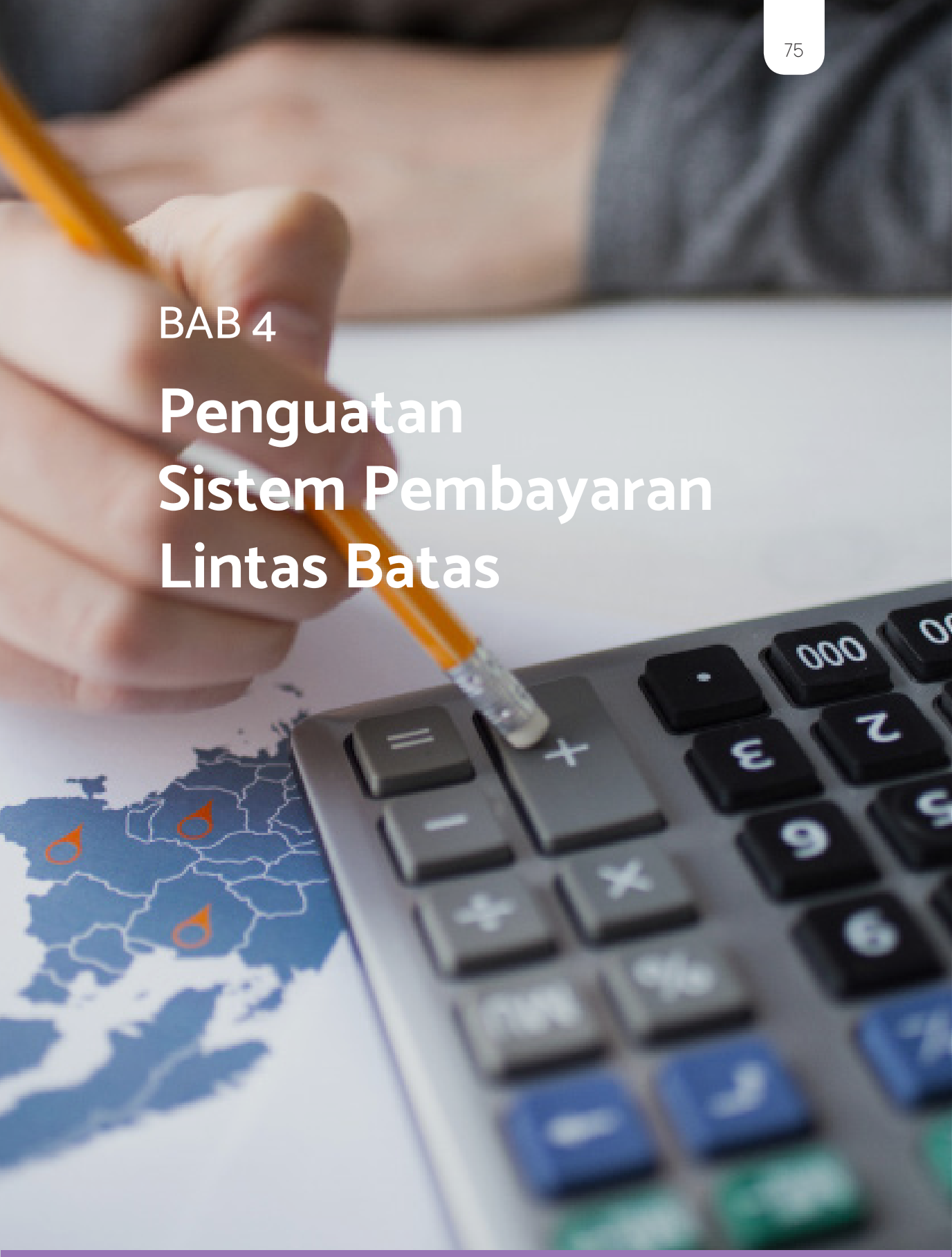
WHO. (2022). "COVID-19: Pandemic Recovery Lessons Learned and Way Forward."

World Bank. (2022). "Education and Training for a Post-Pandemic World."



BAB 4

Penguatan Sistem Pembayaran Lintas Batas



Pendahuluan

Sistem pembayaran lintas batas negara (*cross-border payment*) merupakan salah satu agenda prioritas G20 yang telah dibahas secara intensif terutama sejak 2020 di bawah Presidensi Arab Saudi. G20 melihat isu pembayaran lintas batas ini sebagai agenda prioritas yang penting untuk membuat pembayaran menjadi lebih cepat, murah, transparan dan inklusif, dengan tetap mempertahankan keamanan. Kecepatan pembayaran lintas batas ini memberikan keuntungan pada masyarakat luas, pelaku bisnis dan mendukung pertumbuhan ekonomi global, perdagangan internasional dan inklusi keuangan. Isu ini secara khusus menjadi perhatian *Financial Stability Board* (FSB) yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional terkait seperti *Committee on Payment and Market Infrastructure* (CPMI), *Bank for International Settlement* (BIS) dan lembaga-lembaga pemeringkat internasional.

Sebagai hasil pembahasan tersebut, telah diluncurkanlah peta jalan penguatan sistem pembayaran lintas batas negara (*Roadmap for Enhancing Cross-border Payments*) pada KTT G20 di Riyadh tahun 2020 (FSB, 2023). Peta jalan tersebut bersifat komprehensif, dengan perencanaan yang cermat, tetapi tetap fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kemajuan yang dicapai terkait perkembangan lanskap pembayaran lintas-batas.

Banyak hal yang telah dibahas sejak peta jalan diadopsi di tahun 2020. Selama dua tahun pertama, fokus FSB adalah membangun fondasi peta jalan, lembaga-lembaga internasional yang mendukung peta jalan tersebut, standar internasional, data nasional dan regional yang ada, penggunaan sistem pembayaran, unsur-unsur layanan dan skema pembayaran, penggunaan skema pembayaran, *interlinking* (saling terhubung) di antara sistem-sistem pembayaran, hingga dimensi desain internasional mata uang digital bank sentral (*Central Bank Digital Currency*/CBDC). FSB juga mempublikasikan laporan kemajuan yang dicapai dari peta jalan tersebut di setiap tahunnya.

Sebagai pemegang presidensi G20 di tahun 2022, Indonesia berkomitmen untuk memasukan isu pembayaran lintas batas negara sebagai sebagai salah satu agenda prioritas G20 di Jalur Keuangan (*Finance Track*) (Bank Indonesia, 2022a). Presidensi Indonesia memberikan perhatian terhadap pentingnya kerja sama internasional untuk memperkuat pembayaran lintas batas dalam konteks meningkatnya digitalisasi ekonomi dan finansial. Kerja sama internasional juga diperlukan untuk mengakselerasi inklusi ekonomi

dan keuangan, remitansi, perdagangan ritel dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan dukungan pembayaran lintas batas yang cepat, terjangkau, transparan dan mudah diakses bagi semua orang.

Di bawah Presidensi Indonesia, G20 mengeksplorasi inisiatif *interlinking* sistem-sistem pembayaran yang komprehensif dengan melakukan harmonisasi protokol pertukaran data dan memantau hasil implementasi peta jalan pembayaran lintas batas. Isu pembayaran lintas batas ini mendukung tema utama Presidensi Indonesia: *Recover Together Recover Stronger*.

Bab ini secara khusus memaparkan pembahasan isu pembayaran lintas batas negara di G20 di bawah Presidensi Indonesia. Pertama dipaparkan urgensi diangkatnya isu pembayaran lintas batas sebagai salah satu agenda prioritas G20 di jalur keuangan G20. Bab ini kemudian memaparkan peran Bank Sentral dan layanan pembayaran di era digital dan sistem pembayaran saat ini untuk mendapatkan gambaran tentang latar belakang pentingnya pembahasan sistem pembayaran lintas batas negara dimasukan sebagai salah satu agenda prioritas di G20. Bab ini kemudian memaparkan kesiapan Indonesia untuk mengembangkan sistem pembayaran lintas batas dengan penyusunan *Blue Print* (cetak biru) pembayaran lintas batas negara.

Urgensi Pembahasan Sistem Pembayaran di bawah Presidensi G20 Indonesia

Presidensi Indonesia memiliki alasan kuat yang mendasari diangkatnya isu sistem pembayaran lintas batas sebagai salah satu agenda prioritas G20 di tahun 2022. Urgensi pertama terkait dengan digitalisasi ekonomi yang semakin meningkat dengan terjadinya pandemi COVID-19. Kerja sama digitalisasi sistem pembayaran lintas batas yurisdiksi (*cross border payment*) diperlukan untuk mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. Pembahasan tentang pembayaran digital di G20 bertujuan untuk dapat menurunkan biaya dan mempercepat, serta memperluas akses pasar yang baik, sekaligus membuat sistem pembayaran semakin mudah diakses masyarakat secara lebih cepat. Pembayaran lintas batas yang cepat, terjangkau, transparan dan aman dapat mendukung digitalisasi ekonomi dan keuangan.

Presidensi Indonesia meyakini bahwa kerja sama dalam sistem pembayaran lintas batas negara dapat mempercepat dan memperkuat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 (Bank Indonesia, 2022a).

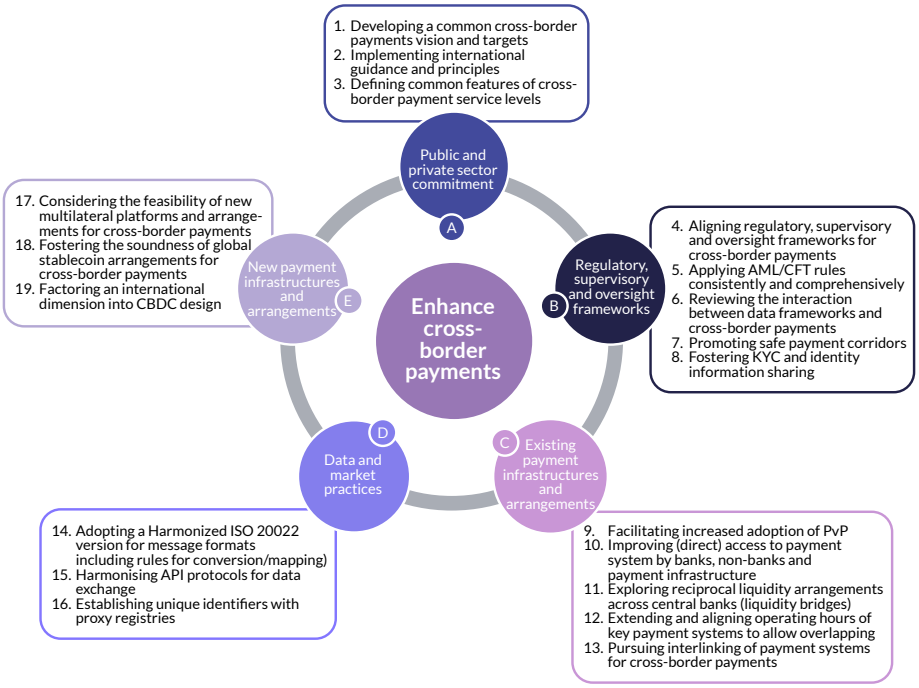
Masuknya isu sistem pembayaran sebagai agenda prioritas G20 juga didasarkan pertimbangan terkait terjadinya perubahan sistem pembayaran yang signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Perubahan tersebut didorong oleh inovasi, perkembangan teknologi dan tuntutan perlunya pembayaran lintas batas yang lebih efisien. Presidensi Indonesia mengakui tantangan-tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan pembayaran yang efisien, di antaranya adalah biaya tinggi, lambatnya kecepatan sistem pembayaran yang ada, dan tidak memadainya transparansi. Untuk itu diperlukan terobosan teknologi supaya sistem pembayaran dapat menjadi lebih efisien, berbiaya rendah, terjangkau dan transparan.



Presidensi Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan inisiatif global yang telah disepakati G20 di bawah Presidensi Arab Saudi di tahun 2020 dengan melanjutkan pembahasan tentang Peta Jalan Pembayaran Lintas Batas G20 sebagai pedoman untuk membangun konektivitas sistem pembayaran. Pembahasan fokus pada pengembangan *interlinking* (saling keterhubungan) di antara sistem-sistem pembayaran secara komprehensif, termasuk melalui harmonisasi protokol pertukaran data dan pemantauan implementasi peta jalan yang telah disepakati G20 di tahun 2020 tersebut.

Presidensi Indonesia mendorong kerja sama sistem pembayaran di Bank Sentral dengan mengeksplorasi inisiatif dikembangkannya *Central Bank Digital Currency* (CBDC). Pembahasan tentang isu ini mencakup bagaimana CBDC dapat menjadi alat pembayaran yang sah di suatu negara. Penerbitan CBDC baik oleh negara maupun melalui kerja sama dengan pihak swasta menjadi perhatian G20. Pembahasan juga melihat bagaimana CBDC mendukung tugas-tugas bank sentral di bidang moneter sektor keuangan sistem pembayaran dan mendukung tugas bank sentral untuk tetap melayani tumbuhnya perekonomian.

Gambar 4.1 Fokus Area dan Isu-Isu dalam Penguatan Pembayaran Lintas Batas



Sumber: FSB (2022). G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments. Consolidated Progress Report for 2022.

Pembahasan CBDC juga dipandang penting untuk mendukung inklusi ekonomi dan keuangan melalui kerja sama di sistem pembayaran lintas batas negara. Diharapkan UMKM dapat memanfaatkan sistem pembayaran ini sehingga usaha mereka dapat terus berkembang. Gagasan yang dibahas dalam hal ini adalah pemanfaatan pembayaran digital seperti QRIS yang dapat mendukung digitalisasi UMKM. Pembahasan CBDC terkait pula dukungan bagi inisiatif pembiayaan berkelanjutan, termasuk mendukung sektor riil yang lebih hijau.

Inisiatif Indonesia mendapatkan dukungan kuat dari para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 dalam serangkaian pertemuan Menteri-menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) yang diselenggarakan di bawah Presidensi Indonesia.

Pada pertemuan FMCBG yang pertama di bulan Februari 2022, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 bersepakat untuk menerima isu pembayaran lintas batas negara sebagai agenda prioritas

dalam Jalur Keuangan G20 (2022a). Pembahasan diarahkan pada sistem pembayaran di era digital untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas yang lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan lebih inklusif karena sistem ini memberikan manfaat yang luas bagi perekonomian di seluruh dunia. *Roadmap* G20 untuk meningkatkan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, lebih murah, aman, dan inklusif. Presidensi Indonesia juga menyoroti pentingnya implementasi peta jalan di tingkat regional dan mendukung inisiatif Indonesia untuk memperkuat kerja sama pembayaran lintas batas melalui rencana penandatanganan perjanjian umum tentang Konektivitas Pembayaran di antara Bank Sentral ASEAN-5.

Pada pertemuan FMCBG ketiga di Bali, 16 Juli 2022, G20 berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan keuangan global jangka panjang, dengan memantau risiko peningkatan volatilitas aliran modal, dampak negatif, dan kondisi pasar yang tidak merata (G20, 2022b). Untuk meningkatkan ketahanan keuangan global, menteri-menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 mempertimbangkan secara seksama dan hati-hasil hasil tinjauan lengkap terhadap *IMF Institutional View (IV) on Liberalization dan Capital Flow Management*, tindakan lanjutan pada operasionalisasi Kerangka Kerja Kebijakan Terintegrasi IMF, dan Kerangka Kerja Stabilitas Makro-Finansial BIS.

Dalam pertemuan FMCBG ketiga tersebut, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral menyambut baik hasil diskusi lanjutan tentang Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC). CBDC dirancang untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas sambil menjaga stabilitas sistem moneter dan keuangan internasional. Para menteri keuangan juga mendorong pembahasan inisiatif *G20 TechSprint 2022* yang diusulkan *BIS Innovation Hub*. Inisiatif bersama antara Presidensi G20 Indonesia dengan *BIS Innovation Hub* melalui *TechSprint 2022* bertujuan untuk berkontribusi dalam perumusan solusi praktis dan layak untuk mengimplementasikan CBDC (Kementerian Keuangan, 2022).

Dalam pertemuan FMCBG tersebut, *BIS Committee on Payments and Market Infrastructures* (CPMI) memberikan laporan tentang *interlinking* sistem pembayaran dan peran APIs. Para menteri-menteri keuangan juga mendengarkan laporan bersama oleh CPMI, BIS Innovation Hub, IMF, dan World Bank terkait opsi akses dan interoperabilitas CBDC untuk pembayaran lintas batas. Mereka menyambut baik penyelesaian tahap kedua Inisiatif Kesenjangan Data (DGI-2). Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 juga berkomitmen untuk mengatasi tantangan tersisa yang teridentifikasi (G20, 2022b).

Pada pertemuan FMCBG keempat, menteri-menteri keuangan dan bank sentral G20 menyambut CBDC sebagai instrumen pembayaran lintas batas sejalan dengan penguatan integritas dan stabilitas sistem keuangan dan moneter internasional (G20, 2022c). G20 berkomitmen terus menjajaki kemungkinan penggunaan CBDC untuk melakukan pembayaran lintas negara sejalan dengan penguatan integritas dan stabilitas sistem keuangan dan moneter internasional. G20 menyambut baik pembahasan lebih lanjut tentang pembentukan sistem pembayaran interkoneksi serta pengembangan akses CBDC dan opsi interoperabilitas untuk metode pembayaran tersebut. Forum multilateral juga berkomitmen untuk memajukan implementasi *Roadmap* G20 untuk Meningkatkan Pembayaran Lintas Batas dalam mewujudkan pembayaran yang lebih cepat, lebih murah, transparan, dan inklusif. Pembahasan dalam pertemuan FMCBG juga berpusat pada progres implementasi regulasi dan pengawasan beberapa isu sektor keuangan, antara lain aset pasar Crypto, keberlanjutan ekonomi inklusif, dan literasi keuangan digital.

Di masa Presidensi G20, Indonesia mengakselerasi kerja sama konkret dalam penerapan sistem pembayaran QR dengan negara-negara ASEAN (Bank Indonesia: 2022b). Kerja sama digitalisasi pembayaran dan sistem pembayaran lintas batas telah menjadi agenda prioritas pertemuan gubernur-gubernur bank sentral ASEAN pada bulan April 2022. Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan banyak pilihan bagi masyarakat ASEAN dalam melakukan transaksi pembayaran lintas batas dan sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi, dan mendorong penguatan stabilitas makro ekonomi melalui penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral.

Sebagai tindak lanjut inisiatif dalam ASEAN tersebut, pada bulan Agustus 2022, Bank Indonesia dan Bank of Thailand bersepakat untuk meluncurkan *QR payment linkage* di antara kedua negara dengan melibatkan 76 pelaku usaha yang siap memanfaatkan sistem pembayaran tersebut. Kerjasama ini memungkinkan pengguna dari Indonesia dan Thailand dapat memanfaatkan aplikasi pembayaran seluler dengan memindai *Kode QR Thailand* dan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Bank Indonesia juga mengeksplorasi peningkatan kerja sama dengan Bank of Thailand dengan menghubungkan sistem pembayaran cepat, BI-Fast Indonesia ke *Prompt Pay* Thailand. Kerja sama ini dapat memungkinkan layanan transfer dana lintas batas secara *real-time* kepada para pekerja migran, ekspatriat dan UMKM.

Gubernur-gubernur bank sentral ASEAN juga menjajagi perluasan kerja sama implementasi pembayaran regional. bank sentral di antara negara-negara anggota. Gubernur-gubernur bank sentral dari ASEAN-5 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina menandatangani *General Agreement on Payment Connectivity between ASEAN-5 Central Banks* di sela-sela KTT ASEAN pada November 2022.

Peran Utama Bank Sentral dalam Mengembangkan Sistem Pembayaran di Era Digital

Fungsi vital dari sektor keuangan adalah menyediakan cara yang efisien yang dapat dipakai oleh rumah tangga dan perusahaan untuk melakukan dan menerima pembayaran. Sistem pembayaran yang sehat dan berfungsi dengan baik dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sistem pembayaran saat ini dibangun di atas struktur dua tingkat yang disediakan oleh bank sentral bersama dengan bank umum (BIS, 2020a). Bank sentral memainkan peran penting dengan memastikan kepercayaan pada uang sebagai barang publik utama yang penting dalam perekonomian secara luas, sementara itu sektor swasta memimpin inovasi dalam melayani publik. Pasokan bank sentral merupakan media paling aman untuk menyelesaikan transaksi grosir dan eceran, sementara bank komersial memasok sebagian besar instrumen pembayaran ritel.

Selama beberapa dekade terakhir, sistem pembayaran telah mengalami transformasi yang radikal. Metode dan sistem pembayaran terus dikembangkan dari yang bersifat tatap muka secara konvensional menjadi sistem digital. Peran penting bank sentral dalam sistem pembayaran semakin meningkat termasuk dalam mengatasi tantangan-tantangan baru yang muncul di era digital. Bank sentral memainkan peran utama dalam meletakkan fondasi yang kuat yang dapat mendukung kreativitas dan inovasi-inovasi sektor swasta dalam melayani masyarakat. Sektor publik memainkan peran dalam mempromosikan interoperabilitas, menetapkan standar atau memastikan arena permainan yang *fair* dan kompetitif.

Bank sentral secara aktif membuat kebijakan untuk mengatasi kekurangan yang ada dalam sistem pembayaran konvensional dalam upaya memastikan bahwa rumah tangga dan pelaku bisnis memiliki akses ke opsi-opsi pembayaran yang aman dan efisien. Penerbitan CBDC merupakan salah satu opsi pembayaran yang mencerminkan perubahan besar dalam sistem pembayaran. Penerbitan CBDC menawarkan alat pembayaran digital yang baru, aman, terpercaya, dan dapat diakses

secara luas. Penerbitan CBDC dapat mendorong persaingan di antara sektor swasta, menetapkan standar keselamatan yang tinggi, dan bertindak sebagai katalis untuk keberlanjutan inovasi dalam pembayaran, keuangan dan perdagangan pada umumnya.

Dalam konteks pergeseran permintaan, teknologi dan pendatang baru yang cepat, rumah tangga dan bisnis memerlukan sistem pembayaran yang lebih aman dan lebih cepat. Harapan pada pembayaran dengan fasilitas yang sepenuhnya digital dan *real time* baik secara *online* atau di titik penjualan semakin besar. Peralihan ke pembayaran digital telah dipercepat karena terjadinya pandemi COVID-19.



Pada saat yang sama, beberapa pendatang baru menawarkan pendekatan baru dalam sistem pembayaran baru dengan mengatasi kelemahan yang ada dari sistem pembayaran konvensional. Upaya inovatif yang ditawarkan oleh pendatang baru di antaranya adalah Bitcoin dan *cryptocurrency*. Di samping itu, Facebook mengembangkan *Libra private global* dalam pengaturan *stablecoin*, sementara perusahaan teknologi dan fintech besar terjun ke dalam sektor layanan jasa keuangan. Beberapa inovasi tidak berhasil mendapatkan banyak daya tarik karena dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan moneter yurisdiksi, sementara banyak masalah regulasi dan kompetisi masih belum disepakati.

Fondasi sistem pembayaran yang aman dan efisien adalah kepercayaan pada uang. dalam sistem uang fiat, di mana uang tidak didukung oleh aset fisik seperti emas. Kepercayaan pada uang tergantung pada penerimaan umum atas selembar kertas yang memiliki nilai nominal tertentu. Di negara-negara di seluruh dunia, bank sentral telah menjadi lembaga yang ditunjuk untuk memenuhi kepentingan umum ini.

Sejarah menunjukkan bahwa sistem pembayaran yang paling efektif dan efisien adalah *two tier one*. Di dalamnya, bank bersaing satu sama lain untuk mendapatkan kepercayaan dari para nasabah sebagai pengguna akhir. Dalam konteks ini bank sentral menyediakan fondasi yang kuat untuk memastikan amannya sistem pembayaran. Bank komersial menawarkan rekening ke rumah tangga dan bisnis yang memiliki rekening di bank sentral untuk menyelesaikan pembayaran di antara mereka sendiri. Dalam sistem dua tingkat, memelihara kepercayaan pada uang bank komersial sangatlah penting. Untuk memelihara kepercayaan tersebut, beberapa mekanisme kelembagaan telah diberlakukan, dengan bank sentral memainkan peran penting di dalam mekanisme tersebut.

Untuk menjamin nilai uang dan memastikan terjadinya konversi uang bank komersial menjadi uang bank sentral dengan nilai yang setara, bank sentral memiliki peran penting sebagai sumber utama likuiditas (pemberi pinjaman pilihan terakhir) untuk menjamin nilai dari uang bank komersial. Bank sentral membuat regulasi dan melakukan pengawasan yang hati-hati dalam upaya mengantisipasi dan mengatasi risiko kegagalan bank. Skema asuransi simpanan dibuat untuk membantu pemegang deposito dapat mendapatkan jaminan penggantian jika terjadi kegagalan perbankan.

Sistem pembayaran adalah seperangkat instrumen, prosedur dan aturan transfer dana di antara partisipan (*a set of instruments, procedures and rules for the transfer of funds among participants*) (BIS, 2020a). Sistem pembayaran yang terdiri dari ritel dan grosir ini merupakan pasar yang kompleks di mana berbagai jenis pelaku ekonomi terlibat di dalam transaksi ekonomi. Sistem pembayaran melibatkan tidak hanya bank tetapi juga penyedia layanan pembayaran non-bank (PSP), yang menawarkan layanan pembayaran kepada pengguna akhir. Umumnya, bank dan PSP lainnya menawarkan layanan yang berhadapan dengan konsumen atau ritel di "ujung depan". Layanan tersebut mencakup apa yang disebut "dompet digital" dan antarmuka seluler yang menyediakan akses kepada para pengguna ke rekening bank atau menyimpan detail kartu kredit. Beberapa bank dan PSP lainnya memainkan peran kunci dalam kliring, penyelesaian dan pemrosesan di "ujung belakang".

Kompleksitas ini memiliki kemiripan dengan pasar di perkotaan yang mempertemukan beragam jenis pembeli dan penjual yang berbeda-beda. Sekalipun terlihat rumit, tetapi pertukaran yang efisien dapat dilakukan dengan adanya dukungan kelembagaan yang kuat. Bank sentral membantu mengatur pasar pembayaran dengan memainkan tiga peran kunci, yaitu sebagai operator, katalisator dan pengawas. Bank sentral

dapat menyediakan sistem kelembagaan infrastruktur yang diperlukan. Bank sentral juga dapat mengatur dan mengawasi penerapan standar, dan mendorong penyediaan berbagai layanan berkualitas tinggi, sehingga mendorong inovasi dan kompetisi. Bank sentral juga dapat meningkatkan layanan yang mereka berikan langsung ke para pengguna utama dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi sesuai kewenangannya.

Untuk menjalankan peran pentingnya dalam menjamin berlangsungnya sistem pembayaran tersebut, sejumlah bank sentral sedang mempertimbangkan penerbitan CBDC. CBDC dapat melayani fungsinya sebagai pelengkap alat pembayaran yang memenuhi kebutuhan khusus dan dapat pula memainkan perannya sebagai katalis untuk mendorong berlanjutnya inovasi dalam pembayaran, keuangan dan perdagangan. Bank sentral juga perlu menjaga keamanan dan integritasnya dalam mendukung berfungsinya pasar supaya sistem pembayaran berfungsi dengan baik dan lancar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kegagalan untuk menjalankan fungsi ini dapat menyebabkan berhentinya kegiatan ekonomi dan lebih lanjut menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi. Distres lokal bisa tersebar di pasar keuangan domestik dan internasional, memperpanjang kerusakan.

Untuk menjaga keamanan dan integritas sistem pembayaran, bank sentral harus memitigasi berbagai ancaman termasuk kemungkinan terjadinya *distress* (kesulitan) lokal di pasar keuangan domestik dan internasional. Ancaman pertama adalah risiko sistemik, yang dapat muncul dalam suatu sistem pembayaran yang saling terhubung (*interlinking*). Risiko sistemik dapat terjadi jika satu bagian dalam sistem tidak mampu menjalankan fungsi seperti yang yang diharapkan. Kegagalan menjalankan fungsi ini menyebabkan bagian sistem lain tidak dapat memenuhi kewajiban mereka pada saat jatuh tempo. Risiko ini dapat menyebarkan risiko kredit atau likuiditas di seluruh sistem. Dalam beberapa dekade terakhir, bank sentral telah melakukan berbagai upaya yang cukup besar untuk memitigasi risiko tersebut.

Ancaman kedua adalah penipuan yang dilakukan dalam pembayaran berskala besar (grosir) dan kompleks. Ancaman ketiga adalah pemalsuan yang terjadi pada penggunaan uang tunai dalam sistem pembayaran. Pemalsuan ini mungkin juga terjadi dalam penggunaan CBDC. Ancaman keempat adalah pembiayaan ilegal dan pencucian uang yang dilakukan dengan penyamaran sumber-sumber ilegal dari hasil pidana. Dalam konteks umum ini, ancaman dunia maya telah muncul dan menuntut kerja sama di antara bank-bank sentral untuk mengatasinya.

Ada berbagai celah masuk yang dapat dilalui untuk melakukan kompromi di sistem pembayaran yang dapat mengganggu sistem pembayaran dan keuangan.

Komunitas internasional telah aktif terlibat dalam membahas bagaimana mengatasi ancaman-ancaman yang muncul dari berfungsinya sistem pembayaran saat ini dan bekerja sama untuk mengurangi dampak buruk dari ancaman lainnya. G20 telah mengidentifikasi tujuh gesekan yang mungkin muncul dari sistem pembayaran lintas batas, termasuk: format data yang terfragmentasi dan terpotong; terbatasnya jam operasi; platform teknologi lama; panjangnya rantai transaksi; biaya pendanaan; kompleksnya proses pemeriksaan kepatuhan; dan lemahnya persaingan (FSB, 2022).

Pertemuan menteri-menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 menjadi semakin penting untuk membahas berbagai potensi ancaman dan sekaligus solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam sistem pembayaran. G20 juga bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional dan badan penetapan standar yang menangani sistem pembayaran lintas batas.

Sistem Pembayaran Saat Ini

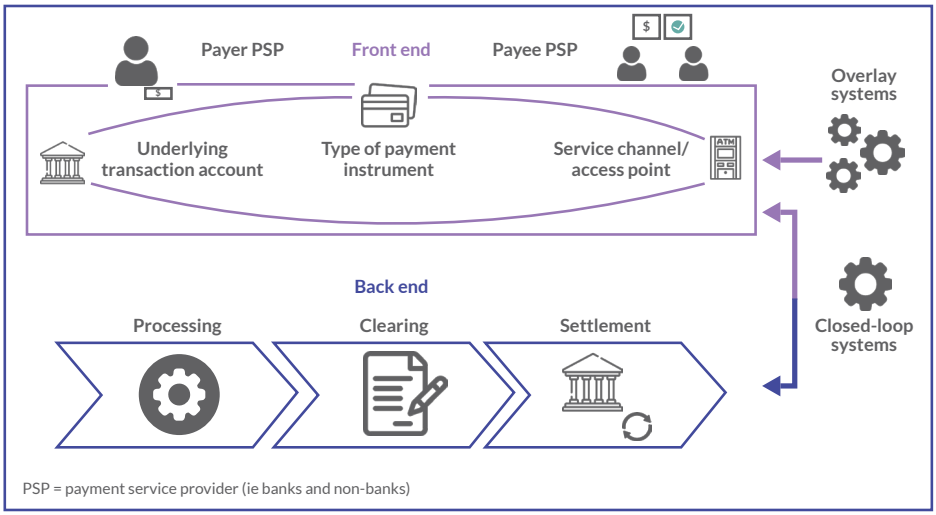
Akses, biaya dan kualitas sistem pembayaran saat ini sangatlah beragam dan kompleks dan mencerminkan suatu hasil evolusi yang panjang (BIS, 2020: 70). Misalnya saat ini terdapat perbedaan antara sistem pembayaran eceran dan sistem pembayaran grosir yang sangat besar. Pembayaran eceran mencapai hampir 90% dari total volume pembayaran yang didasarkan pada jumlah transaksi ekonomi yang terjadi. Dalam pembayaran ritel sejak 1950, banyak negara telah mengadopsi pembayaran elektronik.

Pertumbuhan kartu kredit dan debit dan penggunaannya juga berkembang pesat (BIS, 2020: 72). Ini diiringi dengan pengenalan anjungan tunai mandiri (ATM), munculnya *web* dan pembayaran berbasis ponsel dan, baru-baru ini, masuknya penyedia layanan pembayaran non-bank besar yang menawarkan layanan pembayaran elektronik. Di antara pembayaran ritel, nilai global dari pembayaran kartu dan *e-money* telah meningkat secara signifikan, sementara penggunaan cek menurun.

Secara keseluruhan, sekitar 90-95% dari penarikan tunai dan pembayaran elektronik ritel bersifat domestik. Muncul tuntutan untuk memperbaiki layanan pembayaran seiring dengan peningkatan

pembayaran elektronik. Akses ke layanan pembayaran telah meningkat dari waktu ke waktu, namun masih jauh dari pembayaran yang bersifat universal.

Gambar 4.2 Unsur-Unsur Infrastruktur Pembayaran



Sumber: BIS, 2020: 71

Akses ke rekening perbankan telah meningkat, khususnya di Asia Selatan (misalnya India), Asia Timur (misalnya China) dan Afrika sub-Sahara (BIS, 2020a:72). Namun demikian masih banyak yang harus dilakukan untuk menyediakan layanan transaksi untuk semua. Kurang lebih terdapat rekening transaksi sebanyak 1,7 miliar yang dimiliki orang dewasa secara global, dan ratusan juta perusahaan, terikat pada uang tunai sebagai satu-satunya alat pembayaran mereka. Namun demikian masih banyak individu berpenghasilan rendah, wanita dan usaha kecil yang belum memiliki akses ke layanan pembayaran formal.

Bahkan di negara maju, beberapa kelompok masyarakat tidak memiliki akses ke rekening bank dan opsi pembayaran terkait ((BIS, 2020:72). Hampir setengah dari populasi kulit hitam dan Hispanik di Amerika Serikat tidak memiliki akses ke perbankan. Di kawasan negara-negara yang memakai Euro sebagai mata uang, 10% dari rumah tangga berpenghasilan rendah tidak memiliki rekening bank. Di beberapa negara berkembang dan kurang berkembang, jumlah perusahaan yang tidak memiliki rekening di lembaga keuangan formal hampir mencapai separuh jumlah perusahaan yang ada. Kurangnya akses ke layanan pembayaran formal ini menyebabkan perusahaan tidak memiliki akses ke layanan lain seperti kredit.

Biaya yang relatif tinggi di segmen ritel dipengaruhi oleh bentuk pembayaran dan tingkat persaingan (BIS, 2020: 72). Pembayaran ritel cenderung lebih mahal bagi pengguna, secara agregat, dalam konteks di mana penggunaan kartu kredit mendominasi pembayaran transaksi. Selain itu, kartu pembayaran adalah sumber pendapatan yang menguntungkan bagi lembaga-lembaga keuangan dan jaringan kartu yang dimilikinya. Kedua fitur tersebut mencerminkan fakta bahwa lembaga ini menggunakan pembayaran sebagai ajang yang kompetitif. Secara keseluruhan, rasio pendapatan pembayaran dalam negeri terhadap PDB (angka kasar proksi biaya) lebih tinggi di mana margin keuntungan bersih yang diperoleh bank lebih tinggi. Ketimpangan keuntungan ini menunjukkan masih lemahnya persaingan di antara penyedia layanan pembayaran.

Di Amerika Latin, misalnya, biaya kartu kredit mencapai lebih dari 1% dari PDB. Jumlah biaya yang besar ini menunjukkan suatu potensi untuk mengurangi biaya, tanpa membebani kegiatan ekonomi. Biaya pemrosesan berbeda-beda di seluruh instrumen pembayaran. Instrumen tunai, debit dan kredit kartu masing-masing melibatkan biaya yang berbeda di bagian depan dalam pemrosesan transaksi pembayaran di loket. Uang tunai juga memerlukan pemrosesan di bagian belakang. Untuk kartu debit dan kredit, hampir semua biaya pemrosesan adalah "layanan pedagang biaya" di mana biaya yang dibayarkan pedagang kepada bank yang menerbitkan kartu, yang diperoleh bank pembayaran kartu dan operator jaringan kartu.

Jaringan kartu biasanya melibatkan tiga atau empat pihak supaya transaksi dapat diproses, dengan berbagai biaya yang terkadang tidak jelas. Ini termasuk pertukaran biaya antar bank dan biaya lisensi ke jaringan kartu. Bahkan di seluruh kartu, biaya sangat bervariasi; kartu premium hadir dengan fasilitas tambahan untuk pengguna khususnya yang berpenghasilan lebih tinggi dibayar dengan iuran tahunan, tetapi juga dengan biaya yang lebih tinggi untuk pedagang (hampir dua kali lipat biaya kartu non-premium). Penetapan biaya tersebut seringkali tidak selalu transparan bagi para pengguna akhir. Bahkan pilihan metode pembayaran tidak mempertimbangkan secara keseluruhan efisiensi sistem karena insentif yang diberikan tidak seimbang. Pihak berwenang telah mengambil berbagai tindakan untuk menurunkan biaya kartu. Namun, biaya cenderung lebih tinggi untuk perusahaan kecil dan untuk pengguna berpenghasilan rendah. Pembayaran lintas batas biasanya tidak hanya lambat dan tetapi kurang transparan dan berbiaya mahal. Pembayaran dengan nilai lebih rendah, seperti pengiriman uang merupakan salah satu contoh yang seringkali terjadi.

Transfer tunai seringkali membutuhkan biaya yang paling mahal. Mahalnya biaya transfer tunai ini mencerminkan besarnya biaya penanganan dan kurangnya persaingan di mana uang tunai adalah satu-satunya pilihan. Variasi biaya juga dipengaruhi jumlah dan jenis perusahaan yang terlibat. Sebagian besar pembayaran lintas batas mengalir melalui jaringan bank koresponden. Pengiriman uang yang ditransfer dengan cara ini membutuhkan biaya paling mahal dengan nilai biaya sebesar 10%, sedangkan biaya transfer uang melalui operator pengiriman uang hanya membutuhkan sekitar setengah dari biaya transfer tunai tersebut dengan nilai 6%. Biaya transfer ini menjadi semakin tinggi jika transfer tersebut melibatkan pengguna yang tinggal di daerah dengan jangkauan perbankan yang lebih terbatas seperti Afrika. Tingginya biaya transfer ini membuat daerah termiskin menjadi yang paling terpukul.



Dalam konteks di mana biaya transfer beragam, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pembayaran dalam hal kenyamanan, transparansi, dan kecepatan (BIS, 2020:75). Meskipun terdapat permintaan yang lebih besar untuk pembayaran secara *real time*, metode seperti transfer bank lintas batas sering dilakukan untuk mengatasi masalah yang sering muncul akibat sistem pembayaran yang berbeda-beda. Banyak negara telah menerapkan sistem ritel baru yang menawarkan layanan yang cepat dan yang bahkan dapat tersedia sepanjang waktu. Namun layanan seperti ini tidak tersedia di semua negara dan wilayah secara universal. Kualitas layanan pembayaran masih jauh dari harapan para pengguna sistem pembayaran.

Pandemi COVID-19 telah menunjukkan aspek-aspek kemajuan yang telah dicapai dalam sistem pembayaran (BIS, 2020:75). Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga menunjukkan kekurangan yang masih terdapat dalam sistem pembayaran. Meningkatnya penggunaan pembayaran nirsentuh di toko-toko dan layanan pembelian *online* telah mendukung pertumbuhan kegiatan ekonomi. Namun sistem pembayaran digital masih

belum berlangsung secara cukup nyaman. Tidak semua orang juga dapat mengakses pembayaran digital dengan mudah dan cepat. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan pembayaran digital termasuk tersedianya akses bagi kelompok rentan supaya inklusi keuangan benar-benar dapat ditingkatkan.

Tantangan Sistem Pembayaran dalam Konteks Digitalisasi

Pembahasan isu pembayaran lintas batas dalam G20 dipengaruhi oleh adanya perubahan perilaku transaksi oleh pelaku-pelaku ekonomi. Perubahan perilaku ini dipengaruhi oleh revolusi digital dalam satu dekade terakhir di mana terjadi pergeseran pola konsumsi melalui platform digital. Perubahan pola ini menuntut metode pembayaran yang tetap menjamin mobilitas dan cepat. Metode pembayaran juga harus menjaga keamanan transaksi ekonomi tersebut. Model-model bisnis baru juga bermunculan seiring dengan peralihan pola hubungan industrial antar pelaku yang menjadi semakin modular. Perkembangan platform digital ini membuat dunia transaksi menjadi *borderless* (tanpa batas). Kedaulatan ekonomi nasional menjadi berkurang dengan memudarnya sekat-sekat batas yurisdiksi.

Tren digitalisasi yang semakin kuat dalam sepuluh tahun terakhir ini berdampak pada perubahan sendi-sendi perekonomian, menyebabkan disrupsi fungsi-fungsi konvensional termasuk di sektor keuangan (Bank Indonesia, 2020). Para konsumen menikmati model layanan yang serba mulus (*seamless*). Mudahnya layanan baru ini menimbulkan kebutuhan besar untuk memperoleh sistem layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman. Peran lembaga-lembaga keuangan sebagai *middleman* menjadi berkurang seiring meningkatnya kolaborasi baru antara para pelaku ekonomi. Model relasi pelaku ekonomi ini belum tercakup dalam ruang lingkup definisi yang dirumuskan dalam regulasi yang ada.

Dalam konteks digitalisasi, peluang-peluang baru telah tercipta. Namun demikian, pada saat yang sama, risiko yang muncul akibat digitalisasi juga menjadi lebih sulit diatasi oleh pihak pemegang kewenangan. Oleh karena itu, kebijakan baru diperlukan untuk mengoptimalkan peluang yang tersedia dalam konteks digitalisasi, sekaligus mengatasi risiko-risiko yang ditimbulkan oleh digitalisasi.

Digitalisasi juga berpengaruh terhadap dominasi perbankan di mana saat ini muncul pelaku non-bank yang mulai memberikan layanan keuangan. Regulasi yang ada belum dapat menjangkau perilaku pelaku-pelaku non-bank tersebut. Melonggarnya *entry barrier* (hambatan masuk),

memungkinkan pelaku non-bank bisa masuk dalam dunia layanan keuangan, dari yang skala rintisan (*start-up*) ke skala besar dan global.

Dalam konteks digitalisasi, aset yang paling bernilai adalah data yang sekaligus menjadi sangat penting dalam menentukan daya saing para pelaku ekonomi. Berbagai aktivitas digital dan jejak digital terajut dalam fenomena *Internet of Things* (IoT). Para penyedia layanan berusaha memperbaiki kualitas layanan dalam upaya menarik para konsumen dan menciptakan kesetiaan dari para konsumen tersebut. Ini mendorong para pelaku dengan kapital yang kuat untuk mengintegrasikan platform digital lintas layanan dalam suatu rantai nilai. Penguasaan data granular yang disediakan para pelaku ekonomi secara individual memberikan peluang kepada penyedia layanan untuk berkembang menjadi *big tech*. Mereka dengan cepat dapat menguasai pasar dan mendapatkan peluang yang lebih besar dari penguasaan data dan sekaligus pasar tersebut.

Digitalisasi memiliki dampak yang luas di negara-negara berkembang dengan potensi pasar yang besar. Semakin terjangkaunya akses teknologi membuat pelaku-pelaku ekonomi di negara-negara berkembang dapat mendorong partisipasi masyarakat menjadi lebih tinggi. Di negara-negara maju, digitalisasi memiliki dampak yang lebih terbatas karena negara-negara tersebut memiliki struktur demografi yang didominasi *aging population*. Jumlah populasi yang tidak memiliki akses ke perbankan di negara maju juga relatif rendah.

Pemerintah di negara-negara G20 melihat pentingnya upaya merancang digitalisasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan dan inklusif. Bagaimana inovasi baru dalam teknologi digital dapat memperkuat demokratisasi ekonomi? Bagaimana memanfaatkan efisiensi yang diciptakan oleh digitalisasi dapat mendorong perekonomian? Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh menguatnya kapasitas pelaku ekonomi dalam mengakses dan memanfaatkan informasi. Bagaimana digitalisasi melahirkan model-model bisnis dan industri baru?

Rantai distribusi barang dan jasa menjadi lebih pendek dengan meningkatnya interkonektivitas di antara para pelaku ekonomi. Distribusi informasi-informasi penting yang menjadi mudah, cepat dan merata membantu meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi. Efisiensi ini diperkuat lagi dengan aplikasi teknologi seperti *aplikasi cloud computing* dan *big data analysis*. Banyak pihak memperoleh akses untuk memanfaatkan data-data yang tersedia tersebut untuk menciptakan inovasi baru dan model-model bisnis dan industri baru. Produk-produk semakin bervariasi seiring dengan semakin luasnya layanan yang tersedia bagi para konsumen.

Revolusi industri 4.0 perlu dipahami dengan lebih baik karena dampaknya sangat berbeda dengan revolusi-revolusi industri yang terjadi sebelumnya. Pemahaman ini menjadi sangat penting untuk mendesain ekonomi digital yang tepat supaya dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Perlu identifikasi risiko yang timbul akibat digitalisasi ekonomi dan keuangan yang berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi. *Shadow banking* semakin marak dengan tawaran-tawaran layanan keuangan yang menarik masyarakat. Impor barang konsumsi meningkat karena batas-batas yurisdiksi semakin pudar. Risiko-risiko lain adalah meningkatnya kejahatan siber, penyalahgunaan data konsumen, persaingan usaha yang tidak sehat serta aktivitas penipuan dalam bentuk baru. Risiko terhadap pasar tenaga kerja juga cukup besar di mana persaingan menjadi semakin ketat, di samping digitalisasi mengubah bidang-bidang pekerjaan berbasis konvensional menjadi berbasis digital. Digitalisasi juga berdampak pada terancamnya kedaulatan ekonomi yang bisa berakibat pada tantangan menjaga stabilitas moneter dan keuangan negara.

Dalam konteks digitalisasi tersebut, potensi kegagalan pasar dalam sistem pembayaran menjadi semakin tinggi. Sistem pembayaran dituntut untuk semakin terintegrasi untuk memfasilitasi transaksi ekonomi yang semakin makin tinggi. Di satu sisi, industri sistem pembayaran menghadapi risiko konsentrasi pasar sebagai akibat skala ekonomi dan efek jaringan. Di sisi lain, uang bank sentral yang memiliki unsur finalitas belum berfungsi untuk memproses penyelesaian pembayaran.

Dalam konteks digitalisasi bank sentral memiliki posisi yang kuat untuk mengatur sistem pembayaran digital. Perannya mencakup fungsi regulator, pengawas, maupun operator dalam memastikan sistem pembayaran berjalan dengan cepat, aman, transparan dan mudah diakses semua masyarakat. Bank sentral perlu membuat pendekatan dan kebijakan-kebijakan baru untuk merespon perilaku transaksi masyarakat di era digitalisasi supaya dampak pergeseran perilaku ini dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Pertemuan gubernur-gubernur bank sentral G20 menjadi sangat strategis untuk berbagi informasi dan praktik baik yang telah dilakukan dalam merespon dampak digitalisasi ekonomi dan keuangan. Pertemuan tersebut juga penting untuk membahas solusi dan langkah-langkah koordinasi dalam menerapkan alternatif-alternatif solusi tersebut. Secara khusus, sinergi pendekatan dan kebijakan sistem pembayaran lintas batas akan dapat memperkokoh proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Sebagai pemegang presidensi G20, Indonesia telah

memainkan peran strategis untuk mengangkat isu-isu kontekstual seperti sistem pembayaran lintas batas yang benar-benar urgent.

Central Bank Digital Currency (CBDC)

CBDC menjadi perhatian besar presidensi G20 Indonesia dan secara khusus dibahas dalam seminar "Digital Currency" yang diselenggarakan sebagai *side event* pada pertemuan deputi menteri keuangan dan bank sentral (FCBD) dan pertemuan ketiga menteri-menteri keuangan dan gubernur bank sentral (FMCBG) di bulan Juli 2022 (Bank Indonesia, 2022).

Pembahasan tentang CBDC ini terkait erat dengan meningkatnya penggunaan aset crypto dalam konteks pandemi COVID-19 COVID-19 dan digitalisasi. Penggunaan aset Crypto memiliki potensi pengembangan inklusi dan efisiensi sistem keuangan. Namun demikian, aset Crypto juga memiliki potensi munculnya risiko baru terhadap stabilitas ekonomi moneter dan sistem keuangan (Bank Indonesia, 2022c).

Kondisi lain yang mendorong eksplorasi penerbitan CBDC adalah meningkatnya penggunaan uang elektronik dan menurunnya penggunaan uang tunai dalam transaksi pembayaran, terutama sejak pandemi COVID-19. Sebagian konsumen telah bermigrasi ke pembayaran elektronik di mana penggunaan uang tunai menurun drastis baik dalam transaksi *online* maupun pembelian langsung.

Dalam konteks meningkatnya penggunaan Crypto tersebut dan pembayaran elektronik di seluruh dunia, G20 memberikan perhatian untuk membahas potensi aset Crypto, risiko yang muncul dan regulasi yang diperlukan untuk mengatasi risiko. Perhatian lebih besar diberikan pada eksplorasi desain dan penerbitan CBDC yang saat ini telah dilakukan oleh sebagian besar bank-bank sentral di banyak negara, termasuk negara-negara G20. Eksplorasi penerbitan CBDC bertujuan untuk melihat potensi penggunaan alat pembayaran digital yang bebas risiko dengan uang bank sentral. Ekplorasi tersebut juga penting untuk memitigasi risiko peningkatan penggunaan *non-sovereign digital currency*, meningkatkan efisiensi dan peningkatan tahapan sistem pembayaran, termasuk lintas batas, dan menjadi instrumen kebijakan moneter yang baru. Di samping itu eksplorasi tersebut dipandang dapat memfasilitasi distribusi subsidi fiskal (Bank Indonesia, 2022c).

CBDC adalah contoh utama bagaimana bank sentral dapat berperan sebagai ujung tombak inovasi baru dalam sistem pembayaran. CBDC menggabungkan inovasi teknologi dan fondasi bank sentral yang

teruji dan terpercaya. Bank memiliki pilihan baru untuk memanfaatkan kekuatan yang dibawa oleh temuan teknologi untuk mewujudkan kebaikan bersama. Mereka bisa menggabungkan peran mereka sebagai katalisator, pengawas dan operator, dan mengembangkan perangkat yang sama sekali baru untuk mengatur pembayaran dengan memakai mata uang digital.

CBDC berpotensi menjadi capaian penting dalam proses evolusi uang. Namun demikian diperlukan kebijakan yang sesuai agar potensi CBDC dapat dioptimalkan dan tidak menimbulkan kerugian bagi perekonomian rumah tangga dan negara. Penerbitan CBDC merupakan hasil upaya teknologi oleh bank sentral untuk mewujudkan beberapa tujuan kebijakan publik sekaligus. Tujuan-tujuan tersebut di antaranya adalah memperluas inklusi keuangan, menjamin keamanan dan integritas dalam pembayaran digital, membangun pembayaran yang tangguh, cepat dan murah; dan mendorong inovasi berkelanjutan dalam pembayaran.

Selama beberapa dekade terakhir, grosir uang digital telah dikembangkan dengan tersedianya akses langsung sektor keuangan terhadap uang bank sentral tersebut. Terdapat potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan CBDC karena CBDC dapat diprogram dengan mengaktifkan pengiriman sekuritas yang diperdagangkan secara otomatis dan pembayarannya dapat diproses seketika setelah pembayaran diterima dan diverifikasi. Dengan cara ini, CBDC grosir dapat ditingkatkan keamanan dan kecepatan, dan berpotensi menyederhanakan kliring dan penyelesaian pasca perdagangan. CBDC grosir juga dapat membantu mengurangi risiko penipuan dan serangan dunia maya.



Implikasi dari CBDC ritel akan lebih luas jangkauannya. Inovasi yang dibuat dapat memberikan akses kepada para pengguna umum secara langsung ke uang bank sentral, dan berpotensi menawarkan instrumen penyelesaian yang aman, andal, dan dapat diakses secara universal sama seperti uang tunai sekarang.

Namun demikian, perlu pertimbangan yang hati-hati dalam memanfaatkan uang digital tersebut. Risiko disintermediasi dapat muncul sebagai salah satu implikasi terhadap fungsi sistem keuangan. Terjadinya pelarian bank mungkin bisa terjadi pada saat terjadinya stress. Ini juga dapat berimplikasi pada kebijakan moneter karena CBDC ritel dapat bersifat *interest-bearing* yang berpengaruh terhadap transmisi kebijakan moneter, termasuk melalui pengurangan batas bawah efektif pada suku bunga kebijakan nominal.

Selama beberapa tahun terakhir, bank sentral dan pembuat kebijakan lebih cenderung mendukung penerbitan CBDC grosir dan eceran dengan beragam motivasi dan beragam lintas yurisdiksi. Sebuah survei tahun 2019 terhadap bank sentral mengungkapkan bahwa keamanan dan efisiensi pembayaran domestik adalah yang paling penting, sedangkan inklusi adalah motif utama yang mendorong negara-negara berkembang dan kurang berkembang untuk mengembangkan CBDC.

Secara teknis, diperlukan sistem yang tangguh dan pelengkap digital inklusif untuk mendukung penggunaan CBDC ritel. CBDC harus memiliki semua itu fitur supaya memiliki daya tarik yang lebih besar. Elemen dasarnya adalah kepercayaan pada entitas penerbit, status tender yang sah, finalitas waktu-nyata yang terjamin, dan ketersediaan yang luas. CBDC juga harus memiliki nilai yang setara dengan uang tunai di dimensi lain.

Pertama, kebutuhan CBDC agar ramah pengguna. Anak sekolah, manula, dan setiap kelompok umur telah dapat memakai uang kertas dan koin sebagai alat pembayaran dengan mudah. Beberapa bank sentral bahkan telah merancang fitur untuk membuat uang kertas dapat diakses oleh orang buta. Kedua, CBDC harus sangat tangguh dalam menghadapi serangan dunia maya. Serangan siber semacam itu bisa mendatangkan malapetaka jika benar-benar terjadi dan dapat menyebabkan gangguan pada pembayaran elektronik, sementara uang tunai tidak lagi digunakan secara luas.

Ketiga, CBDC perlu menjamin keamanan dan integritas pembayaran. Sama seperti uang tunai, CBDC harus tidak dapat dipalsukan. Seperti alat pembayaran digital lainnya, mereka perlu melindungi privasi

pengguna, namun tetap memungkinkan penegakan hukum secara efektif. Penggunaan CBDC memberikan peluang untuk mengatasi tindak pidana pencucian uang.

Isu lain yang penting adalah bagaimana memastikan bahwa penggunaan CBDC dapat berdampingan dengan penggunaan uang tunai dan elektronik sebagai opsi pembayaran yang telah ada. Penggunaan opsi-opsi ini tetap dapat berjalan sesuai dengan sistem pembayaran dua tingkat, yang memungkinkan sektor publik dan swasta untuk fokus pada masing-masing keunggulan komparatif. Bank sentral dapat fokus untuk memastikan kepercayaan, stabilitas dan integritas dalam pembayaran. Sektor swasta diharapkan dapat menjadi tempat terbaik untuk dilakukannya aktivitas CBDC yang dihadapi konsumen.

Perlu dieksplorasi secara hati-hati desain CBDC supaya bisa mengantisipasi risiko pelarian dana bank dan masuk ke CBDC khususnya pada saat stres. Opsi tersebut misalnya adalah pemberian imbalan kepada kepemilikan CBDC dengan bunga yang lebih rendah dari tingkat yang dibayarkan pada cadangan bank komersial di bank sentral. Alternatifnya, bank sentral dapat membatasi jumlah CBDC yang dimiliki rumah tangga dan bisnis, misalnya melalui *caps*.

Kepatuhan terhadap standar peraturan menjadi sangat penting mengingat besarnya peran sektor swasta. Persaingan terbuka harus tetap dijaga, sementara inovasi harus tetap didorong untuk terus dikembangkan. Hak istimewa dapat diberikan oleh bank sentral kepada sektor swasta yang telah menjalankan fungsinya sebagai perantara dalam mendistribusikan CBDC ke klien ritel.

Standar peraturan yang ada juga harus benar-benar dipatuhi oleh pendatang baru dan teknologi baru. Celah sistem pembayaran harus ditutup supaya persaingan terbuka di antara sektor-sektor swasta yang memainkan peran perantara tersebut. Di antaranya adalah dengan desain teknis dan kerangka hukum untuk menjamin persaingan terbuka tersebut, termasuk terkait dengan pengumpulan, penggunaan, dan pembagian data. Secara khusus, desain CBDC harus menciptakan suatu keseimbangan baru antara mengijinkan portabilitas data, menjaga privasi, dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan ilegal.

Persaingan dalam menciptakan inovasi-inovasi akan muncul di dalam pengembangan CBDC ritel. Untuk mendorong persaingan dalam inovasi tersebut, diperlukan suatu infrastruktur yang dapat dioperasikan oleh bank sentral. Idealnya, infrastruktur tersebut mudah beradaptasi dalam merespon perkembangan terkini. CBDC seharusnya dapat diakses oleh PSP melalui beberapa saluran, termasuk pemrograman antarmuka

dan API. Kesetaraan akses dan kemampuan beradaptasi seperti ini diharapkan dapat terus memacu terciptanya inovasi sektor swasta. Alternatifnya, bank sentral dapat membatasi jumlah CBDC yang dimiliki rumah tangga dan bisnis, misalnya melalui *caps*.

Bank Indonesia (2022c) melihat bahwa CBDC dapat menjadi solusi yang berkelanjutan (*future proof*). CBDC dapat menjadi jembatan antara kebutuhan publik yang ingin bertransaksi di era digital dan kebutuhan bank sentral yang memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara keberlangsungan sistem keuangan di mana bank sentral menempati posisi poros. CBDC dapat memainkan fungsi sebagai instrumen bagi bank sentral dalam menutup keterbatasan uang-uang yang ada saat ini dalam konteks digitalisasi.

Sekalipun mengakui CBDC dapat mengatasi kelemahan uang-uang yang ada saat ini, Bank Indonesia melihat bahwa penerbitan CBDC harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Perlu perumusan desain CBDC yang terukur dengan takaran yang tepat. Ini diperlukan supaya penerbitan CBDC tidak kontraproduktif terhadap perekonomian. Pengembangan desain CBDC dilakukan dengan memperhatikan tiga prinsip utama yaitu: (1) pelaksanaan mandat bank sentral dalam bidang moneter dan makroprudensial tidak boleh terganggu, (2) kesanggupan CBDC hidup berdampingan dengan uang-uang yang sudah ada dan tersedia saat ini, (3) dorongan inovasi dan efisiensi.

Untuk memayungi gagasan eksplorasi desain dan penerbitan CBDC Indonesia (Digital Rupiah), Bank Indonesia telah meluncurkan "Proyek Garuda" pada bulan November 2022 (Bank Indonesia, 2022d). Peluncuran ini ditandai dengan menerbitkan *White Paper* tentang desain Rupiah Digital. White Paper tersebut menyediakan informasi tentang konfigurasi desain Digital Rupiah yang terintegrasi dari ujung ke ujung, fitur desain yang fleksibel sehingga pengembangan model bisnis baru dimungkinkan, arsitektur teknologi Digital Rupiah. *White Paper* juga memuat dukungan perangkat regulasi dan kebijakan dalam penerapan desain Digital Rupiah.

Ada dua jenis Digital Rupiah yang akan diterbitkan Bank Indonesia. Yang pertama adalah Digital Rupiah *wholesale* (w-Digital Rupiah) yang hanya didistribusikan untuk melayani transaksi grosir (*wholesale*). Jenis uang digital memiliki cakupan akses yang terbatas. Yang kedua adalah Digital Rupiah ritel (r-Digital Rupiah) yang memiliki cakupan akses terbuka untuk publik. Digital Rupiah ritel ini akan dipakai dalam transaksi ritel.

Berbagai fitur akan melengkapi Digital Rupiah untuk memastikan resiliensi, baik dalam konteks keamanan maupun ketersediaan. Fitur ini di antaranya adalah *offline functionality* yang dapat meningkatkan inklusi keuangan yang luas di daerah tertinggal. Digital Rupiah juga memiliki arsitektur teknologi yang terdiri dari tiga lapisan, yaitu platform teknologi, aset digital, dan *use case*.

Paparan di sub bab ini menunjukkan urgensi pembahasan CBDC dalam G20 yang menunjukkan kemajuan cukup penting di bawah Presidensi Indonesia. Sebagai anggota G20, Indonesia juga telah menunjukkan komitmennya untuk menyiapkan dirinya dalam mengeksplorasi desain dan penerbitan CBDC seperti ditunjukkan dengan peluncuran "Proyek Garuda."

Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025

Sebagai anggota G20, Indonesia memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam membahas isu-isu utama dalam perekonomian, keuangan dan moneter yang menjadi kepedulian global. Koordinasi kebijakan dan kerja sama ekonomi, keuangan dan moneter dalam mewujudkan sistem yang lebih baik diperlukan dalam mengatasi berbagai masalah global. Indonesia juga menyadari diperlukan kesiapan domestik sangatlah penting supaya manfaat keanggotaan G20 dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Dalam kaitan dengan pembahasan sistem pembayaran lintas batas di G20, Indonesia telah meluncurkan cetak biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025 pada bulan Mei 2019 (Portal Informasi Indonesia, 2022). Cetak biru tersebut disiapkan sebagai upaya memperkuat pembayaran lintas batas yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, pelaku bisnis dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sistem pembayaran yang baik, terbuka, transparan dan mudah diakses dan cepat akan mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan inklusif.

Pembuatan cetak biru sistem pembayaran Indonesia 2025 merupakan respon pemerintah Indonesia terhadap perkembangan digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional dan global (Bank Indonesia, 2019a). Digitalisasi ini memunculkan sejumlah risiko yang perlu diatasi dengan serius. Risiko tersebut di antaranya adalah peningkatan ancaman siber, persaingan monopolistik dan shadow banking. Bila tidak diatasi, risiko-risiko tersebut dapat berpengaruh terhadap berkurangnya pengendalian moneter yang efektif dan sistem keuangan yang stabil,

serta sistem pembayaran yang lancar. Harus diakui bahwa digitalisasi telah mengubah perilaku manusia baik sebagai konsumen maupun tenaga kerja. Perubahan perilaku manusia tersebut berpengaruh terhadap perubahan pola interaksi antar pelaku ekonomi, baik sebagai konsumen maupun faktor produksi. Cetak biru SPI diharapkan dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan digitalisasi dan sekaligus memfasilitasi perubahan perilaku manusia menjadi lebih positif (Bank Indonesia, 2019b).

Dalam cetak biru SPI 2025 dirumuskan lima visi SPI (Bank Indonesia, 2019a). **Visi pertama adalah mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional** sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan. **Visi kedua adalah mendukung digitalisasi perbankan sebagai Lembaga utama** dalam ekonomi-keuangan digital melalui open-banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan. **Visi ketiga adalah menjamin *interlink* antara *Fintech* dengan perbankan** untuk menghindari risiko *shadow* banking melalui pengaturan teknologi digital (seperti *Application Programming Interface-API*), kerja sama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan. **Visi keempat adalah menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat** melalui penerapan *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism* (AML/CFT), kewajiban keterbukaan untuk data/informasi/bisnis publik, dan penerapan *reg-tech* dan *sup-tech* dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan. **Visi Kelima, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara** melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerja sama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas.

Bank Indonesia merumuskan lima inisiatif dalam upaya perwujudan kelima visi SPI tersebut (Bank Indonesia, 2019d). Lima inisiatif tersebut adalah:

1. **Inisiatif 1: Digital Open Banking dan Interlink Bank Finctech.**

   Inisiatif ini akan dicapai dengan mendorong digital open banking dan membangun interlink bank-fintech melalui standardisasi open API. Ruang lingkup standardisasi akan mencakup standar data, standar teknis API, standar keamanan, dan standar governance termasuk standar kontraktual yang sekaligus menjadi *key deliverables* dari inisiatif ini. Langkah ini memungkinkan keterbukaan informasi keuangan dan *interlink* antara bank dan fintech.

2. **Inisiatif 2: Pengembangan Pembayaran Ritel.**

   Inisiatif ini akan dicapai melalui pengembangan infrastruktur yang mendukung ketersediaan layanan pembayaran secara real time, *seamless*, tersedia 24 jam dan 7 hari (24/7) dengan tingkat keamanan dan efisiensi yang tinggi secara *end to end*. Inisiatif ini diharapkan mampu memberikan layanan pembayaran yang lebih mudah dan murah untuk semua orang. *Key deliverables* pada inisiatif ini meliputi pengembangan BI-FAST, interface pembayaran yang terintegrasi, GPN dan QRIS.

3. **Inisiatif 3: Pengembangan *wholesale payment* (pembayaran grosir) dan infrastruktur pasar keuangan.**

   Inisiatif ini akan dicapai melalui modernisasi infrastruktur dan penguatan kerangka regulasi infrastruktur pasar keuangan. Melalui inisiatif ini, infrastruktur pasar keuangan Indonesia diharapkan mampu beroperasi sesuai standar praktik-praktik terbaik dan mendukung implementasi kebijakan secara optimal. *Key deliverables* dalam inisiatif ini mencakup modernisasi BI-RTGS, BI-SSSS termasuk fungsi CSD, dan BI-ETP, serta penguatan kerangka regulasi terkait CCP dan TR termasuk pengembangannya.

4. **Inisiatif 4: Data.**

   Inisiatif ini akan dicapai melalui pengembangan infrastruktur publik untuk pengelolaan data. Melalui inisiatif ini, keterbukaan data (data openness), transparansi, dan disiplin pasar, diharapkan tercapai. *Key deliverables* dalam inisiatif ini mencakup pengembangan *data hub*, integrasi pelaporan dan pengembangan *Payment ID*.

5. **Inisiatif 5: Pengaturan, Pengawasan, Perizinan, dan Pelaporan.**

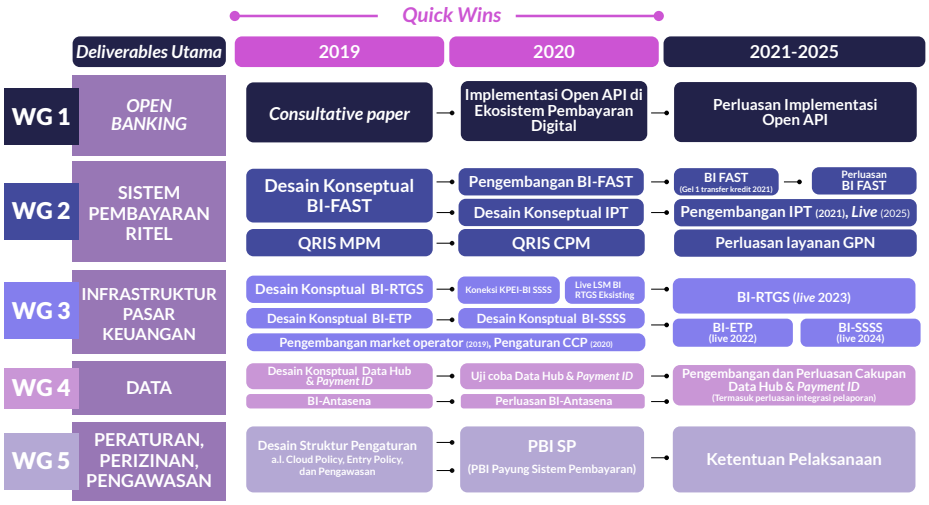
   Inisiatif ini akan dicapai melalui penguatan kerangka pengaturan, perizinan, dan pengawasan. Melalui langkah ini, digitalisasi dapat diimbangi oleh regulasi, *entry-policy*, dan pengawasan yang sesuai dengan tuntutan era digital, mendorong inovasi, dan memitigasi risiko secara memadai. *Key deliverables* inisiatif ini mencakup kerangka pengaturan termasuk kerangka proteksi data pribadi dan keamanan siber, integrasi perizinan dan pengawasan termasuk pemanfaatan *regtech* dan *suptech*.

Kelima inisiatif tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam program-program strategis Bank Indonesia yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam rentang waktu tahun 2019 s/d 2025. Bank Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan visi melalui implementasi inisiatif-inisiatif yang telah dirumuskan tersebut dengan tetap memperhatikan

tugas dan kewenangannya. Kolaborasi dan koordinasi yang efektif dan produktif dikembangkan dengan kementerian/ lembaga terkait dan kelompok-kelompok industri dalam rangka perwujudan visi dan implementasi inisiatif-inisiatif tersebut.

Sejak awal, SPI 2025 mendorong program transformasi Bank Indonesia yang bersifat inklusif supaya dapat memberikan peluang bagi pelaku ekonomi kecil berpartisipasi dalam arus besar digitalisasi. Dengan transaksi digital tersebut, pelaku ekonomi kecil dapat menemukan solusi bisnis baru yang dapat meningkatkan partisipasi ekonomi yang lebih tinggi.

Gambar 4.3 Roadmap dan Timetable Cetak Biru SPI 2025



Sumber: Bank Indonesia, 2019c:50.

Bank Indonesia juga memastikan bahwa digitalisasi dapat terus berlanjut sesuai dengan upaya menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan serta kelancaran sistem pembayaran. Di satu sisi, BI mendorong perbankan melakukan transformasi digital supaya dapat mempertahankan daya saingnya di era digitalisasi. Di sisi lain, BI mendorong terbangunnya *interlink* antara bank dengan fintech dengan berlandaskan standar dan mekanisme kontraktual yang jelas. Perlu dilakukan penyelarasan kerangka regulasi, *entry-policy*, pelaporan dan pengawasan dengan tuntutan era digital. Penyelarasan ini dilakukan di antaranya dengan cara membangun kesesuaian dengan unsur pengendalian risikonya. Infrastruktur publik perlu dibangun untuk menjamin keterbukaan data dan disiplin pasar, sekaligus mencegah munculnya potensi monopoli akibat penguasaan data granular oleh

sedikit pihak. Upaya mendorong keterbukaan data tetap harus diperkuat pula dengan upaya perlindungan data.

Perwujudan visi baru SPI 2025 diharapkan dapat menciptakan sistem pembayaran yang lancar, dan mendorong berfungsinya sistem moneter dan sistem keuangan dengan baik. Sistem pembayaran ini pada akhirnya dapat menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Persaingan usaha dapat berkembang dengan dukungan inovasi digital. Inovasi digital tersebut akan mendorong terciptanya beragam layanan dan produk yang bermanfaat bagi ekonomi masyarakat. Inovasi juga akan mengurangi ketergantungan sistemik pada satu atau sedikit pihak. Inovasi digital dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang merata.

Pengendalian arus digitalisasi tetap sangat penting supaya inovasi digital tidak bersifat kontraproduktif terhadap stabilitas makroekonomi dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Pemerintah Indonesia perlu membuat kebijakan yang tepat dan cepat, serta melihat ke depan supaya inovasi digital tetap dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sistem pembayaran, dalam hal ini, hadir sebagai poros penentu efektivitas respons kebijakan yang diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan kebijakan di era digital. Konteks kebijakan sistem pembayaran adalah urat nadi perekonomian. Sistem tersebut menentukan proses peredaran uang (*money supply process*) antar agen ekonomi. Transaksi ekonomi dan keuangan apapun tidak akan selesai tanpa sistem pembayaran yang kokoh dan andal. Sistem pembayaran menentukan kelancaran aliran barang dan jasa. Sistem pembayaran yang lancar dan sistem moneter yang berfungsi dengan baik merupakan basis pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) (Bank Indonesia, 2019c mengutip Ingves, 2018). Dengan bangunan kepercayaan yang dimiliki, seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh manfaat optimal dari sistem keuangan. Dalam dimensi ekonomi mikro, sistem pembayaran memenuhi karakteristik barang publik layaknya listrik dan prasarana transportasi.

Kebijakan moneter dan SSK berakar dari tugas tradisional bank sentral di sistem pembayaran (Bank Indonesia, 2019e mengutip Manning dan Russo, 2017). Bank sentral yang menjadi *asset settlement* akhir, menjalankan peran penting untuk memastikan kelancaran sistem pembayaran yang berlaku di suatu negara (Bank Indonesia, 2019c mengutip Tucker, 2019). Jalinan ketiga tugas pokok bank sentral tersebut menjadi pilar penopang kepercayaan masyarakat yang menentukan

efektivitas inklusi keuangan. Dalam konteks ini, mandat utama bank sentral adalah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap nilai uang dan sistem keuangan. Kerangka regulasi yang kokoh akan melancarkan proses *market entry* (Bank Indonesia, 2019c mengutip Cartens, 2018) dan memperkuat struktur industri.

Peran Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai otoritas sistem pembayaran adalah memastikan ketersediaan infrastruktur, baik keras maupun lunak, bagi masyarakat dan dunia usaha yang selaras dengan tuntutan era digital. Infrastruktur keras (*hard infrastructure*) dalam hal ini berupa ketersediaan infrastruktur sistem keuangan, khususnya sistem pembayaran, yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha (Bank Indonesia, 2019c). Pada area sistem pembayaran ritel, Bank Indonesia akan membangun BI-FAST sebagai infrastruktur *fast payment* yang melayani seluruh jenis transaksi pembayaran, termasuk transaksi berbasis kartu. BI-FAST akan bersanding dengan SKNBI dan GPN sebagai infrastruktur ritel di sisi *back-end*. BI-FAST diharapkan mampu mendorong daya saing industri, membuka pilihan pembayaran yang lebih luas bagi masyarakat, meningkatkan efisiensi transaksi, dan memperkuat keandalan sistem pembayaran ritel di Indonesia.

Bank Indonesia juga akan membangun *Data Hub* sebagai infrastruktur publik yang memungkinkan keterbukaan data (data openness) dan penggunaannya untuk kepentingan publik. Infrastruktur tersebut akan memanfaatkan data granular dari transaksi pembayaran (Bank Indonesia, 2019c). Untuk itu, *Payment ID* yang memungkinan proses pengolahan data granular oleh *Data Hub* juga akan dirancang memanfaatkan data dan informasi dalam transaksi pembayaran. Data dan informasi yang dihasilkan akan terbuka bagi publik berdasarkan persetujuan pemilik data. Strategi ini diharapkan mampu menjembatani pembiayaan UMKM secara lebih efektif. Cakupan standardisasi instrumen dan layanan sistem pembayaran akan diperluas. Implementasi QR Indonesian Standard (QRIS) akan terus diperkuat untuk mendorong interoperabilitas dan efisiensi ekonomi. Standarisasi di bawah payung GPN, yaitu Standar Nasional Teknologi Chip (SNTC) dan kartu garuda akan terus didorong sesuai target waktu yang ditetapkan.

Di samping itu, standar domestik kartu kredit akan dikembangkan dan diharapkan mampu menekan tingginya *interchange fee* yang dikenakan oleh skema prinsipal kartu kredit global (Bank Indonesia, 2019c). Program elektronifikasi akan diperkuat melalui proses *engagement* yang lebih terarah. Edukasi dan perluasan akseptasi pembayaran digital (misalnya QRIS), akan difokuskan pada fungsi-fungsi

ekonomi tradisional yang bersifat massal (pasar tradisional). Keterlibatan penuh dunia akademik (perguruan tinggi) sebagai poros perkembangan inovasi teknologi dan model bisnis keuangan juga akan diperkuat. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat inklusi ekonomi dan keuangan di Indonesia. Sembilan belas (19) Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015 menetapkan target migrasi SNTC sebesar paling kurang 50% pada 1 Januari 2020 80% pada 1 Januari 2021 dan 100% pada 1 Januari 2022, dari total Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan telah menggunakan SNTC dan PIN *online* enam digit.

Mengembangkan *Interlinking* Sistem Pembayaran dan Peran Aplikasi Pemrograman Antarmuka

Pengaturan *interlinking* sistem pembayaran merupakan unsur penting untuk meningkatkan pembayaran lintas batas. BIS, IMF dan World Bank (2023) mendefinisikan *Interlinking* sistem sebagai "*seperangkat perjanjian kontraktual, hubungan dan standar teknis, dan komponen operasional antara sistem pembayaran dari yurisdiksi yang berbeda, yang memungkinkan masing-masing PSP yang berpartisipasi untuk bertransaksi satu sama lain. seolah-olah mereka berada dalam sistem yang sama*" (BIS, IMF dan World Bank, 2023).

Dengan pengaturan interlinking ini, PSP yang berpartisipasi dalam sistem pembayaran negara tertentu (A) dapat mengirimkan pembayaran ke PSP yang berpartisipasi dalam sistem pembayaran negara lain (B). Dalam konteks sistem ini, PSP di negara A tidak harus membuka rekening di negara B atau menjadi peserta sistem pembayaran yang beroperasi di negara B. Pengaturan *interlinking* ini dapat berbentuk rangkaian hubungan bilateral masing-masing dengan aturan masing-masing atau hubungan di bawah suatu kerangka umum tertentu.

Melalui *interlinking* ini rantai transaksi dapat diperpendek dan biaya transaksi dapat dikurangi. *Interlinking* juga dapat meningkatkan transparansi dan kecepatan pembayaran. *Interlinking arrangement* yang tepat dapat memungkinkan bank-bank dan penyedia layanan pembayaran melakukan transaksi satu sama lain tanpa harus berpartisipasi dalam sistem pembayaran yang sama atau memakai *intermediaries* seperti bank koresponden.

CPMI (2022) menjelaskan tiga alasan pentingnya pengaturan *interlinking* tersebut. Alasan ini menjadi pertimbangan yang mendasari pembahasan isu ini dalam G20 sejak peta jalan sistem pembayaran lintas batas disepakati di Oktober 2020. Alasan pertama adalah tantangan yang

kompleks dalam meningkatkan pembayaran lintas batas. Pendekatan berbagai segi dapat memberikan manfaat dalam peningkatan sistem pembayaran. Opsi yang tersedia di antaranya adalah memperbaiki tatanan perbankan koresponden. Opsi-opsi lain tetap terbuka seperti model-model alternatif yang potensial, termasuk *interlinking arrangement*.

Tantangan komplek lain adalah sistem pembayaran sedang berupaya mengembangkan *interlink* satu sama lain. Laporan CPMI (2022) menyebutkan ada 26 atau mendekati 10% sistem pembayaran yang disurvei telah berpartisipasi dalam *interlinking arrangement tersebut*. Diperkirakan trend partisipasi sistem pembayaran dalam *arrangement* tersebut akan meningkat.



Tantangan ketiga adalah bagaimana mengatasi perbedaan-perbedaan standar teknis dan teknologi yang dipakai oleh sistem-sistem pembayaran yang ada. Tantangan ini merupakan tantangan terbesar di antara tantangan-tantangan berat yang ada dalam membangun *interlinking arrangement*. Tantangan ini sedikit demi sedikit mulai teratasi dengan meningkatnya penggunaan API dan diadopsinya standar pesan finansial ISO 20022. API dan standar pesan finansial tersebut dapat membantu memfasilitasi *interlinking* sistem pembayaran.

Topik *interlinking* sistem pembayaran ini menjadi semakin penting untuk dibahas di G20 mempertimbangkan banyak manfaat dari *interlinking* tersebut. Selain dapat memperpendek rantai transaksi seperti

yang disebutkan sebelumnya, *interlinking* sistem pembayaran juga dapat mendukung harmonisasi format data dan memfasilitasi pertukaran data melalui aplikasi yang dirancang khusus untuk pertukaran data tersebut. *Interlinking* sistem pembayaran juga dapat mengurangi biaya pendanaan dan membatasi pengecekan yang tidak diperlukan. *Interlinking* juga dapat mendukung harmonisasi format data dan memfasilitasi pertukaran data melalui aplikasi yang dirancang khusus untuk pertukaran data tersebut. *Interlinking* sistem pembayaran juga dapat mengurangi biaya pendanaan dan membatasi pengecekan yang tidak diperlukan. *Interlinking* juga dapat meningkatkan persaingan di antara penyedia layanan pembayaran lintas batas. *Interlinking* juga dapat mengurangi risiko penyelesaian lintas batas (*cross-border settlement*) sekalipun manfaat ini tergantung pada rancangan dari sistem yang terhubung dan pengaturannya.

Operator dan pemilik kewenangan perlu berhati-hati dalam mengembangkan *interlinking* sistem pembayaran supaya manfaat potensial tersebut benar-benar dapat diwujudkan. Dukungan politik bisa menjadi tantangan terutama di tahap awal karena diperlukannya biaya tinggi dalam memulai pengembangan *interlinking* sistem pembayaran. Tantangan terkait dukungan politik lain termasuk kerangka regulasi dan pengawasan, perbedaan legal, kriteria akses yang tidak selaras, perbedaan-perbedaan persyaratan tingkat layanan, dan pengelolaan risiko operasional.

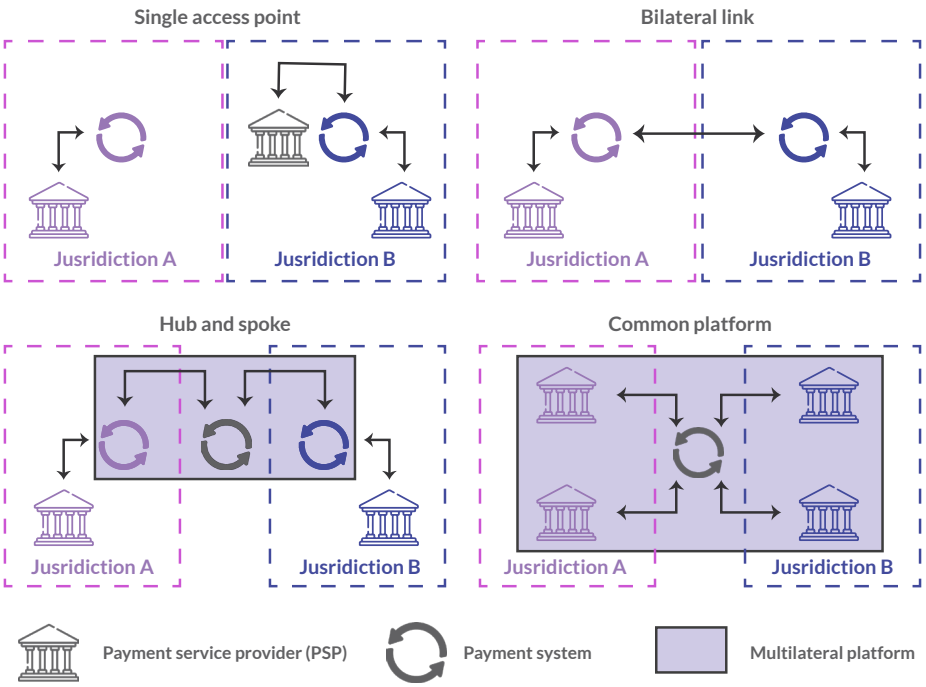
Risiko juga bisa muncul jika tidak dilakukannya mitigasi terhadap tantangan-tantangan *interlinking arrangement* tersebut secara memadai. Pertimbangan terhadap tantangan dan risiko perlu dilakukan sebelum *interlinking arrangement*nya dibangun. Pertimbangan tersebut harus dibuat terus menerus ketika nantinya *arrangement*nya sudah dioperasikan. CPMI (2022) juga mengakui adanya tantangan besar terkait API dan adopsi ISO 20022, sekalipun memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat. Tantangan tersebut dapat menghambat *interlinking* sistem pembayaran yang lebih cepat dan efektif secara biaya.

Dalam laporannya, CPMI (2022) memberikan perspektif dan pertimbangan praktis yang dapat dipakai oleh operator sistem pembayaran dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mencakup perhatian-perhatian yang beragam dari *interlinking arrangement*. Aspek-aspek yang dicakup di antaranya meliputi:

1. Dukungan pemangku kepentingan publik dan swasta yang terkait bagi *interlinking arrangement* sebagai solusi efektif untuk meningkatkan pembayaran lintas batas.

2. Kerangka legal, regulasi dan pengawasan untuk membatasi risiko legal dan menyiapkan basis yang kuat, jelas dan transparan yang dapat ditegakkan di yurisdiksi yang terkait.
3. Viabilitas pasar yang didasarkan analisis kebutuhan bisnis yang komprehensif yang menekankan pentingnya pembentukan *interlinking arrangement*.
4. Kriteria akses yang jelas dan objektif yang dapat dibuka oleh publik dan aturan tata kelola yang konsisten dengan mempertimbangkan tingkat toleransi terhadap risiko dan pendekatan tata kelola sistem pembayaran yang dilibatkan.
5. Tingkat layanan dan aturan skema yang mendefinisikan cakupan, ketersediaan dan kualitas layanan untuk memfasilitasi transfer nilai yang akan diproses melalui *interlinking arrangement* dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran yang terhubung dalam *arrangement* tersebut.
6. Pengaturan operasional (*Operational setup*) untuk memastikan berfungsinya *interlinking arrangement* secara lancar termasuk penyesuaian antara kliring dan aturan-aturan dan proses penyelesaiannya, tumpang tindih antara jam operasi, tersedianya layanan tambahan, dan komponen-komponen infrastruktur pendukung.
7. Pengaturan yang efektif antara konversi valuta asing dan penyelesaiannya dengan melibatkan pihak yang berwenang dan pelaku pembayaran grosir.
8. Monitoring tertutup dan manajemen yang efektif terhadap risiko keuangan potensial yang muncul dari *interlinking arrangement*.
9. Langkah-langkah dan kontrol pengelolaan risiko operasional yang memadai untuk memastikan keberlanjutan operasi sesuai dengan ketahanan yang tinggi dan ketersediaan standar yang disepakati oleh operator-operator yang berpartisipasi.
10. Memanfaatkan standar teknikal internasional untuk format pesan yang umum untuk APIs, dalam mendukung secara langsung pemrosesan (STP) dengan meningkatkan otomatisasi berbagi informasi dan anti pencucian uang/perang melawan pendanaan kegiatan terorisme (AML/CFT) secara memadai.

Gambar 4.4 Model Interlinking Sistem Pembayaran



Contohnya termasuk euroSIC (*single access point*), Directo a México (*bilateral link*), the Regional Payment and Settlement System (REPSS) of the Common Market for Eastern and Southern Africa (*hub and spoke*) and Southern African Development Community (SADC)-RTGS (*common platform*). Platform multilateral termasuk peserta dan entitas yang berpartisipasi dalam *arrangement*. Dalam model *hub and spoke*, partisipannya adalah sistem pembayaran. Dalam model platform *common*, pesertanya adalah PSPs.

Sumber: BIS, IMF dan World Bank, 2023: 8.

Sistem *interlinking* ini berbeda dengan sistem pembayaran lintas batas yang sudah berlangsung cukup lama di mana pembayaran lintas batas menggunakan jasa agen lokal, atau bank koresponden. Bank koresponden menyimpan simpanan yang dimiliki oleh bank dalam sistem pembayaran luar negeri (bank responden) dan menyediakan pembayaran dan layanan lainnya kepada bank-bank responden tersebut. Syaratnya, bank responden harus membuka rekening dengan koresponden dan menyepakati cara untuk bertukar pesan melalui jaringan pesan keuangan internasional tertentu seperti SWIFT.

Diakui bahwa, sistem pembayaran dengan model perbankan koresponden memang telah memungkinkan dua bank berbeda negara dapat melakukan pembayaran lintas batas. Namun demikian, sistem lama ini memiliki kelemahan dalam hal kecepatan dan efisiensi. Sistem ini juga memiliki kelemahan karena biaya pemeliharaan hubungan di antara bank

koresponden di setiap yurisdiksi yang berbeda-beda. Rantai transaksi juga bisa menjadi panjang, jika bank responden harus menggunakan bank perantara dalam konteks di mana bank responden tidak mempunyai hubungan rekening langsung dengan bank penerima. Menemukan bank koresponden di negara-negara tertentu juga tidak mudah bagi bank-bank yang kecil atau PSP non-bank.

Mahalnya biaya, panjangnya waktu dan ketidakjelasan menjadi isu yang dihadapi dalam pembayaran lintas batas yang saat ini dipakai. konvensional. Model *interlinking* sistem pembayaran dipandang bisa mengatasi masalah-masalah yang menjadi tantangan dari sistem pembayaran lintas batas yang lama tersebut. G20 meyakini bahwa berkembangnya pemanfaatan *interlinking* sistem pembayaran lintas batas yang dibahas di *Finance Track*, dapat mendorong transaksi ekonomi dan keuangan lintas batas, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif.

Proyek Nexus dalam Penguatan Pembayaran Lintas Batas

Untuk mendorong percepatan, transparansi dan aksesibilitas pembayaran lintas batas dengan biaya yang lebih rendah, BIS Hub telah menerbitkan cetak biru yang memberikan petunjuk teknis terperinci pada tahun 2021 dan memperbaharui cetak biru tersebut di tahun 2023 (BIS, 2023). Konsep teknis proyek Nexus menghubungkan FPS Singapura, Malaysia, dan zona Euro (melalui TIPS). BIS Innovation Hub ini bertujuan untuk membuat perangkat lunak bagi para operator FPS tersedia di negara-negara yang terhubung.

Nexus Project (proyek Nexus) yang dikembangkan oleh BIS Innovation Hub merupakan contoh sistem pembayaran cepat (*Fast Payment System*/FPS) lintas batas melalui *interlinking arrangement* (BIS 2023). Proyek ini menyediakan elemen hub dan menghubungkan FPS di beberapa negara, sehingga negara-negara yang FPSnya terhubung dapat menawarkan pembayaran lintas batas dalam waktu 60 detik untuk menyelesaikan prosesnya hingga tujuannya tercapai. Interoperabilitas FPS yang terhubung melalui Nexus didukung oleh perangkat lunak yang dikenal sebagai *Nexus Gateways*. *Nexus Gateways* ini mengelola perbedaan dalam data, fungsionalitas, dan proses di antara berbagai FPS.

Setiap peserta FPS perlu beradaptasi satu kali untuk memastikan kompatibilitas dengan *Nexus Gateways*. Cara ini berfungsi lebih baik dibandingkan jika sistemnya harus terlebih dahulu menyesuaikan diri

dengan fitur FPS yang sangat berbeda dan terkadang bertentangan satu sama lain berdasarkan negara per negara. Pendekatan multilateral ini berbiaya lebih rendah dan prosesnya bisa berlangsung lebih cepat, jika dibandingkan dengan penggunaan sistem pembayaran yang terhubung secara bilateral. *Nexus Gateways* dapat berperan mengakomodasi perbedaan antar FPS dengan meminta setiap operator FPS melakukan kodifikasi skema sistem yang terhubung dalam sebuah *Service Level Description* (SLD).

SLD berisikan informasi-informasi yang diperlukan seperti *proxy* yang dapat digunakan dalam proses pembayaran, format nomor rekening lokal, *International Bank Account Numbers* (IBANs) yang diterima, dan nilai pembayaran maksimal yang dapat dikirimkan. SLD ini kemudian dibagikan ke seluruh jaringan Nexus. Bank pengirim akan meminta Nexus untuk SLD negara tujuan, ketika pelanggan melakukan pembayaran. Dengan memiliki informasi yang tersedia dalam SLD ini, bank pengirim dapat meminta informasi yang sesuai kepada pengirim dan mengatur instruksi pembayaran yang akan diterima di negara tujuan.

Nexus memiliki desain yang telah memanfaatkan kemajuan terbaru dalam standar pesan dan teknologi pertukaran data. API telah digunakan Nexus secara ekstensif untuk komunikasi antara Nexus, bank dan penyedia layanan pembayaran, serta penyedia pertukaran valuta (FX). Standar pesan ISO 20022 juga telah digunakan dalam desain Nexus supaya terjadi kesesuaian instruksi pembayaran yang dipakai. Standar ISO 20022 ini telah digunakan oleh banyak FPS sehingga memudahkan proses pembayaran lintas batas.

Penggunaan sistem pembayaran yang instan (*Instant Payment System*/IPS) saat ini telah berkembang dan membuat pembayaran lintas batas menjadi lebih cepat dan berbiaya sangat murah (BIS, 2023). Ada 60 negara yang sistem pembayaran domestiknya telah terhubung satu sama lain yang memungkinkan pelaku pembayaran di negara-negara tersebut dapat mencapai tujuan di negara lain dalam waktu beberapa detik dengan biaya yang sangat kecil.

Nexus telah mengatasi masalah yang muncul dari *interlinking* sistem pembayaran yang bersifat bilateral karena setiap IPS di masing-masing negara mungkin memakai standar teknikal yang berbeda. Proses bisnis dan regulasinya pun berbeda-beda. Inisiatif kerja sama bilateral memerlukan integrasi teknikal yang komplek dan negosiasi hukum di antara banyak pihak. Nexus telah membuatnya menjadi lebih mudah dengan menghubungkan beragam IPS sekaligus dalam suatu jaringan melalui pendekatan multilateral yang terstandar.

BIS (2023) menyimpulkan bahwa Nexus berhasil membuktikan fisibilitas koneksi IPS secara multilateral secara teknis. Koneksi IPS secara multilateral memberikan manfaat potensial bagi individu dan pelaku bisnis di seluruh dunia. Negara-negara didorong untuk membangun koneksi multilateral supaya perdagangan dan remitansi dapat berkembang dengan cepat. Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19 akan semakin kuat. Pertumbuhan ini juga bersifat inklusif karena menjangkau semakin banyak populasi di negara-negara yang IPSnya terkoneksi.

Penutup

Presidensi G20 Indonesia telah berhasil menjaga momentum yang terkait dengan pembahasan tentang pembayaran lintas batas sebagai tindak lanjut implementasi *Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments* yang telah diadopsi pada KTT G20 di Riyadh tahun 2020. Dalam konteks pandemi COVID-19, digitalisasi ekonomi dan keuangan menjadi semakin menguat, sementara tantangan-tantangan inovasi di bidang teknologi yang dihadapi juga semakin sulit diatasi. Dalam konteks revolusi industri 4.0 dan temuan-temuan baru di bidang teknologi, serta berkembangnya transaksi ekonomi melalui platform digital, kebutuhan untuk membangun sistem pembayaran lintas batas yang cepat, transparan, mudah diakses, murah dan aman menjadi semakin meningkat. Presidensi G20 Indonesia memiliki alasan yang cukup kuat untuk mengangkat isu sistem pembayaran lintas batas sebagai salah satu agenda prioritas G20 di tahun 2022.

Sekalipun terdapat tantangan yang berat dalam pembahasan agenda-agenda prioritas akibat isu geopolitik dan situasi makroekonomi yang terdampak pandemi dan perang Rusia-Ukraina, Presidensi G20 Indonesia telah menghasilkan capaian-capaian penting, termasuk dalam pembahasan isu sistem pembayaran lintas batas. Dalam Deklarasi KTT G20 di Bali, pemimpin-pemimpin G20 menegaskan komitmennya untuk terus mendukung implementasi *the G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments*, termasuk perkiraan awal indikator kinerja utama. Di bawah Presidensi G20 Indonesia, pemimpin-pemimpin G20 menerima laporan kemajuan 2022 yang mencakup prioritas-prioritas yang harus ditindaklanjuti dalam pertemuan-pertemuan G20 selanjutnya. Pemimpin-pemimpin G20 juga mendorong bank-bank sentral, dan lembaga-lembaga keuangan yang memiliki kewenangan publik dan industri pembayaran untuk terus berkolaborasi dalam memperkuat pembayaran lintas batas.

Capaian penting lain yang diraih G20 di bawah Presidensi Indonesia adalah laporan yang disusun oleh *Bank for International*

Settlements (BIS) *Committee on Payments and Market Infrastructures* (CPMI) terkait dengan sistem pembayaran *interlinking* dan peran *Application Programming Interfaces* (APIs). API telah dipresentasikan dalam workshop yang diselenggarakan oleh presidensi G20 Indonesia bekerja sama dengan BIS CPMI dan the BIS Innovation Hub (BISIH). Workshop tersebut membahas pembayaran lintas batas dan interoperabilitas pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022. Capaian lain yang diakui oleh pemimpin-pemimpin G20 di Bali adalah laporan bersama yang disusun oleh BIS CPMI, BISIH, IMF, dan World Bank terkait opsi-opsi akses dan interoperabilitas Central Bank Digital Currencies (CBDCs) dalam pembayaran lintas batas.

Sebagai pemegang presidensi G20, Indonesia juga telah berhasil mendorong inisiatif konkret dalam membangun kerja sama dalam mengembangkan sistem pembayaran lintas batas di tingkat regional dengan melibatkan 5 bank-bank sentral di ASEAN. Inisiatif ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya cakap dalam mempromosikan ide-ide inovatif, tetapi juga memiliki kemampuan dalam menciptakan langkah-langkah konkret untuk memastikan perwujudan ide-ide inovatif yang dimiliki G20.

Di tingkat domestik, Indonesia memiliki tingkat kesiapan yang baik untuk mengembangkan sistem pembayaran lintas batas. Bab ini telah menunjukkan *Blue Print* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang merangkum rencana-rencana Bank Indonesia dalam membangun Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital. Indonesia juga sudah menyusun *white paper* tentang Digital Rupiah dalam upaya untuk mengeksplorasi desain dan penerbitan CBDC Indonesia. Kesiapan domestik ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memperoleh manfaat dari kemajuan pembahasan isu prioritas yang bersifat strategis seperti sistem pembayaran lintas batas di dalam G20.

Referensi

Bank Indonesia (2019a). "Bank Indonesia Paparkan 5 Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025," https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_214019.aspx

Bank Indonesia (2019b). "Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. *Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital*. Power Point Presentation (PPT)." https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/BSPI-Presentasi.pdf

Bank Indonesia (2019c). "Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital." https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/blueprint-2025/default.aspx

Bank Indonesia (2019d) "Lampiran siaran pers No 21/40/DKOM.27Mei 2019." https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Documents/Lampiran-Siaran-Pers-Inisiatif-Perwujudan-5-Visi-SPI-2025.pdf

Bank Indonesia (2020). "Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah." https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx

Bank Indonesia (2022a), "Fast, Affordable and Inclusive Cross-Border Payments to Accelerate Economic Recovery. Press Release No. 24/183/DKom." 14 Juli 2022. https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2418322.aspx

Bank Indonesia (2022b) "The Implementation of Cross-Border QR Payment Linkage (Press Releases No. 24/232/DKom)"

Bank Indonesia (2022c). "Peran CBDC dalam Memperkuat Pelaksanaan Mandat Bank Sentral, Siaran Pers No. 24/177/DKom." https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2417722.aspx

Bank Indonesia (2022d). "Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah. https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/default.aspx FSB (2023a).

Financial Stability Board/FSB (2023). "G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payment. Priorty Actions for Achieving the G20 Targets." Februari 2023. https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P230223.pdf

Bank Indonesia Institute/BI Institute (2023). Indonesia untuk Dunia. Pulih Bersama Pulih Lebih Kuat. https://www.bi.go.id/id/bi-institute/publikasi/Pages/Indonesia-untuk-Dunia-Pulih-Bersama-Pulih-Lebih-Kuat.aspx

Bank for International Settlement/BIS (2020). "BIS Annual Economic Report. Central Bank and Payment in Digital Era." Hal 67-68, https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2020e3.pdf

Bank for Internatioal Settlement/BIS (2023). "Project Nexus. Enabling Instant Cross-border Payments. Conclusions from a technical proof

Bank for Internatioal Settlement/BIS (2023). "Project Nexus. Enabling Instant Cross-border Payments. Conclusions from a technical proof of concept between the Eurosystem, Malaysia and Singapore." March 2023.

BIS, IMF dan World Bank (2023). "Exploring Multilateral Platforms for Cross-Border Payments" https://www-elibrary-imf-org.translate.goog/view/journals/064/2023/001/article-A001-en.xml?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Committee on Payments and Market Infrastructures/CPMI (2022) "Interlinking payment systems and the role of application programming interfaces: a framework for cross-border payments." Report to the G20, July 2022.

Financial Stability Board/FSB (2022). "G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments. Consolidated progress report for 2022." 10 October 2022. https://www.fsb.org/2022/10/g20-roadmap-for-enhancing-cross-border-payments-consolidated-progress-report-for-2022/

FSB (2023). "G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payment. Priorty Actions for Achieving the G20 Targets." Februari 2023. https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P230223.pdf

G20 (2022a). "Communiqué G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting." 17-18 February 2022, Jakarta, Indonesia.

G20 (2022b) "G20 Chair's Summary Third G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting Bali," 15-16 July 2022

G20 (2022c). "G20 Chair's Summary Fourth G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting Washington DC," 12-13 October 2022

Kementerian Keuangan (2022). "Finance Ministers and Central Bank Governors, Joint Press Release No. 24/191/DKomNo. SP-107/KLI/2022." https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Menteri-Keuangan-dan-Gubernur-Bank-Sentral-G20

Portal Informasi Indonesia (2022). "Sejalan dengan G20, BSPI 2025 BI Membuat Ekonomi Indonesia Bertahan Menuju Pemulihan," https://indonesia.go.id/kategori/kabar-terkini-g20/4140/sejalan-dengan-g20-bspi-2025-bi-membuat-ekonomi-indonesia-bertahan-menuju-pemulihan



BAB 5

Pengembangan Skema Pendanaan Pembangunan Berkelanjutan – Penerapan Standar Infrastruktur Berkualitas melalui Kebijakan ESG di Indonesia

Pendahuluan

Pandemi sebagai sebuah *extraordinary event* menyusul isu perubahan iklim yang sudah bergaung beberapa waktu sebelumnya membuat banyak pihak, baik pemerintah, sektor usaha, maupun masyarakat sadar bahwa pembangunan perlu di desain dan dijalankan dengan konsep berkelanjutan (*sustainable development*) (IPCC, 2021). Pandemi dan perubahan iklim telah menyebabkan terjadinya masalah kesehatan berskala global dan berdampak multidimensional ke krisis pangan, krisis sosial, ekonomi dan keuangan (UNFCCC, 2021). Hal ini diduga terkait dengan upaya pembangunan dan industrialisasi yang ekstraktif dan ekspansif, yang pada saat bersamaan dilakukan dengan mengabaikan prinsip-prinsip yang mengedepankan kelestarian lingkungan. Pembangunan dan industrialisasi ini terjadi secara masif baik di negara maju maupun berkembang yang dimulai pada era 1990-an sampai dengan 2000-an, dan kemudian baru dirasakan dampaknya pada era sekarang ini yang jamak disebut era *Anthropocene*.

Atas kondisi yang makin mengkhawatirkan ini, pemerintah dan organisasi-organisasi internasional melakukan serangkaian publikasi, himbauan, kampanye, aksi nyata dan merumuskan kebijakan sebagai upaya pemenuhan komitmen negara terhadap kesepakatan global. Bersama-sama dengan masyarakat internasional dan berbagai pemangku kepentingan, pemerintah dan organisasi-organisasi internasional berupaya mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

SDGs merupakan kesepakatan pembangunan baru yang diprakarsai oleh masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dalam rangka mendorong perubahan-perubahan paradigma dan tujuan pembangunan yang bersifat berkelanjutan dengan tetap menegakkan penghormatan pada hak asasi manusia dan kesetaraan dengan berlandaskan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup (United Nations, 2018). Dalam hal ini SDGs bukan berkontradiksi dengan upaya pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan, namun justru memperluas sudut pandang pemangku kepentingan untuk melihat bahwa kesejahteraan bukan hanya *one time consumption concept* dengan *monetary value* tertentu, namun juga melihat bahwa kesejahteraan juga melingkupi kelestarian alam dan lingkungan, keteraturan sosial, dan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab (KPBU Kemenkeu, 2022).

Perhatian besar diberikan pada isu pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di mana pembangunan menekankan pentingnya

keberlanjutan infrastruktur secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan juga perlu memberikan perhatian pada dampak-dampak yang ditimbulkan oleh infrastruktur tersebut.

Keselarasan proses bisnis dari hulu hingga hilir perlu menjadi perhatian dalam upaya membangun infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan pentingnya pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 5 tahun, maupun yang dieksekusi per tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (KPBU Kemenkeu, 2022).

Terkait dengan konteks upaya pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan berkelanjutan tersebut, maka dibutuhkan pembiayaan yang juga *sustainable*. Hal ini menjadi cukup komplek bagi negara-negara berkembang, karena isu yang dihadapi dalam pencapaian pembiayaan ini bukan hanya tentang pencapaian efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pembangunan, namun juga terkait dengan ketersediaan anggaran publik yang cukup terbatas karena digunakan untuk pemenuhan alokasi prioritas lainnya dalam *public budget* (APBN di Indonesia) seperti pendidikan dan kesehatan.

Dilandasi dari latar belakang tersebut, maka muncul tantangan dalam pemenuhan pembiayaan, di mana diharapkan muncul partisipasi dari sektor privat, baik yang berasal dari domestik maupun yang berlatar belakang investor global. Untuk menjawab tantangan tersebut, sektor publik yang mempunyai tugas penyediaan infrastruktur, perlu menyadari bahwa infrastruktur tidak hanya dilihat dari fisik bangunan, namun juga melihat sisi *soft infrastructure* yang terkait dengan lingkungan, sosial dan tata kelola dalam rangka penyediaan infrastruktur tersebut. Hal ini penting, karena pembangunan infrastruktur, selain bermanfaat untuk menunjang pelayanan publik yang berkualitas, juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan. Dari sini, pemerintah mengakui potensi munculnya risiko lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur. Negara harus mengelola risiko tersebut dengan baik supaya dapat menghindarkan terjadinya risiko tersebut. Jika risiko terjadi, pembangunan infrastruktur dapat terhambat sehingga pemerintah tidak dapat mewujudkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (KPBU Kemenkeu, 2021). Cara pandang ini terangkum dalam sebuah prinsip umum yang jamak disebut sebagai prinsip *Economic Social Governance* (ESG).

Prinsip ESG merupakan konsep yang mengedepankan pertimbangan lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan pembangunan/investasi/bisnis berkelanjutan (Alijoyo, 2019). Prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial dan tata kelola yang baik harus diterapkan dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan. Prinsip ESG mencakup tiga unsur utama yang harus menjadi dasar pembuatan keputusan dan implementasi keputusan tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. **Unsur lingkungan** yang menekankan bahwa pembangunan infrastruktur seyogyanya menggunakan energi ramah lingkungan; mengelola limbah agar tidak menjadi polutan; menjaga konservasi sumber daya alam tak tergantikan; memperlakukan binatang yang hidup di lingkungan pembangunan secara wajar dan tidak semena-mena; dan menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif dalam pengelolaan risiko lingkungan;
2. **Unsur sosial** yang menekankan pentingnya pemilihan pemasok yang juga memiliki kebijakan dan praktik ESG; melibatkan organisasi dalam pembangunan komunitas baik dalam bentuk persentase laba dan/atau kerja sukarela para karyawan bagi komunitas; memberikan kepastian lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi karyawan; memberikan kepastian untuk mempertimbangan masukan dan harapan pemangku kepentingan terhadap organisasi;
3. **Unsur tata kelola** dengan menggunakan metode akuntansi yang sesuai dengan standar yang diharuskan; memberikan kepastian bagi semua pihak terkait kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan suara untuk keputusan mengenai isu yang penting bagi negara; memastikan tidak adanya kontribusi politik untuk memperoleh perlakuan istimewa dari penerima kontribusi; memastikan bahwa pemangku kepentingan dalam pembangunan tidak terlibat dalam kegiatan illegal (KPBU Kemenkeu, 2021a).

Penerapan prinsip ESG ini dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja bisnis dan keberlanjutan usaha suatu perusahaan (Sembel, 2021). Hasil penelitian Oxford menunjukkan adanya peningkatan kinerja bisnis perusahaan sebesar 80-88% jika perusahaan menerapkan ESG. Penelitian tersebut juga menunjukkan pertumbuhan harga saham sebesar 80% bagi perusahaan yang menerapkan ESG (Ding, 2022). Dengan mengembangkan program ESG terbuka peluang

bagi perusahaan untuk mendapatkan akses modal yang lebih besar bagi perusahaan. Brand perusahaan yang menerapkan ESG juga akan diterima secara luas (KPBU Kemenkeu, 2021a). Prinsip ESG ini juga berkontribusi positif bagi privat, karena tidak hanya berinvestasi untuk mendapatkan *return*, namun juga mempunyai reputasi yang baik karena turut serta menjaga lingkungan. Apabila dikaitkan dengan pembangunan dalam rangka pemenuhan SDGs, para pemangku kepentingan memiliki peluang lebih besar untuk mengelola dampak dan risiko sosial dan lingkungan jika mereka menjadikan unsur *environmental, social, and governance* (ESG) dalam pembangunan infrastruktur. Ini merupakan nilai tambah dari manfaat-manfaat lain yang diterima oleh para pemangku kepentingan tersebut (KPBU Kemenkeu, 2021).

Dari uraian konteks keterkaitan pembangunan infrastruktur, pemenuhan SDGs, dan penerapan prinsip ESG sebelumnya, hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara mengimplementasikan prinsip ESG dalam pembangunan infrastruktur, terutama dalam konteks negara berkembang. Dilema yang dihadapi dan muncul selama ini adalah konsep keberlanjutan ini menjadi *obstacles* bagi proyek infrastruktur karena akan membuat durasi pembangunan menjadi lebih lama dan kemudian berujung kepada biaya proyek yang mahal. Kedua hal tersebut menjadi tantangan utama dari penerapan ESG yaitu dalam konteks kecepatan waktu implementasi dan tidak menambah mahal biaya proyek.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, sudah seharusnya pemerintah selaku regulator perumus kebijakan publik mengambil aksi nyata untuk mulai menerapkan prinsip ESG ini dalam merancang pembangunan, dalam hal ini, Kementerian Keuangan mengambil peran dan inisiatif untuk terlibat dan berkontribusi dalam menciptakan efek bola salju penerapan ESG agar dapat memengaruhi Kementerian/Lembaga lain dan Pemerintah Daerah agar juga menerapkan prinsip ESG ini dalam perencanaan pembangunan sesuai kewenangan mereka. Inisiatif pemerintah ini akan ditangkap oleh sektor privat sebagai *breakthrough policy* yang memperlihatkan keseriusan pemerintah sehingga membuat korporasi dan investor tidak ragu-ragu untuk turut dalam upaya penerapan ESG dalam bisnis mereka. Peran serta semua pihak tersebut akan lebih mudah terkoordinasi dan terakselerasi apabila terdapat satu *platform* yang menyatukan inisiatif. Atas kebutuhan ini, disusunlah *Manual ESG* sebagai bentuk kesamaan cara pandang antar pemangku kepentingan, sehingga memunculkan *ownership* dari semua pihak terhadap proses implementasi ESG.

Perhatian terhadap pentingnya ESG dalam pembangunan infrastruktur telah mendorong Presidensi G20 Indonesia untuk mengangkat isu pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu agenda prioritas dalam G20 di tahun 2022. Diharapkan dengan masuknya isu prioritas ini, pemerintah di negara-negara G20 dan non G20 terdorong untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur memenuhi kriteria *environmental*, *social*, *and governance* (ESG). Pembahasan ini sejalan dengan pembahasan yang telah dilakukan dalam *Finance Track* (Jalur Keuangan) khususnya terkait dengan *sustainable finance* dan pembiayaan perubahan iklim dan juga sesuai dengan pembahasan dalam *Infrastructure Working Group* (IWG).

Ada dua topik utama yang dibahas dalam IWG:

1. Pengembangan indikator-indikator investasi infrastruktur yang berkualitas (*Quality Infrastructure Investment*/QII) dan
2. Penyempurnaan tata kelola *Global Infrastructure Hub* (GIHub) (KPBU Kemenkeu, 2022).

IWG mendorong empat agenda untuk dibahas dalam G20. Agenda pertama adalah mendorong peningkatan investasi infrastruktur yang berkelanjutan melalui partisipasi sektor swasta. Agenda kedua adalah meningkatkan inklusi sosial dan mengatasi kesenjangan daerah. Agenda ketiga adalah meningkatkan investasi dalam bidang infrastruktur digital dan *infraTech*. Agenda keempat adalah memajukan infrastruktur yang transformatif pasca pandemi COVID-19 (KPBU Kemenkeu, 2022a).

Penyusunan kerangka indikator *Quality Infrastructure Investment* (QII) ini berhubungan dengan penerapan standar ESG dalam pembangunan infrastruktur, di mana pembangunan infrastruktur yang berkualitas itu mempunyai dimensi sosial dan lingkungan, selain dimensi ekonomi. Pemerintah Indonesia c.q Kementerian Keuangan kemudian melihat perluasan konsep ini dalam konteks, proyek-proyek infrastruktur yang dibangun dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi *pilot project* dalam memastikan pembangunan infrastruktur menggunakan prinsip ESG. Hal ini dilatarbelakangi tata kelola penyiapan proyek KPBU yang relatif *established* dan mendapati fakta bahwa beberapa contoh proyek KPBU yang telah selesai dilelang, masih menghadapi tantangan yang terkait dengan dimensi ESG dalam pelaksanaan proyek.

Penyusunan *manual ESG* ini perlu dilakukan dengan kredibel dan komprehensif sehingga realistis dan dapat meyakinkan semua pemangku kepentingan. Penyusunan manual ini dilakukan dalam kerangka kerjasama presidensi G20 dengan *United Nations Development Programme*

(UNDP) dan didukung oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Negara-negara anggota mengharapkan agar presidensi dapat menyiapkan dan mendiskusikan dokumen kerangka kerja yang ringkas yang memuat rekomendasi termasuk langkah-langkah konkrit. Rekomendasi tersebut juga termasuk memuat bagaimana negara-negara anggota dapat memiliki akses yang mudah dan cepat (KPBU Kemenkeu, 2022).

Dari perspektif domestik, guna menunjang percepatan proses, Kementerian Keuangan menugaskan *Special Mission Vehicle* antara lain PT IIF (*Indonesia Infrastructure Finance*) untuk menjadi lokomotif dalam proses *mainstreaming* ESG dalam pembangunan infrastruktur. PT IIF perlu menyusun strategi untuk dapat menjawab tantangan ESG, yaitu menginternalisasi *local wisdom*, tidak menunda waktu dan proses pembangunan infrastruktur, dan tidak menambah mahal biaya proyek.

Kerangka Kerja ESG

Sejarah ESG

Konsep ESG berkembang dari kesadaran bahwa aktivitas bisnis dan investasi mempunyai dimensi yang lebih luas daripada hanya sekedar motif keuntungan semata (KPBU Kemenkeu, 2021). Dimensi tersebut adalah kelestarian lingkungan, dampak positif bisnis ke masyarakat, dan proses tata kelola yang baik dalam menjalankan bisnis. Ketiganya menjadi faktor penting bagi bisnis karena memberikan dukungan kepada keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, parameter dan kriteria terkait dengan ketiga hal tersebut juga perlu menjadi perhatian bagi investor dalam proses pengambilan keputusan investasi.

Dilihat dari lini waktu perkembangannya, konsep ESG mulai muncul pada tahun 1960-an ketika *Electrical and Mine Workers Unions* yang mengelola dana pensiun di Amerika Serikat mulai mempertimbangkan dampak lebih luas dari aktivitas bisnisnya terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berinvestasi pada sektor perumahan publik dan sektor kesehatan.

Pada dekade berikutnya, situasi geopolitik yang memanas dengan terjadinya perang Vietnam yang melibatkan Amerika Serikat memunculkan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan penggunaan senjata kimia yang juga berdampak besar ke lingkungan. Hal tersebut cukup memengaruhi keputusan investor pada waktu itu untuk menghindari investasi pada perusahaan yang terafiliasi sebagai *supplier*

perang dan melakukan pelanggaran hukum atas hak asasi manusia. Di era ini juga muncul teori dasar yang menjadi fondasi bagi perkembangan ESG berikutnya, yaitu teori *Shareholder Value* yang dikemukakan oleh Milton Friedman, ekonom yang juga penerima nobel dari Amerika Serikat. Penerimaan publik atas kampanye kelestarian lingkungan juga mulai muncul di era ini dengan munculnya *public campaign Earth Day* yang bertahan sampai saat ini.

Selanjutnya pada era 1980-an, pemberlakuan politik *apartheid* di Afrika Selatan yang memunculkan isu rasial dan hak asasi manusia membuat Amerika Serikat membuat peraturan *Comprehensive Anti-Apartheid Act* yang membatasi eksposur investasi di Afrika Selatan. Pada perkembangan berikutnya, diskusi mengenai isu ini makin menguat pada awal tahun 1990-an, di mana mulai muncul kesadaran bersama warga dunia tentang ancaman perubahan iklim.

Pemimpin-pemimpin global merespon kepedulian tersebut dengan menghadiri pertemuan KTT Bumi di Rio de Janeiro. Dalam pertemuan tersebut para pemimpin global berhasil menyepakati *United Nations Framework on Climate Change* pada 1992, yang kemudian berkembang menjadi *Kyoto Protocol* pada 1997 dan *Paris Agreement* pada 2015. Pada intinya, kesepakatan internasional tersebut memuat komitmen negara-negara untuk melakukan aksi nyata dalam rangka menghadapi ancaman krisis lingkungan karena perubahan iklim.

Di era ini juga mulai muncul instrumen investasi yang menjadi pelopor indeks berbasis investasi berkelanjutan (*sustainable investment*), yaitu *Domini Social Index* yang saat ini berkembang menjadi *MSCI KLD 400 Social Index*. Para investor memberikan perhatian lebih besar terhadap isu lingkungan dan sosial, serta pentingnya praktik tata kelola perusahaan yang baik. Perkembangan ini mendorong United Nations Principles for Responsible Investment (PRI) meluncurkan ESG di tahun 2006.

Dalam rangka membuat standar ESG ini lebih terinstitusionalisasi dan diterapkan lebih luas, *The World Economic Forum (WEF)* Davos 2020 *dan the International Business Council (IBC)*, bersama dengan *the Big Four (Deloitte, PwC, KPMG, and Ernst & Young)* membuat pengukuran standar penerapan ESG dengan 22 variabel metrik yang digunakan sebagai referensi bagi pelaporan pelaksanaan bisnis berdasarkan konsep ESG. Platform ini kemudian dikenal dengan *Davos Manifesto 2020: The Universal Purpose of a Company in the Fourth Industrial Revolution* yang disepakati akan dijalankan oleh 120 perusahaan multinasional besar di seluruh dunia.

Dari rangkaian sejarah perkembangan ESG tersebut, kesadaran bersama warga dunia semakin menguat dan bersepakat untuk melihat bisnis secara lebih komprehensif dengan perspektif *beyond profit*, bahwa faktor lingkungan, sosial masyarakat, dan tata kelola yang baik sangat vital berfungsi sebagai fondasi dalam keberlanjutan bisnis. Para pemilik modal yang menginvestasikan kapitalnya di bisnis yang berkelanjutan memiliki pengaruh yang lebih besar (*leveraging power)* dalam mengelola dana investasi mereka. Para investor tersebut perlu mengelola aset sesuai nilai yang mereka percaya dapat mendorong perusahaan dan pasar modal memberikan perhatian yang lebih besar terhadap unsur sosial dan lingkungan dalam operasi mencari keuntungan mereka.

ESG dan Agenda Prioritas G20

Semangat dan filosofi ESG ini juga muncul sebagai sebuah isu yang ingin didorong dan diimplementasikan melalui forum G20. Hal ini dikarenakan, konsep ESG tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan G20 itu sendiri, yaitu mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif. Konsepsi ESG ini secara lebih spesifik sejalan dengan tema yang diusung oleh Presidensi G20 Indonesia, yaitu *recover together recover stronger*. Tema tersebut menetapkan agenda di sektor keuangan, yaitu penerapan *sustainable finance* yang berfokus pada pembahasan risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan. Sebagai forum kerjasama multilateral G20 memiliki kekuatan yang berpengaruh dari sisi populasi dan pasar, perdagangan dan investasi global dan PDB dunia (DJPb Kemenkeu, 2022). Dengan kekuatan seperti itu, forum G20 ini tentu memiliki kapasitas dan pengaruh yang besar dalam pembahasan dan penerapan suatu isu, termasuk konsep ESG ini.

Situasi dan kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa negara-negara maju dalam G20 khususnya Uni Eropa sebagai *funder* yang mempunyai sumber daya keuangan/modal relatif besar, memiliki persyaratan yang sangat ketat terkait dengan pemenuhan syarat dan ketentuan mengenai mitigasi risiko iklim, risiko rendah karbon dan kriteria proyek berkelanjutan sebagai bagian dari syarat pencairan dana pinjaman maupun hibah. Di sisi lain, aktivitas pembangunan/investasi/bisnis yang membutuhkan pendanaan, masih cukup bervariasi kesiapannya untuk dapat membuat proposal proyek pembangunan atau investasi yang memenuhi kriteria negara *funder* terkait dengan pemenuhan ESG, belum lagi standar mengenai proyek yang menerapkan ESG ini juga banyak dipengaruhi oleh faktor lokal (*local wisdom*) yang juga berbeda-beda

antar satu proyek atau negara dengan proyek dan negara lainnya.

Situasi tersebut memunculkan *gap* (kesenjangan) yang perlu ditutup agar tujuan besar G20 dapat tercapai. Oleh karena itu, Indonesia menyampaikan pandangannya tentang pentingnya penerapan indikator *Quality Infrastructure Investment* (QII) pada pertemuan *Finance Ministers and Central Bank Governors* (FMCBG) di Bali pada 15-16 Juli 2022. Indonesia mendorong negara-negara anggota G20 menerapkan QII dalam membangun proyek infrastruktur supaya pembangunan infrastruktur membawa manfaat yang optimal bagi ekonomi, lingkungan dan sosial. Indonesia mendorong supaya negara-negara G20 menerapkan indikator tersebut dalam setiap proyek infrastruktur yang ditawarkan (KPBU Kemenkeu, 2022b).

Gambar 5.1. Prinsip-prinsip Investasi Infrastruktur Berkualitas

	Indikator QII
1.	Memaksimalkan dampak positif infrastruktur dalam mencapai pertumbuhan dan pengembangan yang berkelanjutan
2.	Meningkatkan efisiensi ekonomi dari perspektif *life-cycle cost*
3.	Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam investasi infrastruktur
4.	Ketahanan bangunan terhadap bencana alam dan risiko lainnya
5.	Mengintegrasikan pertimbangan sosial dalam investasi infrastruktur
6.	Memperkuat tata kelola infrastruktur

Sumber: G20, Principles for Quality Infrastructure Investment, diadopsi di KTT Osaka G20, 2019.

Prinsip-prinsip *Quality Infrastructure Investment* (QII) menekankan pentingnya layanan infrastruktur yang berkualitas, efisiensi ekonomi, keamanan, lapangan pekerjaan, peningkatan kapasitas, dan transfer *knowledge*. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan investasi infrastruktur yang berkelanjutan yang sekaligus dapat mengatasi dampak negatif yang bisa muncul dari pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur juga dapat menjadi lebih inklusif secara ekonomi dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas (KPBU Kemenkeu, 2022c). Indikator QII tersebut sangat

terkait dengan prinsip ESG, kecuali prinsip nomor 2. Dalam konteks operasionalisasi konsep QII tersebut, dibutuhkan kerangka kerja yang sifatnya lebih detail dan implementatif serta komprehensif melihat substansi nilai yang ingin dituju setelah mempertimbangkan variabilitas latar belakang para *funder*/investor/pemilik dana di satu sisi dan di sisi lain mempertimbangkan penerima dana yang punya kultur, sistem nilai dan *local wisdom* sendiri dalam menjalankan dan memaknai pembangunan. Oleh karena itu, dibangunlah Kerangka Kerja Implementasi ESG dalam konteks G20 untuk menjawab kebutuhan tersebut.



Bagaimana Kriteria ESG Diterapkan?

Secara umum, standar ESG mengintegrasikan tiga unsur utama, yaitu lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik. Kriteria ESG menegaskan bahwa prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial dan tata kelola yang baik harus menjadi acuan dalam implementasi pembangunan infrastruktur dan pengambilan keputusan yang terkait. Prinsip E (*environmental)* menegaskan pentingnya mempertimbangkan posisi lembaga terhadap isu lingkungan dan upaya melestarikan sumber daya alam (KPBU Kemenkeu, 2021a). Prinsip S (*social*) menekankan pengelolaan hubungan sosial antara satu aspek sumber daya dengan aspek sumber daya lainnya. Prinsip G (*governance*) menekankan pentingya standar sebagai referensi bagi institusi dalam menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*) (Media Digital, 2022). Operasionalisasi standar ESG dalam kegiatan pembangunan/investasi/bisnis dapat tergambar dalam matrik aksi sebagaimana disebutkan pada Tabel 5.2.

Gambar 5.2. Operasionalisasi Standar ESG dalam Pembangunan

Prinsip E (*Environment*)	Prinsip S (*Social*)	Prinsip G (*Governance*)
Prioritisasi penggunaan sumber daya energi ramah lingkungan dan terbarukan.	Pengakuan dan pemberdayaan keberagaman latar belakang individu (SARA) sebagai aset dalam kegiatan pembangunan/ investasi/bisnis	Kepatuhan terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku
Pengendalian polusi, penurunan polutan dan efek gas rumah kaca	Penerapan inklusivitas dan kesetaraan gender dalam kegiatan pembangunan / investasi/bisnis	Transparansi proses pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan / investasi/bisnis.
Strategi pengelolaan sampah dan limbah yang komprehensif dari hulu ke hilir	Jaminan perlindungan hak asasi manusia – termasuk pemberian upah layak dan dukungan lingkungan kerja	Menghindari keterlibatan dalam aktivitas illegal dan konflik kepentingan di antara pemangku kepentingan.
Pelestarian dan usaha konservasi Sumber Daya Alam	Pengelolaan dan penyelesaian pembebasan lahan dan relokasi penduduk yang terdampak kegiatan pembangunan/ investasi/bisnis dengan baik	Proses pencatatan dan pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pembangunan / investasi/bisnis sesuai dengan standar.
Manajemen risiko yang efektif dalam menjalankan program sesuai prinsip lingkungan		Penerapan manajemen risiko yang dapat mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang berdampak pada tata kelola.

Secara umum, organisasi yang menerapkan kriteria ESG menjadikan pedoman dan standar ESG sebagai referensi dalam pelaksanaan operasional organisasi. Proposal investasi akan dilihat pertama kali dengan menggunakan pedoman dan standar ESG tersebut. Hanya apabila sesuai, rencana investasi atau kegiatan bisnis tersebut akan dilaksanakan. Sebagai contoh, *the World Bank Group* memiliki

pedoman *Environmental and Social Framework* (ESF). ESF disusun berdasarkan *Environmental and Social Policy for Investment Project Financing* yang menjadi panduan *the World Bank Group* dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Gambar 5.3. Standar Lingkungan dan Sosial

No	*Environmental and Social Standards* (ESS)
1.	Asesmen dan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial serta dampaknya
2.	Kondisi pekerja dan lingkungan kerja
3.	Efisiensi sumberdaya dan manajemen pencegahan polusi
4.	Kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar proyek
5.	Pembebasan lahan, pembatasan penggunaan lahan dan pemukiman kembali penduduk terdampak
6.	Konservasi biodiversitas dan manajemen Keberlanjutan Sumber daya alam dan lingkungan hidup
7.	Penduduk pribumi dan komunitas lokal
8.	Peninggalan bersejarah
9	Perantara keuangan (*financial intermediaries*)
10.	Pengelolaan kepentingan *stakeholders* dan pengungkapan informasi yang diperlukan

Sumber: World Bank. (2023) "Environmental and Social Standards (ESS)." https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards

Berdasarkan pedoman tersebut, *due diligence* akan dilakukan atas usulan proyek yang diajukan dengan karakteristik dan signifikansi risiko serta dampak lingkungan dan sosial dari pelaksanaan proyek tersebut (KPBU Kemenkeu, 2021). Pedoman ESF ini kemudian akan digunakan sebagai acuan dalam menyepakati *terms and conditions* dari *loan agreement* terkait dengan aspek lingkungan dan sosial yang dituangkan dalam *Environmental and Social Commitment Plan* (ESCP) sebagai acuan untuk memonitor kesesuaian kinerja lingkungan dan sosial proyek *Environmental and Social Standards* (ESS).

Implementasi Kerangka Kerja ESG dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Indonesia dan Implementasi ESG

Secara umum, penerapan standar ESG belum terlalu *mainstream* di Indonesia. Berdasarkan data dari *Economist Intelligence Unit* dari *the Economist*, Indonesia berada pada level *moderate* dalam hal risiko penerapan ESG. Level *moderate* menunjukkan bahwa implementasi aspek lingkungan masih tinggi risikonya, aspek sosial risikonya rendah, sedangkan tata kelola berisiko moderat. Data lain dari RobecoSAM lembaga *think tank* di bidang lingkungan, menunjukkan bahwa komitmen Indonesia terus menurun dalam komitmen penerapan ESG yang direpresentasikan dengan penurunan *ESG scores* selama periode 3 tahun mulai tahun 2021, 2020, dan 2019.

Hal ini berkebalikan dengan negara sekawasan seperti Filipina dan Vietnam yang terus menunjukkan perbaikan dalam implementasi ESG dengan pencapaian skor ESG tertinggi dalam periode tahun yang sama. Data juga menunjukkan bahwa negara yang ramah dan menerapkan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, relatif lebih menarik perhatian investor daripada negara yang hanya fokus pada pembangunan ekonomi saja.

Di sisi lain, Indonesia, sebagai negara yang berpotensi terjebak masuk ke dalam *middle income trap* padahal mempunyai bonus demografi yang besar, perlu melakukan serangkaian aksi nyata dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya dengan bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik (*hard infrastructure*) selain infrastruktur non fisik (*soft infrastructure*). Urgensi pembangunan ini juga terkait dengan komitmen Indonesia dalam *Paris Agreement* untuk berpartisipasi dalam kampanye global perubahan iklim dengan menetapkan *Nationally Determined Contribution* pengurangan polusi. Namun hal klasik yang juga menjadi tantangan adalah ketersediaan anggaran dalam pembiayaan infrastruktur, yang tidak dapat hanya disediakan oleh sektor publik, namun juga perlu melibatkan partisipasi swasta. Dalam RPJMN 2020-2024, Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp6.445 triliun untuk membangun infrastruktur di dalam negeri. Dari jumlah tersebut, APBN hanya dapat memenuhi sebesar Rp2.385 triliun atau sekitar 37%. Peran swasta diperlukan untuk memenuhi sisa kebutuhan pembangunan infrastruktur. Beragam skema telah disiapkan untuk mendorong keterlibatan pihak swasta, termasuk melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan

Usaha ataupun pembiayaan kreatif (*creative financing*) (KPBU Kemenkeu, 2022b).

Dari uraian fenomena-fenomena di atas, perlu muncul kesadaran dari pemerintah untuk menerapkan konsep pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, sosial dan *governance* (ESG) dengan mengundang partisipasi dari sektor privat dalam kerangka skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dorongan untuk mengimplementasikan ESG dalam proyek infrastruktur ini memberikan peluang bagi para investor yang berkomitmen pada investasi yang berkelanjutan (SRI) untuk menutup *gap* kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional sebesar Rp.2,7 triliun tersebut (KPBU Kemenkeu, 2021a).

Dalam kajiannya atas beberapa proyek infrastruktur, World Bank menemukan bahwa penerapan standar ESG pada tahapan perencanaan proyek dapat berkontribusi pada percepatan proses pelaksanaan/ konstruksi proyek. Percepatan konstruksi proyek ini dimungkinkan karena unsur-unsur ESG berfungsi sebagai *risk mitigation tools* proyek itu sendiri (Bouyé et al., 2021). Secara prinsip, fondasi pembangunan berkelanjutan dengan pilar ESG ini sudah diterapkan dengan pertimbangan tertentu.

Dokumen penyiapan proyek seperti Prastudi Kelayakan mencakup ruang lingkup peninjauan atas unsur dampak lingkungan dan sosial yang dapat dilihat pada pemenuhan AMDAL proyek, sementara pemenuhan unsur tata kelola dapat dilihat dari kajian legal. Namun memang pelaksanaannya belum terstandarisasi untuk semua proyek.

Kerangka kerja ini diperkuat lagi dengan penerapan konsep *Quality Infrastructure Investment* (QII) yang juga menjadi komitmen dalam *Infrastructure Working Group* di tahun G20 2022. Lembaga pembiayaan multilateral yang konsisten dengan penerapan ESG dalam proyek KPBU dapat membantu memastikan telah dipatuhinya prinsip ESG oleh proyek KPBU. Ini akan tercermin dalam kontribusi pembiayaan yang disediakan oleh lembaga tersebut. Namun demikian, kerangka kerja dan prinsip tersebut perlu diterjemahkan dalam konteks manual yang implementatif. Untuk itu, pemerintah mendorong penyusunan manual teknis ESG.

Menteri Keuangan dalam hal ini, mendorong diterapkannya standar dan manual ESG ini secara lebih luas sebagai bagian dari *assessment* sebagai syarat pemberian dukungan pemerintah pada proyek-proyek infrastruktur yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Definisi yang jelas tentang kebutuhan dan cara penerapan dalam konteks dan kondisi Indonesia diperlukan supaya tidak terkesan bahwa penerapan

ESG dalam proyek infrastruktur pemerintah hanya dilakukan untuk mengikuti *'trend'* semata.

Beberapa masalah yang seringkali muncul dan perlu diantisipasi di antaranya meliputi potensi penambahan waktu penyiapan proyek, penambahan biaya penyiapan proyek, serta permintaan penambahan jumlah kontribusi/dukungan Pemerintah Pusat dalam proyek, terutama terkait upaya untuk memenuhi standar internasional. Lebih lanjut, Kementerian Keuangan c.q. DJPPR berkolaborasi dengan *Special Mission Vehicle* (SMV) Kemenkeu dan pihak eksternal seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggunakan manual implementasi ESG dalam penyiapan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. DJPPR telah berpengalaman dalam menerapkan standar ESG dalam penyiapan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang memperoleh pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (KPBU Kemenkeu, 2021a).

Manfaat Pemenuhan Kriteria ESG pada Proyek KPBU

KPBU adalah skema penyediaan layanan infrastruktur publik dengan kerjasama antara pemerintah sebagai sektor publik dengan badan usaha sebagai sektor privat berdasarkan kontrak kerjasama dengan alokasi risiko yang optimal bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, proyek KPBU merupakan investasi yang memiliki karakteristik tertentu (*infrastructure as an aset class*) dari sektor privat karena *return*-nya yang dimensi waktunya jangka panjang, menyediakan arus kas yang stabil dan *predictable*, dan defensif terhadap inflasi. Badan usaha dalam proyek KPBU, umumnya bertindak selaku *equity investor* yang memberikan setoran modal kepada proyek, ataupun menyediakan *technical skill expertise* kepada proyek. Pihak lain di sektor privat yang terlibat selain badan usaha adalah perbankan/lembaga keuangan bukan bank. Sektor privat ini mempunyai preferensi tersendiri sebagai dasar keputusan investasi mereka yang dipengaruhi oleh amanat dari pemegang saham dan pemilik modal.

Penerapan ESG menjadi tren yang berkembang di antara investor milenial yang memiliki kepedulian pada isu-isu keberlanjutan, aspek lingkungan dan sosial. *ESG investing* banyak didorong oleh investor milenial yang memiliki *concern* terhadap isu-isu keberlanjutan tersebut. Investor jangka panjang juga mulai tertarik pada kesinambungan dan kinerja jangka panjang. Tren ini terkonfirmasi dengan makin pesatnya nominal investasi *Portofolio ESG investing yang menunjukkan* nilai portofolio ESG *Exchange Traded Funds* (ETFs) pada tahun 2021 telah mencapai 54 miliar dollar

sesuai dengan data yang dikutip Nasdaq dari *The Financial Times* (Boyde, 2023).

Sektor swasta menjadi lebih selektif dalam memilih proyek KPBU jika mereka telah memegang dan menerapkan standar ESG. Investor atau *lender* dapat memiliki pilihan untuk memutuskan berpartisipasi atau tidak berpartisipasi tergantung apakah proyek KPBU telah didasarkan pada kebijakan atau standar ESG atau tidak. Dengan demikian, investor akan jeli dalam melihat peluang berinvestasi dengan memperhatikan seberapa jauh proyek KPBU telah direncanakan dan disiapkan dengan memperhatikan pada kriteria ESG (KPBU Kemenkeu, 2021).

Penerapan ESG bagi proyek KPBU dapat membawa dampak dan manfaat yang signifikan dan berkelanjutan. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa terdapat makin banyaknya investor yang mempunyai preferensi untuk berinvestasi di sektor hijau yang identik dengan pengelolaan lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik, maka akan membawa potensi kemudahan perolehan pembiayaan bagi proyek KPBU yang menerapkan standar ESG. Selain kemudahan perolehan pendanaan, penerapan ESG juga berpotensi memberikan *cost of fund* yang lebih murah. Hal ini disebabkan karena risiko-risiko lingkungan dan sosial yang merupakan *inherent risks* yang cukup berdampak pada keberhasilan proyek infrastruktur, akan tertangani dengan lebih baik di dalam proyek yang menerapkan ESG.

Pengelolaan infrastruktur termasuk dalam penilaian dampak lingkungan dan sosial harus dilakukan dengan mengacu pada panduan yang telah dirumuskan dalam standar ESG. Penilaian dampak dan risiko lingkungan dan sosial harus dilakukan dengan melakukan *due diligence* atau *assessment* terhadap proyek yang telah direncanakan dan disiapkan. Secara prinsip untuk melakukan penilaian atas dampak dan risiko tersebut diperlukan kajian prastudi kelayakan khususnya kajian yang fokus pada isu lingkungan dan sosial dari proyek infrastruktur. Diharapkan risiko lingkungan dan sosial dapat lebih terkendali jika penilaian dampak dan risiko proyek telah dilakukan sejak awal.

Implementasi ESG juga perlu diikat dalam suatu perjanjian supaya nantinya pelaksanaan proyek dapat menghindari risiko lingkungan dan sosial. Pengendalian risiko ini dapat mengoptimalkan manfaat, sementara risikonya dapat diturunkan. Penurunan risiko ini kemudian akan direspon dengan risiko kredit yang lebih rendah yang kemudian dapat memberikan keuntungan dengan ditekannya tingkat suku bunga yang menjadi lebih murah. Penurunan *cost of fund* ini berpengaruh terhadap meningkatnya kelayakan finansial yang membuat para investor lebih berminat pada

proyek KPBU yang ditawarkan tersebut (KPBU Kemenkeu, 2021). Hal ini karena *cost of fund* merupakan elemen tingkat diskonto sebagai denominator yang menentukan besaran kelayakan keuangan proyek yang direpresentasikan dengan parameter *Net Present Value*.

Sinkronisasi Proses KPBU dan Implementasi ESG di Indonesia

Manfaat penerapan standar ESG telah diulas dalam banyak literatur dan terbukti secara empiris cukup efektif di berbagai negara. Dalam konteks Indonesia, guna dapat diterapkan dengan utuh, maka peran pemerintah menjadi sangat penting untuk bertindak selaku *enabler* dan perintis penerapan ESG. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah melalui perannya sebagai regulator yang memberikan arah pengaturan suatu kebijakan dan pelaksanaannya. Pemerintah telah membangun fondasi yang kuat untuk menerapkan ESG dalam kebijakan yang sifatnya implementatif, karena telah merujuk kepada kesepakatan universal bangsa-bangsa di seluruh dunia atas konteks filosofis masing-masing pilarnya.

Di pilar lingkungan, pemerintah Indonesia telah meratifikasi *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 dan *Kyoto Protocol* dengan meluncurkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Pemerintah juga telah menandatangani *Paris Agreement* dan mengesahkan kesepakatan internasional tersebut dengan membuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

Sedangkan di pilar sosial terkait dengan isu Hak Asasi Manusia, pemerintah telah meratifikasi sebagian besar instrumen pokok HAM internasional dan memuat pengakuan HAM melalui amandemen keempat UUD 1945. Terkait dengan tata kelola yang baik, pemerintah telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption 2003* dengan meluncurkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Untuk mendukung tata kelola ini, pemerintah Indonesia juga telah membuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi di tahun 2001 (KPBU Kemenkeu, 2021).

Fondasi ini kemudian mendorong kepada kebutuhan untuk melakukan inisiasi aktif dalam mengimplementasikan konsep ESG tersebut di lapangan. Pemerintah memulainya dengan sektor KPBU dengan pertimbangan bahwa *enabling factors* penerapan ESG sudah *embedded* dengan skema KPBU. Dalam konteks ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ESG telah diterapkan oleh pihak

investor/*lender* sejak dilakukannya proses pemilihan investasi. Penerapan ini akan terus dilanjutkan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kerangka aturan yang jelas juga sudah dibuat dalam kerangka penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU ini. Aturan tersebut menjelaskan bagaimana ESG harus diterapkan pada tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, dan pelaksanaan perjanjiannya. Dengan demikian sejak awal proyek KPBU telah dirancang secara utuh untuk memenuhi kriteria ESG (KPBU Kemenkeu, 2021).

Sinkronisasi ruang lingkup dan detail proyek yang sesuai dengan kriteria ESG dimulai sekali pada tahap penyiapan dengan dibuatnya kajian prastudi kelayakan. Kajian prastudi kelayakan tersebut memuat kajian hukum dan kelembagaan, dan kajian lingkungan dan sosial. Sebelum lelang dilakukan, lembaga pemeringkat rating juga dapat diminta untuk melihat seberapa jauh sebuah proyek KPBU yang telah disiapkan telah sesuai dengan kriteria ESG. Dengan praktik ini, para investor yang betul-betul memiliki komitmen terhadap isu lingkungan dan sosial memiliki minat lebih tinggi pada proyek KPBU yang sedang dilelang tersebut.

Selanjutnya, pada tahap transaksi, pemerintah dapat menetapkan syarat eligibilitas sektor swasta yang dapat berpartisipasi dalam lelang KPBU. Sektor swasta harus merupakan badan usaha yang telah memiliki kebijakan dan standar ESG. Pemerintah juga dapat menetapkan persyaratan bahwa investor/*lender* memiliki komitmen awal pembiayaan yang merujuk pada kebijakan dan standar ESG. Hal tersebut dimaksudkan agar proyek akan lebih cepat mencapai *financial close*. Sedangkan pada tahap operasionalisasi proyek untuk memberikan layanan kepada masyarakat, di mana dalam tahap ini risiko lingkungan dan sosial berpotensi terjadi, standar ESG akan menjadi panduan yang jelas bagi para pihak dalam menghadapi risiko yang muncul, memitigasi dan menyelesaikannya (KPBU Kemenkeu, 2021).

Secara lebih khusus, dalam upaya mendorong penyiapan proyek KPBU memenuhi kriteria ESG, Kementerian Keuangan yang bertindak selaku pemberi dukungan kepada proyek KPBU meluncurkan standar ESG untuk proyek KPBU. Kebijakan dan standar ESG tersebut ditetapkan sebagai bagian dari proses *assessmen*t yang menjadi syarat supaya Kementerian Keuangan dapat memberikan fasilitas dan dukungan seperti fasilitas penyiapan proyek (*project development facility*/PDF), dukungan kelayakan (*viability gap fund*/VGF), dan penjaminan infrastruktur (*infrastructure guarantee*) (KPBU Kemenkeu, 2023). Selain itu, Kementerian Keuangan juga mendorong *special mission vehicle-nya* untuk patuh dalam mengikuti kebijakan dan standar ESG. Sebagai

salah satu SMV dan pengelola platform SDG Indonesia One (SIO), PT Sarana Multi Infrastruktur telah menetapkan dan mengimplementasikan Panduan Perlindungan Lingkungan dan Sosial (KPBU Kemenkeu, 2021).

Penutup

Bab ini telah memaparkan salah satu isu prioritas strategis yang dibahas dalam jalur keuangan G20 di bawah Presidensi Indonesia. Presidensi Indonesia mendorong komitmen negara-negara G20 untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan membawa manfaat positif yang optimal bagi warga masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan pelestarian lingkungan, serta tata kelola yang baik. Pada pertemuan IWG yang keempat di bulan September 2022, IWG telah menyelesaikan pembahasan enam agenda utama termasuk investasi infrastruktur berkelanjutan, inklusi sosial dan kesenjangan daerah, infrastruktur transformatif pasca pandemi, indikator QII, infrastruktur digital dan Infratech, dan GI Hub (Kementerian Keuangan, 2023).

Di bawah Presidensi Indonesia, G20 telah mempublikasikan cetak biru peningkatan pembiayaan dan pengembangan Infratech dan indikator QII. Kerangka untuk mendorong partisipasi swasta dalam infrastruktur berkelanjutan juga telah difinalisasi oleh IWG, selain perangkat kebijakan dalam upaya memobilisasi pendanaan dan pembiayaan investasi infrastruktur yang inklusif dan berkualitas di perkotaan dan daerah. G20 juga telah memfasilitasi Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) membuat kompendium pembiayaan pembangunan infrastruktur digital. Hasil lain dari pertemuan IWG adalah pembaruan *Infra Tracker 2.0* yang diinisiasi GI Hub sebagai perangkat yang dapat dipakai dalam menyusun perencanaan infrastruktur melalui identifikasi tren investasi infrastruktur anggota-anggota G20 dan negara-negara undangan (Kementerian Keuangan, 2023).

Bab ini telah menunjukkan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya kriteria ESG dalam penyiapan, perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Tersedianya dukungan institusional dan portofolio ESG *investing* dengan nilai investasi yang besar menjadi bukti peningkatan kesadaran global tersebut. Sebagai salah satu bentuk investasi, proyek KPBU memiliki kesempatan besar untuk menarik para investor dan lembaga-lembaga investasi yang telah mendeklarasikan komitmennya untuk mewujudkan prinsip-prinsip ESG. Para investor dan lembaga-lembaga investasi melihat manfaat dari

implementasi ESG yang membantu meningkatkan nilai dan kualitas layanan infrastruktur. Implementasi ESG juga membantu memastikan kemampuan membayar pengguna, di samping manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penerapan ESG juga berdampak positif dalam peningkatan kualitas layanan infrastruktur yang mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan mendorong terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Kualitas nilai dan layanan infrastruktur juga mengakomodir isu konektivitas yang diperlukan oleh masyarakat yang tinggal di berbagai tempat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Praktik tata kelola yang sehat (*good governance*) memperkuat kualitas nilai dan layanan infrastruktur tersebut (KPBU Kemenkeu, 2021b). Perencanaan dan penyiapan proyek KPBU yang sesuai dengan kriteria ESG sejak tahap awal menjadi suatu keharusan supaya kualitas nilai dan layanan tetap dapat dijaga di masa yang akan datang. Semua upaya yang dilakukan ditujukan untuk meningkatkan daya tarik investasi infrastruktur di kalangan para investasi, sekaligus membuat proses memperoleh pembiayaannya menjadi mudah dan murah sehingga manfaatnya bagi publik dan pelaku ekonomi menjadi lebih optimal (KPBU Kemenkeu, 2021).

Sebagai anggota G20 dan pemegang presidensi di tahun 2022, Indonesia berkewajiban untuk secara konsisten mengimplementasikan platform *Environmental*, *Social*, *and Governance* (ESG). Dengan demikian Indonesia tidak hanya dikenal karena memiliki inisiatif terobosan yang patut diperhitungkan anggota-anggota G20 lain, namun juga diapresiasi karena telah menindaklanjuti hasil-hasil pembahasan di G20 secara konkret. Skema KPBU yang telah diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan dipraktikkan di Indonesia merupakan salah satu wujud pemenuhan komitmen terhadap agenda prioritas G20 tersebut. Rencana aksi yang telah dilakukan adalah peluncuran *ESG Framework dan Manual*, sebagai hasil kolaborasi Kementerian Keuangan, United Nations Development Programme (UNDP) dan Pemerintah Kanada melalui program hibah yang dikelola oleh World Bank dan mendapat dukungan dari PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF). Inisiatif ini juga mencerminkan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, transparan, inklusif dan resilien di Indonesia, termasuk pada bidang pembiayaan infrastruktur. Kerangka dan manual ESG tersebut menyediakan informasi yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan terkait proyek infrastruktur tentang peran dan tindakan yang perlu dilakukan supaya aspek ESG benar-benar diikuti dalam proyek infrastruktur tersebut (Kemenkeu, 2022).

Dengan panduan ESG yang jelas para pemangku kepentingan terkait didorong untuk patuh terhadap regulasi dan standar lingkungan yang berlaku dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Kepatuhan terhadap regulasi berbasis ESG ini dapat meningkatkan dampak positif pembangunan infrastruktur dan sekaligus menyediakan akses pembiayaan yang lebih luas. Masyarakat luas dapat menerima dan mendukung pembangunan proyek tersebut. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan *pipeline* yang menjelaskan tahap-tahap implementasi ESG hingga tahun 2025. Pemerintah juga telah memulai proyek percontohan infrastruktur sektor perumahan dan sumber daya air sejak tahun 2022. Sejumlah perbaikan terhadap proyek percontohan dilakukan berdasarkan hasil review atas proyek percontohan ini. Diharapkan hasil perbaikan ini dapat memberikan dukungan pembiayaan infrastruktur yang lebih luas (Kemenkeu, 2022).

Referensi

Alijoyo, A. (2019, July 25). *Environmental Social Governance (ESG): Agenda Prioritas Direksi dan Dewan Komisaris*.

Bouyé, E., Klingebiel, D., & Ruiz, M. (2021). *Environmental, Social, And Governance Investing*.

Boyde, E. (2023). ESG accounts for 65% of all flows into European ETFs in 2022. *Financial Times*.

Ding, H. (2022). *Sustainable finance: the economic impacts of environmental, social and governance (ESG) factors on stock price, brand value and executive compensation*. University of Oxford.

DJPb Kementerian Keuangan. (2022). *Alasan Tentang G20 Indonesia, Apa Itu G20? Sejarah dan Anggotanya*. https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kalsel/id/data-publikasi/berita-terbaru/2975-ulasan-tentang-g20-indonesia,-apa-itu-g20-sejarah-dan-anggotanya.html

IPCC. (2021). *Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*.

Kementerian Keuangan (2023). "Infrastructure Working Group Presidensi G20 Indonesia Selesaikan Seluruh Agenda Utama Bidang Infrastruktur." https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Infrastructure-Working-Group-Presidensi-G20

Kementerian Keuangan. (2022). "Implementasi ESG Wujud Nyata Tindak Lanjut Agenda Infrastruktur G20 Presidensi Indonesia." https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Implementasi-ESG-Wujud-Nyata-Tindak-Lanjut-Agenda

KPBU Kementerian Keuangan. (2022). "4 Agenda Utama Infrastructure Working Group (IWG) G20." https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1144-1366/umum/kajian-opini-publik/4-agenda-utama-infrastructure-working-group-iwg-g20

KPBU Kementerian Keuangan (2022a). "G20 Mendukung Penangan Perubahan Iklim dengan Mendorong Aspek Keberlanjutan dalam Keuangan dan Investasi." https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1157-1458/public/public-study-opinion/g20-supports-handling-climate-change-by-encouraging-sustainability-in-finance-and-investment

KPBU Kementerian Keuangan. (2021). "Mengapa Proyek KPBU Harus Memenuhi Kriteria ESG." https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1124-1287/umum/kajian-opini-publik/mengapa-proyek-kpbu-harus-memenuhi-kriteria-esg

KPBU Kementerian Keuangan. (2021b). "Penerapan Quality Infrastructure Investment dalam Proyek Infrastruktur di Indonesia." https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1125-1288/umum/kajian-opini-publik/penerapan-quality-infrastructure-investment-dalam-proyek-infrastruktur-di-indonesia

KPBU Kementerian Keuangan. (2022c). "Penyediaan Layanan Infrastruktur melalui Penerapan QII Indicator." *https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1149-1401/umum/kajian-opini-publik/penyediaan-layanan-infrastruktur-melalui-penerapan-qii-indicator*

KPBU Kementerian Keuangan. (2022b). *"Presidensi G20 Indonesia dalam mendukung peningkatan infrastruktur dengan Indikator Quality Infrastructure Investment (QII)."* https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1155-1445/umum/kajian-opini-publik/presidensi-g20-indonesia-dalam-mendukung-peningkatan-infrastruktur-dengan-indikator-qii

KPBU Kementerian Keuangan. (2021a). "SDGs, ESG dan Infrastruktur." https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/88-243/umum/kajian-opini-publik/sdgs-esg-dan-infrastruktur

KPBU Kementerian Keuangan. (2023). "Terobosan Fasilitas Penyiapan Proyek/Project Development Facility (PDF) sebagai Upaya Menghadapi Tantangan di Sektor Air Minum." https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1195-1576/umum/kajian-opini-publik/terobosan-fasilitas-pdf-sebagai-upaya-menghadapi-tantangan-di-sektor-air-minum

Media Digital. (2022). "Simak Alasan Penerapan ESG Kian Penting bagi Perusahaan." https://market.bisnis.com/read/20220324/192/1514572/simak-alasan-penerapan-esg-kian-penting-bagi-perusahaan

UNFCCC. (2021). "Glasgow Climate Pact." https://unfccc.int/documents/310475

United Nations. (2018). "SDG 6 Synthesis Report 2018 on Water and Sanitation. SDG 6 Synthesis Report 2018 on Water and Sanitation." https://doi.org/10.18356/e8fc060b-en



BAB 6

Penguatan Sistem Inklusi Keuangan

Pendahuluan

Krisis keuangan global tahun 2008 telah menimbulkan krisis kepercayaan pada masyarakat. Peristiwa tersebut memperlihatkan sistem keuangan yang berjalan kurang berpihak pada kelompok masyarakat marginal dan hanya melayani sebagian kecil populasi. Sejak itu muncul inisiatif kebijakan untuk inklusi keuangan (*financial inclusion*). Laporan Tahunan World Bank tahun 2008 berjudul *Finance for All* membahas perluasan akses keuangan yang faktanya masih menemui kendala di banyak negara. Namun, tidak semua tindakan pemerintah efektif dan beberapa kebijakan yang diambil justru menjadi kontraproduktif. Setahun kemudian pada KTT Pittsburgh, para pemimpin G20 berkomitmen untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat miskin melalui pembentukan *Financial Inclusion Expert-Group* (FIEG).

Selama tahun 2012, dalam 'Agenda Inklusi Keuangan Internasional' Presidensi G20 Meksiko juga mendorong komitmen negara-negara G20 dan non-G20 untuk membentuk platform tingkat nasional untuk mencapai inklusi keuangan. Termasuk dibahas dalam agenda tersebut adalah upaya mengembangkan rencana aksi strategis nasional untuk memenuhi target inklusi keuangan serta pendidikan keuangan dan langkah-langkah perlindungan konsumen. Arah politik semakin kuat mendukung agenda inklusi keuangan dalam pembangunan internasional. Pada tahun 2011 dibentuk *Alliance for Financial Inclusion* (AFI), suatu jaringan pembuat kebijakan dan regulator dari 90 negara berkembang, dengan pendanaan dari *Bill and Melinda Gates Foundation* dan dukungan dari G20 (Gabor & Brooks, 2017; Sakariya, 2013).

Selain dianggap sebagai mesin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inklusi keuangan juga dianggap sebagai hal mendasar untuk meningkatkan penghidupan masyarakat miskin. Beberapa organisasi dan kelompok negara di dunia mencoba mengembangkan strategi standar untuk inklusi keuangan yang dapat diterapkan secara bersama. Penelitian Sakariya (2013) di India menunjukkan bahwa negara tersebut juga melakukan berbagai upaya untuk mengadopsi praktik standar global untuk inklusi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya inklusi keuangan ternyata memerlukan dukungan data yang dapat diandalkan, adanya indikator umum yang menjadi fokus dan strategi yang tepat, serta pemantauan yang efektif. Keberhasilan inklusi keuangan dapat dicapai melalui pembentukan strategi yang tepat, pembangunan struktur kelembagaan, pengembangan kebijakan,

peraturan dan infrastruktur keuangan bagi sektor swasta dan sektor publik, serta pembentukan kerangka implementasi yang mendukung.

Sementara itu, terdapat juga upaya menguji tiga asumsi dasar dari inklusi keuangan yang selama ini menjadi acuan para praktisi. Ketiga asumsi tersebut masing-masing: (1) terdapat hubungan sebab akibat mulai dari inklusi keuangan hingga pembangunan dan manfaat yang lebih luas; (2) perluasan layanan keuangan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin; dan (3) terdapat peluang bisnis yang belum dimanfaatkan dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat miskin. Temuan Mader (2016) menyimpulkan empat implikasi utama dari upaya mempertanyakan kembali ketiga asumsi dasar inklusi keuangan tersebut, yaitu perlunya: (1) memperkuat basis bukti; (2) menilai kembali prioritas; (3) memeriksa kasus bisnis secara kritis; serta (4) memperhatikan sisi negatif yang mungkin timbul dari upaya peningkatan inklusi keuangan tersebut.

Mader (2016) berargumen bahwa inklusi keuangan adalah bidang yang kompleks dan mencakup banyak aktor serta beragam pertanyaan yang belum terselesaikan. Hal tersebut rentan menimbulkan ekspektasi yang tidak realistis yang dapat menyebabkan ketidakselarasan prioritas dan kekecewaan. Oleh karena itu para pengambil keputusan perlu berhati-hati dan kembali mempertanyakan ketiga asumsi di atas untuk merefleksikan posisi mereka terhadap inklusi keuangan demi memperjelas: manfaat apa yang mereka harapkan, dapat diberikan kepada siapa, dan mengapa. Sementara itu penelitian Khan et al. (2022) menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara inklusi keuangan, keberlanjutan keuangan, dan efisiensi keuangan di antara negara-negara G20 yang menjadi fokus penelitian. Temuan tersebut menambah keyakinan perlunya penguatan lembaga keuangan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Kemitraan Global untuk Inklusi Keuangan

Kemitraan Global untuk Inklusi Keuangan (*Global Partnership for Financial Inclusion* atau GPFI) adalah platform inklusif bagi semua negara G20, negara non-G20 yang tertarik, dan pemangku kepentingan terkait untuk melanjutkan pekerjaan inklusi keuangan. Pada KTT G20 di Seoul tahun 2010, para pemimpin G20 mengakui inklusi keuangan sebagai salah satu pilar utama agenda pembangunan global dan mendukung Rencana Aksi Inklusi Keuangan (*Financial Inclusion Action Plan* atau FIAP) yang konkret. Inklusi keuangan tidak hanya dimasukkan dalam *G20*

Leaders Declaration, namun juga disorot sebagai komponen penting dalam Konsensus Pembangunan Seoul dan agenda reformasi sektor keuangan. GPFI merupakan bentuk implementasi FIAP G20 yang disahkan pada KTT G20 di Seoul. GPFI secara resmi diluncurkan pada tanggal 10 Desember 2010 (GPFI, n.d.).

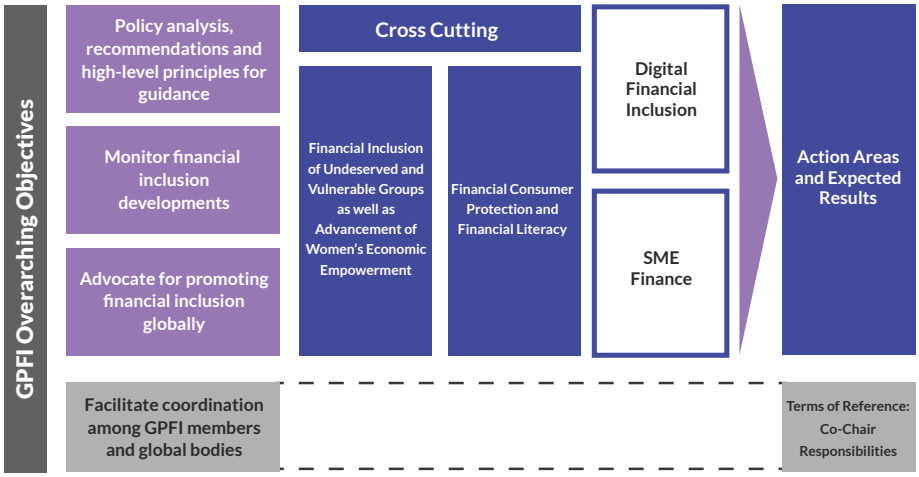
GPFI berkomitmen untuk memajukan inklusi keuangan secara global dengan meningkatkan kualitas akses, penggunaan, dan layanan keuangan formal yang berkelanjutan. Termasuk dalam strategi untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui perluasan peluang bagi rumah tangga dan perusahaan yang kurang terlayani dan tersisih untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam menjalankan misi GPFI, rencana aksi terus diperbarui. Rencana Aksi 2010 diperbarui dengan Rencana Aksi 2014, Rencana Aksi 2017 dan Rencana Aksi 2020. Implementasi Rencana Aksi 2020 dilakukan dengan memperhatikan pula dampak wabah pandemi COVID-19 sebagai tantangan global yang berdampak signifikan tidak hanya pada ekonomi global namun juga bagi individu dan bisnis.

Dalam Rencana Aksi 2020 (GPFI, 2020), GPFI menunjukkan kesigapannya untuk merespon isu-isu global baru yang muncul, membingkai kerja kemitraan secara memadai untuk mencerminkan keadaan terkini dan mengatasi dampak krisis serta dampak ekonomi pasca krisis. GPFI juga menegaskan kembali komitmen pemimpin G20 untuk memajukan inklusi keuangan yang bermanfaat bagi semua negara dan semua orang, termasuk kelompok rentan (seperti lansia, migran, dan orang yang terpaksa mengungsi) serta kelompok yang kurang terlayani (termasuk orang miskin, perempuan, pemuda, dan orang yang tinggal di daerah terpencil dan daerah pedesaan).

Sebagai pemenuhan mandat pemimpin G20 dalam Deklarasi Buenos Aires untuk GPFI agar merampingkan program kerja dan strukturnya, GPFI memprioritaskan pekerjaannya di bawah FIAP G20 2020 tentang inklusi keuangan digital (*Digital Financial Inclusion* atau DFI) dan keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM (*SME Finance*).

Gambar 6.1 Kerangka Rencana Kerja Inklusi Keuangan G20 2020



Sumber: GPFI, 2020.

Setelah perampingan penetapan prioritas, dan terlepas dari prioritas jangka pendek yang akan ditetapkan oleh kepresidenan G20 berikutnya, sebagaimana dalam dokumen *GPFI 2022 Annual Plan* (GPFI, 2021), dalam FIAP G20 tahun 2020 GPFI menyepakati dua topik utama yang menjadi prioritas, yaitu DFI dan SME Finance sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Digital Financial Inclusion

GPFI menggambarkan inklusi keuangan digital secara luas sebagai "penggunaan layanan keuangan digital untuk memajukan inklusi keuangan." Ini melibatkan penyebaran sarana digital untuk menjangkau populasi yang tersisih secara finansial dan kurang terlayani melalui berbagai layanan keuangan formal sesuai kebutuhan, dengan biaya yang terjangkau, dan layanan yang berkelanjutan – perhatian khusus diberikan kepada kaum perempuan. Ini termasuk penyebaran layanan digital yang aman dan bertanggung jawab yang memperluas jangkauan layanan keuangan formal secara berkelanjutan dan menangani potensi risiko dari teknologi tersebut. Termasuk di dalam layanan GPFI adalah perlindungan data dan masalah privasi, keamanan dunia maya, utang berlebih, pencucian uang, pendanaan penyebaran paham teroris, penipuan, dan risiko keuangan terlarang lainnya. Edukasi keuangan dan perlindungan konsumen yang dilengkapi dengan regulasi terkait merupakan faktor kunci dalam melindungi dan memberdayakan kelompok yang paling rentan.

Istilah "layanan keuangan digital" (*digital financial service*) mencakup seluruh rangkaian produk dan layanan keuangan, termasuk pembayaran, pengiriman uang, transfer, tabungan, kredit, asuransi, sekuritas, perencanaan keuangan, dan laporan rekening. Layanan keuangan digital dikirimkan melalui perangkat digital/elektronik seperti *e-money* (dimulai secara *online* atau pada aplikasi ponsel/dompet) atau instrumen seperti kartu pembayaran yang terhubung ke perangkat digital dan rekening bank.

SME Finance

GPFI berfokus pada peningkatan akses keuangan UMKM di negara-negara G20 dan non-G20, khususnya di negara-negara berpenghasilan rendah dan berkembang. UMKM memainkan peran penting dalam lapangan kerja, penciptaan lapangan kerja, investasi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi secara global. Mereka menyumbang sekitar 90 persen bisnis dan lebih dari 50 persen lapangan kerja di seluruh dunia. Oleh sebab itu keberhasilan mereka sangat penting untuk pemulihan ekonomi dunia di saat krisis dan untuk kemajuan ekonomi di masa depan (Lentera24, 2022).

Misi GPFI adalah memastikan bahwa UMKM yang layak di seluruh dunia memiliki akses ke layanan keuangan. Perhatian khusus diarahkan pada UMKM yang dipimpin oleh segmen yang sulit dijangkau dan/atau kurang terlayani, termasuk pengusaha wanita, pengusaha muda, pengusaha pedesaan, orang yang dipindahkan secara paksa, dan kelompok rentan lainnya.

FIAP G20 2020 juga menaruh perhatian pada isu lintas sektoral *(cross cutting issues)* dan area aksi *(action areas)* sebagaimana dijabarkan sebagai berikut.



Isu Lintas Sektoral

Isu lintas sektoral adalah tema yang dibahas dan dipertimbangkan dalam kegiatan, area aksi, dan hasil kerja GPFI. Isu-isu lintas sektoral tercermin dalam area aksi dan hasil selama durasi FIAP G20 2020 di bawah prioritas keuangan DFI dan *SME Finance*:

1. Mendorong perluasan layanan keuangan di kalangan masyarakat yang sulit dijangkau, khususnya yang menyasar kelompok kurang terlayani dan rentan, serta pemberdayaan ekonomi perempuan.
2. Mempromosikan perlindungan konsumen keuangan dan literasi keuangan melalui kolaborasi dan koordinasi dengan organisasi multilateral, termasuk Satuan Tugas G20/OECD untuk Perlindungan Konsumen Keuangan dan Jaringan Internasional untuk Pendidikan Keuangan.

Area Aksi

FIAP G20 tahun 2020 juga menetapkan empat bidang tindakan untuk memandu kerja GPFI selama tiga tahun ke depan (2021–2023) di bawah dua prioritas yaitu DFI dan *SME Finance* (Bank Indonesia, 2022). Diharapkan tindakan yang diimplementasikan fokus pada mereka yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, area tindakan harus mendukung pengurangan hambatan akses dan penggunaan bagi kelompok yang kurang terlayani dan rentan.

Digital Financial Inclusion

1. Mendorong implementasi yang efektif dari Konferensi Tingkat Tinggi G20 2016 untuk Inklusi Keuangan Digital di negara-negara G20 dan non-G20, khususnya terkait dengan kelompok yang kurang terlayani dan rentan, sesuai dengan keadaan nasional.
2. Mempromosikan pengembangan sistem pembayaran inovatif yang bertanggung jawab yang menyediakan solusi pembayaran yang terjangkau, aman, dapat dioperasikan, transparan, dan inklusif lintas batas, baik di dalam negara G20 dan non-G20 untuk mendukung kemajuan pengurangan biaya pengiriman uang, dengan tetap menjaga perlindungan konsumen dan persyaratan pengungkapan (*prerequisite disclosure*).

SME Finance

1. Mengidentifikasi dan mempromosikan opsi kebijakan nasional dan global, serta mendukung upaya penerapan selanjutnya yang dapat memfasilitasi perluasan dan diversifikasi layanan keuangan, termasuk memanfaatkan layanan keuangan digital, untuk UKM di negara G20 dan non-G20, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan tren industri.
2. Mengidentifikasi dan mempromosikan praktik baik tingkat kelembagaan, di negara-negara G20 dan non-G20, yang secara khusus ditargetkan untuk meningkatkan berbagai layanan keuangan untuk UKM, termasuk layanan yang dikelola oleh kelompok yang kurang terlayani dan rentan.

Inklusi Keuangan dalam Presidensi Indonesia

Pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, tema umum yang diangkat adalah "*Recover Together, Recover Stronger*". Tema tersebut memiliki tiga pilar yaitu:

1. Mempromosikan produktivitas,
2. Meningkatkan ketahanan dan stabilitas, dan
3. Memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022).

Sejalan dengan FIAP G20 2020, pilar pertama dan ketiga dari Presidensi Indonesia, fokus agenda adalah mengeksplorasi area di mana inklusi keuangan digital diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Perhatian diarahkan pada kebijakan yang mengintegrasikan antara sisi penawaran sektor keuangan dengan sisi permintaan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempromosikan inklusi keuangan dan ekonomi untuk kelompok sasaran dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

Pembahasan mencakup pada empat capaian *(deliverables)* yang sejalan dengan FIAP 2020 meliputi panduan dan mekanisme, produk dan layanan keuangan, lingkungan peraturan, dan harmonisasi data. Empat target deliverables dapat dirumuskan secara lengkap sebagai berikut:

1. Kerangka implementasi prinsip tingkat tinggi (*High-Level Principles*/HLP) tentang inklusi keuangan digital.
2. Inventarisasi database dan analisis produk serta layanan keuangan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di luar kredit (*beyond credit*).
3. Perangkat diagnostik regulasi layanan keuangan digital UMKM (di mana versi final akan siap pada 2023)
4. Memajukan agenda kerangka harmonisasi data UMKM.

Kebijakan terpadu tersebut diharapkan dapat memaksimalkan potensi ekonomi dan kemampuan keuangan kelompok sasaran, yang selanjutnya akan memungkinkan untuk mempromosikan inklusi keuangan yang berkelanjutan terkait dengan akses, penggunaan, dan kualitas. Presidensi G20 Indonesia mengeksplorasi area di mana digitalisasi dapat memanfaatkan penggunaan produk dan layanan keuangan yang akan mendukung produktivitas dan memastikan pertumbuhan yang inklusif.

Adapun target Presidensi G20 Indonesia berupa perumusan "*Financial Inclusion Framework in Harnessing Digitalization to Increase Productivity, Sustainable and Inclusive Economy of Women, Youth, and MSMEs*" (Kerangka Inklusi Keuangan dalam Memanfaatkan Digitalisasi untuk Meningkatkan Produktivitas, Ekonomi Perempuan, Pemuda, dan UMKM yang Berkelanjutan dan Inklusif) (Bank Indonesia, 2022a). Kerangka ini ditujukan kepada kelompok yang paling rentan, seperti penerima manfaat sosial dan rumah tangga yang terkena dampak COVID-19, UMKM, dan terutama perempuan dan pemuda. Dengan menggunakan kerangka FIAP G20 2020, uraian *deliverable* dari Kepresidenan G20 Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut (GPFI, 2021):

Digital Financial Inclusion: Action Area 1

Kata kunci dari *deliverable* yang diharapkan dari area aksi ini adalah panduan dan mekanisme berupa pengembangan kerangka implementasi untuk *High-Level Principles* (HLP) *(GPFI, 2023)*.

Kerangka implementasi *High-Level Principles for Digital Financial Inclusion* (HLP for DFI) G20 ditafsirkan sebagai mekanisme penilaian dan panduan melalui identifikasi opsi kebijakan, praktik terbaik, serta pengalaman dan *showcase* di negara-negara G20 dan non-G20. Dengan memperhatikan dampak pandemi terhadap digitalisasi, diusulkan kerangka implementasi untuk fokus pada beberapa prinsip HLP for DFI, yaitu prinsip-prinsip: mempromosikan pendekatan digital untuk inklusi

keuangan, menyeimbangkan inovasi dan risiko untuk mencapai digitalisasi inklusi keuangan, membangun praktik keuangan digital yang bertanggung jawab untuk melindungi konsumen, dan memperkuat literasi dan kesadaran digital dan keuangan.

SME Finance: Action Area 1

Kata kunci yang diharapkan dari area aksi ini adalah produk dan layanan keuangan bagi UMKM yang sifatnya *beyond credit*, di luar produk kredit misalnya asuransi dan manajemen risiko *(*GPFI, *2023)*.

Dari area aksi ini diharapkan dihasilkan inventarisasi produk dan layanan keuangan digital dan inovatif untuk UMKM di luar produk kredit (*beyond credit*). Hal tersebut ditujukan agar dapat dikembangkan opsi kebijakan yang memanfaatkan layanan keuangan digital dalam rangka mengurangi kemungkinan kerapuhan keuangan dan merangsang penciptaan lapangan kerja, investasi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi inklusif secara global.

Hasil yang diharapkan adalah database di situs web yang isinya terus dimutakhirkan berisi kasus-kasus sukses produk dan layanan keuangan digital dan inovatif untuk UMKM di luar produk kredit. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pemanfaatan produk dan layanan keuangan tersebut dari lembaga keuangan formal, termasuk *fintech*.

Produk dan layanan dimaksud meliputi seperti pembayaran digital, pembiayaan berbasis sosial/masyarakat dan *crowdfunding* sekuritas sebagai sumber alternatif pembiayaan UMKM, produk asuransi dan manajemen risiko, serta produk dan layanan lain yang dapat memfasilitasi akses UMKM terhadap pembiayaan. Selain itu, pelaku juga dapat memanfaatkan pihak-pihak di luar keuangan untuk mendukung akses UMKM ke pasar keuangan, meningkatkan keterampilan manajemen, dan meningkatkan kemampuan bisnis mereka. Produk dan layanan tersebut diharapkan dapat memberikan akses keuangan yang lebih cepat dan murah untuk meningkatkan ketahanan keuangan dan memitigasi risiko.

Produk dan layanan keuangan untuk UMKM di luar produk kredit akan didasarkan pada karakteristik kebutuhan keuangan kelompok sasaran tertentu, yaitu perempuan sebagai pelaku UMKM, pemuda sebagai pelaku UMKM, dan penerima dana sosial.

Basis data fokus pada produk dan layanan keuangan di luar produk kredit yang sesuai untuk setiap kelompok sasaran tertentu. Kriteria untuk produk dan layanan keuangan harus mempertimbangkan

High Level Policy Guideline on Digital Financial Inclusion (kerangka implementasi tingkat tinggi tentang inklusi keuangan digital) untuk pemuda, perempuan, dan UKM. *Guideline* ini merupakan *deliverable* dari Presidensi G20 Arab Saudi di tahun 2020. Terkait dengan *database* produk dan layanan keuangan tersebut, akan disusun pula dokumen yang akan dikembangkan untuk memuat ringkasan singkat dari kasus-kasus tersebut, penjelasan tentang database baru, termasuk apa yang ada di dalamnya, bagaimana *database* dapat berguna dalam menemukan praktik yang baik dan bagaimana database dapat terus diperluas lebih lanjut untuk memuat pengalaman dan pelajaran yang lebih bermanfaat.

SME Finance: Action Area 2

Terdapat dua hal pada area aksi ini (GPFI, 2023). Untuk yang pertama, kata kunci yang diharapkan dari area aksi ini adalah lingkungan peraturan. Pada area aksi ini hasil yang diharapkan adalah alat diagnostik regulasi untuk membantu regulator menciptakan lingkungan yang mendorong akses UMKM ke layanan keuangan digital yang inovatif. Lingkungan domestik yang mendukung dan kuat diperlukan untuk mempromosikan akses UMKM dan pemanfaatan layanan keuangan digital. Dukungan dan komitmen pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur, produk dan jasa keuangan, kebijakan dan regulasi, serta data UMKM sangat diperlukan. Alat diagnostik regulasi dikembangkan berdasarkan praktik terbaik tentang kebijakan, regulasi, atau inisiatif yang dapat mencakup komponen seperti arsitektur regulasi, ekosistem layanan keuangan digital, perlindungan konsumen, privasi data, literasi keuangan dan digital, dan *Anti Money Laundering/Counter-Terrorism Financing* (AML/CTF).

Pada area aksi kedua, kata kuncinya adalah harmonisasi data. Pada area aksi ini hasil yang diharapkan adalah memajukan agenda kerangka kerja harmonisasi data UMKM untuk meningkatkan ketersediaan data yang sudah dipilah berdasarkan gender dan kelompok usia. Hasil harmonisasi data tersebut selanjutnya diharapkan dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan lintas negara dalam inklusi keuangan, mengidentifikasi kelompok usaha kecil yang rentan secara finansial, membuat keputusan yang lebih tepat, atau menilai dampak intervensi kebijakan.

Cross Cutting Topic: Financial Consumer Protection

Adapun topik lintas sektoral yang menjadi agenda pembahasan G20 di bawah Presidensi Indonesia adalah *financial consumer protection* (FCP) atau perlindungan konsumen keuangan (GPFI, 2023). Perlindungan konsumen keuangan merupakan bentuk dukungan pada inklusi keuangan. Topik tersebut menjadi salah satu agenda untuk dibahas mengingat tren terkini digitalisasi yang cepat dan perlunya menyeimbangkan inovasi dan mitigasi risiko.

Prinsip perlindungan konsumen keuangan awalnya didukung oleh menteri keuangan G20 dan gubernur bank sentral, dan pemimpin G20 pada tahun 2011. Tinjauan Prinsip FCP dirujuk dalam Komunike FMCBG G20 di bulan Oktober 2021. Peninjauan dilakukan bekerja sama dengan Satuan Tugas G20/OECD untuk perlindungan konsumen keuangan, yang terdiri dari pembuat kebijakan dan pakar perlindungan konsumen keuangan.

Semua negara G20, serta negara OECD dan lainnya, juga berpartisipasi dalam proses peninjauan prinsip FCP tersebut. Prinsip FCP telah menjadi standar internasional terkemuka dalam kerangka perlindungan konsumen keuangan selama sepuluh tahun terakhir. Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip FCP terus mencerminkan praktik terbaik, mengingat perubahan kondisi dan perkembangan kebijakan yang ada.

Kerangka Implementasi Prinsip Tingkat Tinggi (*High-Level Principles*) tentang Inklusi Keuangan Digital

Inklusi keuangan digital adalah topik prioritas utama untuk GPFI, berdasarkan potensinya untuk memperluas akses dan inklusi keuangan secara global. Fokus berkelanjutan ini telah menghasilkan panduan utama, seperti *High-Level Principles for Digital Financial Inclusion* (HLP for DFI) pada tahun 2016, laporan G20/GPFI *Digital Financial Inclusion: Emerging Policy Approaches* pada tahun 2017, dan G20 *High-Level Policy Guidelines on Digital Financial Inclusion for Youth, Women and SMEs* pada tahun 2020. Masing-masing hasil GPFI tersebut ditujukan untuk mendorong adopsi layanan dan produk keuangan digital yang dapat dipercaya untuk mencapai tujuan inklusi keuangan, serta tujuan G20 terkait pertumbuhan inklusif dan meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan (GPFI G20 Indonesia, 2022a).

Better than Cash Alliance, CGAP, dan OECD di bawah pimpinan World Bank menyusun draft panduan implementasi *High-Level Principles for Digital Financial Inclusion*. Dokumen tersebut dibangun berdasarkan pekerjaan GPFI dan bertujuan untuk memberikan panduan praktis tentang penerapan prinsip tingkat tinggi yang efektif serta dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan negara-negara di berbagai tahap pembangunan. Berikut ini enam panduan prinsip tingkat tinggi yang menekankan pendekatan praktis "**bagaimana caranya**" dan **contoh praktik baik** yang dapat ditiru, serta menyoroti **potensi risiko** (GPFI G20 Indonesia, 2022a). Di dalam dokumennya, setiap bab dalam panduan tersebut menampilkan sumber daya tambahan yang dapat dikonsultasikan oleh pembuat kebijakan tentang topik yang bersangkutan.

Gambar 6.2 Wawasan Utama dan Rekomendasi Akses Layanan Finansial Digital bagi UMKM

Prinsip Tingkat Tinggi 1 – *Mempromosikan Pendekatan Digital untuk Inklusi Keuangan*

Mempromosikan layanan keuangan digital sebagai prioritas untuk mendorong pengembangan sistem keuangan inklusif, termasuk melalui strategi dan rencana aksi nasional yang terkoordinasi, dipantau, dan dievaluasi.

Aktivitas

1. Memahami lanskap inklusi keuangan untuk mengembangkan langkah-langkah yang tepat, efektif, dan tepat waktu untuk meningkatkan inklusi keuangan yang dimungkinkan secara digital. Pertama-tama pembuat kebijakan harus melakukan penilaian terperinci terhadap lanskap keuangan dengan fokus pada penentuan bagaimana layanan keuangan digital telah (atau belum) berperan dalam mencapai tujuan inklusi.
2. Mengembangkan strategi inklusi keuangan nasional yang mencerminkan tantangan dan peluang yang dirinci dalam pengumpulan data dan diagnostik. Setelah menerapkan kerangka diagnostik untuk menyoroti kesenjangan dalam inklusi dan mengidentifikasi pengungkit layanan keuangan digital untuk mengatasi kesenjangan tersebut, wawasan ini kemudian harus disalurkan ke dalam pengembangan strategi. Pengembangan dan implementasi strategi inklusi keuangan nasional harus memastikan partisipasi sektor swasta sebagai mitra utama

memastikan partisipasi sektor swasta sebagai mitra utama dan mempertimbangkan berbagai kasus penggunaan untuk merangsang layanan keuangan digital. Contohnya adalah digitalisasi pembayaran pemerintah dalam jumlah besar.

Tantangan

Mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif yang diperlukan untuk memastikan bahwa strategi inklusi keuangan nasional tepat sasaran dengan kondisi di lapangan, dan mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan yang diperlukan dari sektor publik dan swasta, serta dari luar sektor keuangan

Prinsip Tingkat Tinggi 2 – *Pentingnya Menyeimbangkan Inovasi dan Risiko untuk Mencapai Inklusi Keuangan Digital*

Menyeimbangkan promosi inovasi untuk mencapai inklusi keuangan digital dengan mengidentifikasi, menilai, memantau, dan mengelola risiko baru.

Aktivitas

1. Mengidentifikasi risiko dalam suatu yurisdiksi merupakan langkah awal yang penting. Risiko yang relevan dengan layanan keuangan digital termasuk risiko konsumen, stabilitas, dan integritas. Kerangka pengaturan dan pengawasan di sekitar layanan keuangan digital harus didirikan untuk mengurangi risiko ini tanpa terlalu membatasi inovasi di pasar. Menerapkan prinsip proporsionalitas untuk mitigasi risiko yang efektif dan seimbang sangat penting untuk mendukung inovasi dan mencapai manfaat inklusi yang lebih besar.
2. Mengembangkan alat yang diperlukan untuk mendukung inovasi. Setelah penilaian risiko selesai, pembuat kebijakan harus mencari cara lebih lanjut untuk mendukung inovasi sambil tetap waspada terhadap risiko baru yang mungkin timbul dari hal yang sama.

Tantangan

Mendapatkan keseimbangan yang tepat antara melindungi stabilitas, integritas, dan pengguna sistem keuangan sambil menciptakan sektor berbasis inovasi yang inklusif.

Prinsip Tingkat Tinggi 3 – Menyediakan Kerangka Hukum dan Regulasi yang Memungkinkan dan Proporsional untuk Inklusi Keuangan Digital

Menyediakan kerangka hukum dan peraturan yang memungkinkan dan proporsional untuk inklusi keuangan digital, dengan mempertimbangkan standar dan panduan yang relevan dari G20 dan badan pembuat standar internasional.

Aktivitas

1. Memastikan dasar-dasar pengaturan lanskap layanan keuangan digital, termasuk persyaratan masuk, persyaratan kehati-hatian, perilaku dan integritas pasar, perlindungan konsumen keuangan, perlindungan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan rezim kebangkrutan.
2. Memastikan bahwa peraturan dasar yang memungkinkan untuk inklusi keuangan digital sudah tersedia.
3. Menetapkan langkah dan inisiatif kebijakan publik yang mendukung pengembangan kegiatan teknologi finansial (*financial technology*).
4. Mempertimbangkan bagaimana isu-isu seputar perimeter peraturan, persaingan, *outsourcing* saling berhubungan langsung ke tekfin. Mengevaluasi perlakuan peraturan dari perkembangan teknologi terbaru, penyedia/pengalihdayaan (*outsourcing*) pihak ketiga, dan platform keuangan. Identifikasi intervensi yang dapat meningkatkan nilai dari data untuk pelanggan miskin dan tersisih, serta mitigasi risiko. Mengevaluasi masalah persaingan khususnya karena munculnya peran teknologi besar dan dampaknya terhadap tekfin kecil.

Tantangan

Regulator dan pengawas perlu mengantisipasi dan menanggapi kondisi pasar yang berubah dengan cepat yang mungkin sangat menantang bagi negara kecil berpenghasilan rendah. Selain itu, kapasitas dan sumber daya dalam konteks pengawasan berbasis teknologi (*suptech*) dan regulasi berbasis teknologi (*regtech*) saat ini yang masih terbatas.

Prinsip Tingkat Tinggi 4 – *Memperluas Ekosistem Infrastruktur Layanan Keuangan Digital*

Memperluas ekosistem layanan keuangan digital (termasuk infrastruktur keuangan dan teknologi informasi dan komunikasi) untuk penyediaan layanan keuangan digital yang aman, andal, dan berbiaya rendah ke seluruh wilayah geografis yang relevan, terutama daerah pedesaan yang kurang terlayani.

Aktivitas

1. Merancang infrastruktur pembayaran utama yang mempertimbangkan penggunaan teknologi, produk, dan mode akses baru dan yang sudah ada secara seimbang untuk memperluas akses dan penggunaan akun transaksi.
2. Memastikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi serta infrastruktur pasar efektif mendukung upaya inklusi keuangan dengan memberikan informasi penting kepada penyedia jasa keuangan, termasuk infrastruktur identifikasi, sistem pelaporan kredit, dan platform berbagi data lainnya.
3. Merancang penawaran produk transaksi dan pembayaran yang efektif untuk memenuhi berbagai kebutuhan transaksi populasi sasaran dan dengan biaya rendah.
4. Memastikan titik akses sudah tersedia untuk menambah kegunaan akun transaksi.
5. Melakukan dan mengoordinasikan pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan dan efektif dengan upaya pemangku kepentingan sektor publik dan swasta untuk mendukung kesadaran dan literasi keuangan.
6. Memanfaatkan arus pembayaran bervolume besar dan berulang, termasuk pengiriman uang, untuk meningkatkan jumlah dan penggunaan rekening transaksi.

Tantangan

Menyelaraskan tujuan kebijakan dengan implementasi teknologi, kurangnya *domestic interoperability* (*interoperability* adalah istilah yang biasa digunakan di sektor komunikasi dan layanan keuangan yang menunjukkan kemampuan sistem atau bahkan produk yang berbeda untuk dapat saling berinteraksi dengan lancar), kurangnya standar data yang selaras untuk pembayaran lintas batas, kurangnya lapangan permainan yang setara dalam mengakses infrastruktur bersama, biaya investasi dan operasional, operasional dan tantangan ketahanan dunia maya, budaya kas yang kuat, eksklusi digital dan kurangnya literasi digital dan literasi keuangan digital, serta konsentrasi pasar.

Prinsip Tingkat Tinggi 5 – *Menetapkan Praktik Keuangan Digital yang Bertanggung Jawab untuk Melindungi Konsumen*

Menetapkan pendekatan komprehensif untuk perlindungan konsumen dan data yang berfokus pada isu-isu relevansi khusus dengan layanan keuangan digital. Kegiatan-kegiatan di bawah ini adalah kunci untuk berhasil menerapkan HLP 5.

Aktivitas

1. Mengikuti standar dan panduan internasional utama, terutama HLP G20/OECD tentang Perlindungan Konsumen Keuangan.
2. Memperbarui kerangka hukum, peraturan, dan pengawasan untuk mengatasi risiko dari inovasi digital dan model bisnis baru. Beberapa risiko utama termasuk: (a) penipuan atau kesalahan operator tekfin, (b) ketidakandalan atau kerentanan platform/teknologi, (c) pengungkapan dan transparansi konsumen dalam konteks digital, (d) peningkatan risiko ketidaksesuaian produk, (e) konflik model bisnis tekfin yang mengarah pada perilaku yang tidak sesuai dengan kepentingan konsumen, dan (f) pengambilan keputusan algoritmik yang mengarah pada hasil yang berpotensi tidak adil dan/atau bias sistemik terhadap populasi yang rentan.
3. Mengartikulasikan persyaratan yang jelas bagi penyedia jasa keuangan dan perantara mereka untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara terhadap konsumen serta pengungkapan dan transparansi yang efektif.
4. Memperkenalkan dan menegakkan aturan tata kelola data dan privasi serta melindungi konsumen dari penipuan dan penyalahgunaan.
5. Memiliki mekanisme penanganan keluhan dan ganti rugi yang mudah diakses, terjangkau, tepat waktu, dan transparan yang membantu membangun kepercayaan pelanggan.

Tantangan

Evolusi teknologi yang konstan dan kondisi pasar yang berubah dengan cepat, dengan aktor non-bank baru. Pada saat yang sama juga harus memastikan respons regulasi dan pengawasan yang tepat waktu dan memadai mengingat kendala kapasitas dan sumber daya yang dihadapi oleh regulator.

Prinsip Tingkat Tinggi 6 – *Memperkuat Literasi dan Kesadaran Digital dan Keuangan*

Dukung dan evaluasi program yang meningkatkan literasi digital dan keuangan berdasarkan karakteristik unik, keuntungan, dan risiko layanan keuangan digital serta saluran (*channels*).

Aktivitas

1. Mengikuti panduan internasional utama, terutama Panduan Kebijakan *G20/OECD International Network on Financial Education* tentang Digitalisasi dan Literasi Keuangan.
2. Mengumpulkan bukti dan mengembangkan diagnostik untuk menetapkan tingkat kesadaran, permintaan, dan penggunaan layanan keuangan digital, serta tingkat literasi keuangan digital.
3. Mengembangkan pendekatan strategis lintas pemangku kepentingan dan lintas sektor yang terkoordinasi untuk memperkuat literasi keuangan digital.
4. Mengembangkan kerangka kompetensi literasi keuangan digital.
5. Memastikan penyampaian program yang efektif untuk meningkatkan literasi keuangan digital.
6. Memfasilitasi evaluasi program edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan digital.

Tantangan

Memastikan bahwa program literasi digital mengimbangi inovasi yang cepat di layanan keuangan digital itu sendiri. Diperlukan pula pendekatan yang lebih empiris untuk mengevaluasi dampak inisiatif yang ditujukan untuk mendukung literasi keuangan digital.

Sumber: GPFI G20 Indonesia, 2022a.

Selain memberikan panduan tentang pendekatan implementasi dan praktik terbaik, panduan Prinsip Tingkat Tinggi 1 – 6 sebagaimana diuraikan di atas juga memberikan alat penilaian mandiri yang akan memungkinkan negara-negara untuk mengevaluasi kemajuan mereka pada setiap prinsip tersebut dan mempertimbangkan prasyarat dan urutan tindakan yang diberikan.

Inventarisasi Database dan Analisis Produk serta Layanan Keuangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di luar Kredit *(Beyond Credit)*

Dalam *International Seminar Digital Transformation For Financial Inclusion* yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada 11 Mei 2022 (Bank Indonesia, 2022), diungkapkan bahwa menurut indeks keuangan global World Bank, per 2017 terdapat 69 persen populasi orang dewasa di seluruh dunia sudah memiliki rekening di lembaga keuangan. Angka tersebut sedikit meningkat dari tahun 2014 yang levelnya 62 persen. Di satu sisi hal tersebut menunjukkan kemajuan yang terjadi, namun di lain sisi juga menunjukkan bahwa sekitar 30 persen dari populasi global atau sekitar 1,7 miliar orang masih kekurangan akses terhadap produk dan layanan keuangan. Termasuk dalam segmen yang minim akses tersebut di antaranya adalah wanita, pemuda dan juga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hasil survei Dewan Nasional Indonesia untuk inklusi keuangan juga menunjukkan tren serupa di Indonesia, di mana 62 persen orang dewasa memiliki akun pada tahun 2020. Selama pandemi banyak UMKM terpaksa menutup bisnis mereka, di mana satu dari lima pelaku usaha UMKM tersebut adalah wanita. Banyak wanita dan pemuda telah kehilangan pendapatan dan menjadi lebih rentan. Selain itu, penerima manfaat sosial juga semakin jatuh ke dalam kemiskinan karena pandemi merenggut pekerjaan dan memperburuk kemiskinan. Hal tersebut juga memperumit upaya untuk mengatasi hambatan terhadap inklusi keuangan, sehingga fokus pada segmen yang tersisih secara finansial sangat mendesak. Dikatakan mendesak karena mereka adalah golongan yang paling tidak mungkin memiliki akses kesehatan yang terjangkau dan berkualitas serta tabungan yang memadai, atau akses ke kredit yang dapat membantu mereka untuk mengatasi penurunan ekonomi.

UMKM memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja dan investasi dan juga dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Peran UMKM sangat signifikan dalam menyediakan lapangan pekerjaan, dan telah berkontribusi pada lebih dari 60 persen PDB Indonesia. Walaupun perannya sangat kritis, perkembangan UMKM masih menghadapi banyak kendala di antaranya adalah akses keuangan. Di Indonesia, hanya sekitar 18 persen dari total kredit bank yang telah disalurkan atau diberikan kepada usaha kecil dan menengah. Ini jauh di bawah rata-rata 30 hingga 80 persen selama pandemi. Pandemi menciptakan situasi yang lebih rentan sehingga fokus Presidensi Indonesia di tahun 2022 adalah bagaimana pemerintah dapat

menerapkan kebijakan untuk meningkatkan akses keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang sangat penting tidak hanya untuk memberdayakan mereka, tetapi juga menciptakan efek pengganda yang kuat dalam bentuk lapangan kerja dan pertumbuhan untuk memulihkan ekonomi.

Akibat dampak pandemi yang sangat parah, perhatian juga diarahkan kepada perempuan karena peran pentingnya dalam pembangunan ekonomi. Meningkatkan akses perempuan ke layanan keuangan formal tidak hanya akan mengamankan kehidupan keluarganya, namun juga memberdayakan diri mereka sendiri dengan terlibat dalam kegiatan bisnis seperti UMKM.

Studi lembaga global McKenzie menunjukkan bahwa 12 triliun dolar AS atau 11 persen dari PDB global dapat diciptakan jika semua negara memajukan kesetaraan perempuan. Besarnya potensi perempuan terutama dalam ekonomi dan pasar tenaga kerja diprediksi dapat menstimulus kegiatan ekonomi hingga 28 triliun dolar AS atau sama dengan 26 persen PDB dunia pada tahun 2025. Namun disadari bahwa potensi perempuan yang sangat besar tersebut seringkali tersisih dari jasa keuangan karena tidak memiliki kartu identitas diri atau tidak dapat memegang aset atas nama sendiri. Hal tersebut menjadi kendala bagi mereka untuk mengakses keuangan serta modal dari lembaga keuangan karena mereka tidak memiliki agunan.



Sementara kaum muda, dalam hal ini adalah 16 persen dari populasi global, merupakan segmen populasi yang sangat penting karena mereka memegang kunci untuk masa depan di mana mereka akan segera memasuki dunia kerja dan berkontribusi pada ekonomi. Namun banyak pemuda tetap tersisih secara finansial. Penyebabnya antara lain adalah karena kurangnya dokumen identitas resmi atau kebutuhan persetujuan dari wali yang sah untuk membuka rekening bank, atau kendala dalam bentuk stereotip yang dikaitkan dengan risiko yang lebih tinggi terkait dengan arus pendapatan yang tidak teratur serta nominal tabungan yang tidak memadai.

Kemajuan informasi dan teknologi turut mendukung upaya untuk mencapai target inklusi keuangan. Pemanfaatan digitalisasi, kecerdasan buatan digital dan *big data analysis* di seluruh dunia masih belum optimal untuk mendorong kemajuan inklusi keuangan. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, Presidensi G20 Indonesia memberikan perhatian terhadap akses perempuan untuk mengembangkan UMKM dengan dukungan inklusi keuangan digital yang telah diupayakan melalui kemitraan global untuk inklusi keuangan atau GPFI.

Transformasi menuju teknologi digital perlu terus dikawal guna memastikan bahwa penduduk terutama kelompok yang paling rentan dan tidak layak masih bisa mendapatkan layanan keuangan. Hal tersebut tidak hanya perlu dipromosikan secara moral, namun juga secara strategis untuk pemulihan ekonomi yang inklusif.

Inklusi keuangan menjadi titik masuk yang membuka peluang untuk inklusi ekonomi. Konsensus umum meyakini bahwa ketika semua orang memiliki akses dan dapat berpartisipasi dalam ekonomi, inklusi ekonomi akan mendorong pertumbuhan global yang berkelanjutan dan lebih berkualitas. Melalui digitalisasi, inklusi keuangan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan juga keberlanjutan, termasuk dalam mewujudkan kesetaraan. Segmen yang biasanya tertinggal yaitu UMKM, perempuan dan pemuda.

Untuk UMKM, inklusi keuangan dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan digitalisasi melalui teknologi keuangan atau teknologi finansial. Teknologi finansial mendukung UMKM dengan membantu mereka menemukan opsi pembiayaan yang lebih efisien. Teknologi finansial juga dapat memberikan lebih banyak opsi bagi publik untuk membuat transaksi lebih efisien dan lebih transparan melalui pembayaran kode QR.

Untuk wanita, tantangan utama dalam memanfaatkan digitalisasi berasal dari keterampilan literasi digital dan literasi keuangan yang rendah, terutama perempuan yang masuk ke sektor informal. Pembukaan rekening untuk perempuan perlu disertai dengan edukasi pemanfaatan akun tersebut secara aktif. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri.

Di Indonesia, pemerintah banyak mendesain dukungan sosial dengan nama, alamat dan nomor rekening di mana kemudian memberikan rekening keuangan tersebut kepada perempuan. Namun setelah pembukaan rekening, para perempuan ini hanya benar-benar menggunakan dengan cara yang sangat minim atau pasif. Untuk pengusaha perempuan dengan tingkat literasi keuangan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan keahlian dalam mengelola keuangan pribadi atau rumah

tangga dengan lebih baik, serta memanfaatkan produk keuangan untuk mengembangkan bisnis dan membangun keamanan finansial masa depan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu program untuk memberikan literasi dan pendidikan keuangan sangat penting.

Segmen kaum muda yang umumnya telah memiliki literasi digital memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan akses ke perangkat digital dan juga sekaligus mengadopsi produk keuangan sebagai *early adopter*. Kaum muda berada di antara penerima manfaat utama dari digitalisasi layanan keuangan. Indeks adopsi teknologi finansial menunjukkan bahwa kaum muda adalah kekuatan pendorong untuk adopsi teknologi finansial. Dengan berinvestasi dalam pendidikan kaum muda, hal tersebut berarti meningkatkan kemampuan kerja dan perspektif profesional masa depan mereka, serta memungkinkan mereka untuk memperoleh otonomi dalam masyarakat. Contohnya adalah akses kaum muda pada fasilitas perumahan dan perencanaan masa depan. Pemuda juga dapat menjadi aktif dalam pelaku ekonomi sosial di negara. Selain mengakses layanan dan produk keuangan yang akan memberikan kesempatan bagi kaum muda untuk meluncurkan inisiatif kewirausahaan, kaum muda juga sekaligus telah berkontribusi penting dalam penciptaan lapangan kerja.

Sementara pemanfaatan teknologi finansial dapat meningkatkan akses ke keuangan, yang tidak kalah penting adalah pengawasan pada sektor ini dan langkah-langkah perlindungan konsumen dan data yang memadai. Ini bukan hal yang mudah mengingat layanan keuangan khususnya di wilayah kota berkembang sangat pesat melalui kepemilikan *smartphone*, namun kemudian menjadi masalah bagi banyak orang yang meminjam uang dengan tingkat bunga tinggi dan berlebihan. Di Indonesia hal ini disebut "pinjol" atau pinjaman *online* di mana orang dengan mudah mengakses layanan kredit tanpa disertai kemampuan membayar kembali. Teknologi pasti mengubah sistem keuangan, sehingga pembuat kebijakan dan regulator perlu memastikan bahwa perubahan tersebut aman dan memberikan manfaat dalam bentuk inklusi, dan pada saat yang sama juga melindungi privasi orang dan terutama melindungi mereka yang rentan dari praktik penyalahgunaan teknologi.

Lebih lanjut dalam seminar internasional Bank Indonesia tersebut, terdapat sesi khusus studi kasus UMI, yaitu Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) yang merupakan salah satu program pemerintah Indonesia untuk mempromosikan inklusi keuangan. Jika dilihat segmentasi bisnis Indonesia, porsi terbesar adalah usaha mikro. Sementara usaha skala kecil menengah dan besar hanya menyumbang kurang dari satu persen. Lebih

lanjut di segmen mikro, mayoritas usaha mikro dijalankan oleh wanita yang jumlahnya kurang lebih 61 persen. Banyak usaha mikro terutama di level bawah atau biasa disebut ultra mikro, tidak dapat mengakses layanan keuangan melalui fasilitas perbankan karena informasi asimetris dan kurangnya jaminan. Berdasarkan data dari sistem informasi kredit program, pada tahun 2016 besarnya bentuk pinjaman mikro adalah sekitar Rp 14 juta. Padahal banyak usaha ultra mikro yang membutuhkan pembiayaan kurang dari Rp 10 juta. Kementerian Keuangan meluncurkan program UMI pada tahun 2017 yang dikelola oleh agen layanan publik.

Program UMI dirancang untuk menyediakan pinjaman mikro yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Melalui lembaga keuangan non-bank diharapkan program UMI menjadi salah satu solusi bagi usaha mikro termasuk perempuan, pemuda dan bisnis mikro agar mendapatkan dukungan keuangan sehingga membawa dampak positif dalam kegiatan ekonomi (Benang.ID, 2022). Program UMI disampaikan melalui partisipasi lembaga keuangan non-bank yang keberadaannya lebih dekat dan lebih banyak dapat diakses oleh masyarakat, harapan proses identifikasi atau "mengetahui fungsi nasabah anda" (*know your customer*) dapat dijalankan dengan baik oleh lembaga keuangan non-bank tersebut. Proses validasi data dilakukan melalui sistem informasi kredit program untuk memvalidasi kewarganegaraan warga negara. Dukungan pembiayaan program UMI juga dilengkapi dengan pendampingan usaha, peran yang diharapkan dapat dilakukan dengan lebih baik oleh lembaga keuangan non-bank.

Selama periode 2017 hingga 2021, program UMI sudah menjangkau lebih dari 5 juta usaha ultra mikro dengan nilai pinjaman lebih dari Rp 18 triliun atau lebih dari 1,2 miliar dolar melalui 55 mitra non-bank yang dimiliki UMI, mencapai 508 dari 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia (Lentera24, 2022). Dari data tersebut terlihat bahwa 95 persen penerima program adalah perempuan, 91 persen di bawah Rp5 juta. Fakta menarik lainnya dari data lima tahunan adalah adanya peningkatan jumlah angkatan muda dengan usia di bawah 30 dari hanya 8 pada 2017 menjadi 18 pada 2021 (Benang.ID, 2022). Untuk tahun 2022 ditargetkan dapat mencapai setidaknya 2 juta penerima UMI baru dan hal tersebut diharapkan dapat mendukung program inklusi keuangan serta program pemulihan ekonomi.

Setidaknya terdapat tiga hal penting yang dapat ditarik dari uraian di atas, yaitu peran transformasi digital sebagai "pengubah permainan" (*game changer*) untuk pulih dari pandemi dan untuk mendorong inklusi keuangan. Kedua, digitalisasi memang dapat mempercepat inklusi

keuangan, namun menciptakan kondisi untuk menumbuhkan produksi atau kegiatan ekonomi yang menguntungkan dan berkelanjutan merupakan sesuatu yang fundamental. Oleh karena itu, upaya mendorong inklusi keuangan perlu dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi. Ketiga, penting bagi para pembuat kebijakan dan regulator untuk memastikan layanan keuangan digital yang aman, menyiapkan infrastruktur untuk memfasilitasi UMKM dalam transformasi digitalnya, dan mendorong pemanfaatan digitalisasi yang lebih besar dalam proses bisnis UMKM dengan sinergi dan kolaborasi.

Sementara itu, SME Finance Forum bekerja sama dengan *Islamic Development Bank* (IsDB), *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), *Women's World Banking*, dan *Better than Cash Alliance*, menghasilkan kumpulan temuan awal dari *Database* "*Digital and Innovative Financial Products and Services for MSMEs Beyond Credit*" (GPFI G20 Indonesia, 2022a). Salah satu tujuan utama dari *database* tersebut adalah untuk mengumpulkan dan menampilkan praktik-praktik baik yang dapat menjadi contoh yang berguna untuk semua negara.

Selanjutnya, sebagaimana dirangkum dari dokumen *Database on Digital and Innovative Financial Products and Services for MSMEs Beyond Credit*, laporan tersebut menyoroti beberapa aspek *database*, dengan fokus utama pada karakteristik dari 60 contoh kasus yang sudah terkumpul. Basis data juga dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengguna untuk mencari studi kasus yang relevan berdasarkan karakteristik berikut, yaitu penghematan, manajemen kas, jaminan kredit, anjak piutang, pendidikan keuangan, asuransi, manajemen risiko (GPFI, 2022). Basis data juga akan memungkinkan pembaca untuk melihat atau mengunduh seluruh studi kasus yang memuat antara lain, informasi tentang jenis produk/layanan, fitur utama inovasi, hasil dan dampak inovasi, pembelajaran dan rekomendasi kebijakan.

Tidak hanya itu, laporan tersebut juga memberikan analisis singkat tentang aspek teknis dari kegiatan survei yang dilakukan, bersama dengan beberapa pelajaran yang dapat dipetik dan implikasi kebijakan. Karena hanya berbentuk tinjauan awal dari gudang kasus praktik baik yang dapat menjadi referensi bagi pengguna, variabel dan statistik dapat berubah dan berkembang.

Dari 60 contoh studi kasus yang masuk, mayoritas berasal dari Abu Dhabi dan Turkiye. GoPay menjadi contoh studi kasus dari Indonesia dengan highlight melengkapi masyarakat cerdas teknologi (*tech-savvy*) melalui kampanye kemampuan cerdas keuangan (*financial-savvy*) (PressRelase.id, 2021), dan QRIS GoPay (QRIS adalah penyatuan

berbagai jenis QR dari penyedia layanan sistem pembayaran yang berbeda dengan menggunakan satu QR Code tunggal). Demikian pula studi kasus Ovo, dampak sosial ekonomi terhadap mitra UMKM – kajian dampak pembayaran digital dalam memperkuat ketahanan UMKM Indonesia di masa pandemi.



Perangkat Diagnostik Regulasi Layanan Keuangan Digital UMKM

UMKM menyumbang lebih dari 90 persen bisnis dan berkontribusi lebih banyak dari 50 persen pekerjaan di seluruh dunia. Namun, pertumbuhan UMKM seringkali terkendala oleh kurangnya akses pembiayaan yang menjadi faktor pendukung utama bagi UMKM untuk memungkinkan mereka melakukan investasi produktif sambil berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, UMKM seringkali harus lebih mengandalkan dana internal atau kas dari sumber informal (seperti keluarga, teman, rentenir) karena mereka cenderung tidak dapat memperoleh pinjaman bank daripada perusahaan besar.

Sebuah laporan tahun 2017 dari International Finance Corporation (IFC) dan SME Finance Forum menemukan bahwa 65 juta perusahaan atau 40 persen dari UMKM formal di negara berkembang memiliki kebutuhan pembiayaan yang belum terpenuhi sebesar 5,2 triliun dolar AS setiap tahunnya, yaitu sekitar 50 persen dari UKM formal yang tidak memiliki akses ke kredit (The World Bank, 2019). Kesenjangan tersebut bertambah 2,9 triliun dolar AS lagi jika digabungkan dengan usaha mikro dan informal. Karena UMKM menyumbang proporsi yang signifikan dari ekonomi global, kurangnya akses ke layanan keuangan formal dapat menghambat pertumbuhan UMKM tersebut, dan terlebih lagi potensi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Layanan keuangan digital telah menjadi pengungkit penting untuk meningkatkan efisiensi pasar keuangan, memperluas akses ke layanan keuangan dan meningkatkan persaingan di sektor keuangan. Inovasi

di bidang teknologi berpotensi meningkatkan akses keuangan UMKM. Tingkat pendanaan eksternal yang relatif rendah menunjukkan bahwa ada kebutuhan memperkuat dan memperluas mekanisme pembiayaan alternatif bagi UMKM. Keuangan digital melalui mekanisme seperti *crowdfunding*, *P2P lending*, dan *Initial Coin Offerings* adalah beberapa alternatif jenis mekanisme keuangan yang dapat melengkapi lanskap keuangan UMKM yang ada dan membantu menjembatani kesenjangan pembiayaan UMKM (GPFI, 2020). Dengan memanfaatkan seperangkat alat dan teknik *big data*, beberapa tantangan tradisional seperti asimetri informasi dapat dikurangi dengan menggunakan penilaian kredit alternatif.

UMKM lebih lambat mengadopsi layanan keuangan digital karena berbagai faktor, termasuk tingkat konektivitas yang rendah. Banyak UMKM yang juga menolak layanan keuangan formal karena defisit kepercayaan yang mendalam pada penyedia layanan keuangan digital. Selama pandemi, bank sentral serta regulator dan pengawas keuangan menginisiasi penggunaan layanan keuangan digital termasuk uang elektronik. Inisiatif ini menargetkan UMKM secara khusus untuk mendukung penerapan layanan keuangan digital. Transformasi digital yang berkelanjutan tersebut berpotensi meningkatkan produktivitas operasional UMKM dan akses keuangan mereka.

Pemanfaatan teknologi menjadi *game changer*. Ekosistem pelaku keuangan berubah dengan masuknya pelaku teknologi dan kemitraan antara perusahaan tekfin dan pemberi pinjaman tradisional yang dapat menyederhanakan dan meningkatkan berbagai aspek penting dari proses pinjaman UMKM. Misalnya, GXS Bank yang didukung oleh Grab (perusahaan teknologi terdaftar) dan Singtel (operator jaringan seluler), telah menerima lisensi perbankan penuh di Singapura untuk menawarkan pinjaman UMKM melalui platformnya. Demikian pula ekosistem *Amazon Pay* di India telah menjangkau lebih dari 8,5 juta pemilik dan pengusaha usaha kecil yang sebelumnya mengandalkan transaksi dengan kas (GPFI, 2023a).

Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan intervensi melalui regulasi. Analisis dan perhitungan mengenai kesenjangan UMKM perlu dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan bentuk intervensi regulasi yang memadai. Berdasarkan hasil analisis, kesenjangan keuangan UMKM adalah kurangnya penyediaan modal untuk perusahaan UMKM berdasarkan kinerja dan tingkat risikonya. Meskipun kesenjangan pembiayaan UMKM di kedua negara G20 dan non-G20 sudah mapan, mengukur dan memantaunya di tingkat negara penting untuk dapat

menilai kemajuan yang dibuat oleh peraturan dan intervensi lainnya. Meskipun tidak ada satu metode analitik yang diterima secara luas untuk menentukan keberadaan dan tingkat kesenjangan pembiayaan, pembuat kebijakan disarankan untuk melakukan upaya untuk menghitungnya sebelum melanjutkan dengan intervensi, dan untuk melembagakan kerangka pemantauan dan evaluasi yang konsisten (GPFI, 2023a).

Kelompok Kerja Keuangan UMKM *Alliance for Financial Inclusion* (AFI) ditugaskan untuk mengembangkan perangkat peraturan (*regulatory toolkit*) bekerja sama dengan Presidensi G20 2022 Indonesia, dan anggota serta mitra pelaksana GPFI, untuk menjadi sumber bagi regulator keuangan dari G20 maupun negara-negara non-G20. *Toolkit* ini berisi berbagai alat regulasi potensial yang cocok untuk yurisdiksi di semua tingkat pembangunan (GPFI, 2023a).

Perangkat peraturan tersebut menguraikan bagaimana layanan keuangan digital dapat menguntungkan UMKM dengan menghilangkan beberapa kendala utama terhadap akses keuangan mereka dan dengan menciptakan akses ke produk dan layanan baru. *Toolkit* ini memberikan panduan dan bertujuan membantu regulator keuangan dan pembuat kebijakan dari yurisdiksi G20 dan non-G20 dalam berbagai tahap proses implementasi kebijakan melalui peningkatan lingkungan peraturan bagi UMKM dalam mengakses layanan keuangan digital yang inovatif dan melengkapi lanskap keuangan yang ada. Selain menguraikan alat yang tersedia untuk regulator keuangan, *toolkit* ini juga menyoroti kebutuhan untuk belajar dari yurisdiksi lain, berkolaborasi dengan regulator/lembaga pemerintah lain dan sektor swasta, dan bekerja menuju harmonisasi ekosistem lintas batas (GPFI, 2023a).

Terdapat 9 butir Wawasan Utama dan Rekomendasi dari Toolkit sebagaimana tertuang dalam dokumen *G20/AFI Preliminary Regulatory Toolkit For MSME Access To Digital Financial Services* (GPFI G20 Indonesia, 2022b) yang dijabarkan dalam Gambar 6.3.

Gambar 6.3 Wawasan Utama dan Rekomendasi Akses Layanan Financial Digital bagi UMKM

1. *Layanan keuangan digital dapat membantu mengatasi kesenjangan pendanaan UMKM.*

   Teknologi inovatif dan layanan keuangan digital dapat membantu menjembatani kesenjangan kepercayaan dan informasi, dan oleh karena itu, meningkatkan akses pembiayaan UMKM, memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan.

2. *Regulator keuangan memiliki peran kunci dalam pengembangan pasar dan menciptakan lingkungan yang aman dan inovatif.*

   Badan pengatur perlu bekerja sama dengan badan sektor publik dan swasta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung layanan keuangan digital. Mereka dapat mengaktifkan praktik terbaik untuk stabilitas sistemik, perlindungan konsumen, dan efisiensi pasar. Setiap rencana intervensi harus dimulai dengan mengukur kesenjangan pendanaan UMKM dan memantau efektivitas intervensi dari waktu ke waktu.

3. *Berpikir secara holistik: "Stack Approach" (Pendekatan Tumpukan).*

   Regulator dapat mencapai dampak paling besar ketika inisiatif dalam produk dan domain digital yang berbeda berinteraksi dan membangun satu sama lain. Contohnya adalah India yang memanfaatkan ID biometrik nasional menjadi lapisan pembayaran universal. *Electronic Know Your Costumer* (eKYC) bersama, dan sertifikasi digital serta dokumen adalah contoh keseluruhan yang lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya.

4. *Memastikan kejelasan hukum.*

   Laju inovasi keuangan digital telah menimbulkan ketidakpastian dan ketakutan, karena teknologi telah melampaui pembuatan peraturan. Regulator harus agnostik teknologi*, tetapi memastikan bahwa legalitas dan penerimaan layanan keuangan digital sejelas dan konsisten seperti analog tradisional yang mereka miliki. Sediakan panduan yang jelas dan tempat berlindung yang seaman mungkin untuk menghindari keragu-raguan.

*Yang dimaksud dengan "agnostik teknologi" adalah teknologi atau pendekatan didesain untuk bersifat netral terhadap berbagai macam pilihan teknologi lainnya, sehingga lebih fleksibel dan mudah diadopsi di berbagai konteks.

5. *Mempromosikan akses digital terbuka ke sumber daya.*

   Regulator harus mempromosikan akses terbuka ke platform dan sistem utama oleh sebanyak mungkin peserta, yang konsisten dengan keselamatan dan keamanan jaringan dan protokol yang mendasarinya. Untuk mempromosikan produk inovatif yang memiliki intervensi manual minimal, penyimpanan data dan platform harus dapat diakses secara daring dan melalui *Application Programming Interface* (API)* yang transparan sehingga dapat diintegrasikan ke dalam alur kerja dan sistem penyedia layanan keuangan digital itu sendiri.

*Yang dimaksud dengan API adalah seperangkat aturan dan protokol yang memungkinkan berbagai perangkat lunak atau aplikasi untuk berinteraksi satu sama lain. API bertindak sebagai perantara yang memungkinkan berbagai komponen perangkat lunak berkomunikasi dan berbagi data tanpa harus memahami detail internal satu sama lain.

6. *Mendorong interoperabilitas**

   Sistem nasional dan regional terpadu membantu meningkatkan skala pengembalian dan meningkatkan penerimaan baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Untuk menghindari penguncian oleh satu penyedia tunggal sistem, regulator harus memilih bahwa untuk infrastruktur fundamental dan sistemik, spesifikasi inti, protokol, dan tipe data harus ditentukan oleh konsorsium terbuka dan dipelihara pada model utilitas publik. Partisipasi luas oleh berbagai lembaga keuangan, bisnis, dan konsumen harus tersedia, dikondisikan pada penerimaan interoperabilitas dan standar kualitas, risiko, keamanan, dan perlindungan data.

7. *Mendukung digitalisasi informasi, dokumen, dan alur kerja.*

   Regulator memiliki peran kunci dalam mendorong digitalisasi proses baik di dalam area pemerintahan lain maupun di pasar. Teknologi yang memungkinkan ini dapat meningkatkan kecepatan layanan dan menurunkan biaya penyediaan Layanan Keuangan Digital – khususnya penting bagi UMKM yang mungkin tidak menguntungkan untuk dilayani melalui cara tradisional.

8. *Mengaktifkan inovasi dan pengujian produk.*

   *Sandboxes** dan pendukung inovasi lainnya dapat digunakan untuk menguji produk baru dan mengevaluasi konsep tanpa risiko terhadap stabilitas keuangan, integritas, atau perlindungan konsumen. Penggunaan yang efektif dari pendukung tersebut memerlukan desain tantangan yang spesifik dan sempit untuk memunculkan solusi potensial di area di mana terdapat kesenjangan yang teridentifikasi dalam penyediaan pasar.

*Yang dimaksud dengan *sandbox* di sini adalah suatu lingkungan yang diciptakan untuk mengizinkan orang untuk menciptakan, menguji, dan mengembangkan ide-ide baru tanpa risiko besar atau dampak negatif yang signifikan.

9. *Sesuaikan kebijakan layanan keuangan digital untuk memastikan inklusi populasi yang kurang terlayani.*

   Pengukuran pasar keuangan UMKM dan dampak intervensi peraturan harus mencakup data terpilah yang dirancang khusus untuk menilai inklusi populasi yang kurang terlayani seperti perempuan, pemuda dan lansia, kaum migran, serta kelompok pedesaan dan pertanian. Persyaratan lisensi dan KYC (*know your customer*) yang berjenjang dapat digunakan untuk mempromosikan inklusi tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap stabilitas keuangan global dan standar integritas.

Sumber: GPFI, 2023a.

UMKM memainkan peran penting di sebagian besar negara berkembang dan maju dalam hal memberikan kontribusi terhadap nilai tambah, lapangan kerja, investasi, dan inovasi. Akses yang sulit ke maupun dari layanan keuangan formal dapat menghambat kapasitas pertumbuhan UMKM, memperparah risiko selama krisis ekonomi dan berdampak negatif pada tingkat makro.

Terkait dengan hal tersebut para pembuat kebijakan diminta untuk mengidentifikasi friksi dalam penawaran dan permintaan layanan keuangan bagi UMKM dan memitigasi kemungkinan kendala keuangan. Untuk itu data terpercaya yang mencakup aspek-aspek utama inklusi keuangan UMKM sangat penting dalam pengambilan keputusan para pembuat kebijakan di bidang ini (Kemenkeu, 2022).

Namun, sementara beberapa survei internasional memberikan indikator inklusi keuangan orang dewasa (misalnya *WB Global Findex* atau Survei Akses Keuangan IMF), informasi serupa untuk UMKM sangat terbatas; khususnya, gender dan data sisi penawaran umumnya tidak ada. Kemajuan harmonisasi data di bidang ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi upaya global dan nasional untuk meningkatkan penggunaan layanan keuangan oleh pengusaha kecil.

Kemajuan harmonisasi data pada UMKM dapat melayani tujuan yang berbeda. Pertama, informasi lintas negara dapat membantu menginformasikan kebijakan dan intervensi kebijakan, termasuk pemahaman tentang kesenjangan yang ada dan potensi langkah ke depan. Kedua, harmonisasi data dapat memudahkan identifikasi subkelompok UMKM yang rentan. Ketiga, dapat meningkatkan evaluasi kebijakan melalui perbandingan hasil lintas negara dan dari waktu ke waktu. Akhirnya, pengumpulan informasi pembanding lintas negara tentang

inklusi keuangan UMKM dapat merangsang penelitian tentang topik tersebut.

Tentu saja, meskipun harmonisasi data memiliki banyak manfaat, terdapat pula tantangan seperti operasional dan metodologis yang berbeda. Tidak mudah mengumpulkan data dalam lingkup global, terutama pengumpulan dan pemutakhiran informasi ke dalam kumpulan data baru yang terintegrasi dan memastikan konsistensi serta keterbandingan dari waktu ke waktu. Dalam hal ini kunci keberhasilan proyek ini adalah menetapkan dengan jelas tujuan kebijakan, garis waktu, dan ruang lingkup pengumpulan data yang tepat.

Laporan yang disusun oleh Alliance for Financial Inclusion mengenai harmonisasi data UMKM ini bermanfaat dalam hal: pertama, menyajikan pengakuan atas kumpulan data atau survei yang tersedia yang berisi informasi keuangan UMKM yang dapat digunakan atau diadaptasi untuk memperoleh indikator inklusi keuangan perusahaan. Kedua, melaporkan hasil lokakarya yang diadakan pada Juli 2022 untuk membahas langkah-langkah yang dapat diterapkan oleh negara-negara untuk mendapatkan data terpilah menurut jenis kelamin tentang keuangan usaha kecil (AFI, 2022).

Tujuan GPFI adalah untuk memajukan harmonisasi data UMKM. Harmonisasi data UMKM adalah elemen kunci untuk memantau kesenjangan keuangan perusahaan dan mengatasinya. Pada saat yang sama, penting untuk mengetahui banyak kesulitan dari proyek semacam itu, baik dari sudut pandang organisasi, teknis dan politik. Salah satu cara maju yang mungkin adalah mengejar tujuan harmonisasi data yang dibangun berdasarkan pengalaman survei yang ada, seperti yang dikelola oleh World Bank, IMF atau OECD. Hal ini membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit dalam hal sumber daya manusia, teknis, dan keuangan. Hal tersebut dapat menjadi catatan bersama untuk memberikan pengakuan atas berbagai pengalaman guna membangun titik awal yang solid dan bersama untuk diskusi tahun berikutnya.

Penutup

Sejumlah besar inisiatif telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan literasi keuangan sejalan dengan prinsip tingkat tinggi yang dikembangkan. Di bawah kerangka keseluruhan yang ditetapkan oleh Rekomendasi OECD tentang literasi keuangan dan Panduan Kebijakan INFE G20/OECD – Digitalisasi dan Literasi Keuangan, telah dilakukan beberapa upaya seperti pengembangan strategi literasi keuangan digital, pengembangan kerangka kompetensi mengenai topik

keuangan digital, dan penerapan berbagai program dan inisiatif untuk target audiens yang berbeda. Di tingkat internasional dan nasional, telah dilakukan upaya signifikan untuk memperkuat literasi keuangan digital sebagai cara untuk mendukung inklusi keuangan digital, seperti survei orang dewasa untuk mendapatkan data yang dapat dibandingkan secara internasional, mengembangkan kerangka kompetensi keuangan untuk anak-anak dan remaja di Uni Eropa secara bersama-sama dilaksanakan oleh Komisi Eropa dan OECD/INFE sebagai pelengkap kerangka kerja untuk orang dewasa yang diterbitkan pada tahun 2021. Meningkatkan kerja sama dan pertukaran internasional dalam literasi dan pendidikan keuangan digital seperti yang dilakukan di GPFI, OECD/INFE, dan forum internasional lainnya, dapat membantu negara-negara anggota dan non-anggota untuk maju lebih cepat.

Dari penyusunan *Database on Digital and Innovative Financial Products and Services for MSMEs Beyond Credit*, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam langkah selanjutnya. Pertama, kuesioner dapat dimodifikasi dan diperbaiki untuk mendorong tanggapan yang lebih lengkap dan lebih sedikit permohonan yang dibatalkan. Hal ini dapat dilakukan baik melalui pertanyaan-pertanyaan itu sendiri, maupun melalui organisasi teknis pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam database. Salah satu solusi yang mungkin dilakukan adalah dengan mengelompokkan pertanyaan berdasarkan bidang topik keuangan UKM, agar pengguna dapat memberikan data statistik dan kontekstual yang lebih relevan. Selain itu perlu dirancang strategi untuk meningkatkan kualitas entri data.

Dukungan dari anggota dan mitra GPFI diperlukan untuk memotivasi lebih banyak pengajuan studi kasus dari lebih banyak negara dan lebih banyak institusi guna memastikan produk dan layanan yang masuk dalam Database mencerminkan gambaran menyeluruh tentang inovasi yang ada di seluruh dunia.

Referensi

Alliance for Financial Inclusion. (2022). "Financial Inclusion Data Working Group." https://www.afi-global.org/working-groups/fid/

GPFI. (n.d.). "About GPFI." *https://www.gpfi.org/about-gpfi*. Retrieved August 11, 2023, from https://www.gpfi.org/about-gpfi

Bank Indonesia. (2022). "International Seminar Digital Transformation for Financial Inclusion." *https://www.youtube.com/watch?v=-GpbgE8nj00&t=7839s*.

Bank Indonesia. (2022a). "Memanfaatkan Peluang Digitalisasi Dorong Keuangan Inklusif dan Berkelanjutan." https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2426422.aspx

Benang.id. (2022). "Percepatan Inklusi Keuangan Pemuda, Wanita, UKM Jadi Prioritas Presidensi G20." https://benang.id/percepatan-inklusi-keuangan-pemuda-wanita-ukm-jadi-prioritas-presidensi-g20/

Gabor, D., dan Brooks, S. (2017). "The Digital Revolution in Financial Inclusion: International Development in the Fintech Era." *New Political Economy*, *22*(4), 423–436.

GPFI. (2020). "G20 2020 Financial Inclusion Action Plan. Retrieved August 11, 2023," https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/sites/default/files/G20%202020%20Financial%20Inclusion%20Action%20Plan.pdf

GPFI. (2021). "*Global Partnership for Financial Inclusion - 2022 Annual Plan*. Retrieved August 11, 2023," https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc= s&source=webcd=&ved=2ahUKEwjChfzZ0LqBAxWA1zgGHSzzDiUQFnoECBAQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.gpfi.org%2Fsites%2Fgpfi%2Ffiles%2Fdocuments%2F2022%2520GPFI%2520Annual%2520Work%2520Plan.pdf&usg =AOvVaw26kF8YgBbWiCwh1tzGKUmG&opi=89978449

GPFI. (2022). "Global Partnership for Financial Inclusion G20 Indonesia Presidency 2022 Database: Digital and Innovative Financial Products and Services for MSMEs Beyond Credit Preliminary Report."

GPFI. (2023). "2023 GPFI Progress Report to G20 Leaders." https://www.g20.org/content/dam/gtwenty/gtwenty_new/document/5-docs-sep/2023_GPFI_Progress_Report_to_G20_Leaders.pdf

GPFI. (2023a). "GPFI/AFI Regulatory Toolkit for Enhanced Digital Financial Inclusion of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)." https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/2023%20GPFI%20-%20AFI%20-%20MSMEs%20DFS%20Toolkit.pdf

GPFI G20 Indonesia. (2022a). "Implementation Guide for the G20 High-Level Principles for Digital Financial Inclusion (Principles 1-6)." *https://www.gpfi.org/sites/gpfi/files/documents/GPFI%20Outcome%201%20%28Final%20-%20updated%29.pdf*

GPFI G20 Indonesia. (2022b). "*Indonesia G20 Presidency - GPFI Report.*"

Kementerian Keuangan. (2022). "Hasil Nyata Presidensi G20 Indonesia. *Fiskal*, Edisi IV." https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/warta-fiskal/file/1676618114_warta_fiskal_4_-_2022.pdf

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2022, September 28). "Seminar Nasional G20 di UGM: Presidensi G20 Indonesia Fokus Tiga Pilar Prioritas dan Concrete Deliverables untuk Hasilkan Solusi Bagi Dunia." *https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4581/seminar-nasional-g20-di-ugm-presidensi-g20-indonesia-fokus-tiga-pilar-prioritas-dan-concrete-deliverables-untuk-hasilkan-solusi-bagi-dunia*. www.ekon.go.id.

Khan, N., Zafar, M., Okunlola, A. F., Zoltan, Z., dan Robert, M. (2022). "Effects of Financial Inclusion on Economic Growth, Poverty, Sustainability, and Financial Efficiency: Evidence from the G20 Countries." *Sustainability (Switzerland)*, *14*(19). MDPI.

Lentera24. (2022). "Umi Bantu Akses Pembiayaan Kelompok Rentan di Balik Usaha Mikro." https://www.lentera24.com/2022/05/umi-bantu-akses-pembiayaan-kelompok.html

Mader, P. (2016). *Questioning Three Fundamental Assumptions in Financial Inclusion*. London.

PressRelease.id. (2021). "Bukan Cuma Melek Digital, GoPay Dorong Anak Muda Canggih Kelola Keuangan di Masa Pandemi lewat FinanSiap." https://pressrelease.kontan.co.id/release/bukan-cuma-melek-digital-gopay-dorong-anak-muda-canggih-kelola-keuangan-di-masa-pandemi-lewat-finans?page=all

Sakariya, S. (2013). "Evaluation of Financial Inclusion Strategy Components: Reflection from India. *Journal of International Management Studies*. International Academy of Business and Economics, *13*(1), 83–92.

The World Bank. (2019). "Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance." https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance#:~:text=The%20International%20Finance%20Corporation%20(IFC,of%20the%20global%20MSME%20lending.

BAB 7

Agenda Perpajakan Internasional



Pendahuluan

Perpajakan internasional merupakan salah satu isu yang menjadi agenda utama dari pelaksanaan G20 di bawah Presidensi Indonesia. Bahasan dari perpajakan internasional meliputi berbagai aspek, dari sistem perpajakan internasional yang berbeda-beda, kebijakan perpajakan internasional, sampai dengan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Secara garis besar, BEPS merupakan sebuah tindakan dan strategi perpajakan yang digunakan oleh perusahaan multinasional dan bisnis internasional untuk menghindari pajak (BPPK, 2017).

Masuknya isu perpajakan internasional sebagai agenda prioritas ini didasarkan pada situasi maraknya praktik penghindaran pajak yang berdampak negatif bagi banyak negara. Dengan berkembangnya perekonomian secara global dan juga perdagangan maupun bisnis lintas negara, banyak perusahaan-perusahaan multinasional dan bisnis internasional yang beroperasi bukan di wilayah asalnya telah melakukan transaksi penjualan dan bisnis di berbagai wilayah di dunia.

Negara-negara menghadapi kesulitan untuk menghadapi perilaku pelaku bisnis lintas batas tersebut. Hal ini di antaranya disebabkan karena sampai dengan saat ini, masih belum terdapat standar peraturan perpajakan internasional yang menjadi acuan dari penerapan perpajakan di seluruh dunia, sehingga berdampak terhadap kerugian akibat adanya penghindaran dan penggelapan pajak yang dilakukan para wajib pajak tersebut. Di samping itu, dengan berkembangnya digitalisasi ekonomi, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, sekalipun terbuka kesempatan yang perlu dimanfaatkan dan ditindaklanjuti.

Dalam konteks penanganan praktik-praktik buruk dalam perpajakan, sekitar 141 negara dan yurisdiksi bergabung untuk mewujudkan *G20/OECD Inclusive Framework* terkait BEPS ini untuk mereformasi peraturan perpajakan internasional dan memastikan perusahaan multinasional membayar persentase pajak yang wajar di manapun mereka beroperasi. Kerangka inklusif ini dibentuk supaya tindakan-tindakan menghindarkan dan menggelapkan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban para wajib pajak dapat dicegah. Kerangka ini juga penting untuk meningkatkan koherensi aturan pajak internasional dan membangun transparansi dalam lingkungan pajak internasional. Kerangka ini juga diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan perpajakan yang muncul dari digitalisasi ekonomi dan keuangan (OECD, 2023a).

Dalam Presidensi G20 Indonesia, pembahasan isu perpajakan internasional yang dilakukan Jalur Keuangan G20 dan OECD fokus pada enam isu utama, yaitu *tax package* yang mencakup seluruh kebijakan perpajakan, insentif pajak, kebijakan pajak pasca pandemi COVID-19, pajak dan lingkungan, dan perpajakan berbasis gender (*Gender Based Taxation*/GBT). Perhatian terutama diberikan kepada pembahasan OECD/G20 tentang *Inclusive Framework* (Pilar Satu dan Pilar Dua) yang menjadi fondasi pemajakan ekonomi digital yang dapat diperluas untuk menjangkau sektor perusahaan multinasional, pembahasan keterhubungan perpajakan dan pembangunan, perpajakan dan lingkungan seperti pajak karbon. Presidensi Indonesia juga memberikan perhatian pada isu-isu terkait *cryptocurrency* dan *cybersecurity* yang terkait dengan perpajakan. Dengan pembahasan yang progresif, Presidensi Indonesia berharap dapat diciptakan kepastian rezim pajak dan transparansi yang dapat mendukung pembangunan (Setyawan, 2022).

Bab ini secara khusus membahas isu perpajakan internasional yang telah menjadi salah satu agenda prioritas dalam presidensi Indonesia. Fokus utama perhatian dari Bab ini adalah praktik BEPS yang telah dilakukan banyak perusahaan dan individual yang karena terdorong motivasi untuk mengoptimalkan kepentingan, mereka menghindari kewajiban membayar pajak di negara asal mereka dengan berbagai cara, termasuk mendaftarkan perusahaan dan operasinya di negara-negara yang menetapkan kebijakan pajak yang ringan. Pertama-tama dipaparkan latar belakang terjadinya BEPS, dan isu-isu terkait praktik BEPS seperti *Tax Haven*, *transfer pricing*, *Controlled Foreign Companies*, dan *Hybrid Mismatch Arrangement*. Bab ini kemudian memaparkan upaya-upaya memerangi praktik BEPS di negara-negara berkembang melalui kerja sama dengan Forum Global terkait AEOI dan G20/OECD Inclusive Framework on BEPS. Selanjutnya dipaparkan progres dan hasil pembahasan isu perpajakan internasional di G20 di bawah Presidensi Indonesia, termasuk penyelenggaraan Simposium Perpajakan Internasional di tahun 2022.

Domestic Tax Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Latar belakang Praktik BEPS

Globalisasi dan modernisasi telah memfasilitasi berkembangnya bisnis secara pesat dan berkontribusi positif bagi pembangunan. Namun demikian, globalisasi dan modernisasi juga membawa dampak negatif, khususnya terkait dengan praktik penghindaran dan penggelapan pajak sebagai upaya bisnis untuk memaksimalkan keuntungan. Banyak perusahaan dan individu memanfaatkan prinsip kerahasiaan data

perbankan dan lemahnya transparansi untuk menyembunyikan harta kekayaan dan hasil usaha dengan memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan internasional.

Di samping itu, perusahaan multinasional telah memanfaatkan celah akibat tidak adanya standar penetapan pajak domestik tersebut untuk memanipulasi secara legal pemindahan keuntungan perusahaan dari yurisdiksi berpajak tinggi ke wilayah dengan tarif pajak yang rendah yang sering disebut *domestic tax base erosion and profit shifting* (BEPS). Perusahaan multinasional tersebut hanya perlu membayar di yurisdiksi berpajak terendah di mana perusahaan telah didaftarkan, walaupun mereka memperoleh keuntungan besar dari beroperasinya usaha perusahaan di wilayah lain yang menetapkan pajak yang tinggi.

BEPS terjadi karena perusahaan multinasional mengeksploitasi kesenjangan dan ketidaksesuaian sistem pajak yang ditetapkan oleh negara-negara yang berbeda. Praktik BEPS sangat berpengaruh besar pada negara-negara berkembang yang selama ini telah bergantung pada pajak penghasilan badan sebagai sumber pendapatan negara. Praktik BEPS ini telah menggerus basis pajak dan mengurangi penerimaan pajak negara-negara yang menjadi tempat beroperasinya perusahaan-perusahaan multinasional.

G20 memberikan perhatian terhadap isu BEPS sebagai masalah global karena melihat BEPS telah menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian dan keadilan perpajakan bagi negara-negara di dunia. G20 membahas bagaimana pemerintah-pemerintah dari berbagai negara di dunia dapat bekerja sama dalam mengatasi praktik BEPS yang muncul akibat beroperasinya bisnis secara internasional. Kerja sama di antara negara-negara diperlukan juga untuk memulihkan kepercayaan pada sistem pajak domestik dan internasional. Diperkirakan selama ini praktik BEPS telah menyebabkan kerugian negara sebesar 100-240 miliar dolar setiap tahunnya. Jumlah kehilangan pendapatan negara ini setara dengan 4-10% dari pendapatan pajak penghasilan perusahaan global.

Dalam praktiknya, kasus BEPS sering ditemui di beberapa negara berkembang yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan belum baiknya sistem perpajakan. Perusahaan multinasional dan bisnis internasional memanfaatkan celah-celah di bidang pengawasan dan sistem perpajakan tersebut untuk melakukan praktik BEPS ini.

Tax Haven dan problematika BEPS

Suburnya praktik BEPS juga dipengaruhi oleh adanya negara-negara yang masuk kategori *tax haven*. Laporan OECD tahun 1998 menyebutkan bahwa tidak ada definisi pasti dari *tax haven*. Secara umum *tax haven* diartikan sebagai suatu negara atau wilayah yang memberikan atau mengenakan tarif pajak rendah atau nol (tidak mengenakan pajak) kepada perusahaan asing dengan tujuan untuk menarik modal masuk ke negara tersebut (OECD, 1998).

Tax haven menjadi sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut negara atau wilayah yang menawarkan tarif pajak yang sangat rendah atau nol bagi individu dan perusahaan asing yang menempatkan uang atau aset mereka di sana. Individu pelaku bisnis dan perusahaan multinasional tertarik untuk menempatkan uang atau aset mereka di negara *Tax haven* karena negara-negara tersebut menjamin kerahasiaan identitas dan aktivitas mereka sehingga sulit bagi otoritas pajak negara lain untuk melacak dan mengenakan pajak atas pendapatan atau kekayaan yang disembunyikan di negara *tax haven* tersebut.

OECD menetapkan empat faktor untuk mengkategorikan bahwa suatu negara tergolong sebagai *tax haven countries* (OECD, 2009), yaitu:

1. Tarif pajak atas pendapatan terkait yang rendah atau nol;
2. Kurangnya pertukaran informasi yang efektif;
3. Kurangnya transparansi;
4. Tidak adanya aktivitas substansial.

Tax haven sering kali menjadi sarana untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak di negara asal, baik secara legal maupun ilegal. Individu dan perusahaan yang tidak berdomisili di negara *tax haven* memanfaatkan kebijakan pajak yang menguntungkan di sana dengan cara membuka rekening bank, mendirikan perusahaan, *trust*, atau instrumen keuangan lainnya di negara *tax haven*, tanpa harus beroperasi atau tinggal secara fisik di sana.

Tax haven dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Beberapa negara yang umumnya dianggap sebagai *tax haven* adalah negara-negara berkembang atau negara kecil seperti Andorra, Bahamas, Belize, Bermuda, Kepulauan Virgin Britania, Kepulauan Cayman, Channel Islands, Kepulauan Cook, Isle of Man, Mauritius, Liechtenstein, Monaco, Panama, dan St. Kitts dan Nevis. Namun, daftar ini tidak baku dan dapat

berubah seiring dengan perkembangan hukum dan politik di masing-masing negara.

Selain nama-nama negara berkembang tersebut, terdapat beberapa negara maju dan yurisdiksi yang masuk ke dalam kategori negara-negara *tax haven*, yaitu:

1. Swiss

   Swiss terkenal dengan kerahasiaan bank yang sangat ketat dan tarif pajak yang rendah bagi perusahaan asing. Meskipun negara ini telah mendapat tekanan dari dunia internasional, Swiss masih mempertahankan aturan tersebut dengan beberapa kelonggaran. Menurut *Tax Justice Network*, Swiss berada di posisi pertama dalam daftar negara dengan kerahasiaan keuangan tertinggi dan volume transaksi terbesar (Tax Justice Network, 2023).

2. Hong Kong

   Hong Kong merupakan yurisdiksi bekas koloni Inggris, yang telah menjadi wilayah administrasi khusus China yang memiliki otonomi dalam bidang ekonomi dan keuangan. Hong Kong dikategorikan sebagai negara *tax haven* karena menawarkan tarif pajak yang rendah, bebas pajak bagi pendapatan luar negeri, dan tidak adanya pajak atas dividen, bunga, atau royalti. Selain itu, Hong Kong juga memiliki sistem hukum yang stabil dan efisien, serta infrastruktur yang modern. Menurut *Panama Papers*, hampir sepertiga dari bisnis firma Mossack Fonseca dijalankan lewat kantornya di Hong Kong dan China (Mai, 2016).

3. Belanda

   Belanda merupakan anggota Uni Eropa yang memiliki tarif pajak perusahaan yang kompetitif, yaitu 25 persen (PWC, 2023). Namun, Belanda juga memberikan berbagai insentif dan keringanan pajak bagi perusahaan asing, seperti bebas pajak atas dividen atau royalti yang diterima atau dibayarkan kepada negara mitra yang memiliki *double taxation agreement* (perjanjian untuk penghindaran pajak berganda/DTA). Belanda juga memiliki jaringan perjanjian penghindaran pajak berganda yang luas dengan lebih dari 90 negara, termasuk negara-negara *tax haven* lainnya. Hal ini memungkinkan perusahaan asing untuk mengalihkan pendapatan mereka melalui Belanda supaya tidak harus membayar pajak di negara asal atau tujuan.

Terdapat cukup banyak perusahaan multinasional yang terdeteksi memanfaatkan negara-negara yang masuk dalam kategori *tax haven* ini. Perusahaan-perusahaan tersebut telah berupaya untuk mengoptimalkan laba dan menghindari pajak melalui pemanfaatan *tax haven* ini.

Beberapa contoh perusahaan yang paling terkenal adalah Apple, Google, Starbucks, dan Amazon. Apple diketahui memiliki sekitar 200 miliar dolar di akun *offshore* di Irlandia, sebuah negara dengan tarif pajak korporasi yang sangat rendah, yaitu 12,5 persen. Dengan kepemilikan di akun offshore tersebut, Apple dapat menghemat miliaran dolar dari kewajiban pajak di AS yang mencapai 35 persen (Vega, 2017).

Google dideteksi telah melakukan hal serupa dengan menggunakan skema yang disebut "*Double Irish with a Dutch Sandwich*" (The Irish Time, 2018). Istilah ini digunakan untuk medeskripsikan kegiatan memindahkan pendapatan dari berbagai negara ke Irlandia, kemudian ke Belanda, dan akhirnya ke Bermuda, sebuah wilayah bebas pajak (Murphy, 2020).

Selain Apple dan Google, perusahaan Starbucks dan Amazon juga menggunakan negara Irlandia sebagai tempat untuk mengurangi beban pajak mereka di Eropa. Starbucks memindahkan sebagian besar pendapatannya dari penjualan kopi di Eropa ke perusahaan induknya di Belanda yang memiliki perjanjian pajak khusus dengan pemerintah setempat. Amazon juga memindahkan pendapatannya dari penjualan *online* di Eropa ke Luxemburg yang memberikan tarif pajak yang sangat rendah bagi perusahaan teknologi.

Gambar 7.1. Contoh Perusahaan Multinasional Yang Dicurigai Memanfaatkan *Tax Haven*

Apple	Google	Starbucks
Amazon	Mark Spencer	Vodafone
Coca Cola	Cisco	Pfizer
LTCM	Parmalat	Refco
Enron	Northern Rock	

Sumber: Vega, 2017; Murphy, 2020; Suryowati, 2016.

Selain perusahaan-perusahaan tersebut, masih banyak lagi contoh lainnya seperti Airbus, Mark Spencer, Vodafone, Coca Cola, Cisco, Pfizer, LTCM, Parmalat, Refco, Enron, dan Northern Rock yang disebut pernah memanfaatkan *tax haven* untuk berbagai tujuan bisnis maupun keuangan (Suryowati, 2016).

Cara paling umum untuk mengakses manfaat dari *tax haven* adalah dengan mendaftarkan entitas korporasi atau *financial vehicles* (kendaraan keuangan) lainnya di dalam yurisdiksi tersebut. Ini biasanya merupakan proses yang cukup sederhana, karena *tax haven* secara khusus dirancang untuk menarik investasi dan pendirian perusahaan asing. Kendaraan korporasi yang paling sering digunakan adalah perusahaan *offshore* atau *trust offshore*. Kedua struktur ini memiliki fitur yang berbeda yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda.

Perusahaan *offshore* biasanya lebih cocok bagi mereka yang ingin menggunakan *tax haven* sebagai bagian dari operasi bisnis mereka untuk meminimalkan pajak korporasi dan mengakses manfaat lain yang tersedia bagi perusahaan *offshore*. *Trust offshore* lebih cocok bagi individu yang bermaksud menggunakan yurisdiksi sebagai tempat untuk melindungi aset pribadi mereka dari pajak dan bahaya lainnya. Banyak individu melakukan trust offshore perlindungan aset dalam upaya mereka melakukan perencanaan terkait warisan, melindungi aset yang tidak tertandingi, meminimalkan jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada yurisdiksi serta menjaga kerahasiaan dari aset-aset mereka.

Salah satu cara untuk memindahkan keuntungan dari negara asal ke *tax haven* adalah dengan menggunakan metode *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah praktik penetapan harga barang atau jasa yang diperdagangkan antara entitas terkait dalam sebuah kelompok perusahaan multinasional. Dengan menggunakan *transfer pricing*, sebuah perusahaan dapat membebankan biaya tinggi kepada anak perusahaannya di negara dengan tarif pajak tinggi untuk barang atau jasa yang disediakan oleh induk perusahaannya di *tax haven*. Dengan demikian, anak perusahaan tersebut akan melaporkan laba rendah atau bahkan rugi di negara asalnya, sementara induk perusahaannya akan melaporkan laba tinggi di *tax haven*.

Beberapa perusahaan Indonesia dicurigai memanfaatkan *tax haven* ini untuk mengoptimalkan profit mereka. Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (International Consortium of Investigative Journalists-ICIJ) menyebutkan bahwa 71 perusahaan *offshore* yang terkait dengan Indonesia didirikan di enam negara *tax haven* tersebut dengan bantuan firma hukum Mossack Fonseca. Keterlibatan perusahaan

tersebut terungkap dalam *Panama Papers* yang menyebutkan perusahaan-perusahaan ini memiliki hubungan dengan Mossack Fonseca melalui kantor-kantor cabangnya di Singapura dan Hong Kong. Perusahaan-perusahaan ini diduga menggunakan *tax haven* untuk menghindari pajak di Indonesia, menyembunyikan aset dan keuntungan mereka, serta melakukan transaksi ilegal.

Pemanfaatan *tax haven* oleh perusahaan-perusahaan *offshore* ini merugikan negara Indonesia, karena mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pemanfaatan *tax haven* juga menimbulkan masalah etika dan moral, karena menunjukkan ketidakjujuran dan ketidakpedulian terhadap tanggung jawab sosial. Pemanfaatan *tax haven* juga berpotensi mengancam stabilitas sistem keuangan global, karena meningkatkan risiko korupsi, krisis, dan ketidakadilan.

Peran Mossack Fonseca telah menjadi sorotan terutama setelah terjadi kebocoran informasi yang tertuang dalam dokumen *Panama Papers*. Mossack Fonseca merupakan firma hukum yang berbasis di Panama, yang didirikan pada tahun 1977. Firma ini menyediakan jasa pembentukan, pengelolaan, dan manajemen aset bagi sekitar 300 ribu perusahaan *offshore*, di mana lebih dari separuhnya terdaftar di negara-negara *tax haven* di Inggris. Mossack Fonseca juga bekerja sama dengan lembaga keuangan besar dan berpengaruh untuk membangun jaringan usaha yang kompleks dan sulit dilacak oleh otoritas pajak (Harding, 2016).

Dokumen *Panama Papers* berisi nama-nama klien yang bekerja sama dengan firma tersebut, termasuk pemimpin lima negara, pejabat negara dan kepala pemerintahan dari 40 negara lainnya, serta tokoh-tokoh terkenal dari dunia bisnis, olahraga, dan hiburan. Dokumen ini juga mengungkapkan skema penghindaran pajak, pencucian uang, dan penyalahgunaan perusahaan cangkang (*shell companies*) yang dilakukan oleh para klien Mossack Fonseca.

Transfer Pricing dan BEPS

Selain *tax haven* yang merupakan salah satu sumber dari BEPS, *transfer pricing* merupakan upaya dari perusahaan multinasional untuk meminimalkan biaya dan memaksimalisasi profit serta mengurangi beban pajak secara global. Walaupun masuk dalam kategori ilegal, praktik-praktik ini masih sering ditemui.

Kasus *transfer pricing*, yaitu praktik penetapan harga transaksi antara entitas yang berafiliasi dalam satu grup perusahaan multinasional. *Transfer pricing* dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah dengan cara menetapkan harga transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip *arm's length*. Dengan demikian, *transfer pricing* dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara tempat entitas berafiliasi beroperasi, karena dapat mengurangi basis pengenaan pajak dan menghilangkan potensi penerimaan pajak.

Transfer pricing sendiri merupakan praktik menentukan harga untuk transaksi antara entitas yang terafiliasi, seperti anak perusahaan dan perusahaan induk, dalam sebuah perusahaan multinasional. Praktik ini penting untuk menilai bagaimana keuntungan dan beban dibagi di antara unit bisnis yang berbeda dalam grup perusahaan. Namun, *transfer pricing* juga dapat disalahgunakan untuk memindahkan keuntungan secara tidak adil dan menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan di negara-negara dengan tarif pajak lebih tinggi. Penyalahgunaan inilah yang menjadi latar belakang mengapa *transfer pricing* menjadi salah satu isu utama BEPS yang digagas oleh OECD dan dibahas dalam G20.

BEPS adalah inisiatif multilateral yang bertujuan untuk mengatasi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional yang memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan internasional. Di bawah BEPS, *transfer pricing* menjadi salah satu fokus utama karena potensi dampaknya terhadap pendapatan pajak negara dan keseimbangan dalam sistem perpajakan global.

Berikut ini merupakan contoh-contoh *transfer pricing* dalam konteks BEPS yang menjadi isu agar dapat diselesaikan:

1. Manipulasi nilai transaksi

   Perusahaan multinasional dapat memanipulasi harga barang, jasa, atau lisensi intelektual yang diperdagangkan antar entitas terafiliasi. Contohnya, perusahaan dapat mengatur agar anak perusahaan di negara dengan pajak rendah membeli produk dengan harga rendah dari anak perusahaan di negara dengan pajak tinggi, sehingga keuntungan lebih banyak mengalir ke negara dengan pajak rendah, mengurangi kewajiban pajak.

2. Royalti dan lisensi intelektual

   Perusahaan bisa memindahkan keuntungan dengan memanipulasi royalti atau biaya lisensi intelektual yang dibayar antar entitas

dalam kelompok. Mereka mungkin menetapkan royalti rendah di negara dengan pajak tinggi agar penghasilan lebih banyak tersedot ke entitas di negara dengan pajak rendah.

3. Pemindahan keuntungan melalui utang antar perusahaan

   Perusahaan dapat memindahkan keuntungan dengan memberikan pinjaman antar entitas dalam kelompok dengan suku bunga yang tidak realistis. Ini bisa menggeser beban bunga ke entitas di negara dengan pajak tinggi dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar di negara dengan pajak rendah.

4. Pemindahan risiko dan fungsi

   Perusahaan bisa mengubah alokasi risiko dan fungsi di antara entitas terafiliasi untuk memindahkan keuntungan. Misalnya, perusahaan bisa mengalihkan risiko tinggi ke anak perusahaan di negara dengan pajak rendah, sementara keuntungan tetap berada di entitas di negara dengan pajak tinggi.

5. Penetapan harga transfer berdasarkan pasar

   Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat menetapkan harga transfer berdasarkan harga pasar yang wajar untuk memastikan bahwa transaksi antar entitas terafiliasi sejalan dengan transaksi antara pihak-pihak yang independen. Ini dapat mencegah pemindahan keuntungan secara tidak adil.

6. Penyelarasan peraturan *transfer pricing* internasional

   Salah satu tujuan BEPS adalah memastikan bahwa aturan *transfer pricing* internasional menghindari celah yang dapat dimanfaatkan. BEPS Action 13, misalnya, mendorong pelaporan informasi *transfer pricing* secara lebih rinci dan transparan kepada otoritas

Dalam rangka mengatasi masalah *transfer pricing* yang terkait dengan BEPS, OECD telah mengembangkan sejumlah tindakan dan pedoman. Tindakan-tindakan ini termasuk mendorong negara-negara untuk saling bertukar informasi pajak secara otomatis (*Automatic Exchange of Information on Taxation*/AEOI), meningkatkan transparansi perpajakan, dan mengembangkan pedoman tentang dokumentasi *transfer pricing* yang lebih rinci. Dengan demikian, tujuan kerja sama mengatasi BEPS adalah menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih adil dan mencegah perpindahan keuntungan yang tidak wajar di antara entitas dalam perusahaan multinasional.

Beberapa contoh kasus *transfer pricing* yang merugikan negara adalah:

1. Kasus Coca-Cola Co. vs Internal Revenue Service (IRS) Amerika Serikat.

   Perusahaan minuman bersoda ini diduga melakukan *transfer pricing* dengan menjual merek dagang, formula, dan barang tak berwujud lainnya ke anak perusahaannya di luar negeri dengan harga yang tidak wajar. IRS menilai bahwa Coca-Cola Co. seharusnya membayar pajak sebesar 9,4 miliar dolar untuk periode 2007-2009 (Taxnotes, 2021).

2. Kasus PT Adaro Indonesia vs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia.

   Perusahaan tambang batubara ini diduga melakukan *transfer pricing* dengan menjual batubara ke perusahaan afiliasinya di Singapura dengan harga di bawah pasar. DJP menilai bahwa PT Adaro Indonesia seharusnya membayar pajak sebesar Rp1,3 triliun untuk periode 2005-2006.

3. Kasus Google, Starbucks, dan Amazon vs HM Revenue and Customs (HMRC) Inggris.

   Ketiga perusahaan raksasa ini diduga melakukan *transfer pricing* dengan memindahkan laba mereka ke negara-negara dengan tarif pajak rendah, seperti Irlandia dan Luksemburg. HMRC menilai bahwa ketiga perusahaan ini seharusnya membayar pajak lebih banyak di Inggris sesuai dengan aktivitas bisnis mereka (Kiss, 2012).

Transfer pricing dapat menjadi tantangan bagi otoritas pajak di seluruh dunia, karena membutuhkan analisis yang mendalam dan komprehensif tentang fungsi, aset, dan risiko yang terlibat dalam transaksi antar entitas berafiliasi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama internasional dan standar yang harmonis untuk mencegah praktik *transfer pricing* yang merugikan negara.

Controlled Foreign Companies dan Praktik BEPS

Kasus *Controlled Foreign Companies* (CFC), atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai "Perusahaan Anak Kontrol Asing", merupakan isu kompleks dalam dunia perpajakan internasional yang berkaitan dengan perusahaan yang beroperasi di negara dengan pajak yang lebih rendah atau praktik perpajakan yang lebih liberal. Tujuan dari CFC adalah

untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang melibatkan pengalihan keuntungan perusahaan dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak lebih rendah.

CFC biasanya terjadi ketika perusahaan atau individu menciptakan entitas anak di negara dengan pajak rendah dan mengalihkan keuntungan mereka ke sana untuk mengurangi kewajiban pajak di negara asal mereka. Ini memungkinkan mereka menghindari pembayaran pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Untuk melawan praktik ini, banyak negara telah memperkenalkan aturan CFC yang kompleks untuk memastikan bahwa penghasilan yang diperoleh oleh anak perusahaan di luar negeri juga dikenai pajak di negara asal induk perusahaan (Danny Darussalam Tax Center, 2023).

Aturan CFC pada dasarnya memungkinkan negara untuk mengenakan pajak atas penghasilan anak perusahaan yang dikendalikan oleh entitas di negara asal perusahaan induk, bahkan jika penghasilan tersebut tidak di-repatriasi (dikembalikan) ke negara asal (Expat US Tax, 2023). Ini dilakukan untuk mencegah praktik perpajakan agresif di mana perusahaan hanya akan membayar pajak di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dan menghindari pembayaran pajak di negara asal yang memiliki tarif pajak lebih tinggi.

Salah satu contoh terkenal dari kasus CFC adalah Apple di Irlandia. Apple telah membuat struktur perusahaan yang memungkinkan mereka mengalihkan sebagian besar penghasilan global mereka ke entitas anak di Irlandia, di mana tarif pajaknya lebih rendah daripada di Amerika Serikat. Ini memungkinkan Apple untuk mengurangi kewajiban pajak global mereka secara signifikan. Namun, tindakan semacam ini telah menarik perhatian pemerintah Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang telah menimbulkan perdebatan dan mendorong perlunya perubahan dalam aturan perpajakan internasional.

Banyak negara telah mengadopsi aturan CFC yang berbeda-beda, dan aturan-aturan ini sering kali rumit dan sulit diimplementasikan. Hal ini karena perusahaan multinasional memiliki banyak cara untuk memanipulasi struktur perusahaan mereka guna menghindari aturan CFC. Oleh karena itu, banyak negara juga berpartisipasi dalam upaya internasional untuk menyelaraskan aturan CFC dan menghindari praktik penghindaran pajak yang merugikan.

Penting untuk dicatat bahwa CFC pada dasarnya bukan ilegal, dan banyak perusahaan yang beroperasi secara sah menggunakan struktur CFC untuk tujuan bisnis yang sah, seperti mengelola risiko atau

mengoptimalkan operasi internasional mereka. Namun, praktik CFC menjadi perhatian global ketika struktur CFC ini dimanfaatkan secara tidak adil atau agresif untuk menghindari pembayaran pajak yang wajar.

Dalam upaya untuk mengatasi kompleksitas dan tantangan dalam implementasi aturan CFC, banyak negara bekerja sama dalam kerangka OECD untuk mengembangkan pedoman internasional tentang bagaimana mengatasi penghindaran pajak dan mencegah praktik yang merugikan ini.

Sebagai kesimpulan, kasus CFC mencerminkan kompleksitas dalam perpajakan internasional yang mendorong perlunya kerja sama internasional untuk mengatasi praktik penghindaran pajak yang merugikan. Aturan CFC bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan membayar pajak sesuai dengan kontribusi ekonomi mereka di berbagai negara, serta mencegah penghindaran pajak yang tidak adil melalui struktur perusahaan yang rumit.

Hybrid Mismatch Arrangement dalam konteks BEPS

Hybrid mismatch arrangement merupakan istilah yang merujuk pada praktik perpajakan internasional yang memanfaatkan perbedaan dalam perlakuan hukum atau perpajakan antara dua atau lebih yurisdiksi guna menghindari atau mengurangi kewajiban pajak. Istilah ini menjadi salah satu fokus utama dalam Proyek BEPS guna mengatasi praktik penghindaran pajak yang merugikan dan menciptakan peraturan perpajakan internasional yang lebih adil dan seimbang.

Hybrid mismatch arrangement terjadi ketika ada perbedaan dalam kualifikasi hukum atau perpajakan suatu instrumen atau entitas di dua yurisdiksi atau lebih. Perbedaan ini memungkinkan entitas atau individu untuk memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk mendapatkan manfaat ganda atau mengurangi kewajiban pajak. Contohnya, entitas dapat memanfaatkan perbedaan dalam pengakuan pendapatan atau pengeluaran di berbagai yurisdiksi untuk menghasilkan keuntungan yang tidak wajar atau menghindari pembayaran pajak.

Contoh-contoh *Hybrid mismatch arrangement* dalam konteks BEPS:

1. *Double Deduction*

   Suatu transaksi atau instrumen dapat menghasilkan pengurangan pajak ganda di dua yurisdiksi yang berbeda. Misalnya, biaya suatu hutang bisa diakui sebagai pengurangan pajak di negara pemberi

pinjaman dan juga sebagai pendapatan bebas pajak di negara penerima pinjaman.

2. *Deduction/No Inclusion*

   Praktik ini terjadi ketika suatu pengeluaran di satu yurisdiksi diakui sebagai pengurangan pajak, tetapi tidak dianggap sebagai pendapatan kena pajak di yurisdiksi lain. Contohnya, biaya bunga dari instrumen keuangan yang diakui sebagai pengurangan pajak di satu negara tetapi tidak dianggap sebagai pendapatan di negara lain.

3. *Imported Mismatch*

   Dalam kasus ini, perusahaan memanfaatkan perbedaan antara yurisdiksi tempatnya beroperasi dengan yurisdiksi tempat mitra bisnisnya beroperasi. Misalnya, suatu negara mengakui pengeluaran sebagai pengurangan pajak sedangkan negara lain mengakui pendapatan dari transaksi yang sama.

4. *Reverse Hybrid Mismatch*

   Terjadi ketika suatu entitas di satu yurisdiksi dianggap sebagai entitas transparan dan tidak dikenakan pajak, sedangkan di yurisdiksi lain, entitas yang sama dianggap sebagai entitas terpisah dan dikenakan pajak.

5. *Hybrid Mismatch* dalam Grup Perusahaan

   Praktik ini melibatkan struktur grup perusahaan dengan entitas yang memiliki status hukum yang berbeda-beda di berbagai yurisdiksi. Misalnya, suatu entitas bisa dianggap sebagai anak perusahaan di satu negara dan mitra usaha tetap di negara lain, sehingga menghasilkan celah dalam perpajakan.

6. *Hybrid Mismatch* melalui Instrumen Keuangan

   Praktik ini melibatkan instrumen keuangan yang menghasilkan perbedaan dalam pengakuan pendapatan atau pengeluaran di berbagai yurisdiksi. Contohnya, instrumen yang dianggap sebagai utang di satu negara, tetapi di negara lain dianggap sebagai ekuitas.

Dalam rangka mengatasi masalah *hybrid mismatch arrangement* dan masalah penghindaran pajak lainnya, kerja sama internasional dan kohesivitas dalam peraturan perpajakan sangatlah penting. Dengan adanya kerangka kerja BEPS, negara-negara dapat bekerja sama dalam mengatasi celah-celah perpajakan dan memastikan bahwa perusahaan

membayar pajak sesuai dengan kontribusi ekonomi yang sebenarnya.

Beberapa langkah utama yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah *hybrid mismatch arrangement* meliputi:

1. Penghapusan Pemanfaatan *Double Deduction*

   OECD merekomendasikan bahwa negara-negara harus memiliki mekanisme yang menghindari pengurangan pajak ganda dari pengeluaran yang sama.

2. Penerapan Ketentuan *Anti-Mismatch*

   Negara-negara dihimbau untuk menerapkan ketentuan *anti-mismatch* yang dapat membatasi manfaat pajak ganda atau penghindaran pajak melalui celah hukum atau perpajakan.

3. Peraturan Terkait Transparansi Entitas

   Negara-negara disarankan untuk mengenali entitas yang dianggap transparan di satu yurisdiksi dan menganggapnya sebagai entitas terpisah di yurisdiksi lain, sehingga mengatasi praktik penghindaran pajak.

4. Ketentuan Koordinasi Internasional

   OECD mendorong kerja sama internasional dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah *hybrid mismatch arrangement* yang bersifat melintas batas negara.

5. Laporan Kewajiban Pajak

   Negara-negara dihimbau untuk meminta pelaporan yang lebih transparan tentang struktur keuangan dan operasional dari perusahaan multinasional untuk memantau praktik penghindaran pajak.

Upaya Memerangi Praktik BEPS di Negara-negara Berkembang

G20 memberikan perhatian besar terhadap praktik BEPS yang merugikan negara-negara berkembang karena merugikan sumber-sumber pendapatan negara-negara berkembang yang diperlukan untuk pembangunan yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan global yang inklusif. Beberapa kasus BEPS di mancanegara menunjukkan berbagai praktik yang digunakan oleh perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan global. Beberapa negara telah terkena dampak serius dari praktik-praktik BEPS ini, baik dari segi pendapatan pajak yang hilang maupun dampak ekonomi yang lebih luas. Kasus-kasus

ini memberikan ilustrasi tentang pentingnya upaya kolaboratif dalam mencegah dan mengatasi penghindaran pajak yang merugikan. Untuk mengatasi praktik BEPS, negara-negara berkembang bergabung dalam Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Keperluan Pajak (Forum Global) yang mendapat dukungan penuh dari G20 dan OECD (OECD, 2023b). Negara-negara berkembang juga didorong untuk bekerja sama dalam Kerangka Inklusif OECD/G20 tentang BEPS (*G20/OECD inclusive Framework on BEPS*) dalam upaya untuk memerangi praktik BEPS secara lebih intensif dan ekstensif (OECD, 2023a).

Berikut adalah beberapa contoh upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi praktik BEPS di negara-negara berkembang sebagaimana yang tercantum dalam laporan OECD.

1. Upaya Uganda dalam penanganan praktik BEPS

Sebanyak 44% kekayaan finansial Afrika diperkirakan disimpan di luar negeri, dan setiap tahunnya benua ini kehilangan sekitar 40- 80 miliar dolar akibat penghindaran pajak (OECD, 2020).

Standar internasional mengenai transparansi dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan membantu memastikan kerjasama antara pemerintah di seluruh dunia untuk melacak pendapatan yang tidak terpajak dari perusahaan dan individu yang menyimpan aset di luar negeri. Hal ini mencegah perusahaan dan individu dengan kekayaan tinggi untuk tetap berada di atas hukum.

Forum Global membantu yurisdiksi di seluruh dunia dalam memerangi penghindaran dan pengelakan pajak, mengatasi aliran dana ilegal, serta menjaga integritas sistem perpajakan dengan memfasilitasi kerjasama global dalam penerapan standar yang disepakati.

Komisi Uni Afrika mendorong anggota Uni Afrika untuk bergabung dengan Inisiatif Afrika dan menjadikan transparansi pajak sebagai prioritas dalam upaya pengumpulan sumber daya domestik mereka. Faktanya, negara-negara Afrika rentan terhadap penghindaran pajak yang disebabkan oleh transfer harga yang tidak pantas dan masalah lain terkait penggerusan dasar dan pergeseran laba.

Pertukaran Informasi merupakan alat penting dalam mengatasi ancaman utama terhadap sistem perpajakan internasional, yang memungkinkan administrasi perpajakan untuk mengirim dan

memperoleh informasi yang berguna dari administrasi perpajakan asing secara otomatis, spontan, atau sesuai permintaan.

Uganda menjadi anggota Forum Global pada Oktober 2012 dan sejak itu telah mendapatkan dukungan baik di dalam negeri maupun dari jarak jauh. Ketika bergabung dengan Forum Global, Uganda menghadapi tantangan dalam memastikan transparansi aktivitas lintas batas wajib pajaknya. Uganda kurang memanfaatkan pertukaran informasi dan memiliki jaringan perjanjian pertukaran informasi yang terbatas, serta hubungan yang belum berkembang dengan otoritas yang berwenang di mitra kerjanya. Selain itu, negara ini tidak memiliki fungsi pemrosesan pertukaran informasi yang sentral, yang mengakibatkan keterlambatan dalam mengajukan dan memproses permintaan.

2. Upaya Tunisia dalam penanganan praktik BEPS

Setelah Revolusi Tunisia pada akhir tahun 2010, negara ini mengalami beberapa tahun stagnasi ekonomi akibat kondisi sosial yang memburuk dan situasi keamanan yang tidak stabil. Tunisia bergabung dengan Forum Global tentang Transparansi dan Pertukaran Informasi untuk Tujuan Perpajakan (Global Forum) pada tahun 2012 dan Proyek OECD/G20 tentang BEPS pada tahun 2014 dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat (OECD, 2021a).

Tunisia mendapatkan pinjaman sebesar 2,9 miliar dolar AS dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada tahun 2016 untuk menjalankan program reformasi ekonomi dan keuangan yang luas guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan merata. Perekonomian Tunisia tumbuh sebesar 1,9% pada tahun 2017 dan 2,7% pada tahun 2018, namun turun menjadi 1% pada tahun 2019. Defisit anggaran negara menurun dari 6,1% dari PDB pada tahun 2016 menjadi 3,9% pada tahun 2019, terutama berkat kebijakan dan langkah administrasi perpajakan.

Tunisia meluncurkan proyek perpajakan dalam skala besar pada tahun 2014 dengan dukungan dari OECD dan Global Forum. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik dengan memperkuat perang terhadap praktik BEPS, melaksanakan standar internasional tentang transparansi perpajakan dan pertukaran informasi, memerangi kejahatan perpajakan, mereformasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta

mengembangkan data statistik yang diselaraskan secara regional dan internasional mengenai pendapatan pemerintah.

Tunisia juga bergabung dengan Kerangka Inklusif OECD/G20 tentang BEPS pada tahun 2017 setelah aktif berpartisipasi dalam pengembangan langkah-langkah konkret untuk mengatasi BEPS bersama negara-negara OECD dan G20. Dengan dukungan dari OECD, Tunisia melaksanakan empat standar minimum BEPS untuk melindungi basis pajaknya, yaitu melawan praktik perpajakan merugikan (Aksi 5), mencegah penyalahgunaan perjanjian pajak (Aksi 6), pelaporan Negara Bagian (Aksi 13), dan meningkatkan mekanisme penyelesaian sengketa (Aksi 14).

Selain itu, Tunisia menerima bantuan teknis dari OECD untuk memperkuat kerangka hukum dan administratifnya dalam *transfer pricing* sebagai upaya mengatasi penentuan harga transfer yang tidak tepat oleh perusahaan multinasional (MNE) yang beroperasi di wilayahnya. Tunisia juga menerapkan persyaratan dokumentasi dan pelaporan baru. Untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, negara ini memperkenalkan rezim Perjanjian Harga Maju (APA) dan menerbitkan peraturan untuk menjelaskan legislasi baru tersebut.

3. Upaya Peru dalam penanganan praktik BEPS

Peru, negara terbesar ketiga di Amerika Selatan dengan populasi sekitar 32,6 juta jiwa, memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah (OECD, 2022). Negara ini kaya akan deposit tembaga, perak, emas, timbal, dan gas alam. Setelah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan selama lebih dari satu dekade (rata-rata 5,7% antara 2005 dan 2016), angka pertumbuhan Peru melambat. Hal ini terutama disebabkan oleh berakhirnya tren komoditas dan melambatnya pertumbuhan mitra perdagangan utama Peru.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi Peru adalah dampak pandemi COVID-19 yang melanda negara tersebut. Pada tahun 2020, Produk Domestik Bruto (PDB) Peru mengalami penurunan sebesar 11,1%. Pandemi ini secara negatif memengaruhi kondisi fiskal Peru karena pembatasan-pembatasan kesehatan yang ketat secara signifikan menekan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi penerimaan pajak. Di sisi lain, langkah-langkah penanganan krisis darurat menyebabkan peningkatan besar dalam belanja publik.

Sebelum pandemi, Peru telah menjadi salah satu ekonomi yang tumbuh pesat di Amerika Latin. Namun, penurunan tajam dalam PDB negara ini menjadi cambuk bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi. Salah satu langkah yang diambil adalah stimulus fiskal yang melibatkan peningkatan belanja publik untuk mendukung pemulihan ekonomi dan memperkuat sistem kesehatan. Pemerintah Peru juga berupaya meningkatkan pendapatan melalui perubahan kebijakan pajak dan reformasi struktural guna mendorong investasi dan pertumbuhan jangka panjang.

Selain itu, penting bagi Peru untuk terus berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, negara ini perlu memperkuat sektor teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan juga menjadi kunci dalam mempersiapkan angkatan kerja Peru untuk menghadapi tuntutan dunia kerja yang terus berubah.

Pandemi COVID-19 telah menjadi ujian yang berat bagi Peru, tetapi negara ini juga memiliki potensi besar untuk bangkit kembali. Meskipun Peru berhasil menjaga kerangka makro fiskal yang solid, Peru menghadapi tantangan dalam hal pendapatan fiskal. Pada tahun 2020, pendapatan fiskal negara ini turun sebesar 17,4% dibandingkan dengan tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2021, pendapatan pajak di Peru tumbuh sebesar 44,4%, mencapai 16% dari beban pajak yang ada.

Sistem pengumpulan pajak di Peru sangat bergantung pada pajak tidak langsung, yang menyumbang sekitar 9,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, Peru juga menghadapi praktik penghindaran dan penyelundupan pajak yang sangat tinggi. Berdasarkan perkiraan, penghindaran pajak mencapai 28% dari potensi penerimaan pajak nilai tambah dan 33,1% dari potensi penerimaan pajak penghasilan korporasi. Secara keseluruhan, hal ini mengakibatkan kerugian sekitar 5,5% dari PDB Peru.

Masalah ini memiliki dampak signifikan bagi stabilitas makroekonomi negara Peru dan juga dalam menjaga penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Oleh karena itu, Peru perlu memperluas basis pajak dan memperkuat pengumpulan pendapatan tetap. Dengan memperluas basis pajak, negara dapat mengurangi ketergantungan pada pajak tidak langsung

yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Langkah-langkah ini juga dapat membantu mengurangi tingkat penghindaran dan penyelundupan pajak, sehingga meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan.

Selain itu, Peru juga perlu melakukan reformasi perpajakan dengan tujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, memperbaiki administrasi pajak, dan meningkatkan transparansi. Dengan memperkuat lembaga perpajakan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap praktik penghindaran pajak, negara dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik dan mengurangi kerugian fiskal yang disebabkan oleh tindakan ilegal.

Pengelolaan pendapatan pajak yang kuat juga akan berdampak positif pada stabilitas makroekonomi Peru. Pendapatan yang lebih tinggi akan memungkinkan negara untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menyediakan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup penduduk Peru secara keseluruhan.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak, Peru mempertimbangkan pentingnya kerja sama dengan negara-negara lain dalam berbagi informasi perpajakan dan melawan praktik penghindaran pajak lintas batas negara. Selain itu, kesadaran dan pendidikan yang lebih baik tentang pentingnya membayar pajak dengan benar dapat membantu mengubah sikap masyarakat terhadap kewajiban pajak.

4. Upaya Senegal dalam penanganan praktik BEPS

Senegal, negara yang ekonominya sangat bergantung pada sektor pertanian, pariwisata, perikanan, pertambangan, dan konstruksi, juga merupakan pusat dari jalur laut dan udara utama berkat lokasinya yang strategis di tepi barat benua Afrika (OECD, 2021b). Negara ini berupaya untuk keluar dari statusnya sebagai *least developing country* (LDC) menjadi negara berkembang pada tahun 2035 (UNDESA, 2021). Untuk mewujudkan rencana ini, pada tahun 2014, negara ini menerapkan strategi pembangunan selama sepuluh tahun (2014-2023), yang dikenal sebagai *Plan Sénégal Emergent* (PSE atau Rencana untuk Senegal yang Berkembang).

Rencana ini didasarkan pada tiga prioritas, yaitu: transformasi struktural ekonomi, peningkatan kondisi hidup masyarakat, dan

pemerintahan yang baik. Sejak PSE diterapkan di tahun 2014, pertumbuhan di Senegal telah mencapai angka di atas 6%, dibandingkan dengan rata-rata 3,5% antara tahun 2011 dan 2014.

Hal ini menjadikan Senegal salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Afrika Sub-Sahara. Eksploitasi ladang minyak dan gas lepas pantai yang direncanakan akan dimulai pada tahun 2022 diharapkan dapat membuka prospek signifikan untuk pertumbuhan yang lebih cepat. Senegal terus bekerja untuk meningkatkan pendapatan dan mengendalikan pengeluaran publik.

Namun, Senegal merasakan dampak yang cukup berkat akibat terjadinya pandemi COVID-19. Sebelum pandemi COVID-19, pertumbuhan PDB diperkirakan mencapai 6,9 persen dan defisit fiskal sebesar 3 persen pada tahun 2020. Pandemi ini telah menghambat perekonomian di mana pada tahun 2020 pertumbuhan Senegal diperkirakan mencapai 2,8 persen. Sementara itu, Senegal mengalami defisit fiskal yang mencapai 5,6 persen dari PDB.

Upaya memobilisasi sumber daya domestik adalah sumber pendanaan penting dalam kerangka PSE di mana Senegal berencana untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB hingga 16,5% pada tahun 2018.

Dengan dukungan dari World Bank (WB) dan IMF, Senegal mengadopsi Strategi Pendapatan Menengah Jangka Menengah (2020-2025) pada tahun 2020 dengan menekankan pada pembaruan kebijakan pajak, reformasi administrasi pajak, dan reformasi institusional yang bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 20 persen.

Senegal telah meluncurkan reformasi perpajakan sejak tahun 2012 dengan dukungan teknis dari OECD, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, dan mitra pembangunan lainnya. Reformasi ini bertujuan untuk mengatasi praktik BEPS, serta memperkuat kapasitas administrasi perpajakan dalam melakukan audit terhadap perusahaan multinasional. Senegal juga terlibat dalam program *Tax Inspectors Without Borders* (TIWB) dan memperoleh data statistik pendapatan pemerintah yang dapat dibandingkan secara regional dan internasional untuk mendukung pengambilan

keputusan kebijakan fiskal.

Sejak tahun 2014, Senegal telah berpartisipasi dalam kerangka inklusif tentang BEPS yang diinisiasi OECD dan G20 dan secara aktif terlibat dalam menyusun langkah-langkah konkret untuk melawan praktik penghindaran pajak. Pada tahun 2016, Senegal bergabung dengan *Inclusive Framework* OECD/G20 tersebut dan menjadi Wakil Ketua Grup Pengarah Kerangka Inklusif tersebut hingga tahun 2018. Dalam konteks kerja sama terkait BEPS ini, Senegal telah melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan perjanjian perpajakan dan model konvensi perpajakan secara luas. Dengan penyempurnaan tersebut, kebijakan perjanjian perpajakan mengharuskan penyelesaian penilaian dampak sebelum negosiasi perjanjian perpajakan, dan model konvensi perpajakan mencakup langkah-langkah anti-BEPS dengan mempertimbangkan keinginan negara untuk melindungi sumber daya pertambangan dan hidrokarbonnya.

Rencana Aksi G20 untuk Mengatasi Praktik BEPS

Pemimpin-pemimpin G20 melihat bahwa langkah-langkah terkoordinasi diperlukan untuk mengatasi praktik BEPS. Pada tahun 2013, G20 dan OECD menyusun 15 Rencana Aksi untuk menangani praktik BEPS dalam upaya meminimalisasi risiko yang disebabkan oleh praktik BEPS (OECD, 2013). 135 negara dan yurisdiksi telah bergabung dalam G20/OECD Inclusive Framework on BEPS.

Indonesia sebagai salah satu anggota dari *Inclusive Framework* on BEPS dan juga sebagai tuan rumah dari penyelenggaraan G20 di tahun 2022 telah mengadopsi 10 rencana aksi BEPS dalam aturan domestiknya, seperti penerapan *Country-by-Country Reporting*, peningkatan transparansi dan pertukaran informasi, penguatan aturan *transfer pricing*, dan pengenaan pajak atas ekonomi digital. Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam pembahasan global mengenai dua pilar solusi BEPS, yaitu pilar satu yang berkaitan dengan alokasi hak pemajakan atas laba perusahaan multinasional dan pilar dua yang berkaitan dengan pengenaan pajak minimum global.

Gambar 7.2. Limabelas Rencana Aksi Penanganan Isu BEPS

Aksi 1: Menangani tantangan perpajakan terkait ekonomi digital	Mengidentifikasi kesulitan-kesulitan utama yang muncul akibat ekonomi digital dalam penerapan aturan perpajakan internasional yang ada dan mengembangkan opsi-opsi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut dengan pendekatan holistik dan mempertimbangkan perpajakan langsung dan tidak langsung.
Aksi 2: Menetralisir efek *Hybrid Mismatch Arrangements*	Mengembangkan kesepakatan dan rekomendasi yang dapat dituangkan dalam bentuk traktat terkait rancangan aturan domestik yang dapat meminimalisir efek *hybrid mismatch arrangement* (seperti *double non-taxation*, *double deduction*)
Aksi 3: Memperkuat aturan terkait *Controlled Foreign Company (CFC)*	Mengembangkan rekomendasi terkait rancangan aturan terhadap CFC.
Aksi 4: Membatasi Penggerusan Basis melalui deduksi bunga dan pembayaran finansial lainnya	Mengembangkan rekomendasi terkait praktik terbaik rancangan aturan untuk mencegah penggerusan basis pajak, melalui penggunaan beban bunga. Aksi ini mengevaluasi efektivitas berbagai limitasi. Aksi ini juga mencakup dikembangkannya panduan *transfer pricing* yang terkait dengan *pricing* transaksi finansial oleh pihak yang terlibat.
Aksi 5: Mengatasi praktik perpajakan yang merugikan dengan lebih efektif, dengan	Memperbaharui upaya-upaya untuk mengatasi praktik perpajakan yang merugikan dengan memperkuat transparansi, termasuk pertukaran peraturan terkait rezim preferensial dan tuntutan bagi dilakukannya aktivitas substansial bagi rezim preferensial. Aksi ini mengadopsi pendekatan holistik untuk mengevaluasi rezim preferensial dalam kontek BEPS.
Aksi 6: Mencegah Penyalahgunaan traktat perpajakan	Mengembangkan *model tax provisions* dan rekomendasi terkait rancangan regulasi domestik untuk mencegah pemberian jaminan manfaat dalam kondisi yang tidak mendukung. Aksi ini juga dimaksudkan untuk memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan traktat perpajakan untuk melakukan *double non-taxation*, dan mengidentifikasi pertimbangan yang diperlukan sebelum memutuskan kesepakatan perpajakan dengan negara-negara lain.

Aksi 7: Mencegah *Penghindaran Artifisial Status Permanent Establishment (PE)*	Melakukan perubahan definisi PE untuk mencegah wajib pajak menghindari pajak secara artifisial dari status PE terkait BEPS, termasuk dengan menggunakan cara-cara komisioner dan pengecualian aktivitas spesifik tertentu. Aksi ini juga diarahkan untuk mengatasi isu-isu pemajakan profit.
Aksi 8-10: Memastikan bahwa *transfer pricing* sesuai dengan penciptaan nilai	Mengembangkan regulasi untuk mencegah BEPS, termasuk dengan mengadopsi definisi '*intangibles*' yang luas, memastikan bahwa profit terkait transfer dialokasikan sesuai terciptanya nilai dan membuat aturan *transfer pricing* dan melakukan *update* petunjuk terkait kontribusi kerugian.
Aksi 11: Mengukur dan Memonitor *BEPS*	Mengembangkan rekomendasi terkait indikator-indikator untuk mengukur skala dan dampak ekonomi dari praktik BEPS, dan memastikan tersedianya instrumen-instrumen untuk memantau efektivitas dan dampak ekonomi dari tindakan yang diambil dalam mengatasi BEPS.
Aksi 12: Meminta Wajib Pajak untuk Membuka perencanaan pajak agresif	Mengembangkan rekomendasi terkait aturan yang bersifat wajib untuk membuka transaksi, pengaturan ataupun struktur yang agresif dan penyalahgunaan (*abusive*) dengan mempertimbangkan biaya administrasi administrasi dan bisnis perpajakan.
Aksi 13: Menguji kembali *dokumentasi Transfer pricing*	Mengembangkan regulasi terkait dokumentasi *transfer pricing* untuk meningkatkan transparansi administrasi perpajakan, dengan mempertimbangkan biaya kepatuhan para pelaku bisnis. Regulasi tersebut mencakup persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan multinasional untuk memberikan informasi alokasi pendapatan mereka secara global, aktivitas ekonomi dan pajak yang telah dibayarkan di negara-negara sesuai dengan *template* yang umum.
Aksi 14: Membuat mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif	Mengembangkan solusi untuk membantu negara-negara menyelesaikan sengketa perpajakan yang terkait dengan traktat dalam kerangka MAP. Proses penyelesaian sengketa pajak internasional perlu memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, supaya tidak mengganggu iklim investasi.

Aksi 15: Mengembangkan instrumen multinasional	Menganalisa isu-isu perpajakan dan hukum internasional publik terkait dengan pengembangan instrumen multilateral untuk memungkinkan yurisdiksi mengimplementasikan aturan-aturan untuk menangani BEPS. Pendekatan inovatif untuk memodifikasi perjanjian pajak bilateral yang sudah ada, untuk menghindarkan terjadinya pertentangan dan tumpang tindihnya peraturan yang sudah berlaku.

Sumber: OECD, 2013.

Dari keseluruhan rangkaian 15 Aksi yang tercakup dalam rencana Anti-Penghindaran Pajak dan Erosi Basis Pajak (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS), negara-negara yang menjadi anggota OECD dan G20 ditempatkan dalam kewajiban untuk menerapkan standar minimum dari empat Aksi BEPS yang telah ditentukan. Keempat aksi tersebut adalah Aksi BEPS 5, Aksi BEPS 6, Aksi BEPS 13, dan Aksi BEPS 14. Tindakan ini menegaskan komitmen kuat dari negara-negara anggota untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas penerapan langkah-langkah konkret dalam memerangi praktik penghindaran pajak dan erosi basis pajak yang merugikan.

Negara-negara G20 dan anggota OECD didorong untuk menerapkan standar minimum di keempat rencana aksi tersebut. Dalam kerangka rencana Aksi 5, negara-negara G20 dan OECD memerangi praktik perpajakan yang merugikan secara lebih efektif dengan mempertimbangkan transparansi dan substansi operasi bisnis. Dalam kerangka rencana aksi 6, G20 dan OECD berkomitmen untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan traktat dengan mempertimbangkan secara seksama sebelum menyepakati perjanjian perpajakan (*tax treaty*) dengan yurisdiksi pajak rendah atau bahkan tanpa yurisdiksi pajak sama sekali.

Dalam kerangka Aksi 13, G20 dan OECD menyusun aturan-aturan untuk menguji kembali dokumentasi *Transfer Pricing* dan ketentuan terkait *Country-by-Country Reporting* (CbCR) yang memberikan kerangka kerja yang jelas dan transparan untuk mengidentifikasi aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan di suatu yurisdiksi. Dalam Kerangka Aksi 14, anggota-anggota G20 dan OECD melihat pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan internasional secara efektif untuk menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan dapat diprediksi bagi pelaku bisnis di seluruh dunia. Langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan melalui prosedur kesepakatan bersama (*mutual agreement procedure*/MAP) dan arbitrase.

Penyelenggaraan *Ministerial Tax Symposium* dan *Tax and Development*

Sebagai salah satu wujud konkrit dari aksi untuk mendukung pembahasan isu perpajakan dan pembangunan yang dapat membantu negara-negara berkembang dalam meningkatkan pendapatan negara dari sumber-sumber perpajakan, Presidensi G20 Indonesia menyelenggarakan *Ministrial Tax Symposium and Tax and Development* pada 14 Juli 2022 di Bali (Kementerian Keuangan, 2022a). Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan ruang bertukar pikiran dan pandangan terkait dengan *multilateral cooperation in tax matter*. Simposium tersebut juga dimaksudkan untuk mendiskusikan langkah nyata agar negara-negara berkembang dapat berpartisipasi dalam proses ini.

Hal ini sejalan dengan upaya negara-negara G20 dan pemegang kepentingan lainnya untuk membantu negara berkembang untuk memaksimalkan keuntungan dari *multilateral engagement* dari perpajakan internasional dan memanfaatkan perkembangan kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan untuk mendukung pencapaian SDGs. Kegiatan simposium ini dilakukan sebagai upaya mencegah penghindaran dan penggelapan pajak, sekaligus meningkatkan koherensi aturan pajak internasional, memastikan lingkungan pajak yang lebih transparan, dan mengatasi tantangan pajak yang timbul dari digitalisasi ekonomi.

Pada simposium yang bersifat hybrid tersebut, para pengambil kebijakan tingkat menteri, delegasi dari negara-negara anggota Kerangka Inklusif BEPS G20/OECD, dan perwakilan dari berbagai organisasi internasional membahas tantangan pemajakan yang dihadapi dalam konteks digitalisasi ekonomi dan peran G20 dalam mendukung perkembangan perpajakan dan pembangunan di negara-negara berkembang.

Salah satu aspek yang ditekankan dalam pertemuan ini adalah upaya untuk mengoptimalisasikan mobilisasi sumber daya domestik negara-negara berkembang. Peningkatan inklusi dalam sistem perpajakan internasional diharapkan dapat membantu negara-negara tersebut dalam memaksimalkan potensi sumber daya mereka sendiri, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Indonesia menegaskan pentingnya partisipasi aktif negara-negara berkembang dalam mengembangkan standar pajak internasional, termasuk melalui perumusan kebijakan maupun implementasi aksi-aksi dalam kerangka

inklusif BEPS G20/OECD. Aksi-aksi BEPS secara efektif tersebut akan membuat negara-negara berkembang dapat mengatasi celah-celah yang memungkinkan penghindaran pajak dan erosi basis pajak dan memanfaatkan kesempatan meningkatkan pendapatan mereka dari perpajakan.

Simposium menyoroti langkah-langkah aksi BEPS dan agenda transparansi perpajakan dan mengidentifikasi area-area prioritas untuk mendukung penerapan standar pajak internasional. Fokus utama pembahasan mencakup *Automatic Exchange of Information on Taxation* (AEOI) dan Paket Pajak Internasional dua pilar yang sedang digarap secara komprehensif di negara-negara berkembang.

Simposium juga menyoroti tantangan yang dihadapi kebijakan perpajakan di masa depan, terutama dalam konteks insentif pajak dan mobilisasi sumber daya domestik. Perhatian diberikan pada peran sistem perpajakan dalam menyediakan pendanaan bagi pembangunan berkelanjutan, yang menjadi prioritas paling tinggi bagi negara-negara berkembang. Pentingnya pendanaan untuk pencapaian SDGs mendorong perlunya cara-cara inovatif dalam meningkatkan sumber daya domestik negara-negara berkembang. Salah satu solusi adalah pentingnya keadilan beban pajak yang menjadi tanggung jawab perusahaan global. Administrasi perpajakan juga menjadi pokok diskusi dalam simposium. Efisiensi administrasi perpajakan di negara-negara berkembang diperlukan untuk menciptakan kepastian bagi para pelaku bisnis supaya praktik penghindaran pajak tidak dilakukan.

Simposium juga menyoroti isu perpajakan dalam konteks di mana negara-negara harus menghadapi kondisi fiskal yang semakin terbatas akibat pandemi COVID-19. Di satu sisi, pandemi telah menyebabkan penurunan pendapatan negara, dan di sisi lain pengeluaran negara di berbagai sektor telah meningkat.

Dalam konteks ini, terdapat urgensi untuk menerapkan aturan pajak internasional yang efektif dan berkelanjutan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan negara. Penerapan aturan perpajakan internasional ini diharapkan dapat menciptakan sumber pendapatan pajak yang memadai untuk mendukung upaya pembangunan di negara-negara berkembang.

Peran G20 yang lebih kuat diperlukan untuk menghadapi tantangan akibat pandemi ini. Potensi G20 sebagai kekuatan penggerak dalam mendukung implementasi standar perpajakan internasional yang lebih baik dan dalam memfasilitasi mobilisasi sumber daya domestik

menjadi semakin penting. Posisi G20 yang berpengaruh dalam ekonomi global membuat G20 dapat berkontribusi membantu negara-negara berkembang dalam memperkuat basis pajak mereka.

Kerja sama dan kolaborasi yang lebih erat di antara negara-negara anggota G20/OECD diperlukan untuk merumuskan solusi yang holistik dan efektif dalam menghadapi dampak ekonomi jangka panjang dari pandemi. Presidensi Indonesia melihat pentingnya inklusivitas upaya pemulihan ekonomi akibat pandemic. Upaya tersebut juga harus berkelanjutan. Koordinasi yang kuat di antara pemangku-pemangku kepentingan di tingkat internasional harus didorong oleh G20.

Dalam kerangka kolaborasi tersebut, negara-negara dapat melakukan pertukaran pengetahuan dan pengalaman terbaik dalam mengimplementasikan standar perpajakan internasional yang telah ditetapkan. Negara-negara anggota G20/OECD dapat belajar satu sama lain tentang praktik terbaik dalam menerapkan aturan perpajakan yang adil dan efektif. Kolaborasi ini dapat memperkuat kerangka perpajakan negara-negara dan yurisdiksi dan membantu memastikan bahwa basis pajak tidak terkikis secara tidak adil oleh praktik-praktik penghindaran pajak.

Dalam konteks pemberlakuan aturan perpajakan internasional yang lebih ketat, negara-negara berkembang harus lebih mengandalkan sumber pendapatan pajak dalam negeri mereka sendiri. Ini melibatkan mengoptimalkan potensi pajak dari berbagai sektor ekonomi dan memastikan bahwa perusahaan, baik lokal maupun multinasional, mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar.

Hasil pembahasan di Simposium menjadi masukan bagi perumusan *Roadmap* negara-negara berkembang dan standar perpajakan internasional yang disusun G20 dan OECD di bawah Presidensi Indonesia.

Capaian Presidensi Indonesia dalam Isu Perpajakan Internasional

Ada dua capaian penting terkait isu perpajakan internasional yang dihasilkan G20 di bawah Presidensi Indonesia, yaitu diterimanya *Two-Pillar Solution* untuk menangani tantangan perpajakan dalam konteks digitalisasi ekonomi dan roadmap negara-negara berkembang dan perpajakan internasional.

Two-Pillars Solution untuk Mengatasi Tantangan Perpajakan dari Digitalisasi Ekonomi

Forum G20 dan OECD secara khusus juga memberikan perhatian pada isu perpajakan yang terkait dengan digitalisasi ekonomi. Kemajuan penting dalam pembahasan upaya mengatasi tantangan pemajakan dalam konteks digitalisasi ekonomi dicapai pada 8 Oktober 2021 dengan diterimanya *Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy* dalam kerangka proyek BEPS G20/OECD (OECD, 2021c).

Two-Pillars Solution merupakan perjanjian regulasi perpajakan yang ditujukan untuk mengatasi inkonsistensi sistem perpajakan antar satu negara dengan negara lain yang berpotensi menimbulkan praktik BEPS. Perjanjian ini diinisiasi oleh negara-negara yang tergabung dalam G20 dan *OECD Inclusive Framework on BEPS* demi mewujudkan keadilan pajak internasional yang lebih proporsional dan non-diskriminatif, sehingga tidak ada negara yang dirugikan.

Masing-masing pilar menegaskan aturan-aturan seperti *scope*, *nexus*, *quantum*, *penggalian sumber pendapatan* dan langkah-langkah penting untuk mengatur perpajakan dalam digitalisasi ekonomi.

1. Pilar 1

   Pilar 1 mengajukan hak bagi "yurisdiksi pasar" untuk memajaki beberapa laba yang dihasilkan di negara tersebut (OECD, 2021). Hal ini akan diwujudkan dengan implementasi *nexus* dan alokasi laba yang baru yang didasarkan pada tempat dikonsumsinya barang/jasa.

   Pilar 1 mengusulkan solusi untuk menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital. Hal tersebut dilakukan melalui perombakan sistem pajak internasional yang tidak lagi harus berbasis kehadiran fisik. Hak pemajakan ini diberikan kepada yurisdiksi tempat perusahaan multinasional memperoleh penghasilan setidaknya senilai 1 juta Euro. Batas penghasilan yang menjadi dasar pemberian hak pemajakan ini ditetapkan lebih rendah untuk yurisdiksi yang lebih kecil (dengan PDB kurang dari 40 miliar), yaitu senilai 250 ribu Euro.

   Perusahaan-perusahaan yang mendulang laba dari yurisdiksi berdasarkan kriteria di atas akan diwajibkan untuk mengalokasikan 25% dari residual profit mereka ke negara pasar.

Selain itu, Pilar 1 mensyaratkan 'ditariknya' kebijakan pajak digital yang bersifat unilateral, seperti *Digital Services Tax* (DST) dan *Electronic Transaction Tax* (ETT) guna menghindari pemajakan berganda atau *double taxing*.

2. Pilar 2

Pilar 2 didesain untuk memastikan perusahaan multinasional membayar sejumlah pajak minimum atas operasi bisnis mereka (OECD, 2021c). Besar pajak minimum ini akan sama di tiap negara sehingga memperkecil celah kesempatan bagi perusahaan melakukan praktik BEPS.

Pilar 2 merupakan upaya melindungi negara dari praktik BEPS dan mengurangi kompetisi pajak yang melahirkan negara-negara suaka pajak. Pilar yang dikenal sebagai *Global Anti Base-Erosion* (GloBe) ini menerapkan pajak minimum sebesar 15% untuk perusahaan dengan pendapatan lebih dari 750 juta Euro. Dengan skema ini, perusahaan multinasional yang melakukan praktik BESP melalui penempatan kantor pusat di negara suaka pajak tidak dapat lagi mengelak dari kewajiban perpajakannya di negara tempat mereka mendulang laba. Selain pajak minimum sebesar 15% tersebut, perusahaan–perusahaan yang menghasilkan lebih dari 10% keuntungan dari penjualan produk atau layanan di negara lain diwajibkan membayarkan pajak kepada negara tempat beroperasi serta negara asal.

Di bawah Presidensi Indonesia, G20 berkomitmen untuk terus mendukung implementasi solusi dua pilar untuk keadilan perpajakan internasional (Kementerian Keuangan, 2022b). Pada pertemuan Menteri-menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ke-3 di bawah Presidensi Indonesia, negara-negara G20 sepakat untuk mendukung implementasi solusi dua pilar dalam perpajakan internasional. Keputusan ini penting dalam merombak arsitektur perpajakan internasional. Komitmen ini menegaskan bahwa negara-negara G20 mendukung berlanjutnya reformasi sistem perpajakan internasional yang lebih adil melalui pengalokasian hak pemajakan ke negara yang menjadi pasar produk barang dan jasa digital (negara pasar) yang masuk kategori Pilar 1. Semua perusahaan multinasional memiliki kewajiban untuk membayar pajak minimum di semua tempat perusahaan tersebut beroperasi atau yang disebut dengan Pilar 2.

Kesepakatan implementasi solusi dua pilar ini menunjukkan perkembangan penting yang telah dicapai G20 di bawah Presidensi Indonesia, meskipun Konvensi Multilateral (MLC) Pilar 1 baru akan

ditandatangani pada pertengahan 2023 dan direncanakan berlaku pada 2024. Konsensus ini dapat memberikan kepercayaan kepada otoritas pajak dalam melakukan pemajakan atas transaksi lintas batas berbasis digital, dan sekaligus mengatasi praktik penghindaran pajak yang sering terjadi dalam konteks digitalisasi ekonomi.

Roadmap Negara-negara Berkembang dan Perpajakan Internasional

Pembahasan isu perpajakan internasional menjadi perhatian besar dalam *G20 Finance Track* bekerjasama dengan OECD. Menteri-menteri Keuangan G20 dan OECD secara serius mengidentifikasi berbagai praktik BEPS di negara-negara anggota G20 dan mendiskusikan strategi-strategi untuk mengatasinya melalui kerja sama intensif dalam kerangka *G20/OECD Inclusive Framework on BEPS*.

Pembahasan isu BEPS juga telah dilakukan dalam *Sherpa Track*, khususnya di *Development Working Group* yang telah mendapatkan mandat untuk membantu negara-negara meningkatkan pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan dan inklusif. Dalam kerangka ini, G20 berkomitmen untuk membantu negara-negara dalam meningkatkan upaya memobilisasi sumber-sumber domestik secara optimal, termasuk melalui peningkatan pendapatan melalui pajak. Sejak pembahasan BEPS diinisiasi di DWG G20 pada tahun 2014 di bawah Presidensi Australia, pembahasan terkait BEPS di negara-negara berkembang mengalami kemajuan yang penting. Pada awalnya, pertemuan tersebut pada intinya mencoba untuk memastikan bahwa seluruh negara berkembang dapat berpartisipasi dan memperoleh keuntungan dari agenda G20/OECD terkait dengan BEPS ini.

Dalam kesepakatan awal yang tercatat pada *G20 DWG 2014 Brisbane Development Update*, organisasi internasional akan berkolaborasi dengan forum administrasi pajak regional untuk melihat apa yang terbaik perlu dilakukan untuk membantu negara-negara berkembang dalam mengimplementasikan poin-poin dari aksi terkait BEPS ini. Organisasi-organisasi internasional yang terlibat juga akan membuat rancangan laporan dari opsi-opsi bagi negara berkembang terkait insentif pajak yang efektif dan efisien untuk investasi. Disamping itu, organisasi internasional tersebut juga mencoba untuk memastikan beberapa upaya untuk mendukung upaya berkelanjutan untuk memperbaiki ketersediaan data terkait perbandingan *transfer pricing* untuk negara-negara berkembang (G20 Development Working Group, 2014).

Di Jalur Keuangan, Presidensi G20 Indonesia secara khusus meminta OECD untuk menyusun laporan terkait perpajakan internasional dan pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk sejauh mana negara-negara berkembang telah memperoleh manfaat dari perpajakan internasional. Menindaklanjuti mandat tersebut OECD menyiapkan *G20/OECD Roadmap on Developing Countries and International Taxation*, yang dilaporkan pada Menteri-menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di bulan Oktober 2022 (OECD, 2022b). *Roadmap* ini juga menekankan pentingnya untuk memberikan *technical assistance* dan menghilangkan permasalahan dan kendala untuk dapat menerapkan standar minimum penanganan BEPS.

Roadmap menekankan pentingnya perbaikan akses *Country by Country Reporting* dan penggunaanya bagi negara-negara berkembang. Menteri-menteri keuangan melihat pentingnya dukungan bagi pembangunan kapasitas negara-negara berkembang untuk mengatasi masalah CbC ini, baik untuk dapat memenuhi persyaratan pelaporan CbC dan juga memanfaatkan informasi dalam laporan CbC tersebut.

Untuk dapat memenuhi standar pelaporan minimum CbC, suatu yurisdiksi harus mempunyai (OECD, 2022b: 21):

1. Peraturan perundang-undangan domestik yang mengatur kewajiban perusahaan multinasional untuk memberikan laporan CbC.
2. Instrumen traktat yang telah ditandatangani dan diratifikasi yang mengatur pertukaran informasi (sebagai contoh: MAAC).
3. Kesepakatan otoritas yang memiliki kompetensi CbC (sebagai contoh CbC MCAA) dengan hubungan yang aktif dengan basis hubungan resiprokal.
4. Telah melalui asesmen konfidentialitas berdasarkan resiprokal (yang didasarkan pada standar AEOI).
5. Telah dilakukan asesmen tentang kontrol untuk memastikan penggunaan laporan CbC secara memadai.

Laporan peta jalan (*roadmap*) tersebut juga menetapkan sejumlah prioritas (OECD, 2022b:28), termasuk:

1. Memantapkan dan mengakselerasi kemajuan penerapan aksi-aksi prioritas BEPS, khususnya pelaporan untuk memastikan negara-negara berkembang mendapatkan manfaat dari pelaporan tersebut;

2. Mendukung implementasi solusi dua pilar;
3. Mengeksplorasi bidang-bidang prioritas lainnya untuk kerja sama multilateral dengan negara-negara berkembang dengan fokus perpajakan dan SDGs.

Di masing-masing prioritas, laporan tersebut mengidentifikasi bidang-bidang khusus yang penting bagi negara-negara berkembang, dan aksi-aksi yang telah dilakukan, serta peta jalan aksi-aksi yang dapat dilanjutkan oleh negara-negara G20 dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara garis besar, prioritas *Roadmap* G20/OECD menekankan pentingnya dukungan bagi negara-negara berkembang, termasuk:

1. Mendukung negara-negara berkembang untuk menilai keuntungan potensial dari implementasi aksi-aksi terkait BEPS dan menyediakan bantuan kepada mereka
2. Memfasilitasi progress yang lebih cepat dalam rangka mengamankan akses dari negara-negara berkembang ke laporan *Country-by-Country* (CbC) dengan cara meningkatkan dan meningkatkan dukungan bagi negara-negara berkembang yang telah berhasil dalam upayanya mendekati persyaratan dan melakukan review bagaimana standar untuk laporan CbC dapat memaksimalkan akses bagi negara-negara berkembang dan melindungi kerahasiaan serta kepantasan dari penggunaan informasi yang sensitif.
3. Memulai menempatkan sumber daya dan juga para ahli untuk menyediakan tambahan *capacity building* yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan *Two-Pillar Solution*. Penempatan sumber daya dan para ahli tersebut segera dimulai di beberapa daerah yang telah mengikuti peraturan *the GloBE* dan interaksinya dengan rezim domestik seperti insentif pajak. Di beberapa daerah lainnya, perencanaan dapat dimulai untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang untuk mulai mengimplementasikan standar baru secara legal dan praktis.
4. Merumuskan tindakan lebih lanjut untuk melakukan asesmen terhadap peluang penerapan kebijakan perpajakan yang dapat mendukung perwujudan tujungan pembangunan berkelanjutan global (SDGs).
5. Merumuskan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan kolaborasi

G20 dengan seluruh yurisdiksi, terutama negara-negara berkembang dalam mendukung proses administrasi perpajakan secara digital.

Penutup

Bab ini telah menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengangkat isu perpajakan internasional di G20 di tahun 2022. Praktik BEPS telah mengurangi pendapatan negara dari sumber-sumber pajak internasional. Negara-negara berkembang mengalami kerugian signifikan dari berkurangnya pendapatan tersebut. Dalam konteks keterbatasan fiskal akibat pandemi COVID-19, upaya yang terkoordinasi sangat diperlukan untuk memerangi praktik penghindaran pajak dan penggelapan pajak oleh pelaku bisnis dan perusahaan-perusahaan multinasional.

Di bawah Presidensi Indonesia, G20 telah berhasil bersepakat untuk mengimplementasikan solusi dua pilar dan meluncurkan peta jalan negara-negara berkembang dan perpajakan internasional. Kesepakatan ini penting untuk menjaga berlanjutnya kerja sama internasional dalam upaya memerangi praktik BEPS, termasuk meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang untuk memperoleh manfaat dari kerja sama internasional. Presidensi Indonesia juga telah berhasil menciptakan *milestone* bagi upaya pemajakan dalam konteks digitalisasi ekonomi.

Referensi

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan/BPPK (2017). "*Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*. Kemenkeu Learning Center." https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-base-erosion-and-profit-shifting-beps/detail/.

Danny Darussalam Tax Center (2016). "Aksi BEPS: Menangkal Penggerusan Basis Pajak." *Inside Tax*, Edisi 38.

Expat US Tax (2023). "What is a controlled foreign corporation (CFC)?" https://www.expatustax.com/controlled-foreign-corporation/

Harding, L (2016). "Mossack Fonseca: inside the firm that helps the super-rich hide their money." *The Guardian*. https://www.theguardian.com/news/2016/apr/08/mossack-fonseca-law-firm-hide-money-panama-papers

Kementerian Keuangan (2022a). "G20 2022 Tax Symposium: Tax and Development. Press Release." https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/siaran-pers/file/1658129305_sp97-g20-2022-tax-symposium-tax-and-development.pdf

Kementerian Keuangan (2022b). "G20 Sepakat Dukung Implementasi Solusi Dua Pilar untuk Keadilan Perpajakan Internasional. "https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/G20-Sepakat-Dukung-Implementasi-Solusi-Dua-Pilar

Kiss, J. (2012). "Google, Amazon and Starbucks face questions on tax avoidance from MPs." *The Guardian*. https://www.theguardian.com/technology/2012/nov/12/google-amazon-starbucks-tax-avoidance

Mai, J. (2016). "Hong Kong was busiest of Panama Papers law firm." *South China Morning Post*. https://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1934566/hong-kong-was-busiest-office-panama-papers-law-firm

Murphy, C (2020). "Double Irish With a Dutch Sandwich: Definition and How It's Used." *Investopedia*. https://www.investopedia.com/terms/d/double-irish-with-a-dutch-sandwich.asp

OECD (1998). "Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue." https://www.oecd.org/ctp/harmful/1904176.pdf

OECD (2009). "Countering Offshore Tax Evasion." https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/42469606.pdf

OECD (2013). "Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)." https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/action-plan-on-base-erosion-and-profit-shifting_9789264202719-en#page1.

OECD (2020). "Tax and Development Case Study: Strengthening tax transparency to combat tax evasion, illicit financial flows and profit shifting in Uganda." https://issuu.com/oecd.publishing/docs/strengthening-tax-transparency-to-combat-tax-evasi

OECD (2021a). "Tax and Development Case Study: Strengthening tax capacity to increase domestic resources in Tunisia." https://www.oecd.org/countries/tunisia/strengthening-tax-capacity-to-increase-domestic-resources-in-tunisia.pdf

OECD (2021b). "Tax and Development Case Study: Fighting international tax avoidance and evasion to finance the emergence of Senegal." https://www.oecd.org/tax/tax-global/fighting-international-tax-avoidance-and-evasion-to-finance-the-emergence-of-senegal.pdf

OECD (2021c). "Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy." https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf

OECD (2022a). "Tax and Development Case Study: Building strong tax foundations to enhance domestic resource mobilisation in Peru." https://www.oecd.org/tax/tax-global/building-strong-tax-foundations-to-enhance-domestic-resource-mobilisation-in-peru.pdf

OECD (2022b). "G20/OECD Roadmap on Developing Countries and International Taxation: OECD Report for the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors." https://doi.org/10.1787/cf46900c-en

OECD (2023a). "International Collaboration to End Tax Avoidance: Understanding Tax Avoidance." https://www.oecd.org/tax/beps/

OECD (2023b). "Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes." https://www.oecd.org/tax/transparency/

PWC (2023). "PWC Worldwide Tax Summaries Netherlands: Taxes on corporate income." https://taxsummaries.pwc.com/netherlands/corporate/taxes-on-corporate-income

Setyawan, H (2022). "Issue Perpajakan Internasional Dalam Presidensi G20 Tahun 2022." Komite Pengawas Perpajakan. https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/issue-perpajakan-internasional-dalam-presidensi-g20-tahun-2022

Suryowati, E. (2016). "Mengenal "Tax Haven" atau Suaka Pajak, dan Fakta Mencengangkan di Baliknya." Kompas. https://money.kompas.com/read/2016/04/11/060300926/Mengenal.Tax.Haven.atau.Suaka.Pajak.dan.Fakta.Mencengangkan.di.Baliknya?page=all

Tax Justice Network (2023). "Country Profiles: Switzerland." https://taxjustice.net/country-profiles/switzerland/

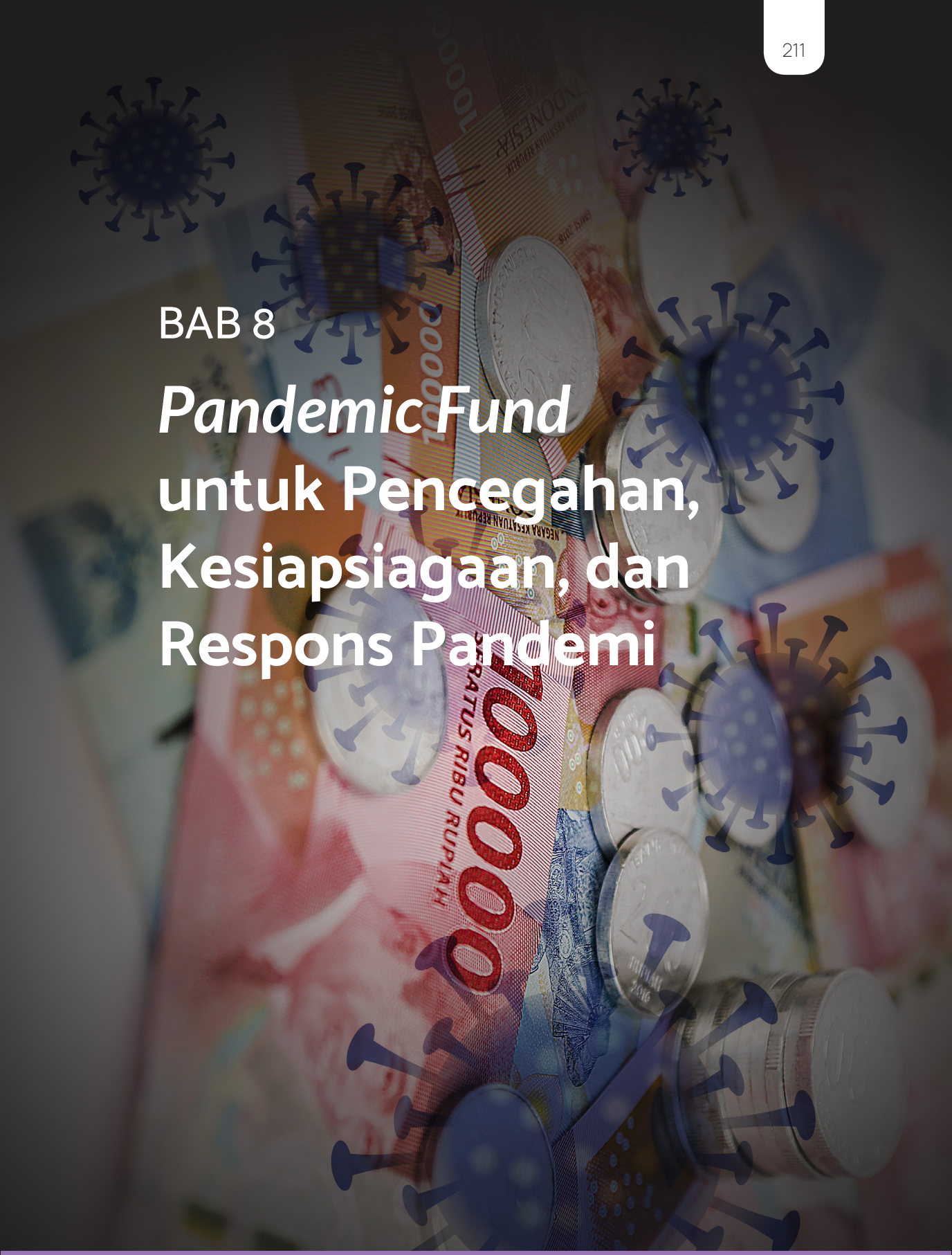
Taxnotes (2021). "Coca-Cola Asks Tax Court to Reconsider Transfer Pricing Decision." https://www.taxnotes.com/research/federal/other-documents/other-court-documents/coca-cola-asks-tax-court-to-reconsider-transfer-pricing-decision/76kkp

The Irish Times (2018). "'Double Irish' and 'Dutch Sandwich' saved Google $3.7bn in tax in 2016." https://www.irishtimes.com/business/economy/double-irish-and-dutch-sandwich-saved-google-3-7bn-in-tax-in-2016-1.3343205

United Nations Department of Economic and Social Affairs/ UNDP (2021). "Least Developed Country Category: Senegal Profile." https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category-senegal.html.

United Nations Department of Economic and Social Affairs/UNDESA (2021). "Least Developed Country Category: Senegal Profile." https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category-senegal.html.

Vega, N (2017). "Apple's offshore move has helped save them billions in taxes." *New York Post*. https://nypost.com/2017/11/06/apple-avoids-ireland-tax-rate-by-moving-operation-to-island-of-jersey/



BAB 8

Pandemic Fund untuk Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Respons Pandemi

Pendahuluan

Adanya pandemi COVID-19 menyadarkan masyarakat global bahwa dampak krisis di bidang kesehatan dapat mempengaruhi hal lainnya dalam skala yang sangat masif, termasuk ekonomi. Dampak dari pandemi COVID-19 menyebabkan krisis ekonomi global yang paling luas dalam satu abad terakhir, dan untuk pertama kalinya terdapat kenaikan level kemiskinan global (World Bank, 2022b). Dengan adanya perbedaan kemampuan ruang fiskal yang dimiliki oleh setiap negara, krisis ini memperlebar jarak kondisi ekonomi negara-negara di dunia. Dengan sumber daya keuangan yang dimilikinya, negara-negara maju cenderung dapat memperbaiki ekonominya dengan lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang memiliki kemampuan lebih terbatas dalam merespon krisis ekonomi yang terjadi.

Goncangan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ditambah dengan tingginya hutang yang dimiliki oleh negara-negara berpenghasilan rendah (*low-income countries*) saat sebelum datangnya pandemi, memperparah krisis ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara tersebut. Negara-negara berpenghasilan rendah tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk merespons pandemi dengan baik sehingga pendanaan untuk kebijakan yang dibutuhkan menjadi sangat kecil atau bahkan tidak ada. Apabila dibandingkan dengan negara berpenghasilan tinggi (*high-income countries*), mereka memiliki dana dengan jumlah yang besar. Di negara-negara berpenghasilan menengah (*middle-income countries*), dana yang disiapkan untuk kebijakan tanggapan bervariasi menyesuaikan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki dan kesediaan pemerintah untuk menganggarkan dana program dukungan (World Bank, 2022b).

Dengan melihat dampak yang ditimbulkan dan tingkat kesiapan yang berbeda-beda antar negara, masyarakat global, khususnya anggota G-20, merasa penting untuk mempersiapkan langkah persiapan khusus untuk mengantisipasi adanya pandemi di masa depan. Langkah persiapan tersebut diwujudkan dengan meluncurkan *Pandemic Fund* pada tahun 2022 bertepatan dengan Presidensi Indonesia di G20. *Pandemic Fund* ditujukan untuk mendanai investasi-investasi penting dalam rangka memperkuat kapasitas pencegahan (*prevention*), kesiapsiagaan (*preparadness*), dan respons (*response*) pandemi di tingkat nasional, regional, dan global. Adapun fokus utama dari investasi yang dilakukan adalah pada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah agar negara-negara tersebut mempunyai kapasitas yang cukup dalam

menghadapi pandemi di masa mendatang dan meminimalkan dampaknya pada ekonomi dan sektor lainnya.

Indonesia sebagai negara pemegang Presidensi G20 mempunyai peran yang signifikan dalam perencanaan inisiasi ini. Diluncurkannya *Pandemic Fund* merupakan bukti bahwa Indonesia mampu memegang mandat dari para pemimpin dengan baik dengan dukungan dari World Bank dan World Health Organization (Kemenkeu, 2022) Ini juga merupakan wujud dari kemampuan Indonesia dalam melakukan koordinasi dan kerjasama multilateral dan menghasilkan kesepakatan yang berdampak kepada masyarakat global.

Proses Pembentukan *Pandemic Fund*

Inisiatif pembentukan *Pandemic Fund* pertama kali diajukan di G20 pada saat Presidensi Italia di tahun 2021. Dalam dokumen Deklarasi Roma, forum G20 mengakui bahwa pendanaan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi (*pandemic prevention, preparedness and response*/PPR) harus lebih memadai, lebih berkelanjutan, dan terkoordinasi dengan lebih baik serta memerlukan kerja sama yang berkesinambungan antara para pengambil kebijakan di bidang kesehatan dan keuangan, termasuk untuk mengatasi potensi kesenjangan pendanaan, memobilisasi bauran mekanisme pembiayaan multilateral yang ada dengan tepat, dan menjajaki pembentukan mekanisme pembiayaan yang baru (G20 Italia, 2021). Dalam dokumen yang sama, forum G20 juga menyatakan pembentukan *Joint Finance-Health Task Force* (JFHTF) untuk meningkatkan dialog dan kerja sama global mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi (*pandemic PPR)*, mendorong pertukaran pengalaman dan praktik terbaik, mengembangkan pengaturan koordinasi antara kementerian keuangan dan kementerian kesehatan, mendorong aksi kolektif, melakukan penilaian dan mengatasi masalah kesehatan yang berdampak lintas negara, dan mendorong penatalayanan sumber daya secara efektif untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi, sembari mengadopsi pendekatan *One Health*.

Sebagai pemegang presidensi di tahun 2022, Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan pembahasan mengenai pendanaan *pandemic PPR* dengan mengoperasionalkan JFHTF. Tidak main-main, pembahasan ini bahkan masuk sebagai salah satu dari tiga isu prioritas presidensi, yaitu penguatan arsitektur kesehatan global.

Gambar 8.1 G20 Joint Finance and Health Ministers' Meeting, Bali 13 November 2022



JFHTF menggelar pertemuan perdananya pada 20 Desember 2021. Dalam pertemuan ini, forum G20 yang terdiri dari perwakilan kementerian keuangan dan kementerian kesehatan anggota G20 membahas tiga agenda, yaitu penyusunan program kerja dan menetapkan peta jalan, pembentukan sekretariat, serta pembahasan substantif mengenai kesenjangan pendanaan terkait *pandemic PPR*. Pembahasan kemudian dilanjutkan di pertemuan JFHTF kedua yang dilangsungkan secara *daring* pada 26 Januari 2022. Dalam pertemuan kedua ini, hadir pula sejumlah negara undangan serta organisasi internasional yang terkait, yaitu World Health Organization (WHO), World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Salah satu agenda utama dalam pertemuan kedua ini adalah pembentukan fasilitas pembiayaan. Negara-negara anggota memberikan pandangan terkait pentingnya upaya untuk memobilisasi pembiayaan secara global untuk mendukung *pandemic PPR*. Hasil dari pembahasan ini akan dibawa pada *1st Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting* (FMCBG).

Pertemuan pertama FMCBG dilangsungkan pada 17-18 Februari 2022 di Jakarta. Dalam pertemuan ini, G20 menyambut baik program kerja JFHTF yang bertujuan untuk meningkatkan dialog dan kerja sama global pada isu-isu yang terkait dengan *pandemic PPR* serta mendorong aksi kolektif dalam merespon pandemi dan memberikan kontribusi

dalam upaya menuju arsitektur kesehatan global yang lebih kuat sembari mempertahankan peran kepemimpinan krusial WHO di bidang kesehatan internasional. Selain itu, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral juga memberikan catatan pada asesmen awal mengenai kesenjangan pembiayaan untuk PPR yang dipresentasikan oleh WHO dan World Bank dan menantikan dokumen laporan akhir yang memuat detail asesmen pada mekanisme-mekanisme pembiayaan internasional yang ada untuk *pandemic PPR*. Lebih jauh, pertemuan FMCBG tersebut menyepakati kerja sama dengan menteri-menteri kesehatan G20 dalam upaya merespon pandemi COVID-19 serta akan mereview laporan JFHTF terkait modalitas untuk membentuk fasilitas keuangan guna memastikan pembiayaan untuk *pandemic PPR* yang memadai dan berkelanjutan.

Menindaklanjuti hasil pembahasan di 1st FMCBG, JFHTF kemudian menggelar pertemuan ketiga yang dilangsungkan pada 1 April 2022. Dalam pertemuan ini, fokus utama pembahasan adalah laporan WHO dan World Bank terkait kesenjangan pembiayaan PPR dan modalitas untuk membangun fasilitas keuangan. Secara umum, forum sepakat bahwa terdapat kesenjangan pembiayaan yang signifikan untuk diatasi degan segera melalui mekanisme keuangan baru yang dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk *pandemic PPR*. Secara berjenjang, hasil pembahasan di pertemuan ini menjadi umpan balik bagi pertemuan FMCBG kedua.

Pertemuan kedua FMCBG dilangsungkan di Washington DC pada 20 April 2022. Pertemuan ini menghasilkan konsensus untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan untuk *pandemic PPR* melalui mekanisme keuangan baru. Untuk itu, G20 menyatakan bahwa *Financial Intermediary Fund* (FIF) yang dikelola oleh World Bank adalah opsi terbaik. Dalam hal ini, untuk memulai pembentukan FIF tersebut, Presidensi Indonesia perlu untuk mengawal diskusi seputar isu tata kelola dan pengaturan operasionalnya.

Untuk membahas hasil konsensus yang dicapai pada pertemuan kedua FMCBG, JFHTF kembali menggelar pertemuan yang dilaksanakan pada 31 Mei 2022. Sesuai dengan amanat pertemuan kedua tersebut, JFHTF ini membahas isu terkait tata kelola dan pengaturan operasional FIF. Selain itu, forum juga membahas *update* terkait perkembangan arsitektur kesehatan global dan bagaimana G20 dapat memberikan kontribusi, serta menetapkan pengaturan koordinasi keuangan dan kesehatan untuk pembiayaan PPR.

Pada 21 Juni 2022, pembahasan terkait kerja sama bidang keuangan dan kesehatan dilangsungkan pada level menteri melalui *Joint*

Finance-Health Ministers Meeting (JFHMM) pertama di Yogyakarta. Pertemuan ini digelar serangkaian dengan pertemuan menteri-menteri kesehatan G20 yang pertama. Pada JFHMM pertama, menteri-menteri keuangan dan menteri-menteri kesehatan G20 menegaskan komitmen G20 dalam pembentukan FIF dan mendiskusikan formulasi terkait penggunaan dananya.

Hasil pembahasan pada JFHMM pertama menjadi bahan masukan bagi pertemuan FMCBG ketiga yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 15-16 Juli 2022. Dalam pertemuan ini, G20 menyatakan akan meneruskan pembahasan terkait tata kelola FIF yang mencakup peran sentral WHO. Pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya tata kelola inklusif bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah serta negara-negara di luar keanggotaan G20.

Pada 8-9 September 2022, dilaksanakan pertemuan perdana Dewan Pengelola *Financial Intermediary Fund* (FIF) *for Pandemic Prevention, Preparedness, and Response* (PPR) secara virtual. Momentum ini sekaligus menjadi tanda terbentuknya FIF-PPR secara resmi. Pertemuan ini dihadiri oleh para donor dan mitra, yaitu perwakilan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Italia, Indonesia, Tiongkok, Jepang, Jerman, Kanada, Korea, Uni Emirat Arab, Spanyol, Australia, Singapura, Norwegia dan Selandia Baru serta donor non-negara seperti Yayasan Bill dan Melinda Gates, Yayasan Rockefeller, *Wellcome Trust*, *Amref Health Africa*, *Global Health Council*, World Bank dan WHO.

Gambar 8.2 Peluncuran Pandemic Fund



Dalam formasi kepengurusannya, Chatib Basri dari Indonesia dan Daniel Ngajime terpilih sebagai *co-chairs*. Dalam sambutannya sebagai *co-chair* terpilih, Chatib Basri menyampaikan bahwa pendirian FIF akan dilihat sebagai sinyal yang jelas oleh masyarakat internasional sebagai aksi nyata G20 untuk secara kolektif dan kolaboratif mengambil pelajaran dari pengalaman bersama dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Target dan Fokus Pendanaan *Pandemic Fund*

Pendemic Fund memiliki tiga target utama dalam pengelolaannya yaitu pencegahan (*Prevention*), kesiapsiagaan (*Preparadness*), dan respons (*Response*), atau dalam hal ini disingkat menjadi PPR. Sebagaimana dikonseptualisasikan oleh World Bank, upaya pencegahan (*Prevention*) mencakup sistem, kebijakan, dan prosedur yang berfungsi untuk menentukan, menilai, menghindari, meredam, dan mengurangi ancaman dan risiko kesehatan masyarakat. Adapun kesiapsiagaan (*Preparadness*) merupakan tindakan-tindakan yang diambil sebelumnya yang membantu mengurangi kerugian jika terjadi wabah, termasuk penguatan kapasitas dan kemampuan; dan respons (*Response*) mengacu pada tindakan-tindakan yang diambil setelah terjadi wabah penyakit sesungguhnya untuk mengurangi konsekuensi ekonomi, sosial, dan kesehatan yang terkait (Boyce, et.al. 2023).

Menurut World Bank (2022), terdapat 3 (tiga) misi penting dari *Pandemic Fund* yaitu:

1. *Pandemic Fund* membantu mendatangkan tambahan sumber daya keuangan untuk PPR Pandemi, termasuk melalui penggalangan sumber daya di luar ODA (Official Development Assistance). Dalam hal ini, *Pandemic Fund* telah berhasil menggalang pendanaan dari yayasan filantropi, dan organisasi serupa lainnya telah menunjukkan minat untuk berkontribusi.
2. Pendanaan dari *Pandemic Fund* dapat digunakan untuk mendorong negara-negara agar lebih banyak berinvestasi dalam PPR pandemi, termasuk melalui penggabungan sumber daya yang diperoleh dari bank pembangunan multilateral (Multilateral Development Bank-MDB) untuk meningkatkan konsesi (*concessionality*) dan pencocokan dengan sumber daya domestik.
3. Dengan mengumpulkan institusi-institusi kunci yang terlibat dalam PPR pandemi dan pembiayaan sistem kesehatan, *Pandemic Fund* akan membantu mendorong pendekatan yang lebih

terkoordinasi dan kohesif dalam memperkuat PPR pandemi dengan menghubungkan pembiayaan dengan proses perencanaan dan prioritas tingkat negara yang sudah ada. Upaya ini dapat memperkuat keselarasan dan pelengkapannya dengan PPR dan sistem kesehatan dan mengurangi biaya transaksi yang ditanggung oleh negara-negara klien. Dukungan yang lebih terkoordinasi juga menciptakan kondisi untuk dialog yang lebih sistematis tentang pembiayaan domestik untuk PPR.

Area fokus utama dari *Pandemic Fund* mencakup:

1. Penguatan kapasitas di tingkat negara dalam bidang pencegahan, deteksi, dan respons, dengan penekanan khusus pada negara-negara berpendapatan rendah dan menengah yang paling membutuhkan dukungan;
2. Pembangunan kapasitas regional dan global untuk fungsi-fungsi pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons; dan
3. Dukungan bantuan teknis, analisis, dan pembelajaran.

Pendanaan yang berfokus pada penguatan kapasitas di tingkat negara akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang meningkatkan kapasitas yang termasuk dalam peraturan kesehatan internasional (*International Health Regulation* (IHR)), seperti sistem-pengawasan untuk penyakit menular, sistem laboratorium, komunikasi darurat dan manajemen kapasitas, serta keterikatan dengan masyarakat. Pendanaan untuk kapasitas regional dan global akan berupaya meningkatkan sistem pengawasan, pelaporan, dan berbagi informasi, berbagi aset kesehatan masyarakat, harmonisasi regulasi, dan kapasitas untuk pengembangan, pengadaan, dan penyebaran bersama peralatan medis/kesehatan dan tindakan pencegahan. Prioritas terakhir adalah memberikan dukungan finansial untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan pembelajaran, bantuan teknis, serta pemantauan sistematis atas kapasitas dan pengeluaran domestik dalam kegiatan PPR pandemi.

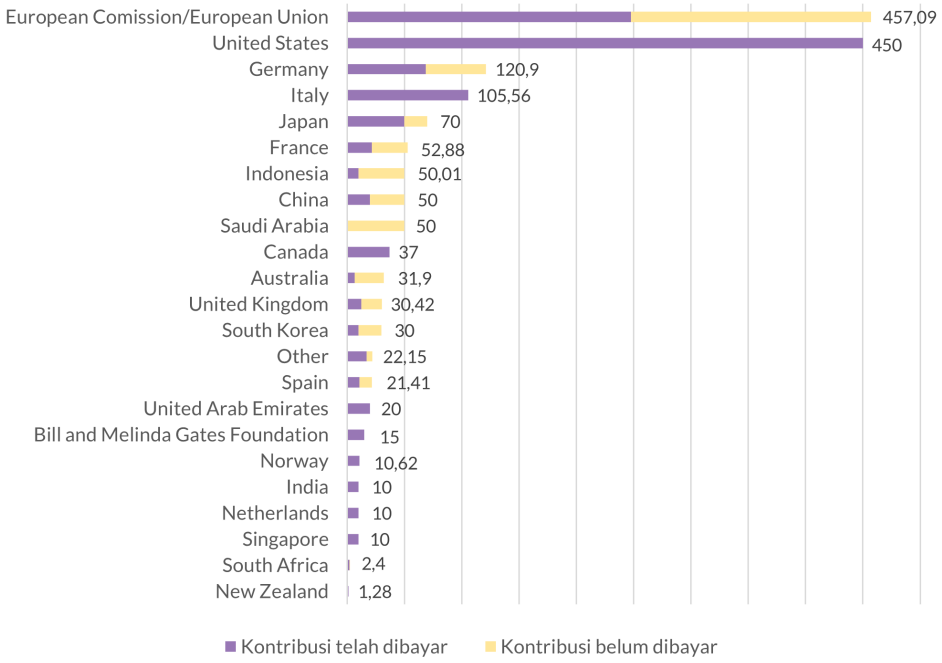
Sumber Pendanaan Pandemic Fund

Pandemic Fund dapat menerima pendanaan dari donor yang berasal dari pemerintah, organisasi antarpemerintah, serta entitas non-pemerintah yang telah disetujui seperti yayasan/filantropi (Michaud & Kates: 2023). Setiap donor dari *Pandemic Fund* ini akan membuat perjanjian dengan *Trustee* (World Bank), dan kontribusi dari entitas non-pemerintah tunduk pada persetujuan *Governing Board*. Kontribusi dapat

diberikan dalam bentuk pembayaran satu kali atau angsuran selama delapan tahun. Semua kontribusi akan digabungkan untuk alokasi selanjutnya oleh Dewan Pengurus. Tidak ada kontribusi donor yang dapat dialokasikan sebelumnya untuk proyek-proyek atau penerima tertentu.

Per tanggal 4 Oktober 2023, *Pandemic Fund* telah mengumpulkan kontribusi berjumlah 1.169,57 juta dolar AS, yang berasal dari paling tidak 23 kontributor. Rincian kontribusi yang diberikan dapat dilihat pada Gambar 8.3.

Gambar 8.3 Kontributor *Pandemic Fund* (dalam Juta Dolar AS) Data per Tanggal 4 Oktober 2023



Sumber: World Bank, 2023

Pengelolaan dan Mekanisme Penyaluran *Pandemic Fund*

Pengelolaan *Pandemic Fund* berada di bawah World Bank. *Pandemic Fund* secara resmi diluncurkan pada 13 November 2022 setelah sebelumnya proposal pendiriannya disetujui oleh World Bank pada bulan Juli 2022 (World Bank, 2022a).

Sebelum adanya *Pandemic Fund*, World Bank pernah memiliki program dengan nama *Pandemic Emergency Financing Facility* (PEF) yang diluncurkan pada tahun 2017 dan bertujuan untuk meminimalkan

potensi guncangan yang dialami negara-negara miskin melalui pemberian dukungan keuangan dengan cepat (Jintau Zhu, 2021). Program ini kemudian tutup pada tahun 2021 dan mendapatkan kritikan perihal kegagalan dalam memenuhi target untuk memobilisasi dana yang dibutuhkan untuk meresponse pandemi. *Pandemic Fund* hadir dengan pendekatan yang berbeda dengan memberikan perhatian pada upaya pencegahan dan penyiapan sebelum adanya pandemi selain upaya respons apabila pandemi telah terjadi (Boyce, et.al: 2022).

Melihat tujuan yang ditetapkan, *Pandemic Fund* dikelola dengan berdasarkan pada lima prinsip sebagai berikut (Zhu, 2021):

1. Program ini dimaksudkan untuk melengkapi apa yang telah lembaga-lembaga lainnya telah dijalankan terkait dengan upaya yang sama;
2. Program ini berusaha untuk melengkapi dan bukan menggantikan *Official Development Assistance* (ODA) yang sudah ada untuk kesehatan global dan mendorong pendanaan dari sumber-sumber swasta, filantropi, dan bilateral;
3. Program ini harus memiliki fleksibilitas untuk bekerja melalui lembaga-lembaga yang sudah terlibat dalam pembiayaan, dengan mendorong koordinasi daripada fragmentasi;
4. Inisiatif *Pandemic Fund* berusaha mendorong negara-negara untuk meningkatkan pendanaan pencegahan (*prevention*), kesiapsiagaan (*preparadness*), dan respons (*response*), termasuk melalui penggabungan sumber daya bank pembangunan multilateral untuk meningkatkan konsesi dan pencocokan sumber daya domestik; dan
5. Ini bertujuan untuk mencerminkan dan mempromosikan inklusivitas, dengan tetap memastikan tata kelola dan prosedur operasi yang efisien dan terpadu.

Dalam pengelolaanya, *Pandemic Fund* merupakan kemitraan antara negara-negara donor, negara-negara *co-investor* (yaitu pemerintah negara-negara entitas pelaksana), dan organisasi masyarakat sipil (*civil society organizations*). *Pandemic Fund* diatur dan dikelola oleh Dewan Pengurus *(Governing Board)*, Panel Penasihat Teknis (*Technical Advisory Panel*), Sekretariat, dan *Trustee*. World Bank bertindak sebagai *Trustee*, menjadi tuan rumah bagi Sekretariat, dan merupakan pengamat dalam *Governing Board*.

Dewan Pengurus *(Governing Board)* terdiri dari 21 anggota yang memiliki hak suara, dengan 18 kursi diperuntukkan bagi negara-negara donor dan negara *co-investor*, 2 kursi untuk organisasi masyarakat sipil (yaitu satu dari *'Global North'* dan satu dari *'Global South'*), dan 1 kursi untuk yayasan. Pada saat buku ini ditulis, *Governing Board* dipimpin oleh Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan Indonesia, dan Sabin Nsanzimana, Menteri Kesehatan Rwanda. Sabin Nsanzima menggantikan Daniel Ngajime yang sebelumnya terpilih menjadi *co-chairs* pada saat peluncuran *Pandemic Bond*.

Technical Advisory Panel (TAP) dipimpin oleh seorang perwakilan dari WHO dan terdiri dari 20 ahli yang memberikan saran kepada *Governing Board* mengenai prioritas pendanaan dan memberikan analisis untuk mendukung rekomendasi berbasis bukti dalam pengambilan keputusan alokasi dana (Boyce et al., 2023). TAP memberikan saran secara independen kepada *Governing Board* mengenai kebutuhan dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi, prioritas pendanaan, serta permintaan proposal pendanaan kepada calon penerima manfaat, serta meninjau proposal-proposal pendanaan yang diajukan ke *Pandemic Fund*.

Penyaluran dana dilakukan dengan mekanisme pengajuan dana melalui proposal. Permintaan proposal diluarkan secara periodik oleh Sekretariat World Bank setelah disetujui oleh *Governing Board* dan setelah melalui persetujuan dari *Technical Advisory Panel*. Proses pengambilan keputusan dilakukan oleh *Governing Board* melalui konsensus (World Bank, 2022a). Dalam hal ini, konsensus tidak selalu mengharuskan persetujuan yang bulat. Seorang anggota *Governing Board* yang memiliki hak suara dapat memberikan penentangan tanpa menghalangi atau mencatatkan abstain tanpa menyatakan pandangan. Jika salah satu dari dua Ketua atau Anggota dengan hak suara menganggap bahwa konsensus tidak mungkin tercapai, para Ketua atau Anggota dengan hak suara dapat meminta pemungutan suara lisan oleh semua anggota yang memiliki hak suara yang hadir untuk memulai proses pemungutan suara formal. Keputusan dapat disetujui dengan dua pertiga mayoritas dari kontributor negara dan kontributor bukan negara maupun *co-investor* (negara-negara yang dapat menjadi penerima manfaat) dan organisasi masyarakat (*civil society organizations*) yang hadir. Jika sebuah keputusan tidak disetujui, para Ketua dapat meminta proposal tersebut diamendemen untuk pertimbangan lebih lanjut atau ditolak.

Proposal-proposal diajukan oleh 'entitas pelaksana' yang dikembangkan bersama dengan negara-negara yang memenuhi syarat untuk menerima pendanaan, yaitu negara-negara yang berpenghasilan rendah dan menengah (Michaud & Kates, 2023). Entitas-entitas pelaksana ini mendapatkan akreditasi dari *Governing Board* dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program dan proyek-proyek yang didukung oleh pendanaan dari *Pandemic Fund*. Entitas-entitas pelaksana yang telah dipilih sebelumnya mencakup World Bank, WHO, serta beberapa lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya (seperti UNICEF), lembaga-lembaga multilateral, serta bank pembangunan regional lainnya.



Entitas pelaksana (*implementing entities*) memiliki peran penting dalam distribusi pendanaan yang disediakan oleh *Pandemic Fund*. Pendanaan tidak langsung disalurkan kepada negara penerima manfaat, tetapi *Pandemic Fund* mengalirkan pendanaan melalui sejumlah entitas pelaksana yang telah ditetapkan sebelumnya, yang bermitra dengan negara penerima manfaat untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung misi pendanaan tersebut (Michaud dan Kates, 2023). World Bank telah menunjuk beberapa organisasi multilateral untuk berperan menjadi entitas pelaksana sebagai berikut:

1. Bank Pembangunan Multilateral (*Multilateral Development Banks)*: African Development Bank, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, European Investment Bank, Inter-American Development Bank, International Finance Corporation, World Bank.

2. Institusi di bawah PBB: FAO *(Food and Agriculture Organization)*, UNICEF, WHO *(World Health Organization)*.
3. Organisasi multilateral dan kesehatan global lainnya: Coalition for Epidemic and Preparedness Innovations (CEPI), Gavi the Vaccine Alliance (Gavi), the Global Fund untuk memerangi AIDS, Tuberculosis and Malaria.

Entitas pelaksana yang dibentuk memiliki tugas-tugas yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengelola dana *Pandemic Fund* yang ditransfer ke entitas tersebut, termasuk penggunaan dana dan aktivitas yang dilakukan dengan dana yang tersedia, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
2. Melakukan diskusi dengan negara penerima dana mengenai proyek-proyek dan aktivitas yang dapat dilakukan dari dana yang diterima.
3. Memberikan dukungan pelaksanaan kepada negara-negara penerima manfaat dari *Pandemic Fund*, jika diperlukan.
4. Memberikan laporan keuangan dan laporan kemajuan kepada *Governing Board* melalui *Trustee* dan Sekretariat.
5. Berkerjasama dalam peninjauan dan evaluasi *Pandemic Fund* sesuai dengan syarat yang dapat diterima oleh Entitas Pelaksana.

Penutup

Dampak dari pandemi COVID-19 telah menciptakan krisis ekonomi global yang belum pernah terjadi dalam satu abad terakhir, dan ini juga pertama kalinya dunia melihat peningkatan level kemiskinan global. Goncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 memperlebar jarak tingkat kesejahteraan antara negara-negara berpenghasilan tinggi dan rendah. Kondisi ini diperburuk oleh tingginya tingkat hutang yang dimiliki oleh negara-negara berpendapatan rendah sebelum pandemi datang sehingga negara-negara tersebut tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk membiayai kebijakan-kebijakan dukungan selama pandemi. *Pandemic Fund* telah didirikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengantisipasi kemungkinan adanya pandemi di masa depan dan meningkatkan kapasitas negara-negara, khususnya yang berpenghasilan rendah, untuk mengatasi pandemi dengan lebih baik.

Pandemic Fund memiliki tiga tujuan utama dalam pengelolaannya, yaitu pencegahan (*Prevention*), kesiapsiagaan (Preparedness), dan respons (*Response*), atau disingkat sebagai PPR. Menurut konsep dari World Bank, upaya pencegahan (*Prevention*) mencakup sistem, kebijakan, dan prosedur yang berfungsi untuk mengidentifikasi, menilai, mencegah, mengendalikan, dan mengurangi ancaman dan risiko kesehatan masyarakat. Kesiapsiagaan (*Preparedness*) merujuk pada langkah-langkah yang diambil sebelumnya untuk membantu mengurangi dampak negatif jika terjadi pandemi, termasuk peningkatan kapasitas dan kemampuan. Sementara itu, respons mengacu pada tindakan-tindakan yang dilakukan setelah terjadi wabah penyakit sebenarnya untuk mengurangi konsekuensi ekonomi, sosial, dan kesehatan yang terkait dengan kejadian tersebut.

Pengelolaan *Pandemic Fund* berada di bawah naungan World Bank dan dipimpin oleh Dewan Pengawas (*Governing Board*). Dana disalurkan melalui proses pengajuan proposal, di mana permintaan proposal ini dikeluarkan secara berkala oleh Sekretariat World Bank setelah mendapatkan persetujuan dari *Governing Board* dan setelah melewati tahap persetujuan dari *Technical Advisory Panel*. Proses pengambilan keputusan dilakukan oleh *Governing Board* melalui kesepakatan bersama. Dana ini diberikan kepada negara-negara penerima manfaat melalui entitas pelaksana yang telah ditentukan oleh World Bank. Entitas pelaksana membantu negara-negara penerima manfaat dalam pengelolaan dana yang disalurkan agar dapat merealisasikan tujuan yang diharapkan.

Referensi

Boyce, M. R., Sorrell, E. M., dan Standley, C. J. (2022). "An early analysis of the World Bank's Pandemic Fund: a new fund for pandemic prevention, preparedness and response." *BMJ Global Health*, *8*(1). https://doi.org/10.1136/bmjgh-2022-011172

G20 Italia. (2021). "G20 Rome Leaders' Declaration." https://www.consilium.europa.eu/media/52730/g20-leaders-declaration-final.pdf

Jintau Zhu. (2021). "Review of the World Bank Pandemic Emergency Financing Facility (PEF) Pandemic Bond with Reform Proposals." https://www.lse.ac.uk/school-of-public-policy/assets/Documents/Social-Sciences-Response-to-Covid/Jintao-Zhu.pdf

Kemenkeu. (2022a). "Pandemic Fund: Langkah Konkret G20 yang Berdampak Global.". https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pandemic-Fund-Langkah-Konkret-G20

Michaud, J., dan Kates, J. (2023). "The New Pandemic Fund: Overview and Key Issues for the U.S." *Global Health Policy*. https://www.kff.org/global-health-policy/issue-brief/the-new-pandemic-fund-overview-and-key-issues-for-the-u-s/

Kemenkeu (2022b) "Siaran Pers: Pertemuan Perdana Dewan Pengelola Dana Perantara Keuangan untuk Pandemi (PPR-FIF) dalam Presidensi G20 Indonesia." https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Dewan-Pengelola-Dana-Perantara-Keuangan

World Bank. (2022a). "Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response Governance Framework." https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-

World Bank. (2022b). "Chapter 1. The Economic Impacts of the COVID-19 Crisis." *World Development Report 2022*. https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2022/brief/chapter-1-introduction-the-economic-impacts-of-the-covid-19-crisis





BAB 9

Mengawal Keberlanjutan Program

Pentingnya Keberlanjutan Program

Kesepakatan dan program yang dicapai selama Presidensi G20 hanya akan berhenti di deklarasi tanpa realisasi jika tanpa tindak lanjut yang berkelanjutan oleh semua pihak. G20 bukan merupakan institusi permanen yang memiliki kantor pusat, kantor cabang, atau staf khusus yang mengoperasikannya. Kepemimpinan G20 bergilir di antara pemimpin negara atau organisasi yang menjadi anggotanya. Keputusan G20 dibuat dalam sebuah konsensus dan implementasi dari konsensus tersebut tergantung dari prioritas dan kondisi internal masing-masing anggota. Dengan melihat situasi ini, penting bagi Indonesia untuk bersama-sama menggerakkan pihak-pihak terkait untuk tetap berkomitmen dengan keputusan-keputusan yang dicapai dalam Presidensi G20 Indonesia.

Sistem Troika yang diadaptasi oleh *G20 leadership* memberikan peluang bagi Indonesia untuk terus mengawal keberlanjutan program dan kesepakatan yang telah dicapai selama G20 Indonesia Presidensi. Di dalam Troika, negara anggota memegang posisi presidensi secara bergiliran bersama dengan dua negara anggota lainnya.

Gambar 9.1 KTT G20 di bawah Presidensi India Tahun 2023



Pada tahun 2022 Troika dipegang oleh Italia, Indonesia, dan India. Sedangkan pada tahun 2023, Troika beranggotakan Indonesia, India, dan Brazil. Pada tahun 2023 ini, untuk pertama kalinya Troika beranggotakan tiga negara berkembang (Insight Editor, 2023). Namun demikian, pada situasi Indonesia tidak lagi masuk menjadi anggota Troika, kesempatan untuk menggerakkan para anggota G20 untuk terus berkomitmen dengan kesepakatan yang telah dibuat terus terbuka.

Memastikan keberlanjutan program merupakan hal yang penting karena adanya ekspektasi dari komunitas global terhadap komitmen bersama yang telah dibuat para pemimpin negara anggota G20. Dengan masih tidak stabilnya kondisi global, kesepakatan yang dibuat merupakan fondasi yang kuat untuk membawa dunia ke arah yang lebih baik. Indonesia sebagai pemegang Presidensi tidak hanya mewakili G20, tetapi juga mewakili negara-negara berkembang lainnya yang sangat terdampak dari ketidakpastian global yang terjadi. Banyak negara jatuh pada jurang resesi dikarenakan inflasi yang semakin tinggi, buruknya kondisi keuangan, dan invasi Rusia ke Ukraina (Roush, 2023).

Apabila menilik kembali ke kesepakatan-kesepakatan yang diperoleh selama perhelatan G20, isu-isu yang dibahas merupakan topik sentral yang tidak hanya memengaruhi negara-negara G20 saat ini, tetapi juga negara-negara lain di seluruh dunia kini hingga nanti. Selain kondisi ekonomi global, terdapat beberapa aspek lain yang menjadi bagian dari deklarasi pimpinan negara-negara G20, seperti pasar keuangan atau arsitektur keuangan internasional, kerjasama pajak internasional, perdagangan dan investasi, lapangan pekerjaan, energi dan perubahan iklim, pembangunan, kesehatan global, digitalisasi, pendayagunaan wanita, migrasi, afrika, terorisme dan pencucian uang, korupsi, serta *agriculture*, keamanan pangan dan perlindungan lingkungan.

Keberlanjutan Kesepakatan yang Dicapai oleh Presidensi Sebelumnya

Sesuai dengan tujuan awal G20 ini dibentuk, kondisi global ekonomi selalu dibahas dalam pertemuan G20. Apabila dikaji ke tahun 2008, kesepakatan negara-negara anggota yang diperoleh saat itu adalah memperkuat kerjasama makroekonomi dalam rangka untuk mendukung ekonomi global dan menstabilkan pasar keuangan. Dua tahun setelahnya, tepatnya pada KTT G20 di Kanada dan Korea Selatan, agenda terkait ekonomi global ini dilanjutkan dengan adopsi standar-standar baru untuk meningkatkan daya tahan dari sistem perbankan. Selain itu, negara-negara G20 bersepakatan untuk melakukan konsolidasi fiskal yang berkelanjutan dengan komitmen negara-negara maju untuk setidaknya mengurangi separuh defisit pada tahun 2013 dan menstabilkan atau mengurangi rasio utang pemerintah terhadap PDB pada tahun 2016.

Fokus negara-negara G20 terkait dengan stabilisasi kondisi ekonomi global terus menjadi prioritas setiap tahun pembahasan. Kesepakatan terkait situasi ekonomi global yang dicapai di tahun 2021 pada saat Presidensi Italia di tengah masa pandemi COVID-19 adalah

negara-negara anggota bertekad untuk menggunakan semua alat yang tersedia selama yang diperlukan untuk mengatasi konsekuensi buruk dari pandemi, terutama pada mereka yang paling terdampak, seperti perempuan, pemuda, pekerja informal, dan pekerja dengan keahlian rendah, serta pada ketidaksetaraan. Negara-negara anggota mendukung proses pemulihan, menghindari penarikan terlalu dini dari langkah-langkah dukungan, dengan tetap menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan fiskal jangka panjang serta melindungi diri dari risiko negatif dan dampak yang merugikan. Topik terkait *exit strategy* kemudian menjadi salah satu dari 6 (enam) agenda prioritas *Finance Track* dalam Presidensi G20 Indonesia.

Seperti kondisi ekonomi global, isu terkait pasar keuangan dan arsitektur keuangan internasional juga dibahas secara berkelanjutan. Di tahun 2008, negara-negara anggota menyepakati prinsip-prinsip bersama sebagai acuan reformasi pasar keuangan, dengan tujuan untuk meningkatkan stabilitas pasar keuangan dan ketahanan pasar serta menghindari krisis keuangan di masa depan. Pada pertemuan selanjutnya pada tahun 2009, *Financial Stability Board (FSB)* dibentuk yang melibatkan ekonomi pasar berkembang utama dengan mandat regulasi keuangan yang lebih kuat.

Fokus yang sama masih menjadi perhatian pada Presidensi G20 Italia. Negara-negara anggota masih memiliki komitmen untuk memperkuat ketahanan keuangan jangka panjang dan mendukung pertumbuhan inklusif, termasuk melalui promosi aliran modal yang berkelanjutan, pengembangan pasar modal dalam mata uang lokal, dan menjaga *Global Financial Safety Net* (GFSN) yang kuat dan efektif dengan IMF yang berpusat pada kuota yang kuat dan berdaya seiring sumber dayanya.

Isu terkait perpajakan internasional pertama kali muncul pada Deklarasi G20 tahun 2009. Pada saat itu negara-negara anggota bersepakat untuk menjadikan sistem perpajakan menjadi lebih transparan dan berkomitmen dalam pertukaran informasi. Isu ini terus dibahas di pertemuan-pertemuan G20 setelahnya.

Pada Presidensi G20 China pada tahun 2016 misalnya, negara-negara anggota bersepakat untuk menyusun daftar yurisdiksi yang tidak bekerja sama dalam bidang transparansi pajak pada tahun 2017 dan mempertimbangkan proposal tindakan terhadap mereka yang mendapatkan manfaat dari ketidakpatuhan dalam menerapkan standar global.

Pada Presidensi G20 Italia tahun 2021, kesepakatan yang diambil masih terkait dengan pembahasan mengenai *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*. Negara-negara anggota G20 sepakat untuk meminta OECD/G20 untuk segera mengembangkan aturan model dan instrumen multilateral sesuai dengan yang disepakati dalam *Detailed Implementation Plan*, dengan tujuan memastikan bahwa aturan baru ini akan berlaku secara global pada tahun 2023.

Terkait isu perdagangan dan investasi, pada pertemuan pertama di tahun 2008, negara-negara anggota bersepakat untuk menolak proteksionisme dalam bentuk "*stand still*" dengan berjanji untuk menahan diri dari memberlakukan hambatan perdagangan atau investasi baru selama 12 bulan. Semangat yang sama terus dilanjutkan di deklarasi tahun 2013 di Rusia yang menguatkan komitmen terhadap transparansi perdagangan dan perpanjangan komitmen untuk tidak menambah hambatan perdagangan dan mengurangi hambatan yang ada hingga tahun 2016. Penekanan diletakkan pada integrasi antara perjanjian perdagangan regional dan sistem perdagangan multilateral.

Inisiasi yang sama masih berlanjut hingga Presidensi G20 Italia yang kembali mengafirmasi peran penting dari sistem perdagangan multilateral berbasis aturan yang terbuka, adil, berkeadilan, berkelanjutan, non-diskriminatif, dan inklusif dalam memulihkan pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas industri, serta mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Negara-negara anggota juga mengkomitmenkan diri untuk memperkuat sistem ini dengan WTO sebagai intinya.

Selain terkait kondisi ekonomi dan pasar keuangan global, isu lain yang muncul pertama kali sejak G20 ini terbentuk adalah terkait energi dan perubahan iklim. Pada deklarasi kesepakatan tahun 2008, negara-negara anggota menyetujui bahwa perubahan iklim dan keamanan energi merupakan tantangan kritis yang harus diatasi. Hal ini dilanjutkan pada pembahasan tahun 2009 di mana negara-negara anggota berkomitmen untuk menghentikan dan merasionalkan subsidi bahan bakar fosil dalam jangka menengah, diiringi dengan pemberian dukungan yang ditargetkan kepada negara yang paling miskin, demi mewujudkan ekonomi global beremisi karbon rendah.

Pada Presidensi G20 Italia, isu ini berlanjut dengan penguatan komitmen untuk implementasi penuh dan efektif dari *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dan *Paris Agreement*, mengambil tindakan di bidang mitigasi, adaptasi, dan keuangan selama dekade penting dalam penanggulangan perubahan iklim ini. Usaha-

usaha dalam penanggulangan iklim tersebut dilakukan berdasarkan pengetahuan ilmiah terbaik yang tersedia, mencerminkan prinsip tanggung jawab yang umum, tetapi tetap menyesuaikan dengan kapabilitas yang sesuai, dengan mempertimbangkan situasi nasional yang berbeda.

Tantangan dalam Mengawal Keberlanjutan Program

Implementasi dan keberlanjutan merupakan kelemahan dalam sistem presidensi G20. Kesepakatan yang diperoleh dalam upacara yang dihadiri oleh para pemimpin dunia adalah momen yang luar biasa, tetapi bagaimana kesepakatan tersebut diimplementasikan dan terus dimonitor merupakan tantangan tersendiri (Virgianita, 2022). Salah satu contoh dapat diambil dari program *Debt Service Suspension Initiative* (DSSI), sebuah isu penting untuk negara berpenghasilan rendah yang menghadapi krisis utang akibat pandemi dan tingginya suku bunga. Program DSSI tersebut diluncurkan di Roma saat Italia memegang presidensi pada tahun 2021. Namun demikian, hingga tahun 2022 realisasi dari program masih rendah. Sistem dalam G20 belum memiliki mekanisme yang menjamin tingkat implementasi dan kepatuhan terhadap kesepakatan.

Diskontinuitas tertanam dalam G20 sejak didirikan sebagai *leaders group* di tahun 2008. Agendanya tidak dibatasi oleh mandat kelembagaan sehingga setiap pergiliran *leadership* dalam G20 digunakan untuk meningkatkan profil dari pemimpin forum dan mengejar prioritas yang dimilikinya. Situasi ini merupakan salah satu sebab mengapa G20 memiliki agenda baru setiap kali berganti presidensi.

Dalam situasi tertentu, program prioritas yang telah ditetapkan pada presidensi sebelumnya memerlukan langkah lebih lanjut yang berkelanjutan. Dengan adanya prioritas baru hasil dari presidensi setelahnya, komitmen aktif G20 terus terakumulasi. Tidak setiap komitmen G20 harus merupakan produk dari pertemuan pemikiran yang aktif, terperinci, dan positif di antara semua pemimpin G20. Jika kondisi untuk konsensus yang kuat tidak terpenuhi, para anggota dapat menyepakati program bersama, namun dengan bahasa berbeda dari apa yang diusulkan oleh presidensi baru (Fischer, 2018).

Jika melihat deklarasi-deklarasi sebelumnya, poin-poin kesepakatan yang dicapai bertambah setiap tahunnya. Pada deklarasi yang dicapai di KTT G20 di Hamburg, Jerman tahun 2017, terdapat 123 poin yang berkontribusi dalam pencapaian Agenda 2030 untuk Pembangunan yang Berkelanjutan (*2030 Agenda for Sustainable*

Development) yang dicanangkan oleh PBB. Pada deklarasi yang dicapai di Presidensi Argentina tahun 2018 ditambahkan 48 item kontribusi untuk Agenda 2030. Dengan rentang yang begitu beragam, sulit untuk mengharapkan bahwa dukungan pemimpin akan sama kuat untuk setiap komitmen.

G20 dapat menyelesaikan masalah jika semua anggotanya sebagian besar setuju terkait dengan perspektif yang diambil dalam menganalisis masalahnya. Ini terjadi pada pengelolaan krisis finansial global di tahun 2008. Jika ada ketidaksepakatan terkait persepsi atas sebuah masalah dan bagaimana masalah tersebut memengaruhi situasi global, hal ini dapat menyebabkan perbedaan yang fundamental. Agar G20 dapat menjalankannya, persepsi terkait sebuah permasalahan haruslah sama.

Perkembangan makroekonomi menjadi penentu penting dalam penetapan isu-isu prioritas yang dibangun dalam G20. Merujuk pada awal dibentuknya, komitmen G20 dalam menjaga kondisi makroekonomi global terus terjaga. Melihat perkembangan sampai dengan saat ini, G20 telah melakukan hal yang luar biasa pada saat penanganan krisis keuangan global pada tahun 2008 hingga menangani krisis pandemi COVID-19 (McBride, et.al, 2023). Sejak tahun 2008, sekitar 34% isi deklarasi dalam G20 membahas terkait dengan kebijakan makroekonomi, namun dengan kadar komitmen yang berbeda-beda antara setiap anggota. Kepatuhan negara anggota terhadap isu ini adalah 82%, lebih tinggi dibandingkan dengan kepatuhan terhadap isu-isu lainnya (Wang, 2023).

Perkembangan geopolitik cukup mewarnai isu-isu yang dibahas dalam G20, khususnya terkait adanya invasi Rusia ke Ukraina dan diperparah dengan persaingan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Adanya invasi Rusia ke Ukraina setidaknya memengaruhi proses pencapaian kesepakatan antara anggota. Walaupun G20 bukan merupakan forum diskusi isu-isu terkait geopolitik, namun pembahasan terkait hal tersebut masuk dalam pembahasan di agenda G20 dan memengaruhi pembahasan di isu penting lainnya (Sinaga, 2023).

Organisasi multilateral seperti G20 atau *World Trade Organization* (WTO), tidak mengantisipasi adanya situasi unik seperti krisis geopolitik pada saat didirikan (Yelery, 2023). Tantangan bagi G20 adalah untuk mengumpulkan para pemimpin yang memiliki perbedaan pandangan dan posisi dalam hal geopolitik agar dapat menemukan titik kesamaan dan solusi untuk krisis baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain hal-hal tersebut di atas, keterbatasan negara-negara anggota dalam merespons isu-isu yang terjadi dengan cepat merupakan tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberlanjutan program-program yang disepakati. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, negara-negara anggota G20 yang sebagian besar adalah negara-negara berkembang dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal untuk merespons krisis yang terjadi (Yelery, 2023). Keanggotaan G20 yang berbasiskan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) tidak serta merta mencerminkan kemampuan setiap negara untuk secara cepat merealisasikan program-program yang disepakati dalam forum G20. Selain itu, terdapat prioritas permasalahan yang berbeda antara negara-negara maju dan berkembang untuk diselesaikan. Adanya keterbatasan institusional yang melekat pada negara-negara berkembang ini yang memperlambat realisasi dari program-program yang disepakati di forum G20.

Hasil Kesepakatan dan Kesepakatan Baru dalam Presidensi G20 Indonesia

Presidensi G20 Indonesia menghasilkan beberapa kesepakatan penting yang bermanfaat tidak hanya bagi para anggota, tetapi juga dunia Internasional. Kesepakatan-kesepakatan tersebut dituangkan dalam 52 paragraf yang disetujui pada tanggal 16 November 2022 (G20, 2022). Sebagai awalan dalam kesepakatan tersebut, deklarasi menegaskan bahwa G20 merupakan forum kerjasama ekonomi global dan para pemimpin kembali meyakinkan untuk bersama-sama menangani tantangan ekonomi global dengan sungguh-sungguh. Setidaknya terdapat 11 (sebelas) kesepakatan pokok yang dicapai pada deklarasi pemimpin anggota G20 saat itu.



Gambar 9.2 Kesepakatan-kesepakatan G20 di bawah Presidensi Indonesia

No	Bidang Kesepakatan	Komitmen
1	Kebijakan Makroekonomi Yang Fleksibel	Fleksibel dalam melaksanakan kebijakan makroekonomi; melanjutkan investasi publik, melaksanakan reformasi struktural, mendorong investasi swasta, dan memperkuat perdagangan multilateral untuk mendorong stabilitas.
2	Keberlanjutan Fiskal	Menggunakan kebijakan fiskal untuk mengelola kesehatan ekonomi dengan menggunakan instrumen pajak, belanja, dan defisit anggaran. Dalam konteks situasi global yang belum stabil, pemerintah dapat mempertimbangkan langkah-langkah stimulus fiskal yang diperlukan yang ditujukan untuk meningkatkan permintaan dan mendukung pertumbuhan.
3	Sistem Pembayaran Lintas Batas	Melanjutkan Peta Jalan G20 untuk Meningkatan Pembayaran Lintas-Batas termasuk tercapainya perkiraan awal indikator-indikator kinerja utama sistem pembayaran lintas batas. Mendorong bank-bank sentral, pemegang otoritas publik dan industri pembayaran untuk berkolaborasi dalam membahas inisiatif peningkatan pembayaran lintas batas yang cepat, mudah diakses, murah dan aman.
4	Investasi Infrastruktur	Revitalisasi investasi infrastruktur dengan cara yang terjangkau, mudah diakses, inklusif dan berkelanjutan.
5	Inklusi Keuangan	Menyediakan akses bagi UMKM ke lembaga-lembaga keuangan, terutama dalam konteks digitalisasi. Memperkuat perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan bagi kaum perempuan, kaum muda dan UMKM dengan memanfaatkan digitalisasi.

6	Perpajakan Internasional	Mendukung implementasi *OECD/G20 two-pillar international tax package* secara cepat.
7	Keamanan Pangan dan Energi	Mengambil tindakan untuk mempromosikan keamanan pangan dan energi serta mendukung stabilitas pasar, termasuk dengan memberikan dukungan sementara bagi upaya mengurangi dampak kenaikan harga, dan memperkuat dialog antara produsen dan konsumen.
8	Investasi di negara-negara berkembang	Membuka lebih banyak investasi untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah serta negara-negara berkembang lainnya, melalui berbagai sumber dan instrumen pembiayaan inovatif, termasuk untuk mendorong investasi swasta, guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
9	Aksi nyata di bidang kesehatan	Membentuk *Pandemic Fund* yang berfungsi memperkuat kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi di tingkat nasional, regional, dan global, dengan fokus pada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.
10	Aksi nyata di bidang ketahanan ekonomi menghadapi krisis	Mendirikan *Resilience and Sustainability Trust* (RST) oleh IMF senilai 81,6 miliar dolar untuk membantu negara-negara yang rentan terhadap krisis dalam membangun ketahanan terhadap guncangan eksternal dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, yang berkontribusi pada stabilitas neraca pembayaran jangka panjang mereka.
11	Aksi nyata di bidang energi	Menghimpun 20 miliar dolar melalui *Just Energy Transition Partnership* (JETP) untuk mendukung program transisi energi Indonesia.

1. Kebijakan Makroekonomi yang Fleksibel

Negara-negara anggota G20 berkomitmen untuk fleksibel dalam melaksanakan kebijakan makroekonomi (G20, 2022). Mereka juga berjanji untuk melanjutkan investasi publik, melaksanakan reformasi struktural, mendorong investasi swasta, dan memperkuat perdagangan multilateral untuk mendorong stabilitas. Para anggota G20 berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan, inklusif, hijau, dan transisi yang adil, termasuk di dalamnya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terkait untuk mencapai stabilitas harga.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang ada, anggota G20 kembali menegaskan komitmennya terhadap penerapan kebijakan yang sesuai dengan situasi, direncanakan dengan matang, dan disampaikan secara efektif untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkesinambungan, serta mengurangi dampak buruknya, guna mendukung pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Seiring dengan semakin beratnya tantangan ini, G20 menyoroti pentingnya tetap fleksibel dalam merespons kebijakan fiskal dan menerapkan langkah-langkah sementara yang tepat sasaran, sembari menghindari tekanan inflasi yang tinggi.

Selain itu, G20 kembali menegaskan betapa pentingnya kerja sama dalam kebijakan makroekonomi untuk menjaga stabilitas keuangan, menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang, serta melindungi diri dari risiko penurunan dan dampak negatif. G20 juga mengulangi pentingnya menerapkan kebijakan makroprudensial, terus memajukan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan bergerak menuju transisi ekonomi yang berkelanjutan. Untuk memastikan stabilitas harga dan menghindari dampak negatif, G20 juga berkomitmen untuk mengukur dengan cermat kecepatan dalam melonggarkan kebijakan moneter.

2. Keberlanjutan Fiskal

G20 berkomitmen untuk melindungi stabilitas makroekonomi dan keuangan serta tetap berkomitmen untuk menggunakan semua alat yang tersedia untuk mengurangi risiko negatif, dengan memperhatikan langkah-langkah yang telah diambil sejak *Global Financial Crisis* (GFC) untuk memperkuat ketahanan keuangan dan mendorong keuangan dan aliran modal yang berkelanjutan (G20, 2022). Melindungi stabilitas makroekonomi dan keuangan adalah tujuan penting bagi pemerintah, bank sentral, dan regulator keuangan di seluruh dunia. Ini melibatkan berbagai kebijakan dan langkah yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan ketahanan keseluruhan ekonomi negara dan sistem keuangannya.

Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mengelola kesehatan ekonomi dengan menggunakan instrumen pajak, belanja, dan defisit anggaran. Dengan adanya situasi global yang belum stabil, pemerintah dapat mempertimbangkan langkah-langkah stimulus fiskal yang diperlukan yang ditujukan untuk meningkatkan permintaan dan mendukung pertumbuhan.

Bank sentral memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan alat-alat kebijakan moneter seperti penyesuaian tingkat suku bunga dan operasi pasar terbuka. Di tengah ancaman kenaikan-kenaikan harga baik di level global maupun nasional, bank sentral perlu fokus untuk mencegah inflasi berlebihan yang dapat merusak daya beli masyarakat dan menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan.

Secara keseluruhan, melindungi stabilitas makroekonomi dan keuangan memerlukan kombinasi kebijakan yang diambil secara berhati-hati, regulasi yang efektif, dan pengawasan yang cermat. Strategi khusus yang digunakan dapat bervariasi dari negara ke negara, tergantung pada kondisi ekonomi dan kerangka institusional, tetapi tujuan utamanya tetap sama: memastikan bahwa ekonomi dan sistem keuangan dapat menahan guncangan dan memberikan lingkungan yang stabil untuk pertumbuhan dan kemakmuran.

3. Sistem Pembayaran Lintas Batas

Sistem pembayaran lintas batas telah menjadi perhatian besar G20 di bawah Presidensi Indonesia di tahun 2022. Isu ini merupakan topik warisan yang telah dibahas di Presidensi G20 Arab Saudi dan dilanjutkan di Presidensi G20 Italia. Digitalisasi yang telah berkembang pesat di sepuluh tahun terakhir telah mendorong pentingnya sistem pembayaran lintas batas yang cepat, mudah, murah, transparan dan sekaligus aman. Pandemi COVID-19 telah semakin mempercepat pentingnya sistem pembayaran yang memanfaatkan teknologi digital. Di bawah Presidensi G20 Indonesia, pemimpin-pemimpin G20 berkomitmen untuk melanjutkan Peta Jalan G20 untuk Meningkatan Pembayaran Lintas-Batas termasuk tercapainya perkiraan awal indikator-indikator kinerja utama sistem pembayaran lintas batas (G20, 2022: 9). Pemimpin-pemimpin G20 mendorong bank-bank sentral, pemegang otoritas publik dan industri pembayaran untuk berkolaborasi untuk membahas inisiatif peningkatan pembayaran lintas batas yang penting ini.

Di bawah Presidensi G20 Indonesia, sejumlah laporan penting telah diterima dan dipaparkan dalam pertemuan-pertemuan G20

terkait. G20 menerima laporan kemajuan yang berisikan seperangkat prioritas untuk pembahasan lebih lanjut terkait pembayaran lintas batas di presidensi selanjutnya (G20, 2022: 9). Laporan tersebut disusun oleh *Bank for International Settlements* (BIS) *Committee on Payments and Market Infrastructures* (CPMI) dan telah dipresentasikan dalam lokakarya bersama antara Presidensi G20 Indonesia dan BIS CPMI dan BIS innovation Hub (BISIH) pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022. G20 juga menerima laporan yang disiapkan oleh CPMI BIS tentang *interlinking* sistem pembayaran dan peran *Application Programming Interfaces* (APIs) (G20, 2022).

Laporan lain yang diterima oleh G20 adalah opsi-opsi akses dan interoperabilitas *Central Bank Digital Currencies* (CBDCs) untuk pembayaran lintas batas. Secara khusus G20 menunjukkan komitmennya untuk terus mendukung eksplorasi potensi pemanfaatan CBDC dengan merancang desain dan penerbitan CBDC. Namun, eksplorasi CBDC harus tetap memperhatikan stabilitas dan integritas sistem moneter dan keuangan internasional. G20 menyambut baik diselesaikannya G20 TechSprint 2022, yang diinisiasi bersama oleh BISIH. Inisiatif tersebut memberikan masukan penting terkait solusi yang paling praktis dan memungkinkan dalam menerapkan CBDCs.

Apa yang telah dibahas dan dicapai oleh G20 di bawah Presidensi Indonesia harus tetap dilanjutkan dan dijaga oleh Presidensi G20 India. Isu pembayaran lintas batas ini tetap menjadi prioritas yang mendesak untuk mendapatkan perhatian mengingat tantangan-tantangan yang muncul dalam konteks perkembangan digitalisasi ekonomi dan keuangan saat ini. Solusi yang dirumuskan dan penerapan sistem pembayaran lintas batas akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan inklusif di masa yang akan datang.

4. Investasi Infrastruktur

G20 mengakui pentingnya revitalisasi investasi infrastruktur dengan cara yang terjangkau, mudah diakses, inklusif dan berkelanjutan (G20, 2022: 13-14). Di bawah Presidensi Indonesia, G20 menyepakati *G20/GI Hub Framework on How to Best Leverage Private Sector Participation to Scale Up Sustainable Infrastructure Investment*. Kerangka ini bersifat sukarela dan tidak mengikat secara legal, serta memberikan ruang kepada negara-negara G20 untuk memperhatikan situasi di negara-negara masing-masing. Sifat kerangka ini juga komplementer dengan investai dari sumber-sumber lain termasuk investasi publik dan keuangan yang disediakan oleh MDBs.

G20 juga menyepakati **Infratracker 2.0** yang memungkinkan sektor-sektor publik dan swasta mewujudkan investasi infrastruktur yang *transformative* di era pasca pandemi COVID-19. InfraTracker 2.0 menyediakan pandangan-pandangan dalam menyiapkan strategi-strategi dan rencana-rencana infrastruktur jangka panjang.

Kesepakatan penting lain terkait investasi infrastruktur berkelanjutan adalah diterimanya indikator-indikator *Quality Infrastructure Investment* (QII) dan catatan petunjuk terkait. QII dan petunjuk tadi bersifat sukarela dan tidak mengikat. Negara-negara memiliki kewenangan untuk melihat situasi di negara-negara masing dalam memakai indikator tersebut.

Di bawah Presidensi Indonesia, G20 telah mendukung diskusi tentang model tata kelola GI Hub dan prinsip-prinsip di dalam tata kelola tersebut. Terdapat kemajuan dalam diskusi terkait isu ini di sepanjang tahun 2022, namun masih banyak yang perlu dibahas dan diselesaikan di presidensi-presidensi selanjutnya.

Kesepakatan tentang *G20/GI Hub Framework on How to Best Leverage Private Sector Participation to Scale Up Sustainable Infrastructure Investment*, InfraTracker 2.0 dan indikator-indikator QII yang telah dicapai dalam Presidensi G20 Indonesia dapat menjadi acuan dalam pembahasan isu investasi infrastruktur di masa presidensi selanjutnya. Termasuk dalam pembahasan adalah seberapa jauh negara-negara telah memanfaatkan kerangka, alat dan indikator-indikator yang telah diadopsi di Bali tersebut.

Isu-isu terkait lain yang belum tuntas di masa Presidensi Indonesia perlu menjadi perhatian presidensi-presidensi berikutnya. Presidensi India di tahun 2023 dan presidensi-presidensi selanjutnya di tahun 2024 dan sesudahnya perlu melanjutkan pembahasan tentang prinsip-prinsip tata kelola GI Hub dan pendekatan inklusif gender dalam pengembangan investasi swasta terkait infrastruktur.

5. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan salah satu isu prioritas penting di *Finance Track*. Presidensi G20 Indonesia memberikan perhatian besar terkait akses UMKM terhadap lembaga-lembaga keuangan terutama dalam konteks digitalisasi. Kesepakatan yang dihasilkan di tahun 2022 adalah *the G20 Financial Inclusion Framework on Harnessing Digitalization to Increase Productivity and Foster a Sustainable and Inclusive Economy for Women, Youth and MSMEs* atau yang dinamakan juga *Yogyakarta Financial*

Inclusion Framework. Kerangka inklusi finansial ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan digitalisasi secara optimal. Kerangka ini juga ditujukan untuk memperkuat perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan bagi kaum perempuan, kaum muda dan UMKM.

G20 juga mendukung OECD dalam meng-*update* dan menerbitkan *the updated G20/OECD High-Level Principles on Financial Consumer Protection*. Prinsip-prinsip tersebut disesuaikan dengan perkembangan digitalisasi dan pembangunan keuangan berkelanjutan. G20 juga menyambut baik prinsip-prinsip pembiayaan UMKM yang telah di-*update* sebagai hasil kerja sama G20 dan OECD. Prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam *the updated G20/OECD High-Level Principles on SME Financing*.

Isu inklusi keuangan telah menjadi perhatian G20 sejak G20 memberikan perhatian pada isu pembangunan di tahun 2010. Presidensi Indonesia telah menjaga kelanjutan pembahasan isu ini dengan melihat pada konteks terkait saat ini. Presidensi-presidensi selanjutnya perlu memastikan bagaimana kerangka inklusi keuangan untuk memanfaatkan digitalisasi menjadi referensi dalam pengembangan UMKM di negara-negara G20. Penerapan prinsip-prinsip pembiayaan UMKM dan perlindungan konsumen keuangan juga perlu dimasukan dalam pembahasan di G20 pada presidensi-presidensi selanjutnya.

6. Perpajakan Internasional

Agenda perpajakan internasional dalam G20 ditujukan untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sumber-sumber perpajakan internasional dalam rangka membiayai anggaran belanja negara. Isu ini merupakan agenda penting karena negara-negara G20 dan non G20 menghadapi tantangan-tantangan serius dari pelaku-pelaku ekonomi seperti perusahaan multinasional dan pelaku bisnis yang melakukan praktik penghindaran dan penggelapan pajak (BEPS). Tantangan ini menjadi semakin berat dalam konteks berkembangnya digitalisasi ekonomi dan keuangan yang berimplikasi pada penetapan basis dan penghitungan perpajakan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Di bawah Presidensi G20 Indonesia, G20 berkomitmen untuk mendukung implementasi *OECD/G20 two-pillar international tax package* secara cepat (G20, 2022: 10). Kemajuan telah dicapai pada Pillar 1, namun masih perlu pembahasan lanjutan terkait finalisasi konvensi multilateral (Multilateral Convention). Pilar 2 telah mencapai kemajuan dalam pembahaan aturan-aturan model GloBE (*Global Anti-Base Erosion*). Aturan ini menyiapkan jalan bagi penerapan kerja implementasi GloBE secara

konsistem di tingkat global. Yang perlu diselesaikan kemudian adalah pembahasan negosiasi tentang *Subject to Tax Rule* (STTR) di bawah Pilar 2. STTR ini akan memberikan ruang bagi pengembangan instrument multilateral dalam penerapan aturan-aturan terkait penanganan BEPS.

Presidensi G20 Indonesia juga telah menghasilkan *G20/OECD Roadmap on Developing Countries and International Tax* (G20, 2022: 10). Peta jalan ini mencerminkan dukungan Indonesia bagi negara-negara berkembang dan kurang berkembang dalam mengoptimalkan pendapatan dari sumber-sumber perpajakan internasional.

Pembahasan lain terkait perpajakan internasional mencakup *Crypto-Aset Reporting Framework* dan perubahan *Common Reporting Standard* yang menjadi bagian integral dari standar global untuk pertukaran informasi perpajakan secara otomatis (AEOI), penerapan standar transparansi yang dapat disepakati secara internasional, dan paket implementasi termasuk jangka waktu implementasi, serta proses monitoring untuk memastikan implementasi tersebut di yurisdiksi yang relevan. Isu-isu yang belum terselesaikan pembahasannya perlu dilanjutkan di G20 di bawah Presidensi India, dan presidensi-presidensi selanjutnya jika belum terselesaikan.

7. Keamanan Pangan dan Energi

G20 berjanji untuk mengambil tindakan untuk mempromosikan keamanan pangan dan energi serta mendukung stabilitas pasar (G20, 2022). Ini termasuk memberikan dukungan sementara untuk mengurangi dampak kenaikan harga dan memperkuat dialog antara produsen dan konsumen.

Anggota G20 mengakui pentingnya rantai pasokan global yang tangguh untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan, inklusif, dan adil. Hal ini mencerminkan pengakuan atas gangguan yang dialami selama pandemi COVID-19 dan perlunya memastikan ketangguhan rantai pasokan. Anggota G20 berkomitmen untuk mengambil tindakan untuk memprioritaskan keamanan pangan dan energi, serta mendukung stabilitas pasar, menyediakan dukungan sementara dan terarah untuk meredam dampak kenaikan harga, memperkuat dialog antara produsen dan konsumen, serta meningkatkan perdagangan dan investasi untuk kebutuhan keamanan pangan dan energi jangka panjang, serta sistem pangan, pupuk, dan energi yang tangguh dan berkelanjutan.

G20 mendukung upaya internasional untuk menjaga kelancaran rantai pasokan pangan, bahkan dalam situasi yang menantang dengan adanya krisis geopolitik dan potensi masalah akibat perubahan iklim. Komitmen G20 dalam hal mengatasi masalah ketidakamanan pangan dengan memastikan aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan pangan dan produk pangan bagi mereka yang membutuhkan, terutama di negara-negara berkembang dan negara-negara yang paling kurang berkembang terus terjaga. Selain itu, G20 juga mendukung diadopsinya praktik baik dan teknologi modern dalam bidang agrikultur dan sistem pangan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan secara selaras dengan alam serta mendorong mata pencaharian petani dan nelayan, serta meningkatkan pendapatan, terutama bagi para petani kecil, dengan meningkatkan efisiensi dan akses yang setara ke rantai pasokan pangan.

8. Investasi di Negara Berkembang

Negara-negara anggota G20 berjanji untuk terus berinvestasi di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, serta negara-negara berkembang lainnya (G20, 2022). Mereka bertujuan untuk mencapainya melalui berbagai sumber pendanaan dan instrumen pembiayaan inovatif, dengan fokus untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Bank Pembangunan Multilateral juga didorong untuk berperan dalam memobilisasi pendanaan tambahan untuk mendukung SDGs dan tantangan global.

Anggota G20 berkomitmen untuk membuka lebih banyak investasi untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah serta negara-negara berkembang lainnya, melalui berbagai sumber dan instrumen pembiayaan inovatif, termasuk untuk mendorong investasi swasta, guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). G20 akan bekerjasama dengan *Multilateral Development Banks* (MDBs) dalam mengambil langkah-langkah untuk menggerakkan dan memberikan pembiayaan tambahan sesuai dengan mandat yang dimiliki oleh organisasi-organisasi tersebut. Investasi pembangunan berkelanjutan merupakan faktor penting untuk mendukung pencapaian SDGs, serta merespons tantangan global.

9. Pembangunan Berkelanjutan

Anggota G20 berkomitmen untuk mempercepat kemajuan menuju pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) (G20, 2022). Ini menekankan dedikasi mereka untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan di dalam G20 dan secara global.

10. Aksi Nyata di Bidang Ketahanan Ekonomi Menghadapi Krisis

Mendirikan *Resilience and Sustainability Trust* (RST) oleh IMF senilai 81,6 miliar dolar untuk membantu negara-negara yang rentan terhadap krisis dalam membangun ketahanan terhadap guncangan eksternal dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, yang berkontribusi pada stabilitas neraca pembayaran jangka panjang mereka.

11. Aksi Nyata di Bidang Kesehatan dan Energi

Selain kesepakatan-kesepakatan yang dicapai, Presidensi G20 Indonesia juga mencapai beberapa aksi nyata untuk kepentingan internasional di bidang kesehatan dan energi.

Pertama, Presidensi G20 Indonesia berhasil membentuk *Pandemic Fund* yang berfungsi untuk mengatasi krisis pandemi di masa depan. Dana Pandemi membiayai investasi kritis untuk memperkuat kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi di tingkat nasional, regional, dan global, dengan fokus pada negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Biaya manusia, ekonomi, dan sosial yang menghancurkan akibat COVID-19 telah menyoroti perlunya tindakan terkoordinasi untuk membangun sistem kesehatan yang lebih kuat dan menggerakkan sumber daya tambahan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi. Meskipun banyak lembaga dan mekanisme pembiayaan yang mendukung kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi, tidak ada yang fokus secara eksklusif pada hal itu.

Dana Pandemi akan membawa sumber daya tambahan yang khusus untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi, mendorong negara-negara untuk meningkatkan investasi, meningkatkan koordinasi antara mitra, dan menjadi platform advokasi.

Kedua, pendirian *Resilience and Sustainability Trust* (RST) oleh IMF senilai 81,6 miliar dolar untuk membantu negara-negara yang rentan terhadap krisis. Melalui RST, IMF membantu negara-negara berpenghasilan rendah dan negara-negara berpenghasilan menengah

yang rentan untuk membangun ketahanan terhadap guncangan eksternal dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, yang berkontribusi pada stabilitas neraca pembayaran jangka panjang mereka. Ini melengkapi *toolkit* pemberian pinjaman IMF yang ada dengan menyediakan pembiayaan jangka panjang yang terjangkau untuk mengatasi tantangan jangka panjang, termasuk perubahan iklim dan kesiapsiagaan terhadap pandemi.

Ketiga, melalui KTT G20 di Bali, Amerika Serikat dan sekutunya setuju untuk menghimpun 20 miliar dolar melalui *Just Energy Transition Partnership* (JETP) untuk mendukung program transisi energi Indonesia. JETP merupakan kesepakatan untuk menggerakkan dana awal sebesar 20 miliar dalam pembiayaan publik dan swasta untuk melakukan dekarbonisasi sektor energi Indonesia, menggunakan campuran hibah, pinjaman konsesional, pinjaman dengan suku bunga pasar, jaminan, dan investasi swasta. Program ini mendukung *trajectory* global dapat terus konsisten dengan menjaga batas pemanasan global 1,5 °C tetap tercapai.

Indonesia akan mengembangkan Rencana Investasi dan Kebijakan JETP yang komprehensif pada bulan Agustus 2023, dengan dukungan dari mitra internasional, untuk menentukan jalur pencapaian target baru dan percepatan dengan:

1. Mencapai puncak emisi total di sektor tenaga listrik pada tahun 2030, menggeser puncak emisi yang diproyeksikan ke depan;
2. Membatasi emisi sektor tenaga listrik menjadi 290 MT CO2 pada tahun 2030, turun dari nilai dasar sebesar 357 MT CO2;
3. Mendirikan tujuan untuk mencapai emisi bersih neto dalam sektor tenaga listrik pada tahun 2050, memajukan target emisi bersih neto sektor tenaga listrik Indonesia sepuluh tahun lebih cepat; dan
4. Mempercepat pengembangan energi terbarukan sehingga generasi energi terbarukan mencakup setidaknya 34 persen dari semua generasi energi pada tahun 2030, sekitar dua kali lipat dari rencana total pengembangan energi terbarukan selama dekade ini dibandingkan dengan rencana saat ini.

Untuk mencapai target dan kebijakan baru ini, Indonesia melakukan mobilisasi dana awal yang ditargetkan sebesar 20 miliar dolar dalam pembiayaan publik dan swasta selama periode tiga hingga lima tahun. Untuk mendukung program ini Indonesia perlu memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang dimiliki serta perlu membutuhkan dukungan dari bank-bank pembangunan multilateral.

Mengawal Keberlanjutan Hasil yang Dicapai oleh Presidensi G20 Indonesia

Dengan adanya pergantian presidensi secara rotasi di setiap tahun, kewenangan anggota pemegang presidensi untuk tetap mengawal program-program yang diinisiasinya menjadi terbatas. Adanya mekanisme Troika memungkinkan Indonesia untuk dapat mengawal keberlanjutan program paling tidak hingga Presidensi G20 India selesai. Namun, Indonesia perlu melakukan usaha-usaha lebih agar hasil kesepakatan yang dicapai selama Presidensi G20 Indonesia dapat terealisasi dan terjaga dengan baik dalam jangka panjang.



Implementasi Kesepakatan

Implementasi kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan G20 oleh para anggota merupakan faktor penentu dalam menjalankan komitmen yang telah disepakati. Meskipun kesepakatan di forum-forum internasional seperti G20 seringkali menghasilkan dokumen yang kuat dan strategi bersama, tantangan nyata terletak pada pelaksanaan di masing-masing anggota.

Perlu disadari bahwa setiap negara memiliki struktur pemerintahan yang khas dan berbeda-beda antara satu negara dan lainnya. Untuk mengoptimalkan implementasi kesepakatan yang dicapai oleh para anggota G20, diperlukan kesamaan persepsi elemen-elemen organisasi, dalam hal ini kementerian dan lembaga, di internal negara atau anggota G20. Koordinasi antar-kementerian ini dapat ditindaklanjuti

dengan penyusunan kebijakan yang komprehensif. Kementerian terkait harus memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan, baik finansial maupun sumber daya manusia, tersedia untuk dapat melaksanakan kesepakatan-kesepakatan tersebut dengan efektif.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan perspektif lokal dalam proses implementasi program-program yang disepakati dalam G20. Kebijakan yang berhasil di tingkat internasional belum tentu secara langsung tepat dengan situasi di tingkat lokal atau kedaerahan. Oleh karena itu, pemerintah pusat juga perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan lokal, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

Selain itu, pemantauan dan pelaporan berkala yang dilakukan oleh internal negara atau anggota G20 juga diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi berjalan dengan baik. Pemerintahan negara terkait perlu memantau kemajuan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan internasional dan mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Informasi ini harus dipertimbangkan dalam evaluasi kebijakan dan jika diperlukan, perubahan harus dilakukan untuk memastikan kesuksesan implementasi.

Selain dari sisi pemerintah, peran sektor swasta juga penting dalam mengimplementasikan kesepakatan internasional yang dicapai dalam G20. Banyak perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara dan dapat memainkan peran kunci untuk mendukung realisasi dari kesepakatan-kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta juga diperlukan untuk menciptakan insentif dan kondisi yang mendukung implementasi kesepakatan ini. Sebagai contoh, dalam kebijakan emisi karbon misalnya, perusahaan-perusahaan multinasional dapat menekan pemerintah negara tempat perusahaan beroperasi untuk dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pengendalian emisi karbon.

Koordinasi Bilateral Indonesia dengan Negara-Negara Anggota

Kerja sama dengan negara-negara lain dalam kelompok G20 dan dengan negara-negara di luar forum tersebut memegang peranan kunci dalam menjaga stabilitas dan perkembangan ekonomi serta politik global. Kolaborasi ini dapat mencakup beragam tingkat pertemuan, baik itu bilateral, regional, atau internasional, yang bertujuan untuk mempromosikan kesepakatan yang telah dicapai dalam forum-forum

seperti G20. Indonesia dapat memaksimalkan pertemuan-pertemuan bilateral yang dilakukan dengan negara-negara lain untuk dapat terus menjaga keberlanjutan program-program yang dicanangkan dalam Presidensi G20 Indonesia.

Keterlibatan Pihak-Pihak Terkait

Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 tahun 2022 dapat bekerjasama dengan aktor-aktor non-pemerintah, seperti organisasi non-pemerintah (NGO), bisnis, dan akademisi, dalam implementasi dan pemantauan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai. Langkah ini sangat penting untuk memperkuat dukungan, meningkatkan efektivitas, dan membawa pengetahuan serta sumber daya tambahan dalam usaha ini.

Organisasi Non-Pemerintah (NGO)

NGO sering memiliki keahlian dalam menganalisis dan memantau isu-isu tertentu. Mereka dapat membantu pemerintah dalam memastikan bahwa kesepakatan diimplementasikan dengan benar dan sesuai dengan standar internasional. Dengan jaringan yang dimiliki NGO di level internasional, NGO dapat berperan mendorong anggota G20 untuk tetap berkomitmen pada kesepakatan yang telah dibuat.

Organisasi bisnis atau swasta memiliki sumber daya finansial dan kapasitas inovasi yang dapat digunakan untuk mendukung implementasi kesepakatan. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi, serta memastikan bahwa kesepakatan berdampak positif pada ekonomi dan masyarakat.

Akademisi dapat menyumbangkan pengetahuan akademik dan analisis ilmiah untuk mendukung kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan kesepakatan. Mereka juga dapat melakukan penelitian independen untuk memantau kemajuan implementasi. Ketika berbagai kelompok dan sektor masyarakat terlibat dalam proses implementasi dan pemantauan, hal ini menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap kesepakatan tersebut. Dengan demikian, upaya bersama untuk mencapai tujuan kesepakatan menjadi lebih mungkin berhasil.

Dalam era globalisasi yang semakin terhubung, peran aktor non-pemerintah dalam isu-isu internasional menjadi semakin penting. Dengan melibatkan NGO, bisnis, dan akademisi, kita dapat memaksimalkan peluang untuk mencapai tujuan kesepakatan internasional dan meningkatkan dampak positifnya baik pada tingkat nasional maupun global.

Kesimpulan

Kesepakatan dan program yang berhasil diperoleh selama masa Kepresidenan G20 akan terbatas pada pernyataan semata tanpa realisasi yang konkret jika tidak diikuti oleh langkah-langkah berkelanjutan dari semua pihak. G20 bukanlah lembaga permanen yang memiliki pusat operasional, cabang, atau personel tetap yang mengelolanya. Kepemimpinan G20 dipindahkan secara bergantian di antara pemimpin negara atau organisasi yang menjadi anggotanya. Melalui Sistem Troika yang diadopsi oleh kepemimpinan G20, Indonesia memiliki kesempatan untuk terus mengawal kelangsungan program dan kesepakatan yang telah dicapai selama masa Kepresidenan G20 Indonesia. Menjamin kelangsungan program ini menjadi sangat penting karena komunitas global mengharapkan agar komitmen bersama yang telah dibuat oleh para pemimpin negara anggota G20 benar-benar diwujudkan.

Sesuai dengan tujuan awal pendirian G20, kondisi ekonomi global selalu menjadi perbincangan utama dalam setiap pertemuan G20. Negara-negara anggota G20 secara konsisten menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi global, dan hal ini tetap menjadi prioritas dalam setiap tahunnya. Di samping itu, isu-isu terkait dengan pasar keuangan dan arsitektur keuangan internasional juga terus diperdebatkan secara berkesinambungan.

Implementasi dan kelangsungan kesepakatan merupakan tantangan dalam sistem kepemimpinan G20. Saat para pemimpin dunia berkumpul dalam upacara G20, itu adalah momen luar biasa ketika kesepakatan dicapai. Namun, langkah selanjutnya, yakni bagaimana kesepakatan tersebut dijalankan dan terus dipantau, menjadi tugas yang kompleks. Jika kita melihat deklarasi-deklarasi sebelumnya, poin-poin kesepakatan terus bertambah setiap tahunnya. G20 memiliki potensi untuk mengatasi berbagai masalah jika mayoritas anggotanya bisa menyepakati pendekatan yang sama dalam menganalisis masalah yang dihadapi.

Pada Presidensi G20 Indonesia, beberapa kesepakatan penting berhasil dicapai. Beberapa di antaranya mencakup komitmen negara-negara anggota G20 untuk menjalankan kebijakan makroekonomi dengan fleksibilitas. Selain itu, G20 juga menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan serta bersedia memanfaatkan semua alat yang tersedia untuk mengurangi risiko-risiko yang merugikan. G20 juga berkomitmen untuk mengambil tindakan guna mempromosikan keamanan pangan dan energi, sambil mendukung stabilitas pasar. Selain itu, negara-negara anggota G20 berjanji untuk terus berinvestasi di

negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, serta negara-negara berkembang lainnya.

Dengan adanya pergantian kepemimpinan secara rotasional setiap tahun dalam G20, kewenangan negara pemegang presidensi untuk terus mengawasi program-program yang mereka gagas menjadi terbatas. Namun, Indonesia perlu melakukan upaya tambahan agar hasil kesepakatan yang dicapai selama Presidensi G20 Indonesia dapat diwujudkan dan dipelihara dengan baik dalam jangka panjang. Implementasi kesepakatan yang disepakati dalam pertemuan G20 oleh anggota-anggota menjadi faktor penentu dalam memenuhi komitmen tersebut. Kerja sama dengan negara-negara lain dalam kelompok G20 dan di luar kelompok tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan perkembangan ekonomi serta politik global.

Sebagai pemegang Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia dapat bekerja sama dengan berbagai aktor non-pemerintah, seperti organisasi non-pemerintah (NGO), dunia bisnis, dan akademisi, dalam upaya implementasi dan pemantauan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai. Ini akan memperkuat proses implementasi dan memastikan bahwa komitmen G20 benar-benar terwujud. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat membantu mengatasi tantangan dalam menjalankan program-program G20 yang berkelanjutan.

Referensi

Fischer, R. A (2018). "The G20 after Buenos Aires: Continuity and discontinuity," https://blogs.idos-research.de/2018/12/12/the-g20-after-buenos-aires/

G20 (2021). "G20 Rome Leaders' Declaration," Rome, Italy, 30-31 October 2021.

G20 (2022). "G20 Bali Leaders' Declaration," Bali, Indonesia, 15-16 November 2022.

G20 (2023). "G20 New Delhi Leaders' Declaration," New Delhi, India, 9-10 September 2023.

Insight Editor (2023). "Sansad TV: Diplomatic Dispatch – New G20 Troika," https://www.insightsonindia.com/2023/01/25/sansad-tv-diplomatic-dispatch-new-g20troika/#:~:text=At%20the%20G20%2C%20the%20member,ensure%20continuity%20of%20the%20agenda.

McBride, J, Siripurapu, A and Berman, N (2023). "What Does the G20 Do?" https://www.cfr.org/backgrounder/what-does-g20-do

Roush, T (2023). "Global Economy is periously close to recession in 2023, World Bank warn," https://www.forbes.com/sites/tylerroush/2023/01/10/global-economy-is-perilously-close-to-recession-in-2023-world-bank-warns/?sh=6a39388f2560

Sinaga, Y.A (2023) "G20 is not a forum for geopolitical issues: India's official." https://en.antaranews.com/news/291147/g20-is-not-a-forum-for-geopolitical-issues-indias-officials

Virgianita, A. (2022). The G20 Bali declaration: did the success really stem from Indonesia's diplomacy? https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/11/25/the-2022-bali-g20-declaration-did-success-really-stem-from-indonesias-diplomacy.html

Wang, A. (2022). "G20 performance on macroeconomic policy," https://www.globalgovernanceproject.org/g20-performance-on-macroeconomic-policy-2/alissa-wang/

Yelery, A. (2023). "Challenge ahead for the G20 grouping," https://indianexpress.com/article/opinion/columns/g20-grouping-challenges-g20-summit-diplomatic-success-global-financial-crisis-8943131/



Galeri Foto - Foto G20 2022



Menteri Keuangan Sri Mulyani **MENDARAT** di Bali tanggal 8 November 2022 dalam rangka kegiatan KTT G20 di Bali

KEDATANGAN

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan melakukan
PENINJAUAN PERSIAPAN
penyelenggaraan KTT G20 di Bali November 2022



PERTEMUAN



PERTEMUAN Menteri Keuangan dengan Delegasi dari Afrika Selatan



PERTEMUAN



Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Delegasi Australia



Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Axel van Trotsenberg



Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Presiden Unilever Global

PANDEMIC FUND



Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan bersama dengan Co-Chair Pandemic Fund di Sela-sela Peluncuran **PANDEMIC FUND**



Pandemic Talk dalam Rangka Peluncuran **PANDEMIC FUND,** Bali 13 November 2022



PELUNCURAN
Indonesia Energy Transition Mechanism Country Platform

ETM COUNTRY PLATFORM





PENANDATANGANAN
Indonesia ETM Country Platform



Penandatanganan **MoU** Early Retirement Plan of First Coal Power Plant dalam Rangka Indonesia ETM Country Platform



MoU

Penandatanganan **MoU** Early Retirement Plan of First Coal Power Plant



PERTEMUAN Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Jajaran Pimpinan Standard Chartered



MENTERI KEUANGAN Sri Mulyani dan **PRESIDEN** Joko Widodo dalam Proses Persidangan di KTT G20

DUKUNGAN Penuh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Presidensi G20 Indonesia

Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan dalam **KTT G20** di Bali 2022

KTT G20

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo dalam Proses Persidangan di **KTT G20**

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo dalam **KTT G20** di Bali

KTT G20



PRESIDEN Joko Widodo dan delegasi-delegasi KTT G20 di Bali



SUASANA Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali 15-16 November 2022



Presiden Joko Widodo **BERTEMU** dengan delegasi Arab Saudi pada KTT G20 di Bali

MENTERI KEUANGAN



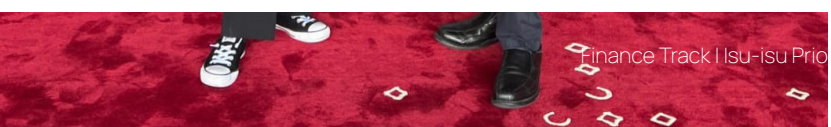
MENTERI KEUANGAN Sri Mulyani dan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus



Pertemuan Bilateral **MENTERI KEUANGAN** Sri Mulyani dan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus



Pertemuan **MENTERI KEUANGAN** Sri Mulyani dengan delegasi dari Prancis



WAWANCARA



WAWANCARA Wartawati KOMPAS dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di tengah-tengah KTT G20 di Bali



Menteri Keuangan Sri Mulyani **DIWAWANCARAI** Metro TV di tengah-tengah KTT G20 di Bali

Testimoni

Testimoni Bapak Marwanto Harjowiryono
(Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan)



"Membaca buku ini, kita dibawa menyaksikan ketangguhan Indonesia dalam Presidensi G20 tahun 2022. Buku ini disusun dalam alur yang nyaman untuk dibaca, bahkan oleh masyarakat kebanyakan sekalipun. Kala itu, dunia sedang dilanda pandemi Covid-19, dan tengah menghadapi konflik antara Rusia dan Ukraina. Meskipun bukan forum yang tepat, namun masalah politik menjadi isu yang mengemuka. Dan Indonesia mampu menjalankan diplomasi modern tingkat tinggi. Bahkan mampu menawarkan solusi terbaik untuk menyatukan anggota G20 yang sedang konfik, untuk kepentingan dunia yang lebih baik. Sungguh, buku ini bagus dan enak untuk dibaca."

Testimoni Bapak Heru Wibowo
(Kepala Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan)



"Buku ini merupakan kurasi pengetahuan tentang kepemimpinan Indonesia dalam G20 tahun 2022 yang secara komprehensif menjelaskan berbagai isu strategis dan kompleks yang dihadapi dunia paska pandemi ditengah turbulensi geopolitik akibat perang Rusia- Ukraina serta upaya-upaya yang dilakukan untuk pulih bersama, pulih lebih kuat. Isu-isu strategis prioritas di Jalur Keuangan, seperti strategi pemulihan, prospek pertumbuhan global, sistem pembayaran digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional dibahas dalam buku ini. Keberhasilan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 menjadi *lesson learned* berharga yang menjadikan buku ini menarik, menginspirasi, dan patut dibaca untuk mengetahui peran penting Indonesia dalam kerja sama internasional dan pemulihan ekonomi dunia."

Testimoni Bapak Sugeng Wardoyo, Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan



"Tahun 2022 menjadi tahun yang berat bagi Indonesia karena pandemi COVID-19 masih tinggi. Presidensi G20 Indonesia 2022 adalah *event* internasional pertama Indonesia yang dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Melalui tema "*Recover Together, Recover Stronger*", Indonesia turut memperjuangkan kepentingan Negara Berkembang untuk dapat pulih dari krisis global. Presidensi G20 menjadi momentum untuk menunjukkan berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia, dan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku ekonomi pascapandemi kepada Indonesia Buku ini juga memberikan perspektif bahwa kualitas penyelenggaraan dan *hospitality* Indonesia yang impresif mendukung perjuangan Indonesia dalam forum internasional, sehingga pengalaman yang berharga ini dapat diketahui oleh generasi muda."

Testimoni Ibu Evy Mulyani, Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN atas buku:

Knowledge Capture Presidensi G20 Indonesia 2022, Finance Track– Isu-Isu Prioritas, Capaian, dan Keberlanjutan



"Keberhasilan Indonesia menjadi Presidensi G20 tahun 2022 dengan tema "*Recover Together, Recover Stronger*" menunjukkan kemampuan untuk mengoordinasikan negara-negara G20 dalam menyusun program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Landasan untuk pembangunan berkelanjutan dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan global dalam *finance track* seperti isu perubahan iklim, inklusi keuangan digital, dan *sustainable economy*. Buku ini menghadirkan *knowledge capture*, tidak hanya mengenai keberhasilan tersebut namun juga tantangan masa depan untuk mengawal kesepakatan yang telah diraih dalam Presidensi. Dengan berwujud menjadi *explicit knowledge*, diharapkan buku ini dapat menjangkau masyarakat umum dan juga menjadi sumber pembelajaran di Politeknik Keuangan Negara STAN."

Testimoni Ibu Dini Kusumawati, Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal atas buku:

Knowledge Capture Presidensi G20 Indonesia 2022, Finance Track– Isu-Isu Prioritas, Capaian, dan Keberlanjutan

"Tahun 2022 merupakan sejarah. Sejak forum G20 dibentuk pada tahun 1999, untuk pertama kalinya Indonesia memegang Presidensi G20, saat kondisi global tidak sedang baik-baik saja, di mana pandemi COVID-19 melanda dunia serta tekanan geopolitik ikut memengaruhi dinamika di antara anggota G20. Namun Indonesia terus berupaya menjaga soliditas anggota G20 untuk tetap melakukan tindakan kolektif guna membawa dunia kembali ke pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Pengalaman Kemenkeu melalui *Finance Track* dalam mengawal aksi kolektif dan kolaborasi inklusif dalam Presidensi G20 2022, sangat penting untuk dicapture sebagai *lesson learned* dan aset intelektual berharga yang dapat dimanfaatkan oleh generasi penerus di masa depan."



Biografi Anggota Tim Penulis

Agung Yuniarto



Agung Yuniarto adalah Widyaiswara Ahli Madya pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan. Ia lahir pada 3 Juli 1971 di Mojokerto, Jawa Timur. Ia merupakan alumni dari Program Diploma III Anggaran, Badan Diklat Keuangan (saat ini PKN STAN) tahun 1993 Badan Diklat Keuangan (PKN STAN) dan Pendidikan terakhirnya Master Manajemen dan Bisnis Universitas Pertanian Bogor tahun 2019. Ia pertama kali memulai karir di Kementerian Keuangan pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta IV, Direktorat Jenderal Anggaran dan pada tahun 2006 bergabung dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagai Widyaiswara. Ia mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun pada tahun 2009, Satyalancana Karya Satya XX Tahun pada tahun 2015 Satyalancana Karya Satya XXX Tahun dari Presiden R.I pada tahun 2022 dan pada tahun 2019 mendapatkan Piagam Pengharaan sebagai Mentor Tetap dalam Manajemen Talenta BPPK pada tahun 2019.

Fandy Anggara Putra



Fandy Anggara Putra adalah Pelaksana pada Subbidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan. Ia lahir pada 18 Oktober 1988 di Batang, Jawa Tengah. Ia merupakan alumni Program Diploma III Akuntansi Pemerintahan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan Diploma IV pada tahun 2015 dan meraih gelar *Master of International Development Policy* dari *Duke University* tahun 2021 dan Master Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 2022. Ia mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Presiden R.I pada tahun 2020 dan mendapatkan Piagam Penghargaan Terbaik Kedua Ide Inovasi dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada tahun 2023.

Dian Handayani



Dian Handayani adalah Dosen Lektor pada Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN). Ia lahir pada 2 Agustus 1978 di Bandung, Jawa Barat. Ia merupakan alumni Program Diploma III Akuntansi pada tahun 1999, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) dan Pendidikan terakhirnya *Master of Business Administration in Finance*, Victoria University, Melbourne tahun 2006. Ia memulai karirnya sebagai Pelaksana pada Seksi Investasi Jasa Keuangan Bukan Bank dan Perdagangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJPB). Ia bergabung dengan BPPK pada tahun 2016 sebagai Pelaksana Subbagian Administrasi Akademik, PKN STAN dan Menjadi Fungsional Dosen Lektor Prodi Diploma III Akuntansi pada tahun 2018. Ia mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya XX Tahun dari Presiden R.I pada tahun 2022.

G20 INDONESIA 2022

Eko Nur Surachman

Eko Nur Surachman adalah Dosen Lektor pada Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN). Ia lahir pada 11 Mei 1982 di Pati, Jawa Tengah. Ia merupakan alumni Program Diploma III Kebendaharaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) pada tahun 2003 dan Pendidikan terakhirnya *Master of Commerce*, University Queensland tahun 2011. Ia memulai karirnya sebagai Pelaksana pada Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, BPPK dan pada tahun 2007 menjadi pelaksana pada Badan Kebijakan Fiskal, kemudian pada tahun 2017 kembali sebagai Dosen Lektor pada PKN STAN. Ia mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Presiden R.I pada tahun 2014.



Klemens Amy Novianto



Klemens Amy Novianto adalah Pelaksana pada Subbagian Komunikasi Publik, Sekretariat BPPK. Ia lahir pada 23 November 1991 di Palembang, Sumatera Selatan. Ia merupakan alumni dari Program Diploma III Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) tahun 2013 dan Pendidikan terakhirnya Sarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Bakrie tahun 2020. Ia mengawali karirnya sebagai Pelaksana Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Keuangan Negara STAN pada tahun 2015.

Yubilianto



Yubilianto adalah Widyaiswara Ahli Muda pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum. Ia lahir pada 8 Juli 1978 di Jakarta. Ia merupakan alumni Program Diploma III Akuntansi pada tahun1999 Badan Diklat Keuangan (PKN STAN) dan Pendidikan terakhirnya Doktoral International Development, Nagoya University tahun 2021. Ia memulai karirnya sebagai Pelaksana pada Sub Direktorat Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJA) dan menjadi Widyaiswara Muda di BPPK pada tahun 2014. Ia mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya Tahun X pada 2014 dan Satyalancana Karya Satya Tahun XX pada 2020 dari Presiden R.I.

Satria Aji Setiawan



Satria Aji Setiawan adalah Pelaksana pada Subbagian Umum, Bidang Penyelenggaraan Pembelajaran, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum. Ia lahir pada 25 Juni 1989 di Semarang, Jawa Tengah. Ia merupakan alumni dari Program Diploma III Pengurusan Piutang Lelang Negara tahun 2010 dan Pendidikan terakhirnya *Master International Business and Politics*, Queen Mary University tahun 2021 dan Master Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada tahun 2021. Ia memulai karirnya sebagai Pelaksana pada Subbagian Organisasi, Sekretariat BPPK. Ia mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun dari Presiden R.I pada 2021.



“Buku "*Knowledge Capture*: Presidensi G20 Indonesia 2022" bukan hanya sekadar catatan sejarah, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam peran Indonesia dalam forum global ini. Dalam bab-bab yang terperinci, buku ini memberikan pandangan yang jelas dan mendalam tentang bagaimana Indonesia berkontribusi dalam pembentukan masa depan ekonomi global. Semoga buku ini tidak hanya memberikan wawasan yang berharga, tetapi juga menginspirasi tindakan positif di tingkat global. Selamat membaca dan menjelajahi wawasan yang luar biasa ini” (**Andin Hadiyanto**, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan).



“Memegang presidensi ini adalah kesempatan langka yang hanya muncul sekali dalam satu generasi, yakni sekitar setiap 20 tahun. Kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat yang besar bagi pemulihan Indonesia dan dunia. Manfaat ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatkan aktivitas ekonomi hingga penguatan kepercayaan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional” (**Iqbal Islami**, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia